Muhammad Wildan dkk.

Menanam Benih di Ladang Tandus

Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA – INDONESIA

MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS

Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS

Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

Penulis:

Muhammad Wildan (Koordinator),
Abdur Rozaki, Ahmad Muttaqin, Ahmad Salehudin,
Alimatul Qibtiyah, Fatimah Husein, Rachmad Hidayat,
Sekar Ayu Aryani, Sukiman

CIS*Form* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MENANAM BENIH DI LADANG TANDUS
Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

Tim Penlis:

Muhammad Wildan (Koordinator)
Abdur Rozaki
Ahmad Muttaqin
Ahmad Salehudin
Alimatul Qibtiyah
Fatimah Husein
Rachmad Hidayat
Sekar Ayu Aryani
Sukiman

Editor:

Saptoni

Desain Sampul:

Erham B Wiranto

Diterbitkan oleh:

CIS*Form*
Center for the Study of Islam and Social Transformation
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Email: cisform@uin-suka.ac.id
Website: cisform.uin-suka.ac.id

Dengan dukungan:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ISBN: 978-623-90240-0-0

cet. 1, 2019
x + 254 hlm
182 x 257 cm

KATA PENGANTAR

Akhir-akhir ini, paham intoleransi dan radikalisme atas nama agama berkembang pesat di kalangan generasi muda. Beberapa kasus radikalisme yang melibatkan generasi muda mengafirmasi maraknya arus islamisme dan radikalisme di Indonesia. Riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2016, 2017, 2018) dan Maarif Institute (2017) misalnya, mengungkap bahwa generasi muda merupakan sasaran empuk penyebaran paham intoleran dan radikal di lingkungan institusi pendidikan. Salah satu indikasi menguatnya paham radikal di kalangan anak muda ini adalah mulai pudarnya semangat kebhinekaan dan toleransi terhadap kelompok yang berbeda (baik inter maupun antaragama), serta terhadap kelompok yang dianggap sesat menurut pemahaman yang mereka yakini.

Merebaknya paham intoleransi dan radikalisme di lembaga-lembaga pendidikan tersebut membawa kita untuk berpikir tentang peran guru agama di sekolah-sekolah. Guru agama seharusnya mempunyai peran penting dalam menyebarkan ajaran agama yang moderat dan --atau paling tidak-- mampu menangkal arus Islamisme. Potret buram intoleransi di kalangan siswa dan guru agama Islam di sekolah secara khusus menandakan bahwa ada masalah serius dalam proses produksi dan pembinaan guru-guru PAI. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, seperti: dari mana sumber pandangan intoleransi para siswa dan guru agama tersebut berasal, atau sejauh mana imunitas guru PAI dalam menghadapi arus Islamisme.

Tidak ada gading yang tak retak. Selama ini Prodi PAI telah berkontribusi sangat besar dalam mencetak guru-guru PAI untuk sekolah-sekolah umum. Dari sekitar 600-an Prodi PAI yang tersebar di berbagai PTKI, kita bisa bayangkan jumlah guru PAI yang diproduksi oleh Prodi PAI dan berkontribusi dalam mendidik dan mengajarkan agama Islam pada generasi muda. Namun demikian, semakin hari tantangan guru PAI semakin berat. Di era milenial, ketika informasi dan pengetahuan agama tersedia serba *online*, guru PAI tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar Islam. Guru PAI dituntut untuk mampu bersaing dengan sumber-sumber pengetahuan lain, yang kadang lebih siap saji. Selain pengetahuan agama dan kemampuan pedagogis yang memadai, guru PAI harus juga mengajarkan cara berpikir kritis pada siswa sehingga siswa bisa memilah dan memilih pengetahuan agama yang tepat di usia mereka.

Penelitian CISForm di 19 PTKI di delapan wilayah di Indonesia mendapatkan adanya beberapa titik kelemahan dalam Prodi PAI dalam mencetak guru PAI, yang perlu dibenahi, seperti dalam input dan rekrutmen mahasiswa, kurikulum, kompetensi dosen, proses KBM, dan lingkungan kampus. Semua hal itu berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan dan sikap keagamaan mahasiswa Prodi PAI. Harus diakui bahwa umat Islam Indonesia sedang mengalami eskalasi dalam beragama. Hal ini juga dipengaruhi oleh politik nasional maupun politik global. Tidak sedikit pengamat sosial yang agak pesimis dengan arah perubahan keislaman umat Islam Indonesia dan menengarai sebagai

bentuk *conservative-turn*. Dalam konteks inilah guru PAI mempunyai peran signifikan untuk berpartisipasi dalam membentuk dan mengarahkan Islam Indonesia.

Seiring dengan perubahan cepat masyarakat Indonesia, Prodi PAI menjadi salah satu harapan untuk "menghadang" derasnya arus Islamisme di Indonesia, khususnya di ranah sekolah umum. Di level Kementerian Agama Pusat, kebijakan terkait dengan input dan rekrutmen mahasiswa serta rekrutmen dosen perlu ditata ulang. Di level PTKI atau LPTK, beberapa kebijakan terkait dengan komponen profesional di kurikulum, proses KBM, dan juga pengaturan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kampus juga perlu ditinjau. Beberapa PTKI sudah sepenuhnya menyadari beberapa titik kelemahan Prodi PAI (dan juga prodi-prodi lain) dan sudah membuat kebijakan untuk meningkatkan kompetensi bahasa dan keislaman mahasiswa dengan berbagai macam program. Untuk meningkatkan daya saing dan juga ketahanan (*resilience*) mahasiswa Prodi PAI calon guru ini perlu dikembangkan program-program yang mengakomodasi lokalitas. Di masa-masa yang akan datang, diharapkan prodi PAI tidak sekadar memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga bisa menjadi bagian dari mekanisme negara dalam mengarus-utamakan Islam moderat.

Akhirnya, CISForm mengucapkan terima kasih kepada para peneliti senior PPIM UIN Jakarta yang telah mengawal survei ini mulai dari pembuatan instrumen hingga penelitian selesai. Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya juga kepada tim peneliti CIS*Form* yang telah bekerja dengan keras untuk mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama hampir enam bulan untuk melakukan penelitian ini: Dr. Muhammad Wildan (koordinator), Dr. Abdur Rozaki, Dr. Ahmad Muttaqin, Dr. Ahmad Salehudin, Dr. Alimatul Qibtiyah, Dr. Fatimah Husein, Dr. Rachmad Hidayat, Dr. Sekar Ayu Aryani, dan Dr. Sukiman. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para *Research Assistant* (RA) lokal yang sudah membantu dan berjuang dalam pengambilan data di lapangan: Ainun Jariah, S.Ag., M.A. (Makassar), Asep Ediana Latip, M.Pd. (Jakarta-Banten), Faisal Zaini Dahlan, M.Ag. (Padang), Mariatul Asiah, M.A. (Banjarmasin), Dr. Muh. Fajar Shodiq (Surakarta), Nur Aini Farida, S.Pd.I., M.Pd. (Yogyakarta), Dr. Safari (Lampung), Yuanda Kusuma, M.Ag. (Malang), Zusiana Elly Triantini, M.S.I. (Mataram), dan Muryana, M.Hum. (koordinator RA). Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada anggota Tim Administrasi yang telah membantu kelancaran program ini: Saptoni, Nurul Ari Suryani, Fitria Heni Sa'adah, dan Thiyas Tono Taufiq, M.Ag. Penelitian ini merupakan buah dari kerja keras mereka semua. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pengetahuan yang signifikan tentang sistem Pendidikan Agama Islam dengan berbagai dinamikanya, termasuk tantangan keberagamaan di Indonesia sekarang ini.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Direktur CIS*Form*

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

Latar Belakang | *1*
Fokus dan Hipotesis Penelitian | *3*
Tujuan Penelitian | *3*
Kerangka Teori | *4*
Parameter Islamisme | *6*
Metode Penelitian | *6*

2. Sistem Produksi Guru Agama Islam dan Tantangan Keberagamaan Di Indonesia

Pendahuluan | *11*
Sistem Produksi Guru Agama Islam | *13*
Potensi Islamisme di PTKI? | *18*
Best Practice LPTK | *19*
Catatan Penutup: Inspirasi Perubahan | *20*

3. Ancaman Islamisme di Balik Komitmen Keagamaan: Sistem Produksi Guru Agama Islam di UIN Imam Bonjol dan STAI-PIQ Padang Sumatra Barat

Pendahuluan: Islamisme di Tanah Minang dalam Kilasan Sejarah | *23*
Kilas Balik Berdirinya UIN Imam Bonjol dan STAI-PIQ Padang | *27*
Profil Kampus, Dosen dan Mahasiswa | *30*
Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN IB dan STAI-PIQ | *35*
Penetrasi Sosial dan Kegiatan Ekstrakurikuler | *46*
Pola Penyelesaikan Masalah di UIN IB dan STAI-PIQ | *47*
Islamisme di UIN IB dan STAI-PIQ: Bisakah menjadi solusi? | *49*
Catatan Penutup: Menatap Masa Depan Prodi PAI | *50*

4. Moderatisme Yang Melemah, Islamisme Yang Menguat: Produksi Guru Agama Islam di Lampung

Pendahuluan | *53*
Visi, Misi, dan Proses Pembelajaran | *55*

Kelas dan Proses Ideologisasi | *63*
Sumber Rujukan Offline dan Online | *66*
Basis Islamisme Baru: Aliansi dan Kontestasi Keberagamaan | *71*
Catatan Penutup: Kampus Membendung Islamisme | *77*

5. Menyambut Musim Semi Radikalisme: Produksi Guru PAI di Jakarta dan Banten

Pendahuluan | *81*
Menakar Asa Prodi PAI | *85*
Sangkar Emas Prodi PAI: Membonsai Potensi | *90*
Musim Semi Radikalisme di Prodi PAI | *103*
Salah Resep Mengatasi Problematika PAI | *110*
Catatan Penutup | *112*

6. Mempersiapkan Guru Agama Profesional dan Moderat: Program Studi PAI UIN Sunan Kalijaga, UMY, dan IIM Surakarta

Pendahuluan | *117*
Profil Program Studi PAI UIN Sunan Kalijaga, UMY, dan IIM Surakarta |*120*
Islamisme Mahasiswa dan Dosen Prodi PAI | *123*
Core Values, Visi, dan Misi Lembaga: Menuju Kampus Moderat | *124*
Profil Lulusan dan Kurikulum Prodi PAI | *127*
Proses Pendidikan di Prodi PAI | *131*
Kompetensi Dosen | *138*
Kompetensi Mahasiswa | *140*
Upaya Pencegahan Islamisme Mahasiswa Prodi PAI | *144*
Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi | *147*

7. Tantangan Islamisme di Kampus Moderat: Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Islam Malang

Pendahuluan: Malang sebagai Titik Penting Persemaian Islamisme | *151*
Sejarah Universitas: Antara Epistemologi Pohon Ilmu dan Landasan Aswaja | *153*
Visi dan Misi Prodi PAI | *155*

Kebijakan Program Studi PAI | *157*
Kurikulum Prodi PAI dan Kemampuan Berpikir Kritis | *159*
Mahasiswa Prodi PAI | *162*
Dosen Prodi PAI | *164*
Tantangan Islamisme dan Respons Kampus | *167*
Mahasiswi Bercadar: Praktis, Modis, atau Ideologis? | *173*
Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi | *175*

8. Masyarakat Religius Pembelajar Agama, Benteng atas Penyebaran Narasi Radikal di Kalimantan Selatan: UIN Antasari Banjarmasin dan IAI Darusalam Martapura

Pendahuluan | *179*
Masyarakat Pembelajar Agama di Kalimantan Selatan | *181*
Filosofi, Kebijakan, dan Desain Pendidikan Agama yang 'Defisit' Ilmu Agama | *183*
Tantangan Manajerial dan Keterbatasan Sumber Daya dalam Mewujudkan Kompetensi Calon Guru Agama | *190*
Sikap dan Kesadaran Keberagamaan Lokal Tradisional | *196*
Poin-Poin Pembelajaran dan Rekomendasi Penguatan Prodi PAI | *202*
Catatan Penutup: Kembali pada Ilmu-Ilmu Islam dan Islam Banjar, Sebuah Rekomendasi | *205*

9. Keluar dari *Business as Usual*: Produksi Guru Pendidikan Agama Islam di Makassar

Pendahuluan | *209*
Setting Wilayah, Profil Kampus, Dosen, dan Mahasiswa | *211*
Arus Islamisme di Ladang Produksi Guru PAI | *217*
Peta Masalah Produksi Guru PAI di Makassar dan Usaha Mengatasinya di Tengah Arus Islamisme | *218*
Menatap Masa Depan PAI | *223*
Pelajaran Terpetik | *224*
Catatan Penutup | *226*

10. Islam Moderat vs Islam Milenial: Sistem Produksi Guru PAI di UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim Nusa Tenggara Barat

Pendahuluan | *229*

Profil UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim | *230*
Islamisme Mahasiswa dan Dosen | *231*
Input dan Rekrutmen Mahasiswa | *237*
Visi-Misi | *239*
Kurikulum dan Proses Pembelajaran | *240*
Dosen dan Pimpinan | *242*
Lingkungan Kampus | *244*
Upaya Menangkal Radikalisme di Kampus | *244*
Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi | *246*

Tentang CIS*Form* | *250*

Profil Para Penulis | *251*

1

PENDAHULUAN

Radikalisme dan ekstremisme masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Ancaman ini terlihat jelas dengan berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme di berbagai kalangan di Indonesia, khususnya generasi muda. Beberapa penelitian menemukan bahwa gejala intoleransi dan radikalisme juga berkembang di ranah sekolah, khususnya SLTA, dan perguruan tinggi. Perkembangan intoleransi dan radikalisme ini seiring dengan semakin meningkatnya semangat religiositas umat Islam Indonesia dan maraknya salafisme global. Untuk kasus di Indonesia, kondisi ini juga diperparah oleh buruknya demokrasi, pemerataan pembangunan, dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak baik. Kasus Mako Brimob (Mei 2018) di Jakarta, bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya (Mei 2018), dan beberapa generasi muda yang berjihad atau hijrah ke Syria adalah bentuk radikalisme yang nyata dan tidak bisa diremehkan.

Latar Belakang

Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ekstremisme dan radikalisme. Sejumlah penelitian mengemukakan temuan-temuan penting tentang potensi radikalisme dan ekstremisme di kalangan generasi muda. Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017, 2018) menunjukkan bahwa anak-anak muda adalah sasaran utama penyebaran paham radikal melalui institusi pendidikan. Hasil penelitian PPIM (2017) terhadap guru-dosen

dan siswa-mahasiswa di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan potensi intoleransi dan radikalisme yang cukup tinggi. Terkait intoleransi, penelitian itu menunjukkan bahwa 49% siswa-mahasiswa tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut aliran yang dianggap sesat (Syiah dan Ahmadiyah), dan 86,5% siswa-mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Terkait isu radikalisme, riset PPIM juga menunjukkan bahwa 37,71% siswa-mahasiswa dan 17,7% guru-dosen setuju bahwa jihad itu bermakna perang melawan non-Muslim; 26,35% siswa-mahasiswa dan 6,83% guru-dosen setuju bahwa bom bunuh diri itu termasuk jihad; serta 34,43% siswa-mahasiswa dan 18,63% guru-dosen setuju bahwa orang yang murtad boleh dibunuh.

Riset PPIM (2016) menemukan bahwa banyak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang cenderung berpaham eksklusif dan bersikap tidak toleran terhadap kelompok yang berbeda paham dengan mereka, baik Islam maupun non-Islam. Selain itu, riset PPIM atas buku ajar PAI yang dilakukan di Jombang, Bandung, Depok, dan Jakarta menemukan sejumlah buku ajar keislaman di sekolah memuat paham intoleransi, bahkan mengajarkan kekerasan. Beberapa konsep sensitif seperti kafir, musyrik, dan khilafah juga dibiarkan tanpa penjelasan mendalam. Selain itu, di beberapa buku teks ditemukan muatan yang tidak cukup akomodatif atas perbedaan paham dalam Islam, seperti penegasan pelaksanaan syariat yang mensyaratkan khilafah dan demokrasi sebagai syirik. Selain itu, riset PPIM terbaru (2018) menunjukkan bahwa guru di Indonesia mulai dari tingkat TK hingga SLTA memiliki opini intoleran dan radikal yang tinggi, yaitu sebesar 50% (opini intoleran) dan 46.09% (opini radikal). Sedangkan dilihat dari sisi intensi-aksi, walaupun lebih kecil nilainya daripada opini, namun hasilnya tetap mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 37.77% guru intoleran dan 41.26% radikal.

Riset MAARIF Institute (2017) melihat bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter bangsa rentan terhadap radikalisasi agama. Studi yang dilakukan terhadap beberapa kebijakan OSIS di enam kota di Indonesia menemukan bahwa Kerohanian Islam (ROHIS) menjadi pintu masuk paham radikal di sekolah menengah atas (swasta dan negeri). Studi ini juga melihat berbagai kelemahan yang dihadapi oleh sekolah, termasuk infiltrasi organisasi ekstra yang bercorak radikal, peran guru dalam proses belajar mengajar, dan kebijakan dan peran sekolah (baik kepala sekolah, guru, pengurus OSIS, maupun komite sekolah) yang lemah dalam menangkal masuknya paham radikalisme agama.

Penelitian PPIM (2017, 2018), dan Maarif Institute (2017) melihat adanya keterkaitan antara peran guru dan tumbuh suburnya intoleransi dan radikalisme di kalangan siswa/pelajar, serta lemahnya peran sekolah dalam menghadang dan melawan paham radikalisme di sekolah. Selain itu, riset PPIM (2017) juga melihat bahwa guru dan buku pelajaran agama Islam turut berperan dalam membentuk pandangan anak muda tentang intoleransi dan radikalisme. Hampir 49% isi buku-buku yang diteliti menghimbau anak muda untuk tidak bergaul dengan penganut agama lain.

Fokus dan Hipotesis Penelitian

Idealnya, sekolah adalah tempat penyemaian nilai-nilai agama yang moderat maupun ideologi negara (kebangsaan). Beberapa data di atas mengindikasikan adanya masalah di tingkat hulu, yaitu ketidakmampuan guru, khususnya guru agama Islam, selaku pendidik di sekolah menengah dalam menyemaikan nilai-nilai Islam moderat dan ideologi kebangsaan. Penelitian di atas juga mengonfirmasi bahwa guru-guru justru mempunyai pemahaman agama yang cenderung eksklusif atau bahkan intoleran. Walaupun guru Pendidikan Agama Islam (PAI) bukan satu-satunya sumber belajar Islam di sekolah, namun guru PAI mempunyai peluang paling banyak dalam mewarnai nilai-nilai keagamaan di lingkungan sekolah. Di sisi lain, siswa SLTP/SLTA adalah generasi milenial (*gen Z*) yang paling banyak mengakses media sosial sehingga pada saat yang sama mereka juga merupakan entitas yang paling rentan untuk terpapar Islamisme atau radikalisme.

Berdasarkan data dan asumsi di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh sistem pendidikan yang menghasilkan guru agama Islam tersebut, yaitu bagaimana mekanisme pendidikan dan pengajaran guru agama Islam di PTKI di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, riset yang lebih mendalam dilakukan untuk mengetahui proses pendidikan guru agama Islam sejak dari kebijakan terkait penyelenggaraan program studi (prodi) PAI, kurikulum dan silabus, kompetensi dan sikap keagamaan dosen-dosen pengajar, kompetensi dan sikap keagamaan mahasiswa, proses kegiatan belajar-mengajar (KBM), dan lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa seperti kegiatan ekstra-kampus seperti *halaqah*, kajian-kajian keislaman, pengajian informal, pesantren dll.

Berdasarkan data-data penelitian sebelumnya, riset ini mengasumsikan sebuah hipotesis bahwa sejauh ini Prodi PAI di PTKI belum mampu membentuk calon guru PAI yang mempunyai kapasitas keagamaan yang cukup untuk mengajar pelajaran agama di SLTP/SLTA. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari ranah kebijakan, input calon mahasiswa, proses pendidikan, SDM, hingga lingkungan di sekitar kampus. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1) Bagaimana sistem produksi guru Pendidikan Agama Islam?
2) Bagaimana kompetensi keislaman calon guru Pendidikan Agama Islam? dan
3) Bagaimana pandangan dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru Pendidikan Agama Islam, terutama terkait dengan isu-isu intoleransi dan radikalisme?

Tujuan Penelitian

1) Mengeksplorasi, mengidentifikasi dan menganalisa unsur-unsur sistemis dan non-sistemis di PTKI yang berkontribusi pada inkompetensi lulusan Prodi PAI di PTKI.

2) Mengidentifikasi pandangan dan sikap keagamaan mahasiswa PAI, khususnya terhadap isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.

3) Mengidentifikasi sumber atau elemen eksternal yang berkontribusi pada pembentukan kapasitas dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru PAI.

Kerangka Teori

Lembaga pendidikan adalah bagian penting dalam mekanisme negara di mana ideologi dan kekuasaan dipertaruhkan. Dalam sistem pendidikan, guru sekolah menjadi aktor *intermediary* yang menjembatani proses transformasi kesadaran antara ideologi negara dan para siswa di sekolah. Dalam melakukan proses edukasi, guru merujuk pada kurikulum sebagai pengejawantahan ideologi dan kepentingan negara lainnya. Pesan negara dalam melahirkan karakter dan sosok generasi yang ingin dihasilkan masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah. Melalui kurikulum sekolah, dalam bahasa Paulo Friere, negara atau pemerintah dapat menjadi *the dominant order*. Guru dan kurikulum menjadi bagian dari representasi negara di sekolah.

Namun di tengah proses perkembangan demokrasi politik, liberalisasi pendidikan, dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, peran negara sebagai *the dominan order* kini mengalami fragmentasi. Guru di sekolah tak lagi mencerminkan representasi negara. Bahkan, tidak sedikit sekolah yang menjadi media penyebaran ideologi gerakan sosial keagamaan (Hefner, 2009). Dalam konteks ini peran guru agama tidak hanya menjadi *intermediary* antara negara dan agama, tetapi juga harus mengusung nilai-nilai modernitas (Jackson, 2004). Tantangan pendidikan di era plural seperti saat ini jauh lebih berat karena generasi muda mempunyai tantangan identitas etnis, nasional, dan trans-nasional. Hasil riset Maarif Institute (2017) menjelaskan adanya pengaruh budaya masyarakat setempat dengan dinamika pendidikan di sekolah. Sosok guru lebih mencerminkan representasi karakter keberagamaan dari basis sosial di lingkungannya. Kini mengapa guru, termasuk dari aparat sipil negara (ASN), terlibat banyak dalam mempromosikan nilai-nilai intoleransi, eksklusivisme, dan bahkan radikalisme keagamaan dapat dijelaskan dalam konteks ini.

Guru dan lingkungan sosial keagamaan masyarakat mencerminkan dialektika baru dalam proses pembentukan pengetahuan dan kesadaran keagamaan siswa di sekolah. Dalam konteks ini, guru memiliki legitimasi yang kuat dari lingkungan sekolah dalam memainkan pengetahuan ideologis, meski harus berseberangan dengan ideologi negara dalam membangun proyeksi kesadaran keagamaan para siswa. Negara makin kehilangan kontrol terhadap ideologi guru di sekolah ketika swastanisasi pendidikan makin masif dan bahan bacaan pelajaran di sekolah tidak lagi tunggal mengacu pada kurikulum nasional. Baik guru dan siswa yang kini makin adaptif dengan model pembelajaran melalui teknologi informasi *online*, membuat akses sumber informasi guru dan siswa makin luas dan cepat.

Dalam diskusinya tentang kaitan problematik pendidikan agama dalam masyarakat majemuk, Barnes (2014) menemukan bahwa kegagalan pendidikan agama konvensional yang menekankan pada klaim identitas dan kebenaran agama justru terletak pada keterputusan antara pendidikan agama dan pendidikan moral. Menurut Barnes (2014), pendidikan agama untuk masyarakat plural seharusnya berorientasi pada pendidikan moral, khususnya ditujukan untuk merespons isu-isu moral kontemporer di tengah masyarakat. Pendidikan agama memiliki peran substansial dalam perkembangan kesadaran moral siswa karena agama dapat menyediakan kerangka moral alternatif bagi nilai sekularisme dan bentuk moral prosedural yang mendominasi kebudayaan dan kehidupan publik modern. Lebih jauh, Barnes (2014) menegaskan bahwa pendidikan agama kontemporer juga seharusnya terlibat penuh dalam merespons berbagai isu intoleransi dan prejudice berdasarkan agama. Setiap agama, termasuk Islam, memiliki sumber dan rujukan dalam kitab suci dan sejarahnya untuk mendukung kebebasan dan penghargaan pada perbedaan keyakinan dan penentangan terhadap intoleransi dan prejudice berdasarkan agama.

Di sisi lain, lembaga pendidikan dapat menjadi bagian dalam pelembagaan dan reproduksi persoalan sosial, politik, dan kultural. Sekolah melalui kurikulum, pedagogis, and kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas memainkan peran penting dalam mempertahankan dan menguatkan persoalan sosial, politik, dan kultural (Apple 1979). Lembaga pendidikan dapat berjalan dalam mengemban fungsi budaya dan perwujudan ideologi yang mempertahankan dan mendukung relasi struktural yang tengah berlangsung. Hal ini karena, menurut Apple (1979), institusi pendidikan berdiri dalam keterhubungannya dengan institusi lain yang lebih berpengaruh. Institusi-institusi ini dalam banyak konteks mengakumulasi ketidaksetaraan struktural dan kultural. Ini artinya bahwa keberadaan sistem dalam sebuah lembaga penyedia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika dan atmosfer kultural, politik, dan sosial yang berada di luarnya, khususnya persoalan-persoalan yang melibatkan lembaga yang lebih berpengaruh, seperti lembaga agama dan negara.

Pendidikan tidak hanya berkutat dengan permasalahan pendidikan, tetapi juga ideologi dan politik (Apple, 2004). Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan menjadi bagian dari sistem yang berperan besar dalam menyebarluaskan ideologi kekuasaan (kebangsaan). Lebih lanjut, lembaga-lembaga pendidikan diharapkan bisa mentransmisikan nilai-nilai Pancasila dan Islam moderat kepada anak didiknya. Dengan demikian, sekolah merupakan bagian dari sistem struktural pemerintah dalam menyebar-luaskan nilai-nilai Islam moderat sebagaimana dianut oleh negara.

Menurut Chisholm (1994) kompetensi budaya tidak dapat diperoleh dalam ruang akademik yang vakum. Kompetensi budaya berkembang melalui kombinasi pengetahuan, pengalaman lintas budaya secara langsung ditambah refleksi atas pengalaman tersebut. Karenanya, lingkungan universitas yang mengapresiasi dan mempromosikan penghargaan pada perbedaan budaya sangatlah mendasar bagi tumbuhnya kompetensi budaya di kalangan komunitas universitas bersangkutan.

Dengan perspektif teoretis seperti di atas, penelitian ini akan melihat sejauh mana Prodi PAI di PTKI mampu menjadi bagian dari lembaga peneguh ideologi negara dan penyemai pandangan agama yang moderat. Riset ini juga menelusuri sejauh mana kurikulum, metode, proses belajar di Prodi PAI dan lingkungan kampus mampu menghasilkan guru-guru agama yang berorientasi pada pendidikan moral di tengah masyarakat multikultural. Secara umum, penelitian ini berusaha untuk melihat ketahanan Prodi PAI dalam menangkal tantangan arus Islamisme, khususnya intoleransi dan radikalisme, yang sedang melanda Indonesia.

Parameter Islamisme

Tidak mudah untuk mendapatkan definisi yang tepat untuk istilah Islamisme. Semakin sering istilah Islamisme dipakai oleh pengamat dan sarjana, semakin banyak varian definisinya. Namun demikian, secara umum istilah Islamisme muncul sebagai pengganti terhadap istilah fundamentalisme dan istilah Islam politik yang cenderung stigmatis. Secara umum, Olivier Roy (2004) mendefinisikan Islamisme sebagai nama baru politik Islam modern yang ingin menciptakan sebuah masyarakat Islam (*ummah*), tidak hanya dengan memaksakan syariat, tetapi juga dengan membangun negara Islam melalui aksi-aksi politik. Sedikit berbeda, Mohammad M. Hafez (2003) mendefinisikan Islamisme sebagai gerakan Muslim yang merasa berkewajiban untuk bertindak berdasarkan keyakinan bahwa Islam itu aktivisme sosial dan politik, baik untuk membangun negara Islam, menghidupkan kembali semangat beragama, atau untuk menciptakan persatuan bagi Muslim. Terakhir, Bassam Tibi (2012) menjelaskan bahwa Islamisme adalah sebuah gerakan yang mempunyai visi tatanan dunia berdasarkan agama yang dipolitisasi dan berkomitmen menggunakan kekerasan. Lebih lanjut Tibi memberikan batasan Islamisme dalam enam kategori: 1) Purifikasi Islam, 2) Formalisasi Syariat Islam, 3) Anti-demokrasi, 4) Anti agama lain, 5) Anti Barat, dan 6) Penggunaan kekerasan.

Maraknya fenomena Islamisme PTKI di Indonesia khususnya Prodi PAI akan dilihat dengan parameter Islamisme di atas. Dengan enam parameter Islamisme Bassam Tibi, akan dilihat tingkat Islamisme di PTKI, apakah di level sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua parameter Islamisme identik dengan kategori radikal. Di level yang paling rendah, islamisme mungkin lebih tepat disebut dengan konservatif dan di level yang paling tinggi (menggunakan kekerasan) disebut dengan radikalisme atau terorisme. Semangat beragama dengan menggunakan cadar, misalnya, tidak bisa dikatakan sebagai fenomena radikalisme, tapi sebatas konservatisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel di 19 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di 8 wilayah. Lokasi penelitian ini dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan: 1) Kota

Wilayah	Nama PTKI Negeri	Nama PTKI Swasta
Padang	UIN Imam Bonjol Padang	STAI Pengembangan Ilmu Al-Quran Padang
Lampung	UIN Raden Intan Lampung	Universitas Muhammadiyah Lampung
Jakarta-Banten	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Universitas Muhammadiyah Jakarta Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta (survey kuantitatif)
Yogyakarta-Solo	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta
Malang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Universitas Islam Malang (NISMA)
Makassar	UIN Alauddin Makassar	Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
Banjarmasin	UIN Antasari Banjarmasin	IAI Darussalam Martapura
Lombok	UIN Mataram	IAI Nurul Hakim Mataram

Gambar 1.1: Daftar Lokasi Penelitian

besar yang mempunyai PTKI besar yang sudah meluluskan banyak guru PAI; 2) Kota yang berdekatan dengan daerah yang rentan radikalisme; dan 3) Institusi yang terpilih berdekatan dengan institusi swasta lainnya.

Penelitian ini menerapkan *mixed methods* (kuantitatif dan kualitatif) yang terdiri dari beberapa kegiatan. P**ertama**, review dokumen meliputi kebijakan, silabus, kurikulum, buku ajar, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). **Kedua**, survei dilakukan terhadap 169 responden dosen dan 981 mahasiswa. Responden dosen sejauh memungkinkan dipilih berdasarkan keberimbangan gender, senioritas, dan pengajar mata kuliah keislaman. Sedangkan responden mahasiswa dipilih berdasarkan jenjang semester akhir (V dan VII), seimbang antara aktivis dan non-aktivis kegiatan ekstra kampus, dan sejauh memungkinkan berdasarkan proporsionalitas gender. **Ketiga**, *semi-structured* interview dilakukan terhadap 119 dosen dan FGD dilakukan terhadap 188 mahasiswa (termasuk tes tulis bahasa Arab). **Terakhir**, adalah observasi baik itu di kelas maupun kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan kampus.

Data hasil penelitian diorganisasi dan dianalisis dengan fokus pada beberapa poin yang terkait dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1) Input dan rekrutmen mahasiswa Prodi PAI. Hal ini penting untuk melihat dari mana dan bagaimana calon mahasiswa masuk Prodi PAI.

2) Kurikulum Prodi PAI. Bagian ini menelaah komposisi mata kuliah profesional (keislaman), pedagogis, dan penunjang serta sejauh mana kurikulum mengakomodasi isu-isu kontemporer dan cara berpikir kritis.

3) Kapasitas bahasa dan sikap keagamaan dosen Prodi PAI. Bagian ini mengidentifikasi sejauh mana kapasitas dosen pengajar di Prodi PAI, khususnya masalah kemampuan bahasa Arab dan sikap keagamaan yang berkontribusi pada inkompetensi dan sikap eksklusif dosen.

4) Kapasitas bahasa dan sikap keagamaan mahasiswa Prodi PAI. Ranah ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi sejauh mana kapasitas mahasiswa Prodi PAI, khususnya kemampuan bahasa Arab dan sikap keagamaan yang berkontribusi pada inkompetensi dan sikap intoleran mahasiswa.

5) Kondisi dan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Bagian ini mengidentifikasi unsur-unsur non-sistematis pada perguruan tinggi yang berkontribusi pada sikap keagamaan dosen maupun mahasiswa di PTKI.

6) Media *online* sebagai sumber belajar. Bagian ini mengidentifikasi sejauh mana ketergantungan mahasiswa terhadap media *online*, termasuk media sosial, dalam belajar agama.

Referensi

Muslim, Abdul Aziz, dkk. 2018. *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab, Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Jakarta: Maarif Institut for Culture and Humanity.

Apple, Michael W. 1979. *Ideology and Curriculum*. London: Routledge.

Balai Litbang Agama Semarang, 2017. *Policy Brief: Langkah Strategis Membina Rohis* 3 (1).

Barnes, L. Phillip. 2014. *Education, Religion and Diversity: Developing a New Model of Religious*. Oxon: Routledge

Chisholm, I. Marquez. 1994. "Preparing Teachers for Muliticultural Classrooms." *The Journal of Educational Issues of Language Minority Students* 14: 43-68.

Cush, D. and D. Francis. 2002. "'Positive Pluralism' to Awareness Mystery and Value: a Case Study in Religious Education Curriculum Development." *British Journal of Religious Education* 24 (1): 52-67.

Golu, Florida. 2013. "Prejudice and Stereotypes in School Environment-Application to Adolescence ." *Procedia, Social and Behavioral Sciences* 78: 61-65.

Hefner, Robert W. 2009. *Making Modern Muslims: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia.* Honolulu: University of Hawaii Press.

Jackson, Robert. 2004, *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy.* London: Routledge-Falmer.

PPIM. 2016. *Policy Brief: Tanggungjawab Negara terhadap Pendidikan Agama Islam.* Jakarta: PPIM.

Wagner, Ulrich and Andreas Zick. 1995, "The Relation of Formal Education to Ethnic Prejudice: Its Reliability, Validity and Explanation." *The European Journal of Social Psychology* 25 (1).

2

SISTEM PRODUKSI GURU AGAMA ISLAM DAN TANTANGAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA

Muhammad Wildan

Pendahuluan

Di era keterbukaan informasi yang semakin luas dan ketika pluralitas keberagamaan menjadi keniscayaan, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin berat. Idealnya, lembaga pendidikan merupakan institusi formal yang tidak hanya mampu mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak didik dan menanamkan ideologi negara. Di era milenial seperti ini, tantangan lembaga pendidikan relatif lebih berat karena sumber pengetahuan anak didik tidak hanya berasal dari guru, tetapi juga dari lingkungan, termasuk internet. Tantangan seorang pendidik, khususnya guru agama, juga menjadi jauh lebih berat karena tidak hanya harus mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter. Buku ini berusaha untuk melihat sejauh mana Program Studi Pendidikan Agama Islam di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bisa membentuk calon guru agama Islam yang mempunyai kapasitas keagamaan yang kuat sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Islam Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan (revivalisme). Namun tidak bisa dipungkiri bahwa meningkatnya semangat Islam Indonesia juga mengarah pada literalisme beragama dan bahkan sebagian pada intoleransi dan radikalisme. Di satu sisi semangat religiositas muslim Indonesia mengalami eskalasi signifikan di era reformasi ini dengan munculnya berbagai fenomena Islam publik seperti masjid yang semakin bagus dan indah, penggunaan dan penjualan hijab yang semakin masif hingga merebaknya forum-forum pengajian di berbagai level masyarakat. Di sisi lain, Islam Indonesia juga ditandai dengan munculnya populisme Islam seperti gerakan 411-212, berkembangnya gerakan salafi-wahabisme, maraknya penggunaan cadar dan celana *cingkrang*, hingga munculnya gerakan pendukung *khilafah* dan merebaknya (paham) radikalisme dan ekstremisme. Dalam spektrum yang lebih luas, literalisme hingga radikalisme atau bahkan terorisme itu sering disebut dengan Islamisme.

Akhir-akhir ini, fenomena Islamisme tidak hanya muncul dan berkembang di lembaga pendidikan yang dikenal berhaluan keras, tetapi juga di sekolah-sekolah umum. Dalam konteks ini, peran guru agama (Islam) dipertanyakan karena ia seharusnya mampu mengajarkan Islam yang moderat kepada anak didiknya. Satu asumsi yang dibangun dari fenomena ini adalah bahwa Prodi PAI di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) belum mampu memproduksi guru agama yang mempunyai kapasitas keagamaan (Islam) yang memadai untuk mengajarkan Islam di sekolah-sekolah. Buku yang merupakan hasil riset ini akan memotret sejauh mana kemampuan Prodi PAI dalam memproduksi calon guru PAI yang mempunyai kapasitas yang cukup, tidak hanya untuk mengajarkan Islam secara normatif tetapi juga berhadapan *vis-a-vis* dengan tantangan modernitas kontemporer dan keragaman beragama.

Profil Responden Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode gabungan (kualitatif dan kuantitatif) ini, sample PTKI dipilih secara purposive, yaitu 19 PTKI di 8 wilayah. Dari 169 responden dosen, 117 di antaranya laki-laki (69,2%) dan 51 perempuan (30,2%). Dari aspek pendidikan dosen, 86 orang berpendidikan S2 (50,9%), 81 pendidikan S3 (47,9%), dan 2 dosen (1,2%) tidak menjawab. Dari sisi usia, responden penelitian ini ada 73 dosen yang berusia di atas 45 tahun (43,2%), 69 dosen berusia antara 30-45 tahun (40,8%), dan hanya 17 dosen yang berusia di bawah 30 tahun (10,1%).

Untuk responden mahasiswa, dari 981 terdapat 389 mahasiswa (39,7%) dan 591 mahasiswi (60,2%). Sebagai generasi milenial, responden mahasiswa adalah pengguna aktif beberapa media sosial, di antaranya yang paling aktif adalah facebook (60,6%), dan instagram (32,8%). Menarik untuk ditambahkan bahwa ustaz idola mahasiswa secara berurutan adalah 1) Ustaz Abdul Somad, 2) Ustaz Adi Hidayat, 3) Ustaz Hanan Attaki, 4) Ustaz Habib Rizieq Shibab, dan 5) Ustaz Quraish Shihab.

Di bawah ini secara berurutan akan disampaikan hasil riset tentang Sistem Produksi Guru Agama Islam dari beberapa aspek, yaitu input dan rekrutmen, kurikulum, kompetensi dosen, kompetensi mahasiswa, lingkungan kampus, dan media *online*.

Sistem Produksi Guru Agama Islam

Input dan Rekrutmen Mahasiswa Prodi PAI

Salah satu bagian dari sistem produksi guru agama Islam yang menarik untuk disorot adalah input, rekrutmen, dan motivasi mahasiswa masuk Prodi PAI. *Pertama*, dalam survei didapatkan data bahwa 323 mahasiswa Prodi PAI (32,9%) berasal dari SMA atau SMK umum. Hal ini menarik karena sekitar 3 dari 10 mahasiswa Prodi PAI dapat diasumsikan tidak memiliki dasar pengetahuan agama yang cukup dibandingkan dengan rekan mereka yang berasal dari Madrasah Aliyah atau SMA berbasis pesantren. *Kedua*, survei juga menunjukkan bahwa mahasiswa PAI masuk LPTK melalui jalur Mandiri 52,2%, SPAN-PTKIN 21,4%, dan UM-PTKIN 17,4%. Khusus untuk PMB di PTKIN (PTKIS mayoritas hanya melalui jalur Mandiri), persentasenya adalah SPAN-PTKIN 43,5%, UM-PTKIN 32%, dan Mandiri 21,6%. Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) dengan jalur SPAN-PTKIN yang "hanya" menilai rapor dan hasil Ujian Nasional (UN) telah memberikan peluang lebih pada calon mahasiswa dari SMA/SMK umum yang mempunyai nilai UN yang relatif lebih tinggi, dan kurang memberikan preferensi bagi alumni-alumni MA dan SMA Islam/pesantren yang mempunyai pengetahuan agama yang sudah cukup memadai.

Ketiga, menarik juga untuk dikaji bahwa ada 299 mahasiswa (30,5%) yang mempunyai motivasi masuk Prodi PAI untuk dakwah dan ibadah. Ini membuktikan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara asal sekolah dan motivasi masuk Prodi PAI.

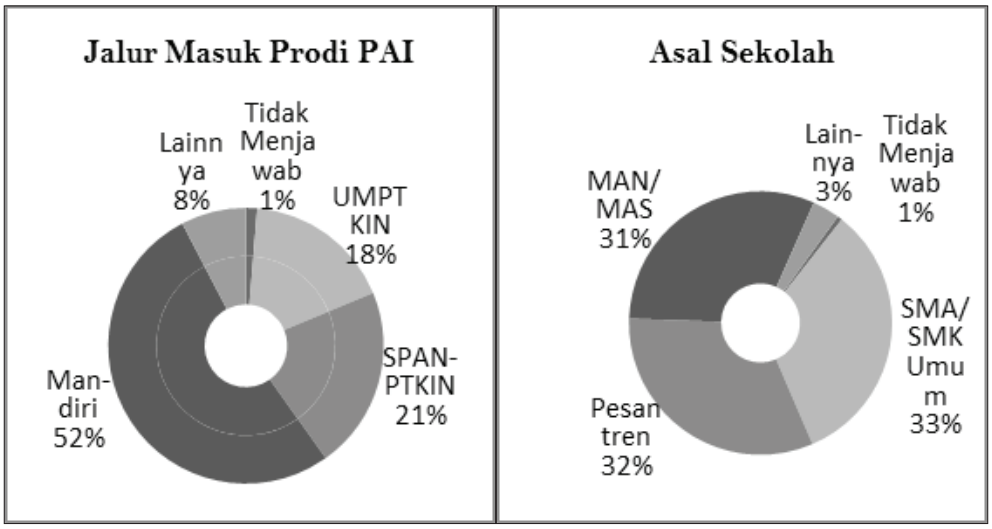

Gambar 2.1: Asal Sekolah & Rekrutmen

Sebagian besar mereka didorong oleh mentor agama ketika aktif di Kerohanian Islam (Rohis) saat di SMA/SMK.

Filosofi dan Kurikulum Prodi PAI

Berdasarkan review terhadap dokumen Prodi PAI, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji khususnya di ranah normatif dan konseptual. Walaupun sebagian PTKI sudah mempunyai visi dan misi yang relatif bagus, beberapa PTKI mempunyai visi dan misi yang terlalu normatif dan kurang operasional. Beberapa visi dan misi relatif banyak kemiripan antara PTKI satu dengan yang lain, sehingga kurang menampilkan kekhasan masing-masing PTKI atau daerah yang sekaligus bisa menjadi keistimewaannya.

Di ranah kurikulum, ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Secara umum muatan kurikulum Prodi PAI dibagi menjadi 3 kompetensi: 1) profesional, 2) pedagogis, dan 3) penunjang. Mahasiswa sebagai calon guru PAI diharapkan mempunyai kemampuan profesional sebagai guru agama Islam dan juga pedagogis sebagai guru. Berdasarkan review dokumen lembaga, kurikulum Prodi PAI di LPTK mempunyai beberapa kelemahan. *Pertama*, secara umum komposisi atau muatan profesional (keislaman) dalam kurikulum di beberapa LPTK yang menjadi subjek riset tidak lebih dari 30%. Sebaliknya, komposisi mata kuliah pedagogis pada kurikulum Prodi PAI rata-rata sekitar 45%. Persentase ini jelas menandakan kompetensi profesional lebih rendah (sedikit) daripada kompetensi pedagogis. *Kedua*, kurikulum Prodi PAI banyak mengandung "halhal teknis" kepengajaran (pedagogis), dan kurang pada penguasaan substansi keilmuan yang lebih dalam. Mata pelajaran Al-Quran-Hadis, misalnya, dibedakan untuk SD/MI, Al-Quran-Hadis untuk SMP/MTs, dan Al-Quran-Hadis untuk MA/SMA/SMK. Sejauh ini, mata kuliah yang dikembangkan di Prodi PAI lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan guru SD sampai SLTA, dan kurang mata kuliah yang merespons isu-isu agama kontekstual dan beragama secara kritis.

Kompetensi Bahasa Arab dan Pandangan Keagamaan Dosen PAI

Idealnya, dosen Prodi PAI mempunyai kompetensi bahasa Arab yang memadai. Dengan kemampuan bahasa yang bagus, dosen bisa mengakses sumber-sumber belajar agama primer dan tidak tergantung pada sumber-sumber yang kurang *reliable* seperti internet atau media sosial. Terkait dengan kompetensi bahasa Arab dan pandangan keagamaan, riset CISForm menemukan beberapa hal menarik. *Pertama*, 57,6% dosen PAI mempunyai kemampuan berbicara bahasa Arab rendah dan 46,0% dosen PAI mempunyai kemampuan membaca teks Arab yang rendah.

Berdasarkan parameter islamisme Bassam Tibi, survei tentang pemahaman keagamaan dosen mendapatkan hasil yang cukup menarik. *Pertama*, penerimaan dosen terhadap demokrasi tinggi (77,5%) dan persepsi terhadap kekerasan juga rendah (95,9%). Jika dilihat dalam masing-masing butir pertanyaan, terdapat 14,2% dosen Prodi PAI

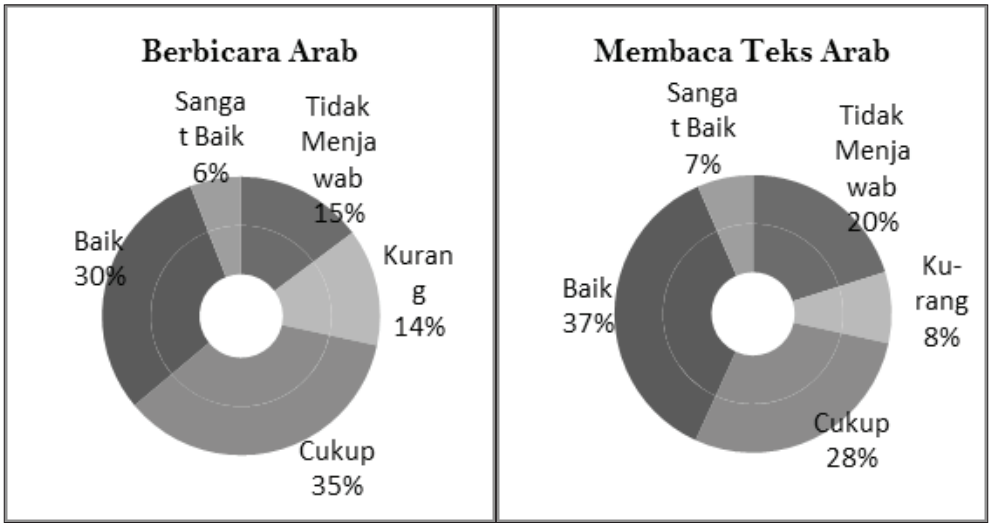

Gambar 2.2: Kompetensi Bahasa Arab Dosen

KATEGORI	TIDAK MENJAWAB	SANGAT TINGGI	TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH
Purifikasi	0%	3,6%	2,4%	66,9%	27,2%
Formalisasi Syariat Islam	1,2%	3,0%	28,4%	49,7%	17,8%
Anti Demokrasi	1,2%	0%	10,1%	69,2%	19,5%
Anti Agama Lain	0,6%	7,1%	29,0%	40,8%	22,5%
Anti Barat	0,6%	16,0%	24,3%	52,1%	7,1%
Kekerasan	1,2%	0,6%	2,4%	23,1%	71,8%

Gambar 2.3: Potensi Islamisme Dosen (N=169)

yang setuju bahwa Islam hanya dapat tegak dengan negara Islam (*khilafah*) dan 16,6% setuju bahwa dalam membela agama diperbolehkan menggunakan kekerasan. *Kedua*, survei mencatat bahwa level islamisme dosen relatif tinggi di beberapa parameter, yaitu formalisasi Syariat Islam (31,4%), anti agama lain (36,1%), dan anti Barat (40,3%). Selain itu, dalam interview juga didapatkan beberapa data menarik, misalnya bahwa ada dosen yang tidak setuju cadar dilarang di kampus, atau bahwa cadar juga merupakan bagian dari hak mahasiswi.

Kompetensi Bahasa Arab dan Pandangan Keagamaan Mahasiswa PAI

Walaupun fenomena ini dimungkinkan juga terdapat di prodi atau fakultas lain, kompetensi bahasa Arab mahasiswa Prodi PAI tidak cukup menggembirakan. *Pertama*, berdasarkan survei sebanyak 867 mahasiswa (88,4%) mempunyai kapasitas berbicara bahasa Arab kurang. *Kedua*, tes tertulis terhadap 188 mahasiswa (peserta FGD) untuk menguji kemampuan memberi harakat dan menerjemahkan teks bahasa Arab mendapatkan hasil bahwa 116 mahasiswa mempunyai kompetensi bahasa Arab rendah (61,7%).

Terkait dengan parameter islamisme, survei terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa cukup mengagetkan. *Pertama*, persepsi mahasiswa terhadap kekerasan atas nama agama rendah (91,1%). Data di butir pertanyaan tentang Pancasila, 89,2% mahasiswa setuju bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. *Kedua*, namun demikian survei mencatat bahwa level islamisme mahasiswa tinggi di beberapa parameter yaitu formalisasi syariat Islam (45,7%), anti demokrasi (46,2%), anti agama lain (43,6%), dan anti Barat (66,4%). Menarik juga jika dilihat dari masing-masing butir pertanyaan, misalnya terdapat 47,1% mahasiswa Prodi PAI yang setuju bahwa Islam hanya dapat tegak dengan negara Islam (*khilafah*), dan setuju bahwa keterpurukan Islam sebagian dari skenario Barat 75,9%.

KATEGORI	TIDAK MENJAWAB	SANGAT TINGGI	TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH
Purifikasi	1,1%	8,8%	20,7%	62,5%	6,8%
Formalisasi Syariat Islam	0,3%	5,0%	39,7%	48,7%	6,2%
Anti Demokrasi	0,2%	5,1%	40,4%	51,9%	2,2%
Anti Agama Lain	0,2%	4,9%	38,0%	43,3%	13,5%
Anti Barat	1,5%	27,9%	39,7%	28,7%	2,0%
Kekerasan	0,1%	2,0%	5,7%	32,4%	59,7%

Gambar 2.4: Potensi Islamisme Mahasiswa (N=981)

Pemahaman keagamaan mahasiswa di atas juga dikonfirmasi dalam FGD bahwa arus islamisme sudah merambah kalangan mahasiswa. Dalam FGD di beberapa PTKI didapatkan beberapa pemikiran, misalnya, bahwa gagasan Islam Nusantara dianggap merusak Islam dari dalam, bahwa demokrasi dianggap telah melemahkan syariat Islam karena demokrasi adalah ciptaan manusia, bahwa Barat mempunyai agenda buruk terhadap Islam, dan sebagainya.

Proses Pembelajaran & Lingkungan Kampus

Dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), secara umum PTKI menyelenggarakan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa). Dalam konteks KBM di Prodi PAI, kreativitas dosen diperlukan supaya mahasiswa memiliki pengetahuan profesional keagamaan dan pedagogis yang memadai, termasuk mengintegrasikan tema-tema aktual. Survei terhadap mahasiswa mendapatkan hal-hal menarik dalam KBM. *Pertama*, mahasiswa setuju bahwa dosen telah mendiskusikan materi toleransi dalam kuliah (96%) dan bahaya ekstremisme dalam beragama (76,7%). Namun demikian, penelitian juga mendapatkan bahwa proses KBM kurang mengajarkan materi maupun metode kuliah yang mengarah pada cara berpikir kritis. Di beberapa PTKI mahasiswa justru tidak belajar proses KBM secara demokratis. *Kedua*, riset juga menemukan bahwa di beberapa PTKI dosen mengajar kurang sesuai dengan kapasitasnya (*mismatch*). Walaupun hal ini terlihat tidak begitu signifikan dan kemungkinan banyak terjadi di prodi lain, ini jelas berpengaruh terhadap profesionalisme penyelenggaraan Prodi PAI, khususnya jika mata kuliah yang diampu termasuk muatan profesional (keislaman).

Ketiga, lingkungan kampus juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pembentukan kepribadian dan pemahaman keagamaan mahasiswa. Menurut observasi di beberapa PTKI yang menjadi subjek riset ini, beberapa kegiatan ekstra kampus berpengaruh pada pemahaman dan sikap keagamaan mahasiswa, misalnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK), *halaqah-halaqah* (*liqa'*), pesantren. Sebagian LDK mengusung ideologi salafi-wahabi, bahkan ada pula yang sudah menjadi unit kegiatan mahasiswa intra kampus. Hal ini juga diperburuk dengan beberapa PTKI yang belum menyadari akan bahaya intoleransi dan radikalisme serta cenderung membiarkan dan mengabaikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengarah pada konservatisme dan literalisme.

Media Online sebagai Sumber Belajar Agama

Terakhir, sebagai generasi milenial, ketergantungan mahasiswa akan internet dan media sosial relatif tinggi. Survei mendapatkan bahwa 52,8% mahasiswa lebih sering mencari pengetahuan agama di internet dan 58,8% lebih sering bertanya masalah agama di grup media sosial. Akses mahasiswa terhadap media *online* ini juga berpotensi masuknya pemahaman dan ideologi agama yang intoleran dan radikal.

Senada dengan fenomena di atas, ustaz idola menurut mahasiswa juga sebagian besar adalah ustaz yang banyak muncul di media *online*. Lima ustaz terfavorit menurut mahasiswa secara berurutan adalah Ustaz Abdus Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Habib Rizieq Syihab, dan Ustaz Quraish Shihab. Fenomana ini juga menyiratkan bahwa akses mahasiswa di media *online* sangat berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan.

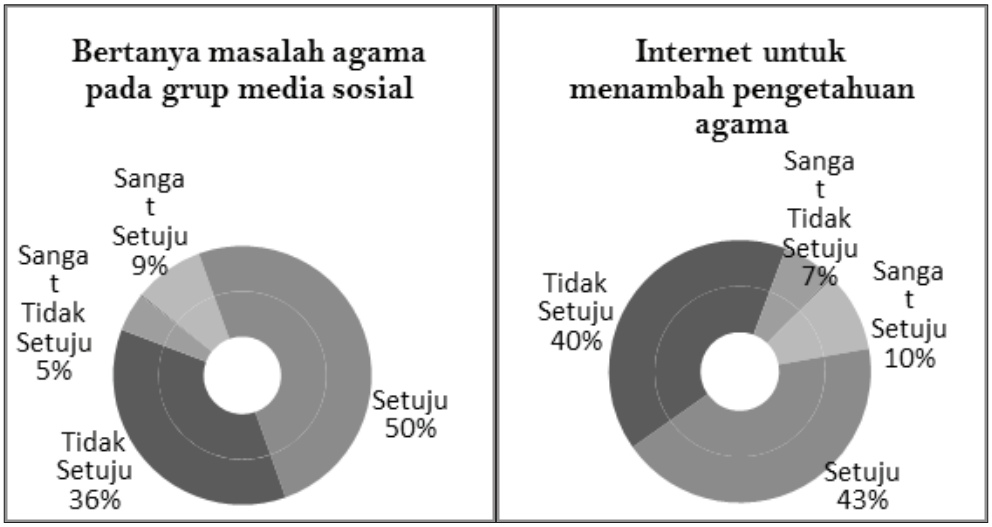

Gambar 2.5: Media Online bagi mahasiswa

Potensi Islamisme di PTKI?

Arus Islamisme yang tumbuh berkembang seiring dengan meningkatnya revivalisme Islam di Indonesia belum sepenuhnya disadari dan direspons secara arif oleh PTKI, khususnya Prodi PAI. Prodi PAI sebagai produsen guru PAI di sekolah dipandang mempunyai peluang cukup besar dalam menyemai Islam moderat dan membendung arus Islamisme. Hasil riset CISForm di sub-bab sebelumnya membuktikan bahwa arus islamisme belum sepenuhnya disadari oleh PTKI di Indonesia, khususnya di PTKI swasta.

Dari data kualitatif, menarik untuk disorot juga bahwa fenomena Islamisme agak menonjol di beberapa daerah seperti di Padang, Lampung, Makassar, dan NTB. Dari beberapa PTKI di kota tersebut didapatkan fenomena Islamisme menarik seperti semakin banyak mahasiswi bercadar dan kegiatan keagamaan ekstra kampus yang cukup aktif. Walaupun fenomena cadar itu tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai bentuk radikalisme, tetapi dalam spektrum Islamisme pemakaian cadar adalah kategori awal dari Islamisme, yaitu puritanisme. Jika dipahami dari perspektif radikalisme, mayoritas wanita-wanita yang terlibat dalam radikalisme atau istri-istri teroris hampir semuanya memakai cadar. Walaupun demikian, fakta di lapangan juga menarik untuk disorot bahwa beberapa mahasiswi memakai cadar sejak sebelum kuliah di PTKI, dan cadar juga tidak cenderung menjadikan pemahaman keagamaan mereka eksklusif. Selain karena alasan praktis dan modis, banyak mahasiswi yang tetap aktif sebagaimana mahasiswa muda gaul lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini cenderung menyimpulkan bahwa fenomena cadar berkembang di kampus PTKI sebagai sebuah proses pemahaman keagamaan yang

cenderung mengarah pada konservatisme. Ini menjadi tanggungjawab PTKI dan dosen untuk menjadikan mereka lebih moderat pemahamannya.

Aspek menarik lain dalam penelitian ini adalah bahwa fenomena Islamisme lebih tinggi di PTKI Swasta daripada negeri. Dari berbagai parameter Islamisme, khususnya di level mahasiswa, tampak jelas bahwa lebih banyak mahasiswa yang setuju dengan formalisasi syariat Islam, anti demokrasi, anti agama lain, dan setuju penggunaan kekerasan atas nama agama. Tingginya fenomena Islamisme di PTKI swasta bisa dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, dari segi input mahasiswa di PTKI swasta hampir tidak ada seleksi atau hampir semua pendaftar diterima. Ini memungkinkan masuknya calon mahasiswa yang tidak punya pengetahuan agama yang kuat. *Kedua*, pemahaman keagamaan mahasiswa di PTKI swasta juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan lingkungan atau lingkungan kampus. Secara umum bisa dikatakan bahwa banyak PTKI swasta yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai untuk kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa cenderung beraktivitas di luar kampus selain kuliah. *Ketiga*, program moderasi agama Kementerian Agama belum banyak menjangkau PTKI swasta. Akhirnya, ideologi keagamaan mahasiswa di PTKI swasta masih banyak dipengaruhi oleh ideologi yayasan atau lingkungan kampus tersebut.

Terakhir, masyarakat yang memiliki tradisi kultural kuat cenderung lebih tahan terhadap paparan paham intoleran dan radikal. Di beberapa PTKI yang kental dengan tradisi pesantren, ikatan mahasiswa dengan pesantren dan kiai menjadi lebih kental sehingga menjadikan mereka tidak banyak berinteraksi dengan ideologi yang konservatif-radikal. Oleh karena itu, penguatan tradisi kultural bisa menjadi alternatif untuk menangkal arus Islamisme yang semakin deras.

Best Practice LPTK

Secara umum, beberapa PTKI telah menyadari tantangan Islamisme secara global dan keterbatasan alumni Prodi PAI. Berbagai fenomena intoleransi dan radikalisme sudah menjadi perhatian berbagai *stakeholder* nasional, termasuk berbagai institusi pendidikan baik di level PTKI maupun LPTK. Tantangan islamisme di dunia pendidikan juga menghantui hampir semua level dan program pendidikan. Perkembangan paham intoleransi dan radikalisme di sekolah-sekolah inilah yang mendorong penelitian di hulu pendidikan guru agama. Dengan penelitian ini diharapkan bisa berperan dalam mereduksi potensi radikalisme di tingkat sekolah atau generasi muda secara umum.

Sebenarnya, berbagai *stakeholder* PTKI sudah memahami keterbatasan mahasiswa Prodi PAI dan umumnya mahasiswa di PTKI. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan sudah dibuat oleh beberapa PTKI untuk meningkatkan kualitas KBM dan juga kapasitas bahasa Arab dan keagamaan mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas KBM, beberapa Prodi PAI di PTKI memasukkan mata kuliah kontemporer dalam kurikulum seperti multikulturalisme dan toleransi, mengarahkan LDK kampus lebih ke gerakan Islam yang moderat, dan sebagainya.

Terkait dengan program peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bahasa Arab dan pemahaman keagamaan, beberapa *best practices* di beberapa PTKI di antaranya adalah 1) program pesantren (*ma'had*) untuk mahasiswa selama beberapa bulan hingga satu tahun, 2) program bahasa Arab tambahan atau *Qira'atul Kutub*, 3) program kelas bilingual atau *excellence class*, 4) hafalan juz 30, 5) penguatan karakter mahasiswa melalui program Sosialisasi Pembelajaran (sospem), Masa Transformasi dan Pengembangan Karakter mahasiswa baru (Master Maba), 6) peningkatan Baca Tulis Al-Quran (BTQ), atau 7) ujian komprehensif membaca kitab kuning sebelum lulus.

Terkait dengan maraknya penggunaan cadar, PTKI merespons secara beragam. Beberapa PTKI melihat cadar sebagai bentuk islamisme dan beberapa PTKI yang lain melihat cadar sebagai fenomena Islam yang biasa. Beberapa kampus secara jelas melarang penggunaan cadar, namun di beberapa PTKI swasta cadar tidak dianggap sebagai fenomena Islamisme. Sebagian Prodi PAI menetapkan aturan bahwa mahasiswi tidak boleh menggunakan cadar ketika Praktik Kerja Lapangan (PKL) mengajar di sekolah-sekolah, tetapi ada juga pimpinan PTKI yang menginginkan semua mahasiswinya menggunakan cadar.

Catatan Penutup: Inspirasi Perubahan

Berkaitan dengan arus pemahaman keagamaan (Islam) yang cenderung mengarah pada intoleransi dan radikal yang merambah sekolah dan kampus di Indonesia. Saat ini dibutuhkan guru agama (PAI) yang mempunyai kompetensi agama yang kuat untuk menangkal penyebaran paham intoleran dan radikal di sekolah-sekolah umum, khususnya SLTA. Hal tersebut sangat terkait dengan beberapa temuan dari penelitian ini.

1) Input dan rekrutmen calon mahasiswa PAI (PMB) masih memberikan peluang bagi lulusan SMA/SMK umum yang notabene mempunyai keterbatasan keilmuan agama Islam dan kurang memberikan peluang bagi lulusan-lulusan MA atau SMA Islam/pesantren.

2) Prodi PAI LPTK cenderung hanya merespons kebutuhan pasar untuk mencetak guru agama SD, SMP, dan SMA, dan kurang merespons isu-isu agama (Islam) aktual-kontemporer. Fenomena ini terlihat pada kurikulum yang lebih banyak menekankan pada kompetensi pedagogis daripada kompetensi profesional keislaman. Lebih lagi, kurikulum kompetensi profesional Prodi PAI juga kurang memuat mata kuliah aktual-kontemporer dan juga pembelajaran kritis.

3) Dalam proses KBM, sebagian dosen PAI mempunyai kompetensi bahasa Arab yang rendah dan juga sikap keberagamaan yang cenderung intoleran dan eksklusif.

4) Selain itu, dalam proses KBM juga ditemukan bahwa kompetensi bahasa Arab mahasiswa juga relatif rendah dan mempunyai pandangan agama yang berpotensi

ke arah intoleran dan radikal. Walaupun kompetensi bahasa Arab rendah tidak serta-merta berpotensi mengarah pada intoleran, namun akan membatasi akses mahasiswa ke sumber-sumber keislaman yang primer dan otoritatif.

5) Kegiatan-kegiatan ekstra kampus hingga lingkungan kampus, seperti LDK dan pesantren mempunyai peran signifikan dalam membentuk pemahaman dan sikap keagamaan mahasiswa calon guru agama. Semakin banyaknya mahasiswi bercadar di LPTK merupakan bukti konkrit menguatnya islamisme dalam kegiatan ekstra kampus.

6) Beberapa program keagamaan tambahan seperti bata tulis Al-Quran (BTQ), bahasa Arab, qiraatul kutub, tahfidz, pesantren kilat, pengajian-pengajian di kampus yang bersifat instan dikhawatirkan justru akan mendorong munculnya konservatisme dan kurang mengajarkan Islam yang komprehensif dan cara berpikir kritis dalam beragama.

7) Secara umum, kompetensi lulusan Prodi PAI di LPTK 'hanya' sesuai untuk menjadi guru PAI di sekolah umum, bukan untuk madrasah atau sekolah Islam.

Berdasarkan berbagai permasalahan seputar sistem produksi guru agama di atas, kami sampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas sistem produksi guru agama (PAI) secara umum di Indonesia.

1) Sebaiknya diadakan studi yang mendalam tentang kebutuhan guru PAI secara nasional dan dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh LPTK di PTKI seluruh Indonesia. Ini penting supaya output lebih bisa dikontrol tidak hanya kualitas, tetapi juga kualitasnya.

2) Guru agama di sekolah umum khususnya SMA/SMK harus mempunyai kompetensi agama yang memadai untuk menyebarkan Islam moderat dan menangkal tantangan maraknya intoleransi dan radikalisme di generasi muda.

3) Pembenahan sistem pendaftaran mahasiswa baru (PMB) Prodi PAI yang memberikan peluang lebih banyak pada lulusan MA dan SMA Islam/Pesantren sehingga input calon mahasiswa PAI mempunyai dasar kompetensi keagamaan yang cukup.

4) Perombakan kurikulum Prodi PAI yang memberikan bobot lebih banyak pada kompetensi profesional guru PAI, yaitu pengetahuan keagamaan dibandingkan dengan kompetensi pedagogis. Selain itu, kurikulum juga harus memuat mata kuliah yang mengajarkan cara berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan PMA No.15 Tahun 2018 tentang LPTK yang mengatur bahwa besaran muatan komponen keahlian adalah 70% dan pedagogis sebesar 20%.

5) Pembenahan mekanisme rekrutmen dosen Prodi PAI yang menitikberatkan pada kompetensi bahasa Arab dan keagamaan.

6) Proses pembelajaran harus mengajarkan tema-tema aktual kebangsaan dan kontekstual dan mengedepankan proses pembelajaran andragogi.

7) Pembenahan dan pengaturan lebih ketat kegiatan-kegiatan ekstra kampus untuk meminimalkan penyebaran pemahaman atau ideologi yang cenderung intoleran dan radikal.

3

ANCAMAN ISLAMISME DI BALIK KOMITMEN KEAGAMAAN

Sistem Produksi Guru Agama Islam di UIN Imam Bonjol dan STAI-PIQ Padang Sumatra Barat

Sekar Ayu Aryani

Pendahuluan: Islamisme di Tanah Minang dalam Kilasan Sejarah

Penelitian ini dilakukan di UIN Imam Bonjol (UIN IB) dan Sekolah Tinggi Pengembangan Ilmu Al-Quran (STAI-PIQ) yang terletak di kota Padang Sumatera Barat. Pemilihan objek penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, kualifikasi Perguruan Tinggi yang memiliki Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) terbesar di kota Padang. Kedua, keterwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Ketiga, keunikan kota Padang pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya sebagai kota yang memiliki sejarah tersendiri dalam perkembangan Islamisme di Indonesia.

Keberadaan UIN IB dan STAI-PIQ dalam konteks sejarah hampir tak dapat dipisahkan dengan semangat untuk melestarikan keunggulan Sumatera Barat sebagai gudang para ulama yang sudah sangat terkenal sejak zaman penjajahan. Semangat lain adalah dalam rangka menghidupkan falsafah hidup Minangkabau "*Adat basandi*

Syarak, Syarak basandi Kitabullah" dengan konsekuensi senantiasa menghidupkan dan membumikan Al-Quran.

> Penamaan Imam Bonjol sendiri bagi UIN IB dikaitkan dengan keulamaan dan kepeloporannya sebagai tokoh purifikasi Islam yang terkenal dengan gerakan Paderi-nya (Raichul Amar, 2016: 80). Sementara itu, STAI-PIQ yang dulu bernama Akademi Ilmu Al-Quran (AIQ) dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) mengkhususkan diri pada pengkajian dan pendalaman ilmu-ilmu Al-Quran. Pendirian perguruan tinggi ini tidak bisa dilepaskan dari semaraknya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (Tim Penyusun Profil STAI-PIQ Sumbar, 2006: 1), dengan kesadaran bahwa Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan dilombakan, tetapi juga harus difungsikan secara konkret sebagai pedoman hidup manusia (*hudan linnas*).
>
> Dalam lingkup yang lebih luas, Sumatera Barat adalah provinsi di Indonesia dengan penduduk sebanyak 5.321.489 jiwa (BPS, 2017). Sekitar 98,05% penduduk Sumatera Barat beragama Islam, sedangkan sisanya memeluk Kristen Protestan (1,07%), Katolik (0,80%), Hindu (0,02%), Budha (0,05%). (BPS, 2017). Mayoritas muslim di Sumatera Barat berada di Kota Padang yang berpenduduk 927.168 jiwa dan sebagian besar berasal dari suku asli Minangkabau. Selain etnis lokal, sebagian kecil penduduk Padang adalah pendatang yang menganut Kristen, Buddha, dan Khonghucu (BPS, 2017).

Kata Minangkabau lebih mengandung makna sosiokultural, sedangkan Sumatera Barat cenderung merujuk pada lokasi geografis administratif. Sebelum masuknya pengaruh nilai-nilai asing seperti Hindu-Budha, Islam, dan Barat, masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat yang terintegrasi dan berkepribadian sangat kuat. Kebudayaan dari luar tidak mudah mempengaruhi sistem tatanan sosial di Minangkabau. Hanya budaya asing yang sesuai dengan adat lokal yang dapat bertahan di Minangkabau. Agama Hindu-Budha yang dianut keluarga kerajaan sejak abad ke-13 Masehi tidak banyak mempengaruhi sistem adat di Minangkabau yang tetap berpedoman pada ajaran "*Alam Takambang Jadi Guru*". Berbeda dengan Hindu-Budha, agama Islam yang masuk pada abad ke-16 Masehi secara bertahap dianut oleh masyarakat Minangkabau dan tumbuh menjadi faktor penting dalam perkembangan sejarah kebudayaan Minangkabau di kemudian hari (Aulia Rahmat, t. t.: 1-3).

Pada abad ke-19, gesekan antara nilai adat dengan syariat Islam terjadi ketika para ulama berpendidikan Arab Saudi berusaha melakukan pemurnian agama dari tradisi yang dianggap sesat. Aksi pemurnian agama pada masa itu melahirkan gerakan Paderi yang dianggap sebagai kelompok keagamaan radikal pertama di Minangkabau (M. Agus Noorbani, 2014: 173-174). Konflik berkepanjangan tersebut mengakibatkan perang saudara yang cukup besar antara tahun 1803-1821. Hingga pada tahun 1832 terjadilah kompromi antara kaum adat dengan kelompok Paderi yang diwakili oleh Tuanku Imam Bonjol. Negosiasi antara kedua kubu menghasilkan kesepakatan mengenai hubungan hukum adat dengan syariat Islam yang dituangkan dalam sebuah fatwa "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Peristiwa tersebut merupakan klimaks dari proses integrasi nilai-nilai ajaran Islam ke dalam budaya Minangkabau. Falsafah

di atas selanjutnya digunakan sebagai nilai dasar untuk membentuk tatanan sosial di Minangkabau (Aulia Rahmat, t. t.). Bertahannya tradisi matrilineal merupakan buah dialog antara kelompok pemurnian agama dengan petinggi adat (M. Agus Noorbani, 2014: 174).

Hubungan timbal balik yang harmonis antara adat dan syariat dalam kebudayaan Minangkabau mendorong dinamika keagamaan berjalan pesat di kalangan masyarakat. Berbagai macam aliran keagamaan pun mulai bermunculan. Menurut hasil penelitian Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan (Balitamas), terdapat 17 kelompok keagamaan yang berkembang di Sumatera Barat, baik berupa tarekat maupun aliran keagamaan lain (M. Agus Noorbani, 2014: 180). Fenomena tersebut tidak lepas dari tradisi masyarakat Minangkabau yang demokratis. Tidak ada otoritas terpusat dalam tradisi Minangkabau. Sejak dahulu, sistem pemerintahan di Minangkabau terdiri dari banyak Nagari (Kampung), dimana pengambilan keputusan harus berdasar pada musyawarah mufakat (M. Agus Noorbani, 2014: 174). Politik yang berlaku di Minangkabau tidak didasarkan pada hirearki, melainkan pada pluralitas dan multiplisitas kekuasaan yang lebih kecil (heterarki). Keberadaan beragam aliran keagamaan disikapi secara terbuka oleh mayoritas masyarakat Minangkabau yang egaliter sehingga tidak pernah terjadi konflik besar. Meski demikian, bila gerakan kelompok keagamaan tersebut sudah dianggap mengganggu stabilitas negara, maka akan dinyatakan sesat dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah daerah (M. Agus Noorbani, 2014: 185).

Gerakan radikalisme di Sumatera Barat mulai terlihat kembali setelah berakhirnya Orde Baru yang menandai runtuhnya rezim Presiden Soeharto tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan akibat dari euforia demokrasi yang membuka peluang untuk mengekspresikan pemahaman keagamaan secara bebas. Munculnya radikalisme Islam dihadapkan pada keinginan untuk mengulang periode kejayaan Islam secara eksklusif tanpa disertai kajian yang komprehensif mengenai Islam dan masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Ideologi tersebut lahir akibat kombinasi beberapa faktor, yakni penafsiran keagamaan yang bersifat literal terhadap ayat-ayat Al-Quran, pengaruh politik dan sosio-ekonomi, bacaan yang kurang tepat mengenai sejarah Islam, serta fanatisme berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu (Zainal, 2014: 446, 448, 458).

Kemunculan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang mengedepankan ideologi ekstremisme religius, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Front Pembela Islam (FPI), dan Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) berangsur menenggelamkan pengaruh ormas Islam arus utama yang selama ini telah eksis, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Islam (Persis), Washliyah, dan organisasi Islam lainnya. Sejak saat itu, ekspresi Islam di Minangkabau menunjukkan perubahan menjadi lebih militan. Penggunaan kekerasan sudah menjadi karakteristik kelompok Islam radikal. Secara ideologis, mereka dinilai memiliki keterkaitan historis dengan kelompok Paderi pada abad ke-19. Hal tersebut terlihat dari kemiripan simbol, pemikiran, dan gerakan yang berupaya menegakkan syariat Islam serta memenuhi

panggilan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Beberapa ormas bahkan menyuarakan pendirian Negara Islam (Zainal, 2014: 447-450).

Gerakan *amar ma'ruf nahyi munkar* tidak sebatas wacana, melainkan sudah diimplementasikan dalam wujud aksi di lingkup kultur maupun struktur. Secara kultural, setiap malam minggu berbagai ormas seperti FPI dan KPSI tersebut rutin melakukan kegiatan razia terhadap tempat-tempat hiburan di kota Padang dan Bukittinggi. Mereka juga mengadakan pertemuan dan ceramah keagamaan, serta sosialisasi syariat Islam melalui selebaran, pamflet, buletin, spanduk, dan baliho di berbagai tempat. Sedangkan di ranah struktural, mereka aktif melakukan desakan kepada dewan perwakilan rakyat dan kepala daerah untuk memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam (Zainal, 2014: 460-462). Sampai dengan September 2006 saja, tercatat ada 23 produk kebijakan dari 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang mengatur masalah moralitas dan keagamaan, antara lain (Aulia Rahmat, t. t.: 9, 29):

1) Perda tentang keterampilan beragama
2) Perda tentang gaya berbusana dan mode pakaian
3) Perda tentang zakat
4) Perda tentang moralitas

Selain yang disebut di atas, ada pula Perda di tingkat provinsi yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur mengenai 'penyakit masyarakat', dalam konteks ini meliputi perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat bius (Zainal, 2014: 463-464).

Komunitas Minangkabau merupakan masyarakat agamis yang masih memegang teguh komitmen ajaran Islam dalam budaya kehidupannya sehari-hari. Di Minangkabau yang menganut falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", ormas-ormas garis keras cukup leluasa menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran Islam berhaluan radikal. Meski demikian, lahirnya gerakan tersebut bukan semata-mata karena dorongan keagamaan. Permasalahan politik yang tidak stabil, sosial-ekonomi yang menguntungkan konglomerat, dan degradasi moral yang menimpa bangsa Indonesia pasca Orde Baru menjadikan rakyat semakin menderita. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat sehingga gerakan ormas Islam radikal hadir menawarkan penerapan syariat Islam sebagai solusi bagi permasalahan bangsa (Zainal, 2014: 458-459).

Sebagai wilayah yang masih memiliki minoritas penduduk non-muslim, situasi tersebut rentan memicu pertentangan antar umat beragama di Sumatera Barat. Meski belum pernah terjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*violence conflict*) yang masif, sebenarnya konflik laten antar kelompok keagamaan akibat perbedaan kepentingan sudah lama ada. Sikap eksklusivitas kelompok Islam dan sentimen kesukuan kaum Minangkabau sebagai mayoritas seringkali mengakibatkan berbagai gejolak sosial keagamaan (Bashori A. Hakim, 2012: 102, 110-112). Beberapa konflik yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, antara lain:

1) Penolakan pembakaran jenazah bagi komunitas keturunan Tionghoa di Pasar Bong, Kelurahan Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada tahun

2018 oleh kelompok GNPF MUI, Forum Masyarakat Minang, dan Ormas Islam Se-Sumatera Barat (Sigit Wibowo, 2018).

2) Penghentian pendirian Hotel Grand Kartini di depan masjid Nurul Haq Bukittinggi yang dimotori FPI, KPSI, Majelis Mujahidin, dan Komunitas Adat Kurai pada tahun 2012 karena dikhawatirkan mengganggu ibadah umat Islam, merusak moral masyarakat (ada citra negatif terhadap hotel), dan berpotensi memicu konflik SARA (pengusaha hotel tersebut orang Cina) (Zainal, 2014: 463-464).

3) Pegawai Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya mengaku atheis pada tahun 2001 dengan para simpatisannya yang berjumlah sekitar 1.200 orang. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bakorpakem Dharmasraya meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti pelakunya secara hukum sesuai peraturan yang berlaku (Bashori A. Hakim, 2012: 110).

4) Umat Hindu di Kota Padang tidak memiliki tempat penguburan sehingga jenazah harus dikirim ke Lampung atau Bali. Pada tahun tahun 1998, Parisade Hindu Dharma Provinsi Sumatera Barat pernah mengusulkan pendirian tempat penguburan bagi umat Hindu, tetapi mendapat penolakan dari Walikota Padang kala itu (Bashori A. Hakim, 2012: 111).

5) Sulitnya prosedur pembelian lahan untuk pendirian gereja di beberapa daerah lantaran kurangnya dukungan masyarakat setempat yang kemungkinan khawatir jika ada gereja di lingkungan tempat tinggal mereka, maka akan digunakan untuk misi Kristenisasi (Andri Mardiansyah, 2014).

Kilas Balik Berdirinya UIN Imam Bonjol dan STAI-PIQ Padang

Sejarah UIN Imam Bonjol bermula dari didirikannya Yayasan Imam Bonjol pada 19 Januari 1962 yang dipelopori oleh alumni Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Sumatera Barat bernama Azhari (saat itu beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang). Yayasan ini didirikan untuk membangkitkan kembali harkat dan martabat masyarakat Minangkabau yang terpuruk setelah aksi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dianggap separatis oleh pemerintah pusat. Azhari berusaha mengembalikan harga diri masyarakat Minangkabau yang terkenal banyak melahirkan cendekiawan muslim melalui gerakan peningkatan pendidikan dengan membangun perguruan tinggi agama Islam di bawah pengelolaan Yayasan Imam Bonjol (Raichul Amar *et al*., 2016: 51-52, 57, 62-63).

Lembaga pendidikan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Agama Islam di tingkat universitas yang nantinya diharapkan dapat menjadi semacam Al-Azhar Sumatera barat. Bersama rekannya A. Kamal, putera Sumatera Barat yang merupakan alumni Fakultas Hukum UGM, Azhari mempelopori

berdirinya perguruan tinggi agama Islam yang pada mulanya masih berstatus swasta. Fakultas yang mula-mula didirikan adalah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Sosial Politik di Padang pada tanggal 5 Juni 1962. Dalam waktu kurang dari setahun setelah itu, didirikan pula beberapa fakultas lain di luar ibu kota provinsi, yaitu Fakultas Syariah di Bukittinggi dan Fakultas Adab di Payakumbuh pada tanggal 20 Januari 1963, serta Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang pada tanggal 5 Mei 1963 (Raichul Amar *et al*., 2016: 52, 62-63).

Perguruan tinggi Islam swasta dengan beberapa fakultas tersebut menjadi cikal bakal yang secara bertahap bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri yang dibiayai dengan menggunakan dana negara sehingga lebih berkembang. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, dibentuklah panitia yang terdiri dari pemuka agama, ahli pendidikan, tokoh masyarakat, serta pejabat pemerintah daerah, termasuk Azhari dan A. Kamal. Berkat kerja keras dari berbagai pihak terkait, maka pada tanggal 21 September 1963 dilakukan peresmian status negeri Fakultas Tarbiyah di Padang yang pada mulanya masih sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah selanjutnya kemudian ditempuh untuk mengubah status 3 fakultas lain dari Yayasan Imam Bonjol, yakni Fakultas Syariah di Bukittinggi, Ushuluddin di Padang Panjang, dan Adab di Payakumbuh. Setelah melalui berbagai proses yang diperlukan selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya ketiga fakultas di atas berhasil diubah statusnya menjadi negeri pada tanggal 21 November 1966 dengan persetujuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak lama kemudian, dilakukan peresmian berdirinya IAIN Imam Bonjol yang terdiri dari 4 fakultas pada tanggal 29 November 1966 di Gedung Tri Arga Kota Bukittinggi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 77 Tahun 1966 (Raichul Amar *et al*., 2016: 63-70).

Pemilihan nama Imam Bonjol untuk IAIN yang didirikan di Sumatra Barat merupakan harapan agar perguruan tinggi tersebut nantinya dapat melahirkan sarjana muslim patriot bangsa yang handal, pembaharu pemikiran Islam berwawasan luas, serta menjadi ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama sebagaimana tercermin dari sosok Tuanku Imam Bonjol. Gelar "Tuanku Imam" yang melekat pada pria bernama asli Peto Syarif tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan ahli adat dan agama Islam yang disegani di kalangan masyarakat Minangkabau (Raichul Amar *et al*., 2016: 78-79).

'Ingatan sejarah' masyarakat masa kini tentang Tuanku Imam Bonjol sebagai ulama besar pembaharu Islam yang karismatik dan pejuang pembela tanah air senantiasa terkenang. Maka dari itu, pemilihan Imam Bonjol sebagai nama IAIN di Sumatera Barat dinilai logis dan tepat karena dilandasi oleh pemikiran bahwa perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menghasilkan calon ulama intelektual yang kontribusinya dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, kepentingan agama, bangsa, dan negara (Raichul Amar *et al*., 2016: 86-87).

Sejarah STAI-PIQ Padang

Pendirian Akademi Ilmu Al-Quran (AIQ) bermula dari gagasan yang dicanangkan mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIA) Jakarta utusan Sumatera Barat ketika bertemu dengan unsur kafilah MTQ Sumatera Barat dalam acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XI di Semarang pada tahun 1979. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan Akademi atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Sumatera Barat. Selepas itu, dibentuklah panitia untuk merealisasikan konsep tersebut yang terdiri dari mahasiswa dan alumni PTIQ Jakarta utusan Sumatera Barat. Setelah mengkomunikasikannya dengan Gubernur Sumatera Barat kala itu, Ir. H. Azwar Anas, ide tersebut disambut baik karena beliau juga menilai perlu didirikan lembaga pendidikan tinggi di bidang agama Islam untuk membangkitkan kembali masa kejayaan Sumatera Barat sebagai "gudang ulama", mengingat kenyataan semakin berkurangnya jumlah ulama serta orang yang paham ilmu dan hafal Al-Quran di Sumatera Barat. Dua bulan pasca MTQN XI di Semarang, susunan konsep pendirian AIQ yang telah dirampungkan panitia kemudian diajukan kepada pemerintah Sumatera Barat melalui LPTQ dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Barat. Setelah mendapat masukan dari berbagai unsur yang juga meliputi Majelis Ulama Indonesia dan pengurus PGAI Sumatera Barat, AIQ Sumatera Barat berhasil didirikan pada tanggal 2 September 1981 di bawah pembinaan Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Quran (YPIQ) Sumatera Barat (Tim Penyusun Profil STAI-PIQ Sumatera Barat, 2006: 1-2).

Pada awal berdirinya, pihak akademi merasa kesulitan memperoleh mahasiswa sehingga berinisiatif memberikan kemudahan bagi yang berminat kuliah di perguruan tinggi ini, di antaranya pembebasan biaya studi serta biaya pemondokan dan konsumsi. Beasiswa yang diberikan terdiri dari 2 jenis, yakni beasiswa penuh serta pembebasan uang kuliah dan sarana perpustakaan saja. Setelah itu, jumlah mahasiswa yang masuk terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata 30-60 orang. Mahasiswa yang diterima adalah utusan kecamatan se-Sumatera Barat yang membawa rekomendasi dari KUA dan camat setempat serta bersedia kembali ke daerahnya untuk mengabdi pasca studi. Kondisi yang demikian berlangsung hingga tahun akademik 1987-1988 (Tim Penyusun Profil STAI-PIQ Sumatera Barat, 2006: 3).

AIQ Sumatera Barat membuka 2 jurusan, yaitu Fahmil Qur'an (FQ) dan Hifzil Qur'an (HQ). Pendidikan berlangsung selama 3 tahun (6 semester). Setelah beberapa tahun menyelenggarakan pendidikan, waktu 3 tahun dinilai kurang memadai untuk mencetak kader ulama yang hafal Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran secara mendalam serta menguasai seni baca Al-Quran. Mempertimbangkan hal tersebut dan usulan berbagai pihak, maka AIQ ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1988. Tahun 1994, STIQ berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran (STAI-PIQ) Sumatera Barat (Tim Penyusun Profil STAI-PIQ Sumatera Barat, 2006: 3-6).

Profil Kampus, Dosen, dan Mahasiswa

Secara umum, fenomena sosial keagamaan kota Padang sebagaimana digambarkan di atas terefleksi di dua kampus yang menjadi objek penelitian, yaitu UIN Imam Bonjol dan Sekolah Tinggi Ilmu Pengembangan Al-Quran (STAI-PIQ) Padang. Kedua kampus ini memberi kesan suasana islami yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan semaraknya kajian Al-Quran baik berupa tadarus, tahfiz, diskusi keagamaan serta salat fardhu berjamaah di masjid kampus atau sekitar kampus. Pada setiap waktu salat, dipastikan tidak ada aktivitas mengajar maupun kegiatan akademik lainnya, bahkan perpustakaan pun tutup sementara ketika masuk waktu salat untuk memberi kesempatan pegawainya melaksanakan salat tepat waktu secara berjamaah. Kebiasaan membaca Quran juga selalu dilakukan setiap hari sebelum memulai pembelajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Imam Bonjol yang bertujuan lebih mendekatkan mahasiswa dengan Al-Quran dan memperbaiki (*tahsin*) bacaan Quran bagi mahasiswa yang belum baik bacaan Qurannya.

Suasana memakmurkan masjid di STAI-PIQ semakin menonjol dengan banyaknya mahasiswa STAI-PIQ yang menjadi guru mengaji Quran, baik iqra, tilawah, tahfiz, dan sejenisnya. Masjid besar di sekitar kampus dipastikan menjadi pusat kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa STAI-PIQ, mulai dari menjadi takmir masjid (*Garin*), guru ngaji, sampai pengisi kegiatan masjid berupa kajian keagamaan, khususnya terkait dengan studi Al-Quran. Pemandangan menarik lain adalah maraknya mahasiswi yang menggunakan pakaian muslimah dengan "jilbab syar'i", meskipun demikian mahasiswi yang menggunakan cadar (*niqab*) masih terbilang sedikit. Sementara yang laki-laki pada umumnya berpakaian rapi, baju koko, dan berpeci. Hal yang menarik adalah meski kesan santri sangat kuat pada mereka, namun penggunaan *smart phone* sebagai alat komunikasi hampir tak terpisahkan dari mereka. Pemandangan seperti ini tampak sangat menonjol di lingkungan kampus.

Paparan di atas menggambarkan bagaimana kedua kampus ini sangat menonjol dalam menampilkan suasana ritual keagamaan (ibadah) Islamnya. Sementara itu, untuk kajian akademik keagamaan yang marak dilakukan adalah kajian intensif dalam forum-forum berbentuk *halaqah* atau yang biasa mereka sebut *liqa'*. Kajian dalam *liqa'* ini, sebagaimana diakui oleh para mahasiswa yang menjadi pesertanya, sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan komitmen keagamaan mereka. Alasan yang mereka kemukakan, kajian *liqa'* bukan hanya sekadar kajian yang bisa memberikan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter kepribadian sekaligus. Mekanisme kajian dengan peserta yang terbatas melalui bimbingan seorang *murabbi*[1] yang disegani menjadikan penanaman nilai di dalamnya semakin efektif. Oleh karena itu, sangat wajar jika banyak mahasiswa mengaku mendapat pencerahan agama yang sebenarnya melalui

[1] *Murabbi* adalah guru yang secara spesifik mendidik seseorang dengan ilmu dan akhlak dengan tujuan memperbaiki kualitas kepribadian murid-muridnya melalui proses pembelajaran yang intensif.

mekanisme *liqa'* ini. Meski civitas akademika dari kedua kampus mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler di kampus tersebut banyak, antara lain kelompok-kelompok Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) olah raga, seni dan pramuka, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ekstra seperti IMM, HMI, PMII, dan KAMMI, tetapi yang menonjol adalah kegiatan *liqa'* ini.

Suasana kampus yang terkesan islami ini sebenarnya positif dan merupakan jawaban terhadap keprihatinan berbagai pihak yang kecewa dengan pemandangan kurang Islami dari beberapa kampus dan institusi Islam. Namun, teknik pembelajaran *liqa'* yang terkesan "indoktrinatif" harus diwaspadai karena berpotensi menghalangi mahasiswa untuk memiliki wawasan keislaman yang luas, berpikir kritis, dan memiliki kepedulian sosial (kebangsaan). Hasil survei terhadap mahasiswa terkait masalah keterbukaan ini masih cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap anti demokrasi yang tinggi di UIN IB sebanyak 64% dan STAI-PIQ sebanyak 66%. Sikap ini diperkuat dengan anti Barat yang juga tinggi, yaitu di UIN IB sebanyak 74% dan STAI-PIQ sebanyak 84%. Sedangkan untuk anti agama lain, di UIN IB ditemukan sebanyak 42% dan STAI-PIQ sebanyak 54%.

Dilihat dari segi kesesuaian keahlian dengan matakuliah yang diajarkan, mayoritas dosen di UIN IB maupun di STAI-PIQ relatif sudah sesuai. Sebagai contoh, yang mengajar Al-Quran dan hadis adalah dosen lulusan Program Studi Tafsir dan Hadis, begitu pula yang mengajar Fiqh dan Ushul Fiqh diambil dari Fakultas Syari'ah dan lain sebagainya. Demikian pula kualifikasi pendidikan S2 sebagai syarat minimal pendidikan dosen sudah terpenuhi, meski demikian dosen yang sudah lulus S3 apalagi yang sudah mencapai pangkat guru besar masih sangat langka. Khusus di STAI-PIQ cukup banyak dosen lulusan Timur Tengah yang menjadi andalan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga bahasa Arab. Karena keahlian bahasa Arab inilah, beberapa di antaranya diminta mengajar dan mengembangkan pengajaran bahasa Arab di UIN IB.

Satu hal yang menarik dari dosen-dosen ini adalah karena tempat tugas utama mereka di Prodi PAI, maka tidak sedikit dari mereka mengambil S2 di bidang Pendidikan, antara lain di Universitas Negeri Padang (UNP). Untuk hal tersebut mereka beralasan karena mereka mengajar di Fakultas Tarbiyah yang notabene memiliki *core* keilmuan di bidang pendidikan, maka mereka pun harus menguasai juga ilmu pendidikan, meski tugas mengajar mereka bukan bidang pendidikan. Hal ini sesungguhnya memiliki nilai positif, karena tidak sedikit matakuliah keislaman di Prodi PAI dikaitkan juga dengan pengajarannya, sebagai contoh Pendidikan Aqidah Akhlak di SMP dan yang sejenis. Namun bila ditinjau dari segi linearitas keilmuan, hal tersebut menjadi kurang konsisten.

Dalam konteks kompetensi bahasa asing mencakup membaca teks bahasa Inggris serta berbicara bahasa Inggris dan Arab, dosen-dosen UIN IB dan STAI-PIQ yang mengaku berkemampuan baik jumlahnya di bawah 50%. Sedangkan untuk kemampuan membaca teks bahasa Arab, hanya dosen STAI-PIQ yang mengaku berkemampuan baik

mencapai 50%. Tidak satu pun dosen mengaku memiliki kemampuan bahasa Inggris maupun Arab yang sangat baik. Penulis berharap data ini semata-mata disebabkan karena *ketawadhuan* mereka, karena beberapa dosen sebenarnya memiliki kemampuan bahasa Arab yang sangat tinggi. Data ini penulis peroleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Dalam konteks keterampilan mengajar, para dosen di Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ secara umum baik. Hal ini didukung hasil survei yang mengungkapkan bahwa baik dosen UIN IB maupun STAI-PIQ terbiasa menggunakan hasil penelitian untuk bahan perkuliahan masing-masing sebanyak 63% dan 70%, meng-*update* materi dan referensi perkuliahan secara periodik sebanyak 75% dan 100%, serta seluruhnya telah mempraktikkan pembelajaran aktif.

Namun, sebagian dari pengakuan di atas seperti tentang *update* materi perkuliahan berdasarkan dokumen tidak terkonfirmasi, karena dari dokumen yang penulis peroleh tidak ditemukan adanya *update* materi tersebut baik dalam silabus maupun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat dosen. Begitu pula berdasarkan observasi kelas belum semua dosen menggunakan metode belajar aktif. Informasi dari laporan mahasiswa melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan wawancara menegaskan bahwa masih ada sebagian kecil dosen yang penguasaan materi dan kepribadiannya (seperti cara berpakaian) disorot mahasiswa.

Persepsi dosen tentang proses perkuliahan terkait pentingnya toleransi, mendiskusikan isu-isu aktual keagamaan, dan bahaya ekstremisme agama cukup tinggi di UIN IB maupun STAI-PIQ yang masing-masing sebanyak 88% dan 70%. Hal ini juga terkonfirmasi dalam survei mahasiswa yang masing-masing mencapai 70% dan 60% ke atas. Meski demikian, hasil FGD dan wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dosen yang melakukannya. Hal penting lain yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan bersikap terbuka terhadap kritik dan mendorong berpikir kritis pada mahasiswa. Untuk masalah ini, masih terjadi kesenjangan antara persepsi dosen dan mahasiswa. Menurut hasil survei, mahasiswa yang menganggap dosen mendorong berpikir kritis hanya 56% untuk UIN IB dan 60% untuk STAI-PIQ. Padahal 88% dosen UIN IB dan 100% dosen STAI-PIQ mengaku telah mendorong mahasiswanya untuk berpikir kritis. Berpikir kritis ini sangat penting agar mahasiswa jeli dalam menanggapi persoalan dan tidak mudah terprovokasi hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rendahnya penanaman kemampuan berpikir kritis mahasiswa juga dikeluhkan oleh dosen yang mengajar filsafat di UIN IB maupun STAI-PIQ. Dia merasa sebagai "*single fighter*" dalam hal mendorong mahasiswa berpikir kritis karena masih sangat sedikit dosen yang melakukannya.

Tentang penelitian dan publikasi ilmiah, sebagaimana umumnya dosen-dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dosen-dosen di UIN IB dan STAI-PIQ relatif kurang produktif. Meski semua dosen mengaku biasa melakukan penelitian, namun belum semua dosen pernah menulis buku, khususnya yang terkait dengan bidang keilmuannya. Begitu juga menulis publikasi di jurnal ilmiah. Sebenarnya ada dosen yang

dari segi keilmuan kuat dan memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, tetapi mengaku malas menulis buku maupun artikel untuk publikasi. Dosen yang aktif menulis artikel di jurnal ilmiah, lokal maupun nasional juga masih sangat langka. Bahkan untuk tulisan di jurnal internasional hampir tidak ditemukan. Sementara untuk bidang pengabdian masyarakat, sebagian besar dosen mengaku aktif di organisasi sosial keagamaan dan menyalurkan tugas pengabdian masyarakatnya di sana. Bahkan tidak sedikit dari mereka menduduki jabatan di kepengurusan.

Meski secara umum persepsi mahasiswa terhadap dosennya positif, dibuktikan dengan pengakuannya terhadap keilmuan dosen yang komprehensif, penggunaan referensi yang disarankan dosen, serta pengaruh dosen dalam ilmu keislaman. Namun, tidak ada yang menyebutkan dosen sebagai tokoh panutan. Mereka justru mengidolakan para ulama yang sering muncul di YouTube, seperti Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Hanan Attaqi, dan sebagainya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan mayoritas mahasiswa mengaku aktif bertanya masalah agama dalam grup media sosial, yakni mencapai 82% untuk UIN IB dan 86% untuk STAI-PIQ. Dan sebanyak 88% mahasiswa UIN-IB dan 90% mahasiswa STAI-PIQ juga bergabung dalam media sosial untuk berdiskusi dan menambah pengetahuan agamanya.

Melalui wawancara dan observasi diperoleh informasi sikap dan pandangan keagamaan mayoritas dosen di Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ cenderung moderat, walaupun ada sebagian kecil yang konservatif. Hal ini diperkuat dengan data survei yang menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain yang cukup tinggi, yakni sebesar 100% di UIN IB dan 90% di STAI-PIQ. Demikian pula penolakan mereka terhadap penggunaan kekerasan dalam agama yang masing-masing mencapai 100% dan 90%. Hal tersebut diperkuat lagi dengan penolakan mereka terhadap sistem *khilafah* sebanyak 100% dosen di UIN IB dan 80% dosen di STAI-PIQ serta kesesuaian Pancasila dengan ajaran Islam yang masing-masing sebanyak 100% dan 80%. Hampir semua dosen yang diwawancarai mengatakan sangat tidak setuju dengan gerakan-gerakan ekstremisme dan radikalisme keagamaan. Berulang kali disampaikan oleh beberapa informan bahwa mereka dan orang Minangkabau umumnya memiliki komitmen keagamaan yang sangat tinggi. Menurut mereka, sikap tersebut perlu dibedakan dengan radikal.

Profil Mahasiswa

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan dosen, diperoleh informasi bahwa sebagian besar mahasiswa lemah dari segi keilmuan Islam dan bahasa Arab. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah karena asal sekolah mereka mayoritas dari sekolah umum, SMA, SMK dan sejenisnya. Meski demikian, data survei menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir jumlah mahasiswa yang berasal dari sekolah keagamaan justru mengungguli sekolah umum. Asal sekolah mahasiswa UIN IB yang berasal dari pesantren dan MAN/MAS mencapai 80%. Sementara untuk STAI-PIQ, mahasiswa yang dari pesantren dan MAN/MAS sebanyak 54%.

Pengakuan bahwa mahasiswa PAI lemah dalam ilmu keislaman dan bahasa Arab ini berkali-kali disampaikan oleh dosen dan pimpinan dalam wawancara, baik di UIN Imam Bonjol maupun STAI-PIQ. Namun di STAI-PIQ, baik dosen maupun mahasiswa mengakui bahwa kekurangan pada aspek *raw input* ini dapat mereka atasi melalui kurikulum, proses pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, dosen dan mahasiswa di STAI-PIQ justru mengeluhkan kurangnya aspek pedagogis pada kurikulum mereka.

Sebagai solusi kurangnya pengetahuan keislaman dan bahasa Arab mahasiswa ini, kedua perguruan tinggi tersebut mensyaratkan hafal Al-Quran bagi lulusannya. Hal ini mengesankan seolah dengan hafal Al-Quran permasalahan lemahnya pengetahuan keislaman dan bahasa Arab dapat terselesaikan. Sementara di pihak lain, tuntutan akan kompetensi guru PAI yang berkualitas sangat mendesak karena mereka dihadapkan pada permasalahan pendidikan agama Islam yang sangat kompleks. Hal ini menjadi penting karena survei menunjukkan motif mahasiswa PAI untuk menjadi guru sangat tinggi, yaitu UIN IB sebanyak 62% dan STAI-PIQ 54%.

Kelemahan bahasa Arab mahasiswa, sebagaimana yang dikeluhkan dosen, menurut tes yang dilakukan terbukti tidak sejelek perkiraan, karena hampir 40% masuk kategori baik dan sekitar 10% sangat baik. Demikian halnya dengan pengetahuan keislaman mahasiswa yang dalam wawancara maupun FGD terlihat cukup baik. Namun, dalam aspek sikap dan keterbukaan terhadap kelompok, mazhab atau pemikiran yang berbeda masih perlu ditingkatkan. Sebagaimana dikemukakan di atas, keterbukaan dan penerimaan mahasiswa terhadap demokrasi, agama lain dan bangsa lain (Barat) juga masih sangat rendah.

Berbeda dengan dosen, pandangan dan sikap toleransi keagamaan mahasiswa Prodi PAI di UIN IB dan STAI-PIQ masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan sikap anti agama lain yang cukup tinggi di UIN IB sebanyak 42% dan di STAI-PIQ sebanyak 54% serta sikap anti demokrasi yang masing-masing sebesar 64% dan 66%. Walaupun mereka yang tidak setuju dengan penggunaan kekerasan dalam agama mencapai 92% di UIN IB dan 84% di STAI-PIQ. Namun, mahasiswa yang setuju dengan sistem *khilafah* masih sangat tinggi, yakni masing-masing mencapai 50% dan 80%.

Data survei di atas tampak inkonsisten dengan hasil FGD dan wawancara. Baik dosen maupun mahasiswa dalam pernyataan tertulis (survei) cenderung lebih berani daripada yang disampaikan melalui ungkapan lisan (wawancara dan FGD). Pada saat FGD, hampir semua mahasiswa di kedua perguruan tinggi menampakkan sikap yang sangat toleran dalam menerima perbedaan pendapat maupun kehadiran kelompok dan agama lain. Demikian pula dalam menerima Pancasila sebagai sistem kenegaraan terbaik untuk bangsa Indonesia.

Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN IB dan STAI-PIQ

Sebagaimana yang dipaparkan dalam profil di atas, Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ masih menyimpan beberapa permasalahan untuk dapat menjadi Prodi yang ideal yang dapat memproduksi guru profesional dan moderat yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralis terutama dari segi agama dan etnis. Berikut adalah beberapa permasalahan tersebut.

Kurikulum

Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang memiliki visi "menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Indonesia". Visi tersebut diturunkan dalam misi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan akademik secara berkualitas dalam bidang Pendidikan Agama Islam untuk menghasilkan guru yang profesional.
2) Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
3) Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan lanjutan, seminar, dan lokakarya.
4) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif.
5) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memecahkan masalah dalam bidang pendidikan agama Islam.
6) Mengadakan jaringan kerja sama dengan lembaga yang relevan, baik lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang tridharma perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.
7) Memberikan pelayanan akademis dan administratif yang prima bagi sivitas akademika (Ikhwan *et. al*., 2015).

Selain visi dan misi, didirikannya Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di UIN IB bertujuan:

1) Menghasilkan guru pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan religius, emosional, kompetensi, dan *skill* sehingga menjadi guru profesional sebagai pendidik agama Islam di sekolah/madrasah, lembaga pendidikan dan pendidikan keagamaan lainnya.
2) Menghasilkan guru pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan religius, emosional, kompetensi, dan *skill* sehingga menjadi guru profesional sebagai pemimpin/pengelola pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah, lembaga pendidikan dan pendidikan keagamaan lainnya.

3) Menghasilkan guru pendidikan agama Islam yang memiliki keunggulan religius, emosional, kompetensi, dan *skill* sehingga menjadi guru profesional sebagai pendidik agama Islam dan penggerak kegiatan keagamaan di masyarakat (Ikhwan *et. al*., 2015).

Visi, misi maupun tujuan Prodi PAI di atas terlihat standar sebagaimana visi, misi dan tujuan Prodi PAI yang lain di PTKI di Indonesia. Kekhasan institusi belum terlihat tereksplorasi. Secara teoretis, seyogianya visi suatu institusi selain merupakan sesuatu yang ideal yang dicita-citakan oleh institusi tersebut, sekaligus juga mengekspresikan yang menjadi keistimewaan dan kekhususan dari institusi tersebut.

Terkait dengan profil lulusan, secara eksplisit tidak ada uraian yang menjelaskan tentang hal tersebut dalam dokumen yang diperoleh di UIN IB. Uraian berikut adalah informasi yang berkaitan profil lulusan yang tertangkap secara implisit dari beberapa sumber yang bentuknya mirip dengan kompetensi lulusan. Sejatinya, dalam Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang merujuk KKNI dan SN Dikti sebagaimana yang berlaku sekarang, Profil Lulusan selain harus eksplisit juga menjadi elemen pokok dalam kurikulum, karena menjadi titik tolak sebuah pengembangan kurikulum.

Berangkat dari kurikulum yang ada di Prodi PAI UIN IB sekarang, lulusan Prodi PAI di samping diharapkan menjadi guru mata pelajaran PAI, mereka juga diharapkan dapat (1) memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat; (2) menjadi pemimpin organisasi keagamaan; (3) Menumbuhkan budaya agama yang positif; (4) menjadi kepala sekolah/ madrasah; dan (5) menjadi pengawas pendidikan agama Islam (Ikhwan *et. al*., 2015).

Uraian tentang profil dan kompetensi lulusan di atas meski bisa jadi juga dimiliki oleh Prodi PAI di tempat lain, namun dalam konteks Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya nomor 1, 2, dan 3 di atas seakan menegaskan bahwa lulusan PAI diharapkan tidak hanya berprofesi sebagaimana keilmuan intinya, yaitu pendidikan, tetapi juga menjadi ahli dan pemimpin agama di masyarakat. Dengan profil seperti ini seyogianya lulusan Prodi PAI UIN IB merupakan ahli-ahli agama yang unggul.

Ekspektasi sebagaimana yang tergambar dalam profil dan kompetensi lulusan di atas tampak kurang didukung oleh kurikulum yang berlaku di UIN IB sekarang. Dari dokumen kurikulum yang didapat Peneliti, tampak Prodi PAI UIN IB masih menggunakan model kurikulum konvensional, hal ini sebagaimana tergambar dari adanya pengelompokan mata kuliah menjadi beberapa kelompok:

1) Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).
2) Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK).
3) Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB).
4) Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB).
5) Kelompok mata kuliah berkehidupan masyarakat (MBB).(Ikhwan *et al*., 2015: 67).

Terkait muatan matakuliah dalam kurikulum UIN IB dikemukakan oleh salah seorang pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, bahwa persentase

muatan keislaman (profesional) dan muatan pedagogis masing-masing 50%. Hal tersebut merupakan kebijakan universitas, fakultas, dan prodi (Re, wawancara, 18 September 2018). Pernyataan yang sama dikemukakan oleh salah seorang dosen senior Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol. Ia mengatakan bahwa muatan keagamaan dan muatan pedagogis dalam kurikulum Prodi PAI sama besarnya, yaitu sama-sama 50 persen (RH, wawancara, 18 September 2018). Pernyataan ini tentu hanya berupa gambaran kasar dari struktur kurikulum yang ada karena sebagaimana diketahui kurikulum PAI selain berisi muatan keislaman (profesional) dan muatan pedagogik (ilmu mengajar), juga ada muatan matakuliah penunjang atau ilmu bantu.

Sementara, Prodi PAI STAI-PIQ memiliki visi yang singkat dan mudah diingat yaitu "Terkemuka dalam ilmu pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran". Sedangkan misinya sebagaimana misi prodi lain pada umumnya yaitu mencakup tiga hal dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

1) Mengelola pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan agama Islam yang bermutu dan berkualitas.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang Pendidikan Agama Islam.
3) Mengadakan pengabdian kepada masyarakat terutama di bidang Pendidikan Agama Islam (Tim Penyusun Kurikulum STAI-PIQ Sumatera Barat).

Selain visi dan misi, didirikannya Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI-PIQ bertujuan:

1) Menghasilkan sarjana yang ulama profesional dalam bidang Pendidikan Agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran.
2) Menghasilkan sarjana yang mengusai ilmu pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi modern.
3) Menghasilkan ilmu pendidikan agama Islam melalui penelitian
4) Mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis penalaran dan hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam (Tim Penyusun Kurikulum STAI-PIQ Sumatera Barat, 2016).

Khusus tujuan nomor satu sangat menarik karena mencerminkan keunggulan STAI-PIQ sebagai Perguruan Tinggi yang mengkhususkan diri pada pengembangan ilmu Al-Quran.

Sebagaimana di Prodi PAI UIN IB, di Prodi PAI STAI-PIQ juga tidak dijumpai uraian eksplisit tentang profil lulusan. Sementara terkait kompetensi Lulusan Prodi PAI STAI-PIQ diharapkan: (1) Memahami wawasan pendidikan secara komprehensif dan integral serta cinta ilmu pengetahuan; (2) Menguasai ilmu-ilmu pendidikan Islam dan metodologi pembelajarannya; (3) Memiliki sikap profesionalisme, demokratis, responsif, inovatif, kreatif, dan keteladanan dalam melaksanakan tugas; (4) Terampil menerapkan teori-teori kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam; (5)

Memiliki keterampilan di bidang ilmu-ilmu Al-Quran (*Tahfiz*, *Nagham*, dan *Qiraat*); dan (6) Memiliki komitmen keislaman dalam bidang pendidikan agama Islam (Tim Penyusun Kurikulum STAI-PIQ Sumatera Barat, 2016). Dari uraian tentang kompetensi lulusan di atas, nomor 5 sangat mencerminkan kekhasan Perguruan Tinggi STAI-PIQ, sekaligus menjadi nilai tambah lulusan Prodi PAI STAI-PIQ dibanding Prodi yang sama di UIN IB. Sebagai konsekuensi dari kompetensi lulusannya ini, maka muatan kurikulum STAI-PIQ sangat kaya dengan muatan Profesional, khususnya Ilmu Al Qur'an.

Selain komponen profesional yang lebih menonjol, terlihat pula dengan jelas bahwa PAI STAI-PIQ Sumatera Barat sangat menekankan tahfiz. Ada 10 SKS untuk mata kuliah tahfiz. Penekanan pada Tahfiz Al-Quran ini dibenarkan oleh salah seorang pimpinan Prodi PAI STAI-PIQ Sumatera Barat. Ia menyebutkan kampusnya sangat menekankan pada pengkajian Al-Quran. Ada keharusan menghafal (tahfiz Al-Quran) sebanyak 6 juz bagi mahasiswa PAI (Ma, wawancara, 19 September 2018).

Dengan muatan materi keislaman, khususnya ilmu Al-Quran yang sangat kaya, kurikulum Prodi PAI STAI-PIQ sudah sejalan dengan tujuan institusinya. Namun, jika dikaitkan dengan kebutuhan guru agama Islam akan pengetahuan keislaman yang komprehensif, masih perlu disempurnakan terutama dari sisi variasi bidang keilmuan dan kedalaman pembahasannya.

Berdasarkan dokumen kurikulum yang penulis peroleh, komposisi muatan matakuliah yang ada dalam struktur kurikulum Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ adalah sebagai berikut: untuk UIN IB muatan komponen profesional sebanyak 87 sks, pedagogis 45 sks dan komponen pendukung 28 sks (jumlah 160 sks minus KKN, PPL, dan Skripsi). Sementara STAI-PIQ, komponen profesional 80 sks, pedagogis 56 sks dan komponen pendukung sebanyak 38 sks (jumlah 174 sks minus KKN, PPL, dan Skripsi) (Borang Akreditasi UIN IB dan STAI-PIQ).

Meskipun ditinjau dari segi komposisi muatan mata kuliah profesional lebih banyak dari pedagogis, namun dilihat dari segi materinya masih banyak yang berisi muatan-muatan materi keislaman di sekolah atau madrasah. Dengan demikian, secara kedalaman masih menjadi masalah. Begitu pula dari segi variasi mata kuliah keislaman yang masih didominasi oleh ilmu-ilmu Al-Quran khususnya tahfiz menyebabkan berkurangnya porsi untuk keilmuan keislaman yang lain yang lebih strategis seperti tentang Aliran dan Pemikiran Islam Kontemporer, Islam dan Politik, Islam dan Budaya Lokal, dan lain sebagainya. Begitu pula dalam komponen ilmu pendukung, masih perlu didesain ulang komposisinya dengan memasukkan ilmu-ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa terhadap kemajemukan agama dan budaya di Indonesia, serta ilmu-ilmu yang mendukung sikap-sikap yang toleran dan inklusif.

Pola Rekrutmen Mahasiswa Baru

Baik Prodi PAI UIN Imam Bonjol maupun STAI-PIQ mengakui bahwa input mahasiswa secara umum kurang menggembirakan. Sebenarnya prodi telah memprioritaskan *raw*

input dari madrasah dan pesantren, namun 'serbuan' *raw input* dari unsur non-madrasah dan non-pesantren tidak dapat dielakkan. Alasan prodi memprioritaskan *raw input* dari madrasah dan pesantren adalah agar lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan karena telah memiliki dasar-dasar keislaman yang cukup dan mampu membaca kitab berbahasa Arab.

Bagi UIN Imam Bonjol sistem penerimaan mahasiswa baru yang berlaku saat ini menyisakan masalah tersendiri. Jalur penerimaan mahasiswa melalui SPMB PTKIN dan Mandiri memang tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan madrasah dan pesantren saja, sehingga pendaftar dari sekolah umum juga banyak. Bahkan prodi pernah mengusulkan syarat penampilan fisik (*performance)* untuk calon guru, misal tinggi badan harus sekian, tapi usulan itu diprotes karena dianggap melanggar HAM (Re, wawancara, 18 September 2018). Dengan longgarnya *raw input* mahasiswa baru, maka mahasiswa tidak tersaring secara ketat sesuai kehendak prodi. Akibatnya pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan indikasi penurunan kualitas *raw input*. Ketika ditanya tentang hal ini, beberapa dosen mengaku merasakan penurunan tersebut.

> Merasakan bu, apalagi setelah menjadi UIN. Penggemarnya sekarang banyak termasuk PAI, sehingga bukan dari MAN atau MAS saja, tetapi banyak dari umum. Jangankan untuk bahasa Arab, membaca Qur'an saja mereka susah, seperti tahsin, tilawah. Sehingga kita seperti mengajar anak SMP lagi, karena itu input kita perlu diperhatikan lagi (RH, wawancara, 18, September 2018).

Para dosen merasa prihatin dengan kualitas input. Mendapatkan input yang cakap berbahasa Arab semacam keinginan yang terlalu tinggi. Faktanya yang didapat bukan mahasiswa baru yang demikian, namun kebanyakan sangat awam dalam keislaman dan bahkan sekadar kemampuan membaca Al-Quran saja masih sangat lemah. Salah seorang dosen mengaku sangat prihatin karena dalam ujian masuk Baca Tulis Al-Quran, hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan baik (Ro, wawancara, 18, September 2018).

Fenomena menurunnya kualitas input dirasakan sejak lima tahun terakhir. Penurunan tersebut terjadi karena masuknya mahasiswa baru dari pendidikan menengah non-keagamaan, hal tersebut lagi-lagi karena sistem *screening* yang lemah jika menggunakan SPMB PTKIN. Seorang dosen menuturkan:

> Iya, saya kewalahan menghadapi mahasiswa, terutama lima tahun terakhir ini, semakin ke sini semakin begitu. Apalagi dengan SPMB PTKIN, itu efeknya kita tidak bisa menyeleksi seperti dulu ada tes lisan. Apalagi terkait PAI yang akan jadi guru, kita tidak tahu fisik calon input yang akan kita terima. Di Prodi Bahasa Arab juga begitu. Input yang masuk beragam. Apalagi yang masuk dari SMK (Sab, wawancara, 18 September 2018).

Namun demikian, tidak semua dosen bersikap pesimis. Sebagian tidak mempermasalahkan latar belakang sekolah menengah mahasiswa baru. Menurutnya beberapa mahasiswa baru dari sekolah umum juga memiliki keagamaan yang bagus. Bahkan mereka yang merasa kurang bagus justru menunjukkan semangat lebih tinggi

untuk menggenjot kualitas keislamannya setelah menjadi mahasiswa. Hal itu ditempuh dengan membentuk kelompok belajar Al-Quran atas inisiatif mahasiswa sendiri (Sas, wawancara, 20 September 2018).

Masalah input tersebut telah menjadi *concern* bagi pengelola Fakultas hingga prodi. Beberapa langkah juga telah dilakukan. Solusi yang diambil sementara ini bersifat kuratif, artinya lebih fokus bagaimana meng-*upgrade* kemampuan keislaman dan bahasa Arab bagi mahasiswa sudah yang terlanjur diterima. Sedangkan masalah yang sifatnya preventif, misalnya memperbarui sistem seleksi atau *screening* mahasiswa baru, belum dilakukan.

> Input PAI sekarang banyak dari sekolah umum, kalau dulu banyak dari sekolah agama. Untuk mengatasinya sekarang di PAI sudah ada Mata Kuliah Tahsin Al-Quran yang masuk kurikulum. Penguatan Bahasa Arab ada dari UIN, dari Pusat Bahasa secara umum untuk mahasiswa UIN. Upaya dari PAI sendiri sampai sekarang belum ada, hanya peninjauan kurikulum seperti memasukkan Tahsin Al-Quran tadi. (Syaf, wawancara, 18, September 2018).

Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan harapan terjadi keseimbangan antara penguasaan konten keagamaan dengan non keagamaan. Selanjutnya dijelaskan:

> Bagaimana agar mahasiswa PAI itu di samping ilmu-ilmu kependidikannya bagus, juga menguasai materi keagamaan dengan bagus. Karena hari ini faktanya mahasiswa dipertanyakan ilmu-ilmu agamanya seperti baca tulis Al-Quran, termasuk mahasiswa PAI lemah dalam hal ini. Pedagogis di PAI terlalu dominan dan konten keagamaannya masih kurang, karena itu harus diperkuat (Syaf, wawancara September 2018).

Dengan alasan itulah PAI UIN Imam Bonjol berusaha lebih serius dalam pengembangan keislaman.

Sama halnya dengan UIN Imam Bonjol, STAI-PIQ juga memiliki *raw input* yang beragam dan menerima lulusan sekolah umum (SMA dan SMK). Bahkan calon mahasiswa yang kurang terampil dalam membaca Al-Quran masih tetap dapat diterima, namun ada perlakuan khusus. Perbedaan yang cukup mendasar adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru, dimana STAI-PIQ lebih leluasa membuat kriteria karena tidak tergabung dalam mekanisme umum yang disebut SPMB PTKIN.

Seleksi mahasiswa baru ditempuh dengan dua jenis ujian. Pertama, ujian tertulis untuk pengetahuan umum, ujian kedua adalah tahfiz dan baca Quran. Sebagian mahasiswa yang mendaftar ada yang sudah hafal Qur'an, ada yang baru satu juz, dan ada yang hanya hafal beberapa surat pendek saja. Mahasiswa yang disebut terakhir ini pun masih dapat diterima. Adapun yang ditolak adalah mereka yang betul-betul belum mampu membaca Quran. Namun seandainya yang tidak mampu membaca ini benar-benar ingin kuliah, maka diharuskan mengikuti pendidikan baca Al-Quran selama satu tahun baru kemudian mengikuti perkuliahan. Untuk kemampuan berbahasa Arab, STAI-PIQ tidak memberikan ujian kepada calon mahasiswa baru. Namun ketika sudah masuk kuliah, mahasiswa dapat mengikuti beberapa program pengembangan bahasa.

Berbanding terbalik dengan UIN Imam Bonjol yang merasakan dominasi penguasaan pedagogis dan lemahnya muatan agama, STAI-PIQ justru mengaku kurang dalam hal pedagogis dan cukup kuat dalam muatan keislamannya. Menurut salah satu dosen, alumni STAI-PIQ lebih cocok sebagai pengajar tahfiz: "... sehingga cocoknya alumni menjadi guru tahfiz karena hafalan Qurannya bagus" (Mar, wawancara 19 September 2018). Sedangkan dalam ilmu pendidikan dan ilmu yang melatih ketajaman berpikir lainnya dirasa masih kurang.

> Karena muatan lokal kita banyak, seperti *naghom* dan lain-lain, maka penguasaan ilmu-ilmu pedagogis agak lemah, maka perlu ditingkatkan porsi keguruannya dalam rangka penguatan PAI. Kemampuan alumni kita dalam mengajar selama ini baik. (Mar, wawancara 19 September 2018).

Kecenderungan tersebut juga dirasakan mahasiswa. Bahkan mahasiswa merasa komposisinya cukup kontras, yaitu 70% keagamaan dan 30% pedagogis (Chan, FGD, 22 September 2018). Lemahnya unsur pedagogis disebabkan oleh terlalu banyaknya muatan lokal (ilmu Al-Quran, termasuk tahfiz) sehingga mengurangi porsi untuk mata kuliah umum.

Proses Pembelajaran

Dengan input yang kurang ideal maka proses pembelajaran tidak dapat memasang target capaian pembelajaran yang optimal. Beberapa perkuliahan harus didesain lebih mudah agar mahasiswa, terutama yang kurang mampu berbahasa Arab, dapat mengikuti. Misalnya dengan cara membebaskan penelusuran literatur, jika tidak mampu memahami teks asli yang berbahasa Arab maka mahasiswa diperbolehkan menggunakan versi terjemahan. Salah seorang dosen mengungkapkan: "Sumber berbahasa Arab masih kita longgarkan, dan mahasiswa lebih banyak memilih sumber berbahasa Inggris." (Zal, wawancara, 20 September 2018).

Hal ini menunjukkan pelunakan sistem agar proses pembelajaran dapat berjalan meski tidak menggunakan sumber yang benar-benar primer. Hanya beberapa mata kuliah saja yang masih 'memaksa' mahasiswa menggunakan sumber primer berbahasa Arab, misalnya untuk mata kuliah hadis. Dosen mata kuliah hadis menegaskan:

> Bagi saya terkait mata kuliah Hadis, yang penting mereka bisa membacanya, mengartikannya, menjelaskannya, apa contohnya, paham mereka, perkenalkan dengan kitab-kitab Hadis, jangan hanya mengenal namanya saja. Misalnya tunjukkan kitab Hadis karya Imam Bukhari itu, dan sebagainya, agar mereka mau belajar meskipun mereka belum mampu membacanya. Mereka harus kenal dulu, agar mau belajar. Lalu diminta untuk menerjemahkannya (Sab, wawancara, 18 September 2018).

Meskipun cukup *strict* dalam penggunaan literatur, pada mata kuliah Hadis ini juga masih dilakukan pelunakan, misalnya dengan tidak banyak memberi tugas individu tetapi tugas kelompok supaya mahasiswa yang kurang kemampuan bahasa Arabnya dapat terbantu oleh anggota kelompok yang cakap berbahasa Arab.

Memperhatikan kemampuan mahasiswa dan kondisi proses pembelajaran yang demikian, cukup berat untuk mencapai target menghasilkan lulusan PAI dengan kemampuan keislaman yang kuat. Kemampuan mengakses literatur asli berbahasa Arab cukup rendah sehingga akses untuk mendapatkan khazanah keislaman yang autentik menjadi semakin sulit, sebab sumber yang diakses mayoritas berbahasa Indonesia. Sementara itu, sumber-sumber bacaan keislaman yang berbahasa Indonesia masih didominasi tulisan keislaman yang berpotensi intoleran. Menyadari hal tersebut, beberapa dosen memiliki inisiatif untuk memasukkan pesan-pesan Islam moderat dalam pembelajaran yang mereka laksanakan.

Upaya memasukkan asupan Islam moderat melalui perkuliahan tersebut misalnya dengan membahas isu-isu kontemporer dalam perkuliahannya.

> ... ada sedikit-sedikit. Misalnya saya berani memasukkan isu-isu aktual tentang gender dan selalu disampaikan kepada mahasiswa. Demikian juga tentang HAM, Multikultural. ….Supaya mahasiswa tidak terjebak, tidak salah. Karena ada juga mahasiswa yang tidak tahu sama sekali dengan isu-isu terkini (Ros, wawancara 18 September 2018).

Hal tersebut disampaikan oleh dosen Metodologi Studi Islam. Dosen lain juga melakukan hal yang sama. Dosen mata kuliah ilmu Hadis menjelaskan:

> Misalnya Hadis tentang jihad. Jihad itu luas pengertiannya, sungguh-sungguh dalam berbagai hal. Berbuat baik pada orang tua, dan sebagainya. Kita bukan dalam kondisi perang, negara kita damai. Tidak ada satu kelompok yang sedang membahayakan kita. Juga ada aparat yang menangani. Jadi tidak tepat jika ada bom bunuh diri atau berjihad, kalau di Palestina mungkin, karena dihadapkan pada persoalan yang tidak ada lagi pilihan lain, itu jalan satu-satunya. Juga di Afganistan. Kita di sini ada pilihan, kita bisa berjihad dengan pena, menjadi guru juga berjihad karena anak bangsa selamat dengan itu (Sab, wawancara, 18 September 2018).

Dengan demikian, beberapa dosen telah berupaya memasukkan isu-isu Islam moderat di dalam perkuliahan mereka.

Akan tetapi ada indikasi bahwa sebagian dosen tidak terlalu serius untuk menyisipkan pesan Islam moderat dan deradikalisasi: Ketika ditanya sering tidaknya menyinggung wacana Islam kontemporer, seperti cadar, agama dan kekerasan, radikalisme terorisme, dosen menjawab:

> Tergantung, jika ada materi terkait itu, maka sangat saya tekankan. Jika tidak *nyambung* ya tidak, paling sedikit-sedikit ketika menguraikan contoh mungkin. ….. Ketika ada titik singgung, saya kaitkan dengan isu-isu itu, tetapi sengaja membahasnya meski tidak ada kaitannya, juga tidak (RH, wawancara, 18 September 2018).

Pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa dosen tidak merencanakan sedari awal untuk menyinggung tema-tema kontemporer termasuk masalah radikalisme. Dosen membahas isu kontemporer hanya ketika ada diskusi yang berkembang ke arah tersebut. Ketika dilakukan *crosscheck* di kalangan mahasiswa terkait asupan isu-isu kontemporer perkuliahan, mahasiswa menyatakan bahwa beberapa dosen memang melakukan upaya

tersebut. Akan tetapi terkait isu terorisme dan radikalisme masih jarang disinggung, meski anjuran untuk hidup toleran dalam perbedaan kadang disampaikan dalam mata kuliah Perbandingan Agama. Salah seorang mahasiswa berpendapat:

> Ada, seperti isu kontemporer dalam fikih, seperti aborsi, bayi tabung, salat di pesawat. Soal radikalisme, terorisme, tidak ada. Tetapi dalam Mata Kuliah Perbandingan Agama ada dibahas bagaimana kita semestinya berada dalam keragaman dan perbedaan. Kita jangan melihat perbedaan tetapi lebih kepada persamaan. Kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain (Ang, FGD, 22 September 2018).

Artinya upaya untuk memasukkan tema-tema Islam moderat juga belum dilaksanakan secara serius. Dapat dikatakan, belum menjadi program terencana di kalangan dosen, apalagi di level kebijakan universitas. Padahal upaya ini dapat dengan mudah dilakukan jika dosen memahami pentingnya memasukkan *softskills* dalam pembelajaran. Semestinya pihak Prodi, Fakultas, dan Universitas memiliki kebijakan untuk menangkal potensi radikalisme di kampus melalui Proses pembelajaran ini. Meskipun mereka cukup optimis dengan kemampuan budaya Padang yang kritis dan tahan (*resilience*) terhadap ideologi radikal, namun antisipasi sejak dini tetap diperlukan, apalagi sebagian mahasiswa mengaku pernah gabung HTI, artinya tidak dapat disangkal bahwa potensi radikalisme masih ada di UIN Imam Bonjol.

Strategi yang digunakan dalam proses kegiatan belajar selain ceramah, juga digunakan metode diskusi. Meski demikian dosen yang mengajak mahasiswa berpikir secara mendalam sangat jarang, yang pengakuannya terkonfirmasi mahasiswa, hanya yang mengajar mata kuliah filsafat. Informasi ini cukup memprihatinkan, jika dikaitkan dengan era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Lebih-lebih hampir semua mahasiswa cukup aktif dalam mengakses informasi dari dunia maya. Data survei mahasiswa yang sering menggunakan mesin pencari di internet untuk menambah pengetahuan agama menunjukkan UIN IB 62% dan STAI-PIQ 54%. Begitu pula yang bergabung dengan media sosial untuk menambah pengetahuan keagamaan, UIN IB sebanyak 88% dan STAI-PIQ 90%. Dengan demikian, harus diwaspadai potensi mereka untuk terpengaruh berita-berita hoaks dan sejenisnya sangat besar jika tidak dibekali dan dilatih untuk berpikir kritis.

Di STAI-PIQ, kegiatan belajar mengajar sangat mengutamakan pengembangan wawasan keislaman, dengan kecenderungannya pada tahfiz. Dengan kecenderungan tersebut, STAI-PIQ terkesan memiliki tradisi akademik yang tekstualis, sehingga memunculkan pertanyaan apakah tradisi berpikir kontekstualis memiliki ruang eksistensi yang sama di STAI-PIQ. Misalnya terkait isu kontemporer dan radikalisme, apakah muatan Islam moderat cukup signifikan diajarkan dalam perkuliahan? Sejauh penelusuran peneliti, wajah Islam moderat belum benar-benar tampak di STAI-PIQ. Meski demikian, pihak pengelola sudah merasa memiliki upaya untuk menampilkan wajah Islam moderat dan menangkal radikalisme. Seorang pimpinan prodi menuturkan:

> Antisipasi tentu tetap ada. Dalam kegiatan mahasiswa baru, kita mendatangkan Kapolda, dari Pertahanan Negara untuk memberi masukan tentang cinta NKRI. Mereka diundang

untuk penguatan wawasan kebangsaan. Dalam kegiatan Muharram ada juga dari Polda, Kodim, BNN, dan Badan Pertahanan Negara. (Mar, wawancara, 19 September 2018).

Namun apakah agenda insidental tersebut dirasa cukup untuk mengajak mahasiswa menjadi moderat-kontekstualis? Sementara selama beberapa semester mahasiswa bergelut dengan cara beragama tekstualis. Dosen-dosen agama di PAI juga banyak diambil dari dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) yang merupakan alumni Timur Tengah. Sementara mata kuliah yang isinya mengarah pada nasionalisme hanya mata kuliah Pancasila dan Ilmu Sosial & Budaya Dasar.

Meski demikian dalam kegiatan belajar mengajar, menurut mahasiswa, para dosen telah memasukkan tema-tema seputar wawasan kebangsaan.

Ya, terutama dalam mata kuliah terkait, seperti Kewarganegaraan, Pancasila. Misalnya disampaikan tentang bahaya radikalisme, bagaimana peraturan kenegaraan, dsb. Ada juga kuliah Fiqh Kontemporer membahas hal-hal yang belum jelas hukumnya, termasuk juga soal bom bunuh diri. Dengan demikian mahasiswa bisa mengetahui hal-hal yang salah seperti itu (Al, FGD, 22 September 2018).

Meski dalam survei ditemukan tingkat toleransi mahasiswa yang cukup mengkhawatirkan, namun dalam FGD, pandangan mahasiswa terkait toleransi dan Islam moderat cukup baik. Salah seorang mahasiswa mengungkapkan keberpihakannya pada Pancasila dan NKRI

Saya kira Islam yang sudah jalan di Indonesia ini sudah bagus. Adapun banyaknya organisasi Islam, bukan untuk perpecahan atau anti NKRI. Kehadirannya adalah untuk bisa saling berbagi, saling menghormati pendapat masing-masing. Hal ini sudah sejak awal terbangun, meski kemudian ada sedikit yang ekstrem. Kelompok ini belum paham betul tentang Islam yang sesungguhnya. Negara ini dibangun oleh pahlawan yakni para ulama. Terkait Pancasila, awalnya Islamlah yang dirujuk oleh Pancasila. Karena itu Islam yang cocok di Indonesia, ya Islam yang seperti sekarang ini.(NH, FGD, 22 September 2018).

Pandangan tersebut cukup inklusif dan moderat. Namun belum dapat ditentukan apakah pandangan tersebut merata di semua mahasiswa atau tidak. Pasalnya, ada pula mahasiswa juga menunjukkan potensi pola pikir *takfiri*.

Di antara sekian banyak organisasi yang menyatakan Islam di Indonesia, ada yang melenceng. Misalnya Syiah yang mempraktikkan cara salat yang lain. Meski menyebut diri Islam, tetapi salah dalam memahami Islam itu sendiri. Syiah bukan Islam, Islam itu satu, meski mazhabnya berbeda. Misalnya di Timur Tengah Maliki atau Hambali, di Indonesia beda lagi. Tentang *khilafah*, sebenarnya perbedaan itu sangat indah. Kita mestinya bisa berbeda pendapat. Menurut saya, Islam yang harus dipraktikkan itu adalah Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tentang kelompok yang disebut fanatik, menurut saya karena mereka baru belajar sunnah, atau merasa nyaman dengan mengamalkan sunnah seperti itu. Karena itu kita harus toleran terhadap mereka (Al, FGD, 22 September 2018).

Meskipun ada ajakan bersikap toleran dalam pernyataan tersebut, namun diksi *takfiri* cukup terasa, misalnya ketika ia menyebut "syiah bukan Islam".

Melihat daftar mata kuliah dari kurikulum PAI di STAI-PIQ, indikasi ke arah pemahaman kontekstualis dan moderat tidak cukup menjanjikan. Justru sebaliknya, dosen yang berpandangan kritis dan moderat merasa dirinya sebagai *single fighter*. Ini artinya Islam moderat dan kritis belum menjadi *mainstream* di lingkungan STAI-PIQ. Ketika ditanya tentang keaktifannya membendung radikalisme, seorang dosen mengakui:

> (Saya) meluruskan cara berpikir, meski terkadang jadi *single fighter*, tetapi tidak ada yang menghalang-halangi. Lembaga tidak ada mengharuskan kepada pemikiran tertentu." (YM, Wawancara, 20 September 2018)

Meskipun tidak ada paksaan mengikuti alur pikir tertentu, namun penting bagi STAI-PIQ untuk berupaya lebih aktif mempromosikan Islam moderat dalam pembelajaran mereka mengingat potensi ke arah pemikiran tekstualis cukup besar. Meski demikian, potensi untuk terbukanya pemikiran moderat juga masih ada. Setidaknya banyak yang masih sepakat bahwa terorisme adalah cara yang salah.

> Saya tidak sependapat dengan tindakan terorisme. Rasul SAW mencontohkan bagaimana berlaku lemah lembut terhadap musuh, sebagai wujud dari Islam Rahmatan lil alamin. Ketika beliau diludahi, justru didatangi ketika yang meludahi jatuh sakit. Karena itu, para teroris tersebut meski mengaku Islam, tetapi bukan Islam. Jika pun Islam, mereka tidak paham Islam bahkan sudah memburukkan nama Islam sendiri (If, FGD, 22 September 2018).

Dengan demikian, dalam konteks pendidikan di Padang, dimensi etis-religius mendapat perhatian lebih daripada dimensi rasional-kritis. Kesimpulan ini diperkuat dengan contoh kasus berikut: mahasiswa menyoroti dosennya sebagai pribadi yang tidak pantas dicontoh. Alasannya adalah cara berpakaian sang dosen. Mahasiswa menyayangkan adanya dosen agama yang mengajar tidak sesuai dengan syariat. Dosen wanita mengajar agama tetapi tidak menggunakan kaus kaki padahal batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Ketika naik motor, pakaiannya naik ke atas (auratnya terbuka karena betis dapat tersingkap). Hal seperti ini diperhatikan oleh mahasiswa dan menjadi alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa dosen tersebut tidak bisa dijadikan *role model*. Bagi mahasiswa kualifikasi *role model* ditentukan oleh dimensi etis-religius tanpa mempertimbangkan apakah dosen yang bersangkutan secara akademik unggul atau tidak.

Ketika ditelusuri siapa *role-model* dan idola mahasiswa, ditemukan kesan bahwa mahasiswa cukup bangga dengan dosen-dosen bergelar *Lc.* karena mereka alumni Timur Tengah (An, FGD, 22 September 2018). Hal ini terkonfirmasi dengan daftar 'ustaz *online*' yang paling disukai mahasiswa, seperti Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Siauw, Khalid Basalamah, dan lainnya yang juga memiliki corak yang kurang lebih sama. Sedangkan mereka yang tergolong ilmuwan murni, intelektual moderat, tidak menjadi bagian dari daftar idola mereka.

Jika cara mahasiswa mencari *role model* hanya didasarkan pada etis-religius saja, maka ini merupakan indikasi bahwa dimensi rasional-kritis belum menjadi nilai

yang dijunjung tinggi. Situasi seperti ini cukup memprihatinkan bagi sebuah lembaga akademik.

Penetrasi Sosial dan Kegiatan Ekstrakurikuler

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Imam Bonjol belum menampakkan upaya deradikalisasi yang benar-benar serius melalui Proses Pembelajaran. Namun upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemantapan kemampuan keislaman tetap terus diupayakan. Hal ini juga penting mengingat kecakapan dalam kompetensi keislaman dan bahasa Arab diyakini mampu mengurangi risiko terpapar radikalisme.

Upaya yang dilakukan UIN Imam Bonjol dalam menguatkan keislaman mahasiswanya di antaranya ditempuh dengan cara memberikan bimbingan Al-Quran dan kemudian hasilnya dibuktikan dengan Piagam Tilawah. Piagam tersebut merupakan syarat untuk dapat lulus dari UIN Imam Bonjol. Ada pula program Bahasa Arab dan Inggris intensif. Bagi semua mahasiswa baru UIN diprogramkan selama dua semester untuk peningkatan bahasa oleh Pusat Bahasa, melalui *placement test.* Mahasiswa yang diperkuat terutama yang sangat lemah, meski semua mahasiswa harus ikut program ini.

Peningkatan bahasa Arab dilakukan oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB) Bahasa Arab selama dua periode. Demikian juga peningkatan bahasa Inggris. UPB mengeluarkan sertifikat untuk semua jurusan. Mahasiswa PAI juga diberikan kuliah Qiraatul Kutub, ada wacana bagi yang akan lulus harus tahfiz 1 juz. Ada semacam bimbingan baca tulis Al-Quran khusus, non SKS oleh prodi. Di tingkat UIN ada LDQ (Lembaga Darul Qur'an) untuk membenahi baca Quran (RH, wawancara, 18, September 2018). Diakui bahwa memang belum ada kebijakan khusus untuk mengatasi kelemahan berbahasa Arab, tetapi ada anjuran misalnya Tahfiz Quran yang sudah ditindaklanjuti, meski belum di-SK-kan. Wisuda kemarin ada mahasiswa Tadris Matematika yang ditunda wisudanya karena belum hafal satu juz (Syaf, wawancara, 20 September 2018).

Terkait dengan pengembangan wawasan keislaman mahasiswa, Prodi PAI dan FTK mempercayakan pada kegiatan Ekstra kurikuler yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dimotori oleh Kelompok Studi Islam (KSI) dengan berbagai kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus. Salah satu bentuk kegiatan yang menonjol dari KSI ini adalah berupa bimbingan keagamaan yang disebut *liqa'*.

Tidak kalah dengan UIN Imam Bonjol, STAI-PIQ mensyaratkan mahasiswa lulus sudah dengan hafalan enam juz. Juz yang dihafal pun tidak sembarang juz, namun ditentukan oleh dosen.

> Di STAI-PIQ lebih pada Al-Qurannya. Ada keharusan tahfiz enam juz bagi mahasiswa PAI dan IQT, juz-nya ditentukan dosen, selain juz tertentu yang harus dihafal. Bahasa lainnya, kita ingin membumikan Al-Quran (Mar, wawancara, 19 September 2018).

Untuk mencapai target tersebut, STAI-PIQ memberikan porsi matakuliah tahfiz sebanyak empat jam per minggu, sama banyaknya dengan praktik mengajar. Selain itu

disediakan pula asrama Ma'had Ali. Ini merupakan program unggulan dimana mahasiswa dapat belajar dan praktik berbahasa Arab dan menghafal Al-Quran di asrama. Saat ini ada sekitar 20 orang mahasiswanya dari sekitar 450 orang total mahasiswa STAI-PIQ. Ada pula PAI program khusus TTQ (*Tahfizh wa Tafhim Al-Quran*) yang mengharuskan hafiz tiga puluh juz.

Penguatan keagamaan di STAI-PIQ dilakukan sejak hari pertama seseorang menjadi mahasiswa baru. Dalam acara *Muqayyam* (semacam pekan orientasi mahasiswa baru) dilakukan berbagai kegiatan sebagai upaya peningkatan bidang keagamaan mahasiswa, khususnya minat baca Al-Quran, seperti *tahsin*, *tahfiz*, dan lain-lain.

Di luar kegiatan sebagai mahasiswa baru, mahasiswa punya banyak kegiatan penguatan keagamaan, termasuk dalam bentuk lingkar studi kecil atau yang sering disebut *halaqah* atau kegiatan *liqa'*. Dalam *liqa*' mahasiswa merasakan ikatan kekeluargaan dan saling tukar ilmu, terutama dari mereka yang berasal dari pesantren kepada yang berasal dari sekolah umum (Ans, FGD, 18, 22 September 2018). Kegiatan *liqa'* ini di STAI-PIQ masuk dalam program yang dikelola oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah (UKMD) Tazkiyah. Unit ini merupakan bagian dari organisasi intra kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab, antara lain dalam kurikulum ada Bahasa Arab 1-4, masing-masing 2 SKS. Bahasa Inggris 4 SKS. Bahasa Arab di sini cenderung tidak ada masalah. Kemampuan membaca buku sumber asli berbahasa Arab pada umumnya mahasiswa dapat melakukannya. Ada pula mata kuliah praktik membaca kitab yakni Qiraatul Kutub. Ada pula mata kuliah pendukung tahfiz seperti ilmu tajwid, ilmu qiraat, dan nagham. Untuk semakin menambah keterampilan mahasiswa, terdapat kegiatan ekstrakurikuler di STAI-PIQ di antaranya adalah Kaligrafi, Tilawah, Qira'at Sab'ah, Qasidah/Paduan Suara, dan Bela Diri Tapak Suci.

Cukup menarik jika BEM di STAI-PIQ ini justru menjadi salah satu tempat mahasiswa belajar bahasa Arab. Sementara BEM di kampus-kampus lain umumnya justru menjadi persemaian gagasan demokrasi, politik, dan moderatisme, corak BEM di STAI-PIQ semakin membuktikan betapa kuatnya orientasi keislaman di kampus tersebut.

Dengan intensifnya penguatan keislaman ini, maka wajar jika STAI-PIQ menghasilkan lulusan yang kuat dengan konten keislamannya khususnya ilmu Al-Quran, meskipun cukup disayangkan karena agak lemah untuk ilmu-ilmu kritis dan pedagogisnya.

Pola Penyelesaikan Masalah di UIN IB dan STAI-PIQ

Jika tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa handal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menguasai ilmu keislaman dan bahasa Arab? Maka jawabannya adalah paling tidak untuk saat ini belum cukup handal. Berbagai problem yang menjadi

penghambat tercapainya tujuan tersebut sudah dikemukakan di atas, yaitu masalah kurikulum yang tidak proporsional dan representatif untuk mencetak guru profesional dan moderat. Masalah rekrutmen mahasiswa yang tidak mampu menyaring bibit-bibit unggul. Begitu pula proses pembelajaran cenderung monoton, kurang dinamis, dan tidak mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis. Dan terakhir, masalah kuatnya penetrasi sosial yang sarat muatan islamisme, yang merembes masuk ke dalam rongga-rongga organ-organ internal kampus yang melemah karena tak mampu menjawab kompleksitas masalah yang ada dalam sistem produksi guru PAI.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di kedua prodi ini sudah dipaparkan di atas. Namun, belum tampak adanya solusi yang konkret dan sistematis untuk mengatasinya. Solusi yang dilakukan baik di UIN IB maupun STAI-PIQ masih terkesan spontan, parsial serta individual. Akibatnya, pemecahan masalah belum dapat menyentuh akar permasalahannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemangku kepentingan terkendala dalam mencari solusinya, antara lain belum adanya kesepakatan dari seluruh pimpinan untuk menganggap masalah ini sebagai masalah yang mendesak untuk dicarikan solusi. Terkadang universitas masih memberi prioritas pengembangan kepada pembukaan fakultas baru ketimbang meningkatkan kualitas fakultas dan prodi yang sudah ada. Sementara kebijakan keuangan bersifat sentralistik diatur oleh universitas. Di lain pihak, kebijakan rekrutmen mahasiswa juga bukan sepenuhnya wewenang prodi maupun fakultas, melainkan menjadi kebijakan universitas. Hal seperti ini sebagaimana ditemukan di UIN IB.

Di STAI-PIQ penyebabnya relatif sama sebagaimana di UIN IB, yaitu masalah kurikulum, pola rekrutmen mahasiswa, proses pembelajaran dan pengaruh sosial. Meski secara birokrasi sebagai lembaga swasta STAI-PIQ relatif lebih leluasa dan fleksibel dalam membuat regulasi dan kebijakan, namun yang terjadi belum ada solusi yang betul-betul tepat dalam memecahkan problem yang dihadapi.

Solusi-solusi yang dilakukan belum bersifat terencana dan sistematis, sehingga hasilnya masih belum optimal. Sebagai contoh, dalam rangka mengoptimalkan usaha meningkatkan kemampuan keislaman dan bahasa Arab ini, berhubung harapan terhadap proses pendidikan formal terkendala banyak masalah, maka perhatian pun beralih pada bidang ekstrakurikuler. Berbagai bimbingan belajar, kelompok diskusi, dan kajian digalakkan dalam rangka membantu peningkatan kualitas dalam dua hal tersebut. Salah satu forum kajian yang tampak cukup berhasil dalam menarik minat mahasiswa adalah sebuah forum Kajian Studi Islam (KSI). KSI ini selain ada di kampus UIN IB dan STAI-PIQ masuk juga ke kampus lainnya seperti UNP dan yang lainnya dengan menggunakan nama yang berbeda. (Fad, Wawancara, 28 November 2018). Pertanyaannya, sudah tepatkah pilihan pemangku kepentingan untuk menyerahkan sepenuhnya pemecahan masalah kekurangmampuan keislaman dan bahasa Arab ini ke badan dan organisasi ekstra sebagaimana KSI?

Islamisme di UIN IB dan STAI-PIQ: Bisakah menjadi solusi?

Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini bahwa fenomena Islamisme di Sumatera Barat pada umumnya dan kota Padang pada khususnya sangat kuat. Fenomena Sumatera Barat dan kota Padang sebagai kota santri tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang kebijakan-kebijakannya mewarnai kesan Islamis Sumatera Barat dan Padang. Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat yang pro masyarakat Sumatera Barat dan Padang yang Islamis sehingga semakin memantapkan suasana Islamis tersebut. Keadaan ini seolah menjadi faktor pendorong (*push factor*) bagi UIN IB dan STAI-PIQ. Kondisi tersebut diperkuat dengan kebutuhan sivitas akademika dari kedua Perguruan Tinggi ini yang merasakan perlunya memperkuat studi keislaman, khususnya terkait dengan pengamalan nilai-nilai keislaman yang menjadi faktor penarik (*pull factor*). Karena adanya *push factor* dan *pull factor* inilah kemudian memotivasi tumbuh suburnya kajian-kajian keislaman, mulai dari kajian yang sifatnya umum maupun yang lebih intensif sebagaimana dilakukan di dalam *halaqah* atau *liqa'*.

Jika dilihat dari aktivitas gerakan keagamaan yang islamis dan non-islamis, maka Sumatera Barat dan kota Padang pada umumnya serta UIN IB dan STAI-PIQ pada khususnya, sangat didominasi aktivitas keagamaan gerakan Islamis. Dengan kata lain, gerakan sosial keagamaan yang *mainstream* di sini adalah gerakan keagamaan Islamis. Gerakan-gerakan sosial keagamaan lain, termasuk organisasi pemuda dan mahasiswanya seperti HMI, IMM, dan PMII masuk pada kelompok non-mainstream. Karena itu, wajarlah jika sebagian anggota dari organisasi ekstra seperti HMI, IMM, dan PMII ini juga banyak memiliki keanggotaan dobel dengan menjadi anggota gerakan yang *mainstream* ini. Karena faktor inilah maka kukuhlah dukungan pimpinan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya dekanat dan Prodi PAI, terhadap gerakan *mainstream* ini karena dianggap mendapat dukungan dari berbagai golongan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kontribusi gerakan keagamaan islamis ini sangat nyata dalam meningkatkan komitmen keagamaan mahasiswa Prodi PAI dan prodi lain di kedua perguruan tinggi tersebut. Tanpa bantuan mereka, secara empiris hal ini sulit bisa dilakukan oleh internal kampus sendiri, karena pendekatan pembelajarannya yang bersifat formal.

Hal yang menarik lagi dari fenomena islamisme ini, di samping para mahasiswa yang sangat sungguh-sungguh dalam melakukan kajian Quran dan keagamaan lainnya, mereka pun sangat melek teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak sedikit dari mereka aktif dalam beberapa media sosial. Sebagai konsekuensinya, mereka pun banyak terpengaruh narasi-narasi keislaman yang kerap muncul di media sosial dan internet.

Islamisme di kampus berkembang dengan cukup subur. Betapa tidak, di UIN IB paham Islamisme masuk lewat kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), khususnya bagian Kajian Keislaman yang dikenal dengan nama Kajian Studi Islam (KSI). Di STAI-PIQ, Islamisme masuk melalui Lembaga Dakwah Mahasiswa yang bernama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tazkiyah. KSI

dan UKMD Tazkiyah ini aktif mengelola kajian Keislaman serta *training* perkaderan yang berjenjang mulai tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif mengelola UKM ini mengaku bahwa fokus kegiatan mereka lebih ke bidang pendidikan (tarbiyah), bukan politik. Oleh karena itu, mereka menyebut kelompoknya dengan Jamaah Tarbiyah.

Sebagaimana di kampus-kampus lain, khususnya PTKI, kelompok ini dikenal memiliki disiplin organisasi yang tinggi. Mereka pantang berbicara sesuatu yang mereka tidak pahami betul, lebih-lebih informasi tentang kelompoknya. Jika mereka ditanya tentang sesuatu hal yang mereka ragu akan jawabannya yang pasti, mereka akan menyarankan untuk bertanya langsung pada pemimpinnya jika terkait masalah organisasi atau kepada *murabbi*-nya jika terkait dengan paham kegamaan. Mereka secara umum berpenampilan sangat sopan baik dalam berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Mereka juga sangat khusuk dalam beribadah. Salat sunat, puasa Senin-Kamis, mengaji, dan menghafal Quran merupakan kegiatan rutin mereka. Dalam bergaul, mereka pun sangat berhati-hati, mereka hanya boleh bertatap muka dengan lain jenis hanya di forum-forum yang dianggap oleh mereka darurat saja. Untuk forum-forum yang mereka selenggarakan sendiri, mereka yang berlainan jenis sebisa mungkin tidak bercampur dalam satu ruangan yang sama, atau paling tidak dihalangi tabir. Jika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan, mereka senantiasa konsultasikan dengan *murabbi*-nya. Mereka mengakui *murabbi*-nya bagaikan orangtua mereka sendiri. Bahkan kadang ada yang mengaku lebih dari sekadar orang tua. Oleh karena itulah mereka senantiasa mengikuti petuah sang *murabbi*.

Mekanisme seperti kontrol informasi dari sang *murabbi* menjadi salah satu faktor efektifitas perkaderan mereka. Dalam konteks penanaman nilai keislaman tentu hal ini sangat positif, namun yang perlu diwaspadai adalah adanya sikap kurang kritis dalam menerima ajaran dan kurang terbuka terhadap pemikiran lainnya.

Kembali pada permasalahan pokok yang dihadapi Prodi PAI, yaitu perlunya peningkatan kualitas lulusan dalam rangka menangkal paham keagamaan radikal melalui penguasaan keislaman dan bahasa Arab yang komprehensif, maka jika KSI dan UKMD Tazkiyah akan dijadikan salah satu sarana solusinya, maka mereka perlu bersikap lebih terbuka dalam hal kajian dan penerimaan terhadap eksistensi kelompok lain yang berbeda. Jika tidak, Prodi PAI hanya bisa keluar dari satu masalah, namun masuk dalam jebakan masalah yang baru. Dari aspek peningkatan komitmen keislaman, mungkin bisa dicapai, namun bisa jadi malah kontra produktif dalam upaya menghasilkan guru profesional dan moderat. Bagai peribahasa mengatakan keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut buaya.

Catatan Penutup: Menatap Masa Depan Prodi PAI

Berkaitan dengan problem utama yang dihadapi Prodi PAI baik di UIN IB maupun STAI-PIQ, penulis merekomendasikan beberapa solusi sebagai berikut:

1) Redesain Kurikulum yang bersifat menyeluruh, dengan menggunakan pola Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang merujuk KKNI dan SN Dikti.

2) Memperbaiki sistem Rekrutmen mahasiswa baru yang menjamin tersaringnya calon-calon mahasiswa yang unggul.

3) Melakukan kegiatan *Capacity Building* bagi dosen-dosen dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar, khususnya kemampuan untuk mendorong pembelajaran yang dinamis dan kritis.

4) Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Kewaspadaan perlu ditingkatkan dalam mengantisipasi masuknya benih-benih paham yang bermuatan ekstremisme dan radikalisme.

Rekomendasi di atas dalam pelaksanaannya mengandaikan beberapa catatan di bawah ini.

1) Permasalahan yang dihadapi Prodi PAI UIN IB dan STAI-PIQ bisa jadi bukan permasalahan yang unik, melainkan juga permasalahan yang dihadapi oleh Prodi lain di PTKI. Namun karena Prodi PAI punya tugas memproduksi guru agama Islam, maka keberadaannya menjadi sangat strategis. Karena posisinya yang sangat strategis inilah, maka seyogianya perhatian pimpinan Perguruan Tinggi juga diarahkan ke prodi ini, tentu dengan tidak mengabaikan keberadaan prodi yang lainnya. Jika tidak demikian, maka dampaknya akan berimbas pada perguruan tinggi yang bersangkutan, bahkan bisa sampai pada masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Oleh karena itu, maka upaya untuk solusinya harus bersifat komprehensif, melibatkan seluruh civitas akademika bahkan pimpinan perguruan tinggi. Sebagaimana terlihat dalam permasalahan di atas bahwa usaha solusi tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak.

2) Dalam rangka mencari solusi ini pula, seyogianya pengelola juga belajar dari pengalaman yang dilakukan prodi/perguruan tinggi lain yang sudah maju. Kajian yang serius dengan mengundang para ahli terkait juga harus dilakukan supaya langkah yang diambil benar-benar komprehensif secara teoretis maupun empiris. Dari proses seperti ini diharapkan solusi yang dibuat dapat terbebas dari adanya *vested interest* yang sering malah menjadi penghalang dan menuntaskan masalah.

3) Keterbukaan pengelola sangat dituntut untuk dapat menghasilkan solusi yang benar-benar teruji. Pelibatan *outsider* dalam proses ini, jangan dianggap sebagai intervensi atau ikut capur urusan dapur orang, melainkan harus dipandang sebagai kepedulian terhadap masa depan Prodi PAI yang imbasnya sampai pada masa depan bangsa dan negara Indonesia. *Wallahu'alam bi al showab*

Referensi

Amar, Raichul, *et al.* 2016. *IAIN Imam Bonjol 1966-2016.* Padang: Imam Bonjol Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2008-2017.* https://sumbar.bps.go.id/quickMap.html. Diakses 3 November 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2011.* Padang: Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut: Provinsi Sumatera Barat.* Padang: Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Kota Padang dalam Angka 2016.* Padang: Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat.

Hakim, Bashori A. 2012. "Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 11 (2): 102-115.

Hasani, Ismail (ed.). 2009. *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Ikhwan, *et al.* 2015. *Buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang.* Padang: Imam Bonjol Press.

Mardiansyah, Andri. 2014. *Di Ranah Minang Gereja Dilarang Didirikan.* 27 Januari 2014. http://sejuk.org/2014/01/27/menyigi-rumah-ibadah-kaum-minoritas-di-sumatera-barat-part-ii/. Diakses 1 November 2018.

Noorbani, M. Agus. 2014. "Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera Barat." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 3 (1): 173-186.

Rahmat, Aulia. tt. *Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi.* tanpa tahun. https://media.neliti.com/media/publications/23743-ID-reaktualisasi-nilai-Islam-dalam-budaya-minangkabau-melalui-kebijakan-desentralis.pdf. Diakses 1 November 2018.

Tim Penyusun Kurikulum STAI-PIQ Sumatera Barat. 2016. *Pedoman Akademik STAI Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera barat 2016.* Padang: STAI-PIQ.

Tim Penyusun Profil STAI-PIQ Sumatera Barat. 2006. *Dua Puluh Lima Tahun AIQ/STIQ/STAI-PIQ Sumatera Barat "Mengibarkan Panji-Panji Al-Quran".* Padang: STAI-PIQ Sumatera Barat.

Wibowo, Sigit. 2018. *Kasus Penolakan Pembakaran Mayat. 23 Maret 2018.* http://setara-institute.org/kasus-penolakan-pembakaran-mayat-bagi-komunitas-keturunan-tionghoa-di-padang/. Diakses 3 November 2018.

Zainal. 2014. "Gerakan Islamis di Sumatera Barat Pasca Orde Baru." *MIQOT*, .38 (2).

4

MODERATISME YANG MELEMAH, ISLAMISME YANG MENGUAT

Produksi Guru Agama Islam di Lampung

Abdur Rozaki

Pendahuluan

Jika merujuk pada peristiwa Talangsari 1989 sebagai jejak awal arus Islamisme di Lampung, maka arus itu sepertinya hingga kini tak pernah padam. Bibit-bibit Islamisme masih terus tumbuh dan bersemai melalui jejaring para aktor, institusi sosial dan media digital, yang kerapkali dalam momen-momen tertentu menampakkan diri melalui narasi dan ekspresi politik pada sejumlah aksi "bela Islam". Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di 32 provinsi di Indonesia memperkuat konteks ini, bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat tertinggi keempat sebagai daerah potensial radikalisme, setelah Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Tentu potensi radikalisme ini memiliki ikatan yang erat dengan arus Islamisme yang mengusung agenda politik, mulai dari aspirasi pemberlakuan syariat Islam, hasrat obsesif atas ide kemurnian agama sampai terwujudnya sistem kekhalifahan Islam versi kelompok politik tertentu sebagai pengusungnya.

Arus Islamisme yang kini menguat di Provinsi Lampung, seolah membuka kembali lembaran kelam saat Orde Baru memukul keras gerakan Usroh ketika menolak pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal. Para pengikut Usroh pimpinan Ustaz Abdullah Sungkar di Jawa banyak yang melarikan diri ke luar Jawa, diantara mereka seperti Nur Hidayat melarikan diri ke Lampung dan bergabung dengan seorang guru ngaji yang saleh, yakni Warsidi. Warsidi yang semula hanya seorang guru ngaji biasa, menjadi sangat ditakuti setelah menampung para pengikut jaringan Usroh yang bertali temali dengan jaringan Darul Islam- Tentara Islam Indonesia (DI-TII) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Hal inilah yang memberikan efek kekhawatiran rezim Orde Baru sehingga mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Hendropriyono untuk meringkus gerakan Warsidi dengan pendekatan kekerasan. Warsidi dan para pengikutnya tewas dan beberapa orang lainnya dipenjara tanpa melalui proses pengadilan. Peristiwa yang terjadi pada 7 Februari 1989 lama mengalami senyap, namun masih terus dikenang dan memberi jejak arus Islamisme di Lampung yang kini apinya terus mengalami kontekstualisasi gerakan, dengan cara bermetamorfosis dalam bentuk gerakan Islam baru.

Sebagaimana diulas oleh Bassam Tibi (2012), *Islamism and Islam*, bahwasannya Islamisme adalah politik keagamaan yang kerapkali memiliki perbedaan dengan Islam sebagai keyakinan. Islamisme menurut Tibi diturunkan dari tafsir politis atas Islam, tidak didasarkan pada iman religius tetapi lebih pada penerapan ideologis atas agama di ranah politik. Islamisme memiliki ciri-ciri reaksioner atas tatanan politik dunia, menolak demokrasi, syariatisasi hukum, sangat obsesif atas gerakan pemurnian agama, penggunaan kekerasan dan memeluk pandangan antisemitisme. Arus Islamisme semacam ini kini menjadi fenomena global, dan dalam kancah politik Indonesia kontemporer makin menguat beriringan dengan kontestasi politik elektoral. Politisasi identitas keagamaan menjadi instrumen mobilisasi politik untuk menjatuhkan lawan dan meraih kekuasaan, sebagaimana di dalam Pilkada Jakarta. Dinamika politik keagamaan semacam ini juga berhembus di wilayah seperti Lampung yang memiliki jejak historis islamisme.

Meski sejauh ini islamisme dengan pendekatan jihadi belum tampak kuat di Lampung, dinamikannya masih berupa pendekatan keagamaan "Haraki-Tarbawi" dan Salafi sebagaimana hasil penelitian Abdul Qohar, dosen UIN Raden Intan Lampung. Gerakan Tarbawi dan Salafi ini tidak saja berkembang melalui berdirinya pesantren-pesantren di lingkungan masyarakat, seperti Ulul Albab, Al-Mujtama', Khilafatul Muslimin, Darul Fattah dan lainnya, namun juga mulai berkembang kuat di lingkungan kampus, baik melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) intra kampus dan juga ekstra kampus. Pembentukan budaya Islamisme di kampus besar sebagaimana yang berkembang di UNILA, motor penggeraknya adalah UKM Birrohmah, untuk UIN Raden Intan Lampung, yakni UKM Badan Pembinaan Dakwah (Bapenda) dan UKM Al Ittihad. Mereka juga membuat Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang menghimpun para penggerak dakwah kampus di Lampung sebagai organisasi ekstra melengkapi organisasi sealiran yang ada sebelumnya, yakni KAMMI. Organisasi

kemahasiswaan lainnya yang tumbuh mengibarkan semangat Salafi adalah Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) Lampung yang anggotanya terdiri dari para mahasiswa lintas kampus yang terdapat di Lampung.

Organisasi-organisasi kemahasiswaan yang memiliki nafas Islamisme di Lampung makin subur dan mampu mengairahkan para mahasiswa dalam membangun keterlibatan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara *online* dan *offline* sangat dinamis dan mampu menjadi *mainstream* baru dinamika kemahasiswaan menggeser dominasi organisasi ekstra lainnya seperti PMII dan HMI. Mereka saling membangun jejaring yang kuat dengan aktivisme gerakan Islam di tingkat nasional dan daerah, baik melalui pendekatan kegiatan seminar, pengajian, pengkaderan sampai pada aksi politik "Bela Islam".

Tulisan ini akan mengurai, bagaimana arus Islamisme itu merambah masuk ke dalam lingkungan kampus? khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di dua Universitas, yakni UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML). Seperti apakah kompetensi para mahasiswa dan dosen Prodi PAI di kedua universitas ini dalam merespon arus islamisme? Pola relasi seperti apakah yang membentuk pandangan Islamisme mereka? Tulisan ini menggunakan pendekatan survei, observasi dan wawancara serta pelacakan dokumen yang terkait dengan tema riset untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Visi, Misi, dan Proses Pembelajaran

Cikal bakal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan dokumen borang Prodi PAI, genealoginya merujuk pada saat Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) berdiri pada tahun 1961. YKIL merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial khususnya umat Islam di Lampung. Tujuan Yayasan ini untuk menyelenggarakan berdirinya rumah-rumah peribadatan dan pendidikan Islam. Tahun 1963 YKIL menghimpun para alim ulama' untuk melakukan musyawarah di Metro, ibu kota Lampung Tengah yang hasilnya memutuskan pembukaan Fakultas Tarbiyah di Teluk Betung di bawah santunan dan asuhan YKIL. Fakultas ini kemudian menjadi bagian dari IAIN Raden Intan Lampung yang dua tahun terakhir ini menjadi UIN Raden Intan Lampung. Kini fakultas ini bermetamorfosis menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sudah 9 sosok yang memimpin sebagai Dekan, yakni: Syeh H. Syamsuddin Abd. Mukti, LML (sejak persiapan – 31 Desember 1979);Drs. H. A. Kadir Hanafi (1 Januari 1980-30 Juli 1986); Drs. H. Tayar Yusuf (31 Juuli 1986-11 Oktober 1990); Dra. Hj. Zahar Maskanah (12 Oktober 1990-4 November 1994); Drs. Kulyubi Mahsan (Juli 1994-Juli 1998); Prof. Yurnalis Etek, M.Pd. (1999 – 2003); Prof. Dr. H. Sulthan Sahrir, MA. (2004-2007); Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd (2007-2011 dan 2011-2015); Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. (2015-2019).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, termasuk fakultas favorit nomor dua terbanyak dari jumlah peminat di UIN Raden Intan Lampung. Khusus

untuk Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang sangat signifikan. Pada tahun 2012/2013 menerima sebanyak 200 mahasiswa, tahun 2013/2014 menerima 250 mahasiswa, tahun 2014/2015 menerima 290 mahasiswa, tahun 2015/2016 menerima 300 mahasiswa, tahun 2016/2017 menerima 400 mahasiswa. Jika ditotal dari sepanjang tahun tersebut terdapat 1.416 mahasiswa Prodi PAI. Untuk angkatan tahun 2018, Prodi PAI menerima mahasiswa sebanyak 360 orang mahasiswa.

Hasil survei Cisform terkait latar belakang mahasiswa Prodi PAI di UIN Raden Intan Lampung 50% berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, 30% berasal dari SMA/SMK/MA pesantren, dan 20% MAN/MAS.

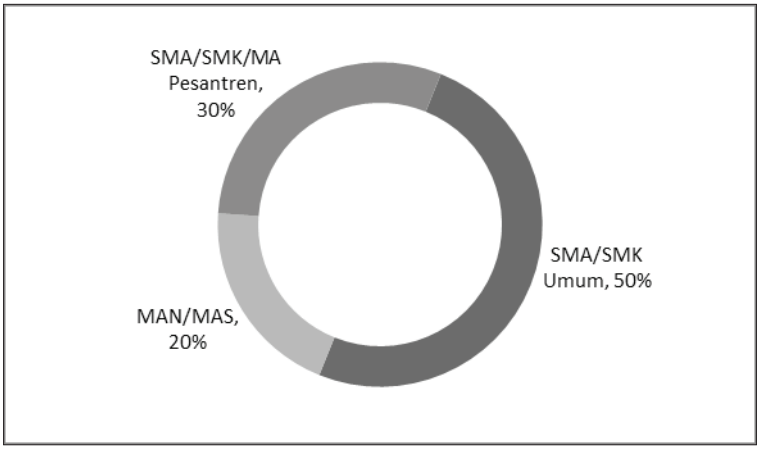

Gambar 4.1: Asal Sekolah Mahasiswa PAI UIN Raden Intan

Kekuatan sumber daya manusia (SDM), persentase dosen yang berpendidikan S2 dan S3 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebesar 100%. Persentase yang ada sangat mencukupi kebutuhan tenaga akademik sesuai dengan rasio jumlah mahasiswa dengan dosen 1:47,89. Adapun kualifikasi dosen semuanya S2 dan S3. Pengembangan tenaga dosen tetap dilakukan dengan studi lanjut pada program Doktor. Khusus untuk Prodi PAI memiliki dosen sejumlah 45 orang, dengan rincian lulusan S2 sebanyak 18 orang dan S3 sebanyak 27 orang. Sedangkan jika dilihat dari analisis jabatan, untuk Guru Besar sebanyak 6 orang, Lektor Kepala 24 orang, Lektor 14 orang dan asisten ahli 1 orang. Kini status Prodi PAI memiliki akreditasi A BAN PT yang dikeluarkan pada bulan April 2018. Sudah tiga periode ini Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung memperoleh akreditasi A BAN PT.

Visi Prodi PAI dapat dilihat rujukannya pula dengan visi fakultas dan universitas. Visi Prodi ini kemudian diterjemahkan ke dalam misi sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat

yang integratif dalam bidang Pendidikan Agama Islam. (2) Menyelenggarakan kegiatan praktikum pendidikan yang memberikan penguatan pada kompetensi keguruan dan *life skill* (kecakapan hidup) keagamaan dan akhlak mulia serta mampu berkompetitif di tingkat Nasional. (3) Mengembangkan penerapan model-model pembelajaran berbasis *Information, Communication and Technology* (ICT) dan pemanfaatannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (4) Mengembangkan kegiatan mimbar akademik mahasiswa dan dosen, yang melibatkan alumni dan *stakeholder* melalui kegiatan diskusi, seminar, workshop, pelatihan, temu alumni atau lainnya, yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara komprehensif.

Visi Program Studi PAI	Visi Fakultas Tarbiyah & Keguruan	Visi UIN Raden Intan
Terwujudnya Program Studi yang unggul dalam melahirkan Sarjana Pendidikan Islam yang berakhlak mulia, profesional serta mampu berkompetitif di tingkat nasional pada tahun 2023	Terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keIslaman yang integratif dan holistik di tingkat nasional pada tahun 2028	Terwujudnya UIN Raden Intan Lampung sebagai Rujukan International dalam mengembangkan Ilmu keislaman, Integratif-Multidisipliner, berwawasan lingkungan tahun 2035

Gambar 4.2: Tabel Sinergi Visi Prodi, Fakultas dan Universitas
(Sumber: Borang Akreditas Prodi PAI, 2018)

Sedangkan Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), dengan merujuk situs Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, sejarah berdirinya didasarkan pada amanah persyarikatan Muhammadiyah, yang selama ini memiliki komitmen pengembangan amal usaha di bidang pendidikan. Keberadaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Lampung sebelumnya tersebar di luar kota Bandar Lampung. Kondisi ini membuat pengurus dan simpatisan Muhammadiyah saling bersinergi untuk mewujudkan berdirinya Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Bandar Lampung. Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Periode 1985-1990 kemudian membentuk TIM Asistensi Diktilitbang yang terdiri atas: Dr. Madrie, M.Sc. (Ketua), Drs. Buchari Kifli (Sekretaris), dan para anggota: Drs. Hi. Thabrani Dris, Dr. Subian, M. Y. Syamsi. Tim inilah yang mendampingi PWM dengan tugas pokok membantu PWM dalam pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Lampung (UML). Melalui koordinasi tim Asistensi ini, juga membentuk satuan-satuan tugas (Satgas) untuk mempersiapkan studi kelayakan dan keperluan lainnya.

Tim ini kemudian mengadakan pertemuan dengan Kopertis Wilayah II, yang menghasilkan pembentukan tim Pra evaluasi unit/Jurusan dalam lingkungan Universitas

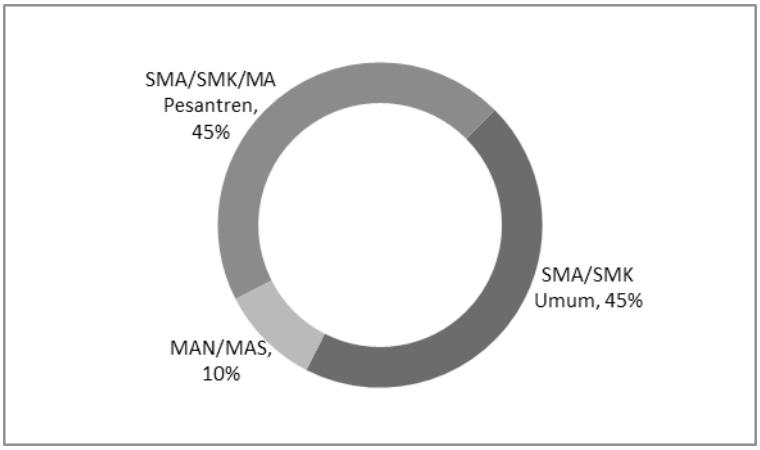

Gambar 4.3: Asal Sekolah Mahasiswa PAI UML

Muhammadiyah Lampung berdasarkan surat Ketua Koordinator Kopertis Wilayah II Nomor: 0760/TSE/VI/Kop. II/87 tanggal 18 Juni 1987 tentang susunan kepengurusan yang terdiri dari: Penasehat: Ir. Buchori Rachman, M.Sc. (Koordinator Kopertis Wilayah II) dan Prof. Dr. R. Margono Slamet (Rektor UNILA); Pengawas: Drs. Edwar Sianipar (Sekretaris Pelaksana Kopertis), dan Dr. Bambang Sumitro (Pembantu Rektor I Unila). Adapun Tim Pelaksana, Ketua: Drs. Sudrajat, M.Pd. Sekretaris: Ir. Siti Sujalmi MS. Anggota: Dra. Adhita BS, Drs. A. Kadir, MS., Drs. Syukri Saleh, Drs. Hi. Thabrani Dris.

Hasil pertemuan dari tim pra evaluasi, secara umum sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Baru di Kopertis Wilayah II Palembang Nomor: Ko-II/D/78, persyaratan untuk berdirinya Universitas Muhammadiyah Lampung telah terpenuhi. Hasil tim tersebut di atas dituangkan dalam rapat bersama pada tanggal 4 Agustus 1987 di Universitas Muhammadiyah Lampung Gedung Menengah antara Ketua Kopertis Wilayah II dengan unsur-unsur Universitas Lampung dan Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II dinyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) diizinkan untuk menyelenggarakan kegiatan akademik untuk: Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Agam Islam. Tindak lanjut dari pernyataan tersebut, kemudian dituangkan dalam surat Nomor 1087/BL.03.02/Kop.II/87 tanggal 6 Agustus 1987 dan diterima pada tanggal 13 Agustus 1987 di Universitas Muhammadiyah Lampung, secara resmi izin telah memulai pelaksanaan kegiatan akademik tahun 1987/1988. Sampai dengan tahun 2018, UML memiliki tujuh prodi, yakni: ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, psikologi, teknik elektro, pendidikan agama Islam, pendidikan luar biasa, pendidikan matematika.

UML kini memiliki 1.123 jumlah mahasiswa, dengan komposisi dosen jabatan akademik sebagaimana berikut, Asisten Ahli Madya: 65; Lektor: 39; Lektor Kepala: 42;

Guru Besar: 2 (Sosiologi, Pendidikan), Jumlah: 148. Sedangkan kapasitas dosen berdasar jenjang pendidikan, Dosen lulusan S1: 71; Dosen lulusan S2: 62; Dosen S3: 4; Dosen sedang S2: 4; Dosen sedang S3: 7; Bidang ilmu Dosen S3/Kandidat Doktor: Hadis, Supervisi & Evaluasi Pendidikan, Psikologi, Pendidikan, Kurikulum, PAI, Teknologi Pendidikan, Bimbingan Konseling, Komunikasi.

Untuk Prodi PAI di UML mulai berdiri sejak tanggal 24 April 1987, dengan Ijin Akte Notaris No. 183 tanggal 24 April 1987 & Surat Kopertis Wil. II No. 1087/ BL.03.02/Kep.II/87 tanggal 6 Agustus 1987. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang asal sekolah mahasiswa PAI UML, yakni yang berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK sebanyak 45%, SMK/SMA/MA Pesantren sebesar 45% dan MAN/MAS sebesar 10%.

Komposisi antara yang berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK dengan SMAN/ SMA/MA Pesantren berimbang, yakni sebesar 45%, hal ini menunjukkan bahwa peminat PAI di UML sangat dinamis. Daya tarik UML tidak saja dari kalangan sekolah berbasis pesantren, namun juga sekolah umum.

Kemudian seperti apakah arah pandu penyelenggaraan Prodi PAI di UML? Arah pandu pelaksanaan Prodi PAI di UML dapat dilihat pada visi dan misi sebagaimana Gambar 4.4.

Visi:	**Misi :**
Unggul dalam menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak mulia pada tahun 2020.	1) Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dalam ilmu PAI, baik teoretis maupun praktis dengan memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pelajaran PAI. 2) Melaksanakan penelitian di bidang PAI secara komprehensif dan berkelanjutan, 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan landasan yang berakhlakul karimah, 4) Melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi dari dalam negeri dan luar negeri, 5) Mengamalkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dalam menjunjung tinggi nilai karakter kebenaran, kejujuran dan keadilan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Gambar 4.4: Tabel Visi dan Misi Prodi PAI UML

Visi dan misi di atas memberikan titik tekan pada aspek profesionalitas dan akhlak mulia dalam menghasilkan guru PAI dengan ciri khas kemuhammadiyahan dalam pengembangan karakter keislaman. Dengan memperhatikan visi dan misi dari kedua universitas di atas, makin tampak jelas arah pandu di dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai nilai-nilai

di dalam tri dharma perguruan tinggi. Visi misi ini tentu terlihat secara lebih jelas lagi seperti proses dalam melahirkan para calon guru PAI yang unggul dan profesional, maka perlu menelusuri kurikulum yang terdapat di dalamnya. Secara umum, kurikulum Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung hampir tidak jauh berbeda dengan Prodi PAI UML, pembedanya pada kurikulum Prodi PAI UML yakni terdapat materi kemuhammadiyahan karena hal itu sebagai bagian dari identitas organisasi yang harus diinternalisasi pula oleh setiap mahasiswa yang menjadi peserta pendidikan di Universitas Muhammadiyah Lampung.

Dengan menelusuri dan menelaah secara lebih saksama kurikulum Prodi PAI, tampak terlihat bahwa fokus utama prodi ini memang menyiapkan kapasitas guru PAI yang hanya mendampingi peserta didik level atau jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Muatan kurikulum sangat dominan muatan materi keislaman dasar dibandingkan keislaman pemikiran dan aspek pedagogis untuk pembelajaran peserta didik jenjang sekolah dasar, menengah dan atas. Hal ini terlihat misalnya pada semester 1, ada 10 materi keislaman sebagaimana berikut ini: Metode Studi Islam, Sejarah Peradaban Islam, Fiqh 1 dan 2, Bahasa Arab 1, Tauhid/ Ilmu Kalam, Akhlak Tasauwuf, Al-Quran Hadits dengan masing-masing pelajaran berjumlah 2 SKS, sedangkan Tafsir Tarbawi dan Sejarah Kebudayaan Islam masing-masing 3 SKS.

Untuk semester kedua, materi keislaman kembali mendominasi yakni ada enam materi perkuliahan yakni: Al-Quran dan Hadits (3 SKS), Tauhid/Ilmu Kalam2 (3 SKS), Bahasa Arab 2, Akhlak Tasawuf 2, Usul Fiqh dan Hadits Tarbawi masing-masing berjumlah 2 SKS. Sedangkan untuk semester 5 sampai semester 7, sangat dominan aspek pedagogis terkait pembelajaran. Aspek pedagogis ini dipadukan dengan materi keislaman dasar yang dapat dipilah dalam dua isu utama, yakni materi pembelajaran dan praktik pembelajaran dengan materi perkuliahan: materi pembelajaran yang meliputi Al-Quran, Hadits, Fiqh, Akhlak, SKI masing-masing berjumlah 3 SKS. Mata kuliah perencanaan pembelajaran 2 SKS dan Evaluasi pembelajaran PAI 3 SKS. Adapun untuk praktik pembelajaran meliputi mata kuliah: Praktikum pembelajaran SKI, Al-Quran Hadits, Fiqh, Aqidah Akhlak, Pengembangan Kurikulim PAI dan Tindakan Kelas, masing-masing berjumlah 3 SKS. Semester 7 meliputi PPL, KKN, dan Skripsi.

Dengan memperhatikan kurikulum Prodi PAI tersebut, tampak betapa dominannya konten kurikulum keislaman dasar dan aspek pedagogis terkait aspek pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi profesional sebagai pendamping guru pendidikan agama Islam tingkat dasar, menengah dan atas sehingga mengkondisikan para calon guru PAI ini tidak dipersiapkan sejak dini untuk memperoleh pemahaman pemikiran keislaman yang mendalam. Kurikulum yang ada juga tidak membekali diri untuk mendalami pemikiran keislaman yang penuh dengan dinamika relasi-relasi budaya, ekonomi politik dan isu-isu aktual keislaman dan kebangsaan lainnya. Pendeknya, kurikulum Prodi PAI tidak dipersiapkan untuk menangkal arus islamisme yang arusnya makin kuat masuk ke dalam lingkungan kampus dan dinamika kemasyarakatan lainnya.

Menurut Bapak Imam Syafii, Kapori PAI dan Ibu Nirva Diana, Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung serta Bapak Anggi Septia, Kaprodi PAI UML, desain kurikulum Prodi PAI tersebut di atas diterjemahkan secara umum dalam praktik pembelajaran di kelas menggunakan metode *student centered learning*- SCL), yakni metode pembelajaran siswa aktif atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Sebagaimana dalam metode SCL, langkah pertama dalam implementasinya dengan peningkatan kapasitas institusi dalam pelaksanaan SCL tersebut melalui pelatihan- pelatihan, seperti *e-learning*. Fakultas juga mendorong prodi untuk memasukkan aspek peningkatan proses pembelajaran dalam kegiatan praktikum lainnya. Adanya program praktikum pembelajaran mensinergikan dimensi teoretis dan praktis. Dalam konteks inilah metode SCL menurut para pejabat di atas, agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk lebih mandiri dalam belajar dan memperoleh pemahaman.

Meski praktik SCL ini diterapkan di kelas, karena konteks kurikulum dan tujuan pembelajaran diarahkan untuk membentuk kompetensi pendidik dalam lingkungan pengajaran dunia anak sekolah tingkat dasar, menengah dan atas, dengan demikian dinamika kelas juga tidak cukup mampu mengetengahkan dimensi *critical thinking* dalam dinamika pembelajaran, terutama debat kritis terkait aliran pemikiran dalam Islam dan isu-isu keislaman aktual lainnya. Muatan kurikulum yang mengajak para calon guru PAI yang relevan merambah isu-isu substantif keislaman yang dapat dikontekstualisasi dengan isu aktual kebangsaan, hanya ada pada semester 1 yakni mata kuliah *civic education* (2 SKS) dan Filsafat Pendidikan Islam (2 SKS), dan juga pada Semester 4, yakni mata kuliah pemikiran pendidikan (2 SKS) dan Sosiologi Pendidikan (2 SKS). Itu pun jika dikritisi lebih dalam pada Satuan Ajar Perkuliahan (SAP), untuk mata kuliah sosiologi pendidikan, tidak kuat menampilkan relasi sosiologis multikultural dimensi akomodasi, adaptasi dan transformasi tradisi pendidikan di dalam masyarakat nusantara yang sangat plural. Alur perkuliahan semacam ini sangat penting untuk mengedukasi peserta didik agar lebih mengenal secara lebih mendalam relasi sosiologis tradisi dan historisitas pendidikan (Islam) di dalam masyarakat nusantara.

Dengan memperhatikan dimensi pluralitas agama, etnisitas dan golongan sosial masyarakat Indonesia, teramat disayangkan di dalam mata kuliah Prodi PAI sama sekali tidak terdapat mata kuliah multikulturalisme dan studi agama-agama, yang sebenarnya sanga relevan untuk membentuk watak kesadaran pluralis para guru PAI sehingga dapat memiliki argumen kebangsaan yang kuat di tengah bahaya dan ancaman ekstensi keindonesiaan yang multikultural ini. Begitu juga dengan tidak adanya mata kuliah logika, mahasiswa Prodi PAI tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan di dalam mengembangkan *critical thinking*. Biasanya di dalam mata kuliah logika, mahasiswa diajarkan bagaimana mengembangkan cara berpikir kritis, merumuskan argumentasi berbasis bukti, analisa dan ide yang kuat agar terhindar dari kesalahan berpikir *(logical fallacy)*.

Aspek lainnya selain dari kelemahan kurikulum yang sangat mendasar dalam membentuk karakter mahasiswa kritis dengan kedalaman pengetahuan keislaman yang dapat menumbuhkan imunitas sehingga tidak mudah terpapar oleh virus intoleransi, ektremisme dan radikalisme adalah adanya kompetensi kemampuan Bahasa Arab di lingkungan mahasiswa Prodi PAI yang sangat lemah.

Untuk mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung berkenaan dengan kemampuan membaca teks arab, yang menjawab baik 24%, sangat baik 2%, cukup 32%, kurang 22% dan tidak menjawab 20%. Data survei ini ketika dikembangkan melalui *Focus Group Discussion* pada 10 orang mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung dengan cara memberikan naskah tulisan arab pegon agar diberi harakat dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, hasilnya 1 orang memiliki kemampuan sangat baik, 9 orang lainnya memiliki kemampuan sangat rendah, yakni tidak memiliki kemampuan memberi harakat, apalagi menerjemahkannya secara baik. Sedangkan hasil survei untuk kalangan dosen terkait penguasaan membaca teks Bahasa Arab, tidak menjawab 27%, kurang 32%, cukup 51%, baik dan sangat baik 0%.

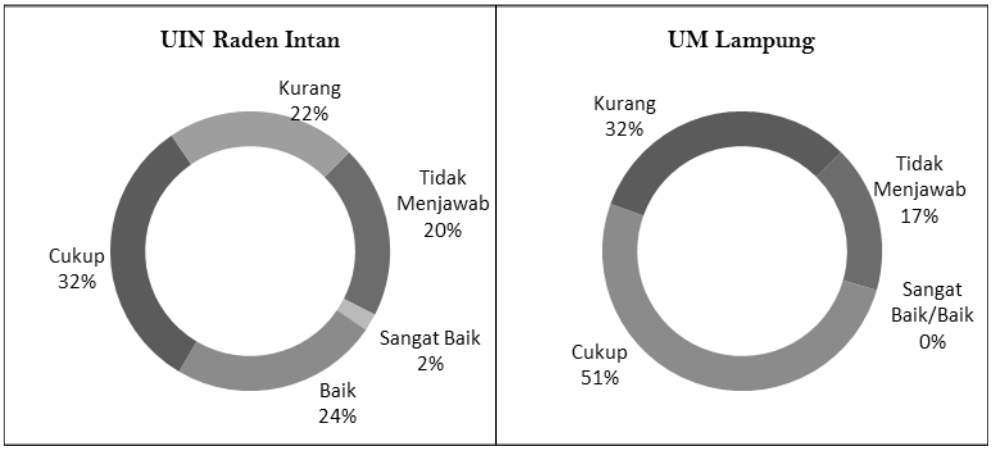

Gambar 4.5: Kemampuan Membaca Teks Arab

Sedangkan untuk mahasiswa Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), yang memiliki kemampuan membaca teks arab sangat baik 0%, baik 0%, cukup 51% dan Kurang 32%. Data survei ini ketika dikembangkan melalui *Focus Group Discussion* pada 9 orang mahasiswa Prodi PAI UML, hasilnya 1 orang memiliki kemampuan baik, 5 orang memiliki kemampuan rendah dan 3 orang lagi memiliki kemampuan sangat rendah. Sedangkan hasil survei untuk kalangan dosen terkait penguasaan membaca teks Bahasa Arab, tidak menjawab 17%, kurang 33%, cukup 0%, baik 33% dan sangat baik 17%.

Dengan memperhatikan hasil kemampuan Bahasa Arab di atas, meskipun terdapat kurikulum Bahasa Arab 1 dan 2 dan juga masing-masing kampus juga ada program peningkatan kapasitas kemampuan Bahasa Arab, sepertinya belum begitu maksimal

menghasilkan capaian yang diharapkan di kalangan mahasiswa Prodi PAI. Kegagalan membentuk kemampuan kompetensi Bahasa Arab ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, latar belakang mahasiswa PAI yang utama bukan berasal dari basis pesantren. *Kedua*, pengembangan Bahasa Arab lebih bergeser pada praktik bimbingan mengaji untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Sebagaimana hasil survei Cisform pada kedua Universitas di Lampung, yakni untuk UIN Raden Intan Lampung, 50% mahasiswa Prodi PAI berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, 30% berasal dari SMA/SMK/MA Pesantren dan 20% berasal dari MAN/MAS. Sedangkan mahasiswa Prodi PAI di UML, 45% berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, 45% berasal dari SMA/SMK/MA Pesantren, dan 10% berasal dari MAN/MAS.

Dalam konteks inilah tidak heran kiranya bila para mahasiswa Prodi PAI kebanyakan gagap menghadapi gelombang disrupsi keagamaan, yakni serbuan arus informasi dari beragam narasi islamisme disertai figur-figur baru ustaz salafi, tarbawi bahkan jihadi yang sangat aktif menyebarkan pesan dakwahnya melalui buku bacaan dan internet, seperti youtube, instagram, facebook dan media sosial lainnya. Para generasi milenial yang selalu erat bersahabat dengan *smartphone* di tangan, termasuk para mahasiswa Prodi PAI yang hampir semuanya memiliki smartphone secara aktif, baik dalam berkomunikasi dengan teman, saling berbagi pesan ataupun dalam mengakses berbagai informasi, termasuk informasi dan pesan-pesan keagamaan.

Kelas dan Proses Ideologisasi

Paradigma sistem pembelajaran di dunia pendidikan kini mulai berkembang pesat, *Teacher Centered Learning* (TCL) yang menempatkan dosen sebagai sosok sentral dalam transfer pengetahuan *(one-way traffic)*, dan mahasiswa sebagai pendengar ceramah dosen dengan aktivitas minimalis, makin ditinggalkan. TCL sudah terbukti menciptakan pembelajaran di kelas yang lesu dan tidak bergairah. Kini trend paradigma pembelajaran di kelas menggunakan *Student Centered Learning (SCL)*, yakni menempatkan mahasiswa secara individu atau berkelompok aktif mengeksplorasi pengetahuan, bukan sekadar menjadi pendengar yang pasif. Paradigma SCL dapat membentuk mentalitas mandiri dan bertanggung jawab bagi mahasiswa sebagai pembelajar psikologi orang dewasa yang bisa saja kemampuannnya mengeksplorasi dan memecahkan problem melampaui dinamika kelas.

Prodi PAI di dua Universitas di Lampung, baik itu UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung secara tegas menyatakan bahwa paradigma SCL menjadi acuan dalam pembelajaran di kelas. Namun, sejauh ini tak mudah untuk mempraktikkan SCL karena menuntut mentalitas dan kreativitas dosen menjalankan peran sebagai fasilitator, motivator sehingga kelas menjadi dinamis. Kelas yang dinamis memberi energi dan hasrat mahasiswa untuk datang, saling sharing pengetahuan dan pada akhirnya mengeksplorasi banyak hal untuk melahirkan cara pandang baru dalam memahami realitas sosial.

Hasil wawancara dengan beberapa orang mahasiswa Prodi PAI, ada dosen yang mampu menerapkan praktik SCL ini di kelas, sehingga suasana kelas menjadi dinamis dan tidak lesu atau kehilangan gairah. Masih banyak pula dosen yang masih belum berubah dengan paradigma lama dalam pembelajaran di kelas, sehingga relasi pembelajaran dosen dengan mahasiswa nuansanya sangat monoton dan menjemukan. Bahkan dalam konteks yang lebih miris lagi, kehadiran dosen dan mahasiswa di kelas sebagai pemenuhan tuntutan administratif semata. Hal ini karena baik dosen dan mahasiswa, sama-sama memiliki kewajiban memenuhi kehadiran minimal 75%.

Namun yang cukup heboh sebenarnya, dosen yang menjadikan kelas sebagai media menyebarkan ideologi keagamaan tertentu kepada para mahasiswa. Sebagaimana yang dituturkan oleh SF, mahasiswa Prodi PAI yang baru saja menyelesaikan sidang skripsinya, bahwa pernah ada dosen LB yang bernama Sri Handayani, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), saat mengajar di kelas lebih banyak membahas ajaran-ajaran HTI dan mempengaruhi para mahasiswanya agar masuk HTI. Para mahasiswa yang tidak masuk menjadi HTI dan tidak mengikuti kegiatan pengajian mingguan HTI diberi sanksi dengan nilai jelek (tidak lulus). Penuturan SF ini dibenarkan pula oleh IS, Kaprodi PAI UIN Raden Intan Lampung.

Setelah beberapa tahun praktik semacam ini berlangsung, keresahan di kalangan mahasiswa makin tidak terbendung, akhirnya informasi ini sampai juga kepada kaprodi PAI dan dekanat lainnya. Setelah melalui proses musyawarah, akhirnya pada tahun 2016 dosen LB Prodi PAI yang menjadi aktivis HTI itu dikeluarkan dan tidak diperpanjang lagi kontraknya. Saat diwawancarai mengapa sampai kesusupan aktivis HTI, baik Kaprodi PAI dan Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung merasa kecolongan sampai ada dosen LB yang selama ini menjadi aktivis HTI mengajar di Prodi PAI.

Sikap tegas pimpinan fakultas dan kaprodi yang memutus kontrak dosen luar biasa (LB) yang terjangkiti ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) patut diacungi jempol. Namun demikian, virus Islamisme bukan berarti hilang begitu saja dari lingkungan dosen dan mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung. Masih ada dosen PAI lainnya yang kerap memunculkan opini di status medsosnya dan kerapkali pula membagikan berita narasi Islamisme di grup *whatsapp* dosen dan juga di akun facebooknya. Sebut saja dosen itu berinisial YH. Di media sosialnya, terutama facebook sering mengunggah narasi islamisme dan ustaz-ustaz yang selama menjadi aktor utama penggerak islamisme. Saat ditanya, beberapa pimpinan di prodi dan dekanat, apakah sudah ditegur dan diberi peringatan dosen yang berinisal YH tersebut, semuanya senyap dan tidak memberi jawaban yang tegas. Kondisi ini menjelaskan dinamika politik keagamaan di kampus begitu kompleksnya.

Dosen yang memang secara terang-terangan menyebarkan pengaruh HTI begitu tegas tidak diperpanjang kontraknya karena kondisi politik kenegaraan saat itu memang mulai membidik HTI dan pada akhirnya meringkus HTI sebagai organisasi terlarang.

Kampus memperoleh dukungan eksternal dan situasi politik kenegaraan. Berbeda halnya dengan dosen seperti YH yang lebih berkutat pada narasi islamisme, terutama dukungannya pada ustaz-ustaz gerakan 212, tak mudah ditegur, apalagi memperoleh peringatan. Mengapa demikian? Karena para dosen di UIN Raden Intan Lampung dan para mahasiswa yang tergabung di dalam UKM-UKM juga tidak sedikit yang memiliki cara pandang islamisme. Misalnya, sebut saja BAS, dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang juga pengurus MUI Lampung dan Koordinator Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama' Lampung yang aktif terlibat dalam gerakan 212. BAS adalah pendiri salah satu UKM yang memiliki keanggotaan mahasiswa dari berbagai fakultas. Ia juga pengurus Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI) bersama Ust Bachtiar Nashir.

Sedangkan untuk kalangan dosen UML, menurut Kaprodi PAI UML hanya satu dosen yang menurutnya selama ini terlihat pemikirannya keluar dari wacana mainstream keagamaan Muhammadiyah, yakni pengajar mata kuliah hadits tarbawi. Dosen yang juga dikenal sebagai ustaz ini sebut saja dengan inisial IAS, terkenal sebagai aktivis 212, pengurus MIUMI bersama Ust Bachtiar Nasir dan Ust Buchori Abdul Shomad. Menurut Kaprodi PAI UML, ada rencana untuk memanggilnya, namun sejauh ini belum dilakukan oleh dekanat atau rektorat. Sepertinya memang tidak mudah memanggil dan menegur dosen IAS karena jaringannya sangat kuat dengan para aktivis Muhammadiyah seperti dengan Ust Bachtiar Nasir yang memiliki pengaruh cukup kuat di UML. Sayangnya upaya untuk melakukan pertemuan dan wawancara dengan dosen IAS ini gagal karena rumah tinggalnya sangat jauh dari Kota Bandar Lampung dan memiliki kesibukan yang sangat tinggi.

Pada saat FGD, 6 Oktober 2018, dengan para mahasiswa UML, nama IAS ini muncul sebagai salah satu dosen favorit mahasiswa karena jika mengajar di kelas sangat bersemangat dan sering mewacanakan isu-isu aktual, seperti saat makin santernya kasus anti Ahok di Jakarta. Dalam setiap perkualiahan, IAS juga selalu memberi tekanan betapa pentingnya memilih pemimpin sesama muslim dan upaya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam yang dinilai sejauh ini masih terus diabaikan oleh pemerintah.

Dosen UML yang berhasil diwawancarai yakni RF (6/10/18), pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ia mengajar di Prodi PAI UML sejak tahun 2005. Pandangan keislamannya sangat diwarnai oleh konstruksi bahwa umat Islam masih marginal, belum memperoleh akses pengaturan kekuasaan sebagaimana mestinya. Umat Islam perlu merebut kekuasaan melalui cara politik, sebagaimana gerakan 212 jika terus membesar dan dipelihara dapat menjadi lokomotif perubahan politik bagi umat Islam. RF sangat mengidolakan Bapak Amien Rais (AR) yang menurutnya segala tindak tanduk AR akan diikuti. Ketika ditanya pandangannya tentang gagasan khilafah islamiyah, ia mengatakan cukup berat memperjuangkan agenda itu di Indonesia, namun bukan tidak bisa. Jalan itu bisa saja terbuka, jika suatu saat ada Presiden Indonesia yang pro dengan gagasan khilafah islamiyah.

Pandangan keagamaan para dosen sebagaimana terurai di atas, tentu bagian dari gelombang arus islamisme yang masuk ke dalam ruang kelas. Nuansa kelas menjadi sangat politis. Cukup menggairahkan bagi para mahasiswa yang menyenangi isu-isu politis. Sedangkan bagi mahasiswa yang ingin membuka ruang secara lebih dalam melihat persoalan, maka akan kesulitan melihat masalah atau realitas sosial dari beragam sudut pandang. Suasana dinamis melalui adanya *critical thinking* dan perdebatan kritis lainnya dengan sendirinya meredup. Suasana pembelajaran di kelas kemudian berkembang menjadi ajang propaganda ideologis dosen guna mempengaruhi *mindset* para mahasiswanya. Hasil FGD dengan para mahasiswa PAI di dua universitas di Lampung ini memberikan gambaran, betapa perspektif islamisme dosen ini juga menular ke dalam perspektif di kalangan para mahasiswa dalam melihat Islam dan dinamika politik keindonesiaan lainnya.

Dosen memang bukanlah sosok yang bebas nilai, jika para dosen tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip akademik tentang tanggung jawab keilmuan, maka nuansa pencerahan dan kedalaman pemikiran dalam melihat realitas sosial akan selalu dikedepankan. Seorang dosen dengan tanggung jawab akademik yang tinggi, tak semestinya menjadikan kelas sebagai arena melakukan proses ideologisasi terhadap para mahasiswanya. Dosen yang menghadirkan iklim akademik akan selalu mengajak mahasiswa untuk berpikir merdeka, membangun perenungan dan daya pikir yang mendalam sehingga melahirkan cakrawala pemikiran yang lebih bernas dan tajam dalam melihat persoalan. Cara mengembangkan nalar akademik keislaman yang seperti inilah yang diharapkan berkembang di kalangan mahasiswa sehingga tidak mudah terpapar virus intoleransi, radikalisme dan ektsremisme lainnya yang kini mulai banyak menjangkiti kalangan anak muda milenial.

Sumber Rujukan *Offline* dan *Online*

Basis sosial para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan Universitas Muhammadiyah Lampung cukup dominan berasal dari masyarakat pedesaan yang tersebar di hampir semua kabupaten di Lampung. Sedangkan posisi kedua universitas ini lokasinya berada di wilayah perkotaan, yakni Bandar Lampung. Secara perlahan para mahasiswa ini masuk ke dalam dinamika masyarakat urban. Saling membangun interaksi dengan kenalan baru, bahkan terlibat ke dalam komunitas baru dan menemukan identitas baru pula dalam keberagamaan. Saat melakukan wawancara dengan MTM, mahasiswi semester 3 Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung, sebelumnya ia tidak menggunakan cadar, karena tumbuh dari lingkungan keluarga yang tidak terlalu ketat dengan nilai-nilai keagamaan. Ia menggunakan cadar, selain karena sering diajak teman kakak tingkat untuk mengikuti pengajian mingguan salah satu UKM di kampus yang banyak juga peserta pengajian dari kalangan mahasiswa yang bercadar, juga karena kebiasaan berselancar di dunia medsos, terutama mengikuti akun instagram **mumo** *(muslimah motivation)* yang mulanya

diperoleh dari *group whatsapp* dimana ia bergabung di dalamnya. Di situ ia makin melihat betapa cantiknya perempuan bercadar itu, berikut pengakuannya:

> "ada teman yang kebetulan menshare informasi seputar MUMO (Muslimah Motivation) dari akun instagram yang isinya kegiatan menarik seputar perempuan-perempuan bercadar. Saya melihat perempuan bercadar disitu cantik, dari situlah saya follow dan terus mengikuti perkembangannya."

Sudah hampir setahun ini MTM menggunakan cadar dan ia makin merasa nyaman menggunakannya. Ia merasa memperoleh banyak teman, apalagi perempuan-perempuan bercadar di kampusnya semakin banyak, hampir semua fakultas dan bahkan prodi terdapat mahasiswi bercadar. Lingkungan kampus semakin menerima mahasiswa bercadar. Pengajian-pengajian mingguan di kampus juga tidak pernah memberikan larangan, justru sebaliknya membuatnya merasa lebih nyaman karena penggunaan cadar dipersepsikan lebih dekat dengan teladan para istri nabi. Saat melakukan wawancara dengan Ust Dr. Buchori Abdus Shomad (29/10/18), pendiri UKM Al Ittihad yang mengembangkan pendekatan salafi di dalam kehidupan mahasiswa, praktik cadar merujuk pada hadis Nabi, saat ada orang datang lewat di depan Aisyah (istri Nabi), lalu Aisyah menutup wajahnya. "Jadi tentu tidak ada yang salah jika ada seseorang yang mengikuti istri Nabi," ungkap lulusan LIPIA dan Pondok Gontor ini.

Cara keberagamaan secara *offline* dan *online* saling bersinergi membentuk icon komunitas keberagamaan baru di kalangan mahasiswa. Kondisi ini terjadi tidak bisa pula dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi seperti penggunaan *smartphone*. Hampir semua mahasiswa sekarang memiliki dan memanfaatkan fungsi *smartphone* dalam kehidupannya, baik untuk urusan memenuhi kebutuhan perkuliahan, mengakses informasi keagamaan sampai pada mengidentifikasi diri menjadi bagian dari identitas keagamaan tertentu secara imajiner. Dalam Bahasa Bryan S Turner (2011:8), globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi internet telah menciptakan pula pasar spiritual. Setiap orang mengakses kebutuhan apapun, termasuk dalam konsumsi keagamaan melalui jaringan internet. Komersialisasi dan ekspresi keagamaan makin tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari praktik kehidupan keseharian (Fealy & White, 2008).

Kondisi inilah yang dimanfaatkan para ustaz-ustaz yang menyuburkan arus islamisme, yakni dengan menciptakan industri dakwah digital, dengan cara memproduksi sebanyak mungkin pesan-pesan dakwah melalui media sosial, seperti instagram, facebook, youtube dan lainnya agar mudah diakses oleh audience dari mulai kalangan generasi babyboomer sampai generasi milenial. Hasil survei Cisform di kedua kampus universitas di Lampung, selebgram yang selama ini menjadi *iconic* para mahasiswa muncul nama-nama seperti Uts Adi Hidayat, Uts Abdul Somad, Ust Hanan Attaki, Ust Abu Bakar Basalamah bahkan Ust Jefry Al Buchori sekalipun sudah meninggal masih disebut pula sebagai idolanya.

Revolusi teknologi media, telah mendorong berkembangnya dakwah digital yang melahirkan figur-figur keagamaan baru di kalangan masyarakat, khususnya para

mahasiswa. Ukuran popularitas kini makin didasarkan pada seberapa banyak orang melakukan *subscribe*, me-*like* atau mem-*follow* pesan-pesan dakwah yang di-*upload* di youtube, instagram, facebook, twitter atau menjadi viral yang disebar melalui *whatsapp*, telegram dan sosial media lainnya. Pesan yang provokatif dan menjadi *trending topic* dalam jagad medsos dengan sendirinya menciptakan efek popularitas yang pada akhirnya menciptakan *follower* dan mengundangnya di dalam pengajian secara *offline* pula. Intinya popularitas dalam dunia maya harus terlebih dahulu hadir dan membangun konstruksi sosial sampai akhirnya menciptakan efek kekuatan simbolik *(symbolic of power)* di kalangan pengikutnya.

Inilah era baru disrupsi keagamaan yang kini makin merambah masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang diulas oleh Renald Kasali (2018) di dalam karya terbarunya *The Great Shifting*, bahwa terdapat pergeseran yang signifikan dalam model bisnis setelah munculnya revolusi teknologi informasi 4.0, dari yang semula *product base* bergeser menjadi *platform base*. Para pebisnis kini tidak perlu lagi sibuk dengan membuat produk barang atau jasa, namun cukup menciptakan *platform* bisnis yang mempertemukan antara *demand side* dan *supply side* ke dalam sistem bisnis atau ekosistem bisnis secara *online*, sebagaimana yang dikembangkan oleh perusahaan taksi *online* seperti grab, gojek dan lainnya. Disrupsi dalam dunia bisnis akibat perkembangan teknologi ini kemudian juga berkembang dalam ranah keagamaan masyarakat.

Sebagaimana terlihat dari dinamika arus politik islamisme yang kini berkembang, upaya untuk mempengaruhi massa, memperoleh dukungan politik, menekan atau merebut kekuasaan dengan cara menciptakan *platform base* melalui ruang diskursif di dunia digital, yakni dengan cara memproduksi sebanyak mungkin *framing-framing* pertentangan identitas keagamaan, dramatisasi marginalisasi umat, kriminalisasi ulama', kebangkitan Islam dengan mengganti sistem demokrasi, anti barat dan bentuk politisasi identitas keagamaan lainnya. Para aktor islamisme tidak perlu sibuk melakukan rekrutmen keanggotaan, melakukan kaderisasi, menciptakan jenjang karir keanggotaan sebagaimana pola keorganisasian lama atau dalam istilah Renald Kasali, organisasi yang mengandalkan pendekatan *product base*. Pendekatan *platform base* di era disrupsi keagamaan ini, intinya untuk memanen tidak perlu harus bertanam. Cukup saling menciptakan kode dari kesamaan *platform* yang sudah saling tersabung melalui memori pikiran yang tersambung secara *online*.

Era disrupsi yang merambah dunia (politik) keagamaan, dari *product base* ke *platform base* ini sebagaimana tercermin pada aksi 212, aksi politik melalui *platform* bahasa politik penodaan agama. Untuk mendatangkan lautan massa sebegitu besar tidak perlu terlebih dahulu melakukan pelatihan, training dan bentuk kaderisasi konvensional lainnya. Melalui pendekatan *platform base* bahasa penodaan agama dengan aktor politik Ahok yang beragama non muslim dan etnis keturunan, maka menjadi *push factor*-daya pendorong massa yang sudah mengalami konstruksi akut oleh *framing* kebencian, keterasingan, ketersingkiran secara ekonomi, budaya dan politik mengikat diri sebagai

follower yang termobilisasi secara politik. Sedangkan *pull factor* sebagai daya penarik karena adanya fasilitas untuk pergi ke Jakarta sehingga massa datang berduyun-duyun ke Monas.

Pendekatan *platform base* semacam ini sepertinya akan terus berkembang sebagai bagian dari politisasi keagamaan mencari pengikut baru, sebagaimana dalam kasus kasus pembakaran bendera yang oleh kelompok keagamaan tertentu dipandang sebagai bendera HTI, sedangkan oleh kelompok keagamaan lainnya dipandang sebagai bendera tauhid. Jagat dunia digital juga bergolak dan saling perang tagar, sedangkan aksi massa juga bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Namun besaran aksi massanya tidak sedahsyat aksi 212 karena dalam kasus bakar bendera dimensi *push factor* dan *pull factor* energinya tidak sekuat aksi 212.

Berbagai peristiwa keagamaan yang dimulai dari perang *platform* di ranah digital, sejauh ini yang paling memanfaatkan ruang *cyber media* untuk melakukan propaganda politik, merebut simpati massa dan bahkan merekrut keanggotaan secara *online* adalah kelompok islamisme dibandingkan kelompok keberagamaan moderat. Berbagai isu keagamaan dalam jagat digital atau *cyber media* selalu yang muncul menjadi trending topik dan mainstream adalah arus islamisme, sebab itu eksistensinya selalu menjadi *iconic* popularitas. Konteks semacam inilah yang selalu menjadi daya tarik anak-anak muda yang hidupnya selalu lekat dengan akses internet untuk mengikuti dan akhirnya mengalami keterpaparan oleh pandangan keagamaan anti sistem, anti demokrasi, anti barat dan akhirnya terjebak dalam arus islamisme. Kondisi semacam ini sangat berbeda dengan konteks keberagamaan sebelum revolusi teknologi 4.0, meski hidup di zaman rezim otoritarian, para intelektual keagamaan modernis seperti Cak Nur, Gus Dur pandangan-pandangan keagamaan selalu menjadi *mainstream* masyarakat. Ada baiknya memang para aktor keberagamaan moderatisme itu mulai secara aktif memproduksi pesan-pesan keagamaan moderat di jagat medsos, sehingga mampu meng-*counter* framing pesan keagamaan kekuatan islamisme dalam jagat digital media.

Strategi *online* dan *offline* di kalangan islamisme juga makin berpengaruh di lingkungan kampus sebagaimana yang terjadi di dua universitas di Lampung. Dari hasil FGD dengan para mahasiswa di UIN Raden Intan dan UML terkait pandangannya tentang Islam dan demokrasi dan keindonesiaan, kedua kelompok mahasiswa yang memberikan pandangan yang hampir senada, yakni bahwa demokrasi itu memperlemah syariat Islam karena mendahulukan hukum manusia dibandingkan dengan hukum-hukum Allah. Selain itu, mereka juga berpandangan, meski Indonesia penduduknya bukan muslim semua, namun bukan berarti sistem *khilafah* tidak dapat ditegakkan, jika semua orang muslim pemilih pemimpin muslim, maka jalan sistem kekhalifahan itu makin terbentang lebar.

Begitu juga dengan hasil survei Cisform yang dilakukan di kedua universitas di atas, hasilnya setali dengan hasil FGD tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam kuesioner sebagai berikut. *Pertama*, Islam hanya tegak dengan negara Islam (*khilafah*). Untuk UIN Raden Intan Lampung mahasiswa yang menjawab sangat setuju 10%, setuju

32%, sedangkan yang tidak setuju 40%, sangat tidak setuju 14% dan tidak menjawab 4%. Sedangkan untuk kalangan mahasiswa UML; yang memberi jawaban sangat setuju 19%, setuju 52%, tidak setuju 27%, sangat tidak setuju 0% dan tidak menjawab 2%.

Jika dijumlah, angka sangat setuju dan setuju sebesar 42%, tentu cukup tinggi dan mengkhawatirkan karena pandangan semacam ini cenderung anti sistem NKRI, meski angka yang tidak setuju dan sangat tidak setuju jika dijumlah masih lebih dominan, yakni 54%. Sedangkan untuk kalangan mahasiswa UML sangat mengejutkan, yakni jika dijumlah persentasenya antara yang sangat setuju dan setuju sebesar 71% mengalahkan yang tidak sangat setuju dan tidak setuju jika dijumlah persentasenya menjadi 27%. Mahasiswa UML jauh lebih kuat anti sistem NKRI dibandingkan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Kedua, sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem *thagut*, maka kita harus menaatinya. Jawaban mahasiswa UIN Raden Intan Lampung: sangat tidak setuju 10%, tidak setuju 48%, setuju 28%, sangat setuju 6% dan tidak menjawab 8%. Sedangkan mahasiswa UML memberi jawaban: sangat tidak setuju 21%, tidak setuju 53 %, setuju 24%, sangat setuju 0%, tidak menjawab 2%. Angka persentase ini dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa secara umum menganggap sistem sekarang ini *thagut*.

Ketiga, keterpurukan umat Islam saat ini merupakan bagian dari skenario Barat. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung memberi jawaban: sangat setuju 24%, setuju, 58%, tidak setuju 10%, sangat tidak setuju 2% dan tidak menjawab 6%. Sedangkan mahasiswa UML memberi jawaban: sangat setuju 28%, setuju 53%, tidak setuju 11%, sangat tidak setuju 6% dan tidak menjawab 2%. Persentase ini juga menunjukkan bahwa para mahasiswa selalu menaruh kecurigaan terhadap Barat.

Ketiga pertanyaan yang menunjukkan pandangan begitu kuatnya islamisme di kalangan mahasiswa tersebut, jika ditelusuri kembali akarnya pada dimensi keimanan melalui pertanyaan berikutnya akan semakin terang benderang, yakni pertanyaan (4) dalam memilih teman, persamaan seiman itu paling penting. Dengan pertanyaan di dalam survei ini, mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung yang menjawab sangat setuju 30%, setuju 32%, tidak setuju 34% dan sangat tidak setuju 2%. Sedangkan mahasiswa Prodi PAI UML yang menjawab sangat setuju 19%, setuju 38%, tidak setuju 39%, sangat tidak setuju 0% dan tidak menjawab 4%. Jika dianalisis jumlah persentase antara yang sangat setuju dan setuju sebesar 62% untuk mahasiswa Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung sedang untuk Prodi PAI UML jika dijumlah persentase antara yang sangat setuju dengan yang setuju sebesar 57%. Tentu saja angka tersebut cukup besar sebagai gambaran betapa dimensi keimanan yang eksklusif sangat kuat di kalangan mahasiswa Prodi PAI di kedua universitas tersebut. Pandangan semacam ini mengindikasikan bahwa para mahasiswa ini sudah terhegemoni oleh arus islamisme yang dikonstruksi baik melalui forum-forum di kelas, pengajian, pesan-pesan keagamaan secara *online* atau keterlibatannya secara aktif dengan organisasi kemahasiswaan yang selama ini memang mengibarkan spirit islamisme dalam berbagai kegiatannya.

Namun demikian, kuatnya pandangan islamisme di kalangan mahasiswa juga memiliki korelasi pula dengan sebagian kecil pandangan islamisme di kalangan para dosennya pula. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil survei di kalangan dosen Prodi PAI di kedua universitas ini. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat diketengahkan di sini, dalam arti tidak semua pertanyaan dalam survei, direspons oleh para dosen. Di antaranya adalah pertanyaan sebagai berikut: (1) Islam hanya dapat tegak dengan sistem negara Islam (*khilafah*). Dosen Prodi UIN Raden Intan yang tidak menjawab 0%, menjawab sangat setuju 16%, setuju 0%, tidak setuju 67% dan sangat tidak setuju 17%. Sedangkan dosen Prodi PAI UML yang tidak menjawab 16%, menjawab sangat setuju 17%, setuju 0%, tidak setuju 67% dan sangat tidak setuju 0%; (2) keterpurukan umat Islam saat ini merupakan bagian dari skenario Barat, dosen Prodi PAI UIN Raden Intan Lampung yang tidak menjawab 0%, menjawab sangat tidak setuju 17%, setuju 83%, tidak setuju 0%, sangat tidak setuju 0%. Sedangkan dosen Prodi PAI UML yang tidak menjawab 17%, menjawab sangat setuju 33%, setuju 17%, tidak setuju 33%, sangat tidak setuju 0%. Angka 16% untuk UIN Raden intan dan angka 17% untuk UML di kalangan dosen Prodi PAI terkait dengan pandangan pro khilafah dan cukup tingginya kecurigaan bahkan tidak menutup kemungkinan anti Barat, yakni angka 83% di UIN Raden Intan Lampung dan jika dipadukan antara yang sangat setuju 33% dan setuju 17% di UML, tentu saja angka potensial yang mencemaskan bagi dinamika moderatisme Islam.

Basis Islamisme Baru: Aliansi dan Kontestasi Keberagamaan

Kampus dengan segala dinamika kemahasiswaan yang terdapat di dalamnya, selalu menarik perhatian banyak pihak, khususnya kekuatan politik keagamaan. Arus Islamisme pun memiliki jejak historis yang lama dengan jaringan aktor dan keorganisasian di dalam kampus, bahkan tidak sedikit dari para aktor atau tokoh islamisme yang berasal dari lingkungan kampus. Dinamika kontestasi politik keagamaan di kampus selalu dinamis, bukan sekadar adu wacana semata, namun kerapkali pula saling berebut akses kuasa di dalam mempengaruhi kebijakan politik di kampus. Organisasi- organisasi kemahasiswaan mainstream seperti HMI, PMII menjadi motor utama dalam dinamika di kampus.

Memasuki alam reformasi politik yang ditandai oleh adanya kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan baru makin tumbuh bermunculan di lingkungan kampus. Organisasi kemahasiswaan baru mampu menciptakan daya tarik sehingga memiliki banyak pengikut di kalangan mahasiswa. Bahkan eksistensi mereka dapat secara perlahan dapat menggeser kekuatan pengaruh organisasi lama, seperti HMI dan PMII. Bagian ini akan mengurai dinamika organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus, terutama di UIN Raden Intan Lampung, sedangkan untuk UML tidak banyak diurai karena organisasi lama, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sangat dominan dan sebagaimana umumnya kampus Muhammadiyah memberikan larangan organisasi kemahasiswaan selain organ Muhammadiyah untuk masuk kampus. Dalam konteks UML, banyak mahasiswa

Prodi PAI UML yang mengikuti organisasi di luar kampus seperti bergabung dengan Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) yang basis utamanya berada di Masjid UNILA.

Dinamika kemahasiswaan di UIN Raden Intan Lampung sungguh sangat menarik, khususnya organisasi kemahasiswaan baru yang kini tengah berkembang mekar (*flourish*) dan memperoleh perhatian serta daya tarik mahasiswa untuk terlibat sebagai simpatisan, anggota dan pengurus. Terdapat tiga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) intra kampus yang kini tengah berkontestasi, yakni UKM Badan Pembinaan Dakwah Kampus (Bapinda) yang mengembangkan ideologi tarbawi- tradisi Ikhwanul Muslimin, UKM Al-Ittihad yang mengembangkan ideologi salafi dan UKM Permata Sholawat yang mengembangkan ideologi *ahlussunnah waljamaah-annahdliyah.* Ketiga UKM ini akan diulas sejarah berdirinya, model kaderisasi dan kegiatannya dalam menarik simpati para mahasiswa dan juga jaringannya dengan kelompok strategis lainnya di luar kampus.

Diawali dengan UKM Bapinda yang lebih lama eksistensinya dibandingkan dengan dua UKM lainnya. UKM Bapinda berdiri pada tahun 1996 sebagai cikal bakalnya dari UKM Rohis. Tahun 1996 sampai menjelang Indonesia memasuki tahun krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, sedang marak-maraknya jaringan antar lembaga dakwah kampus melakukan konsolidasi dan membangun eksistensi di kampus. Motor penggerak utamanya adalah kampus besar seperti Masjid Salman ITB dan Jamaah Salahuddin UGM. Menjelang reformasi para aktivis dakwah kampus ini juga mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan ikut terlibat dalam aksi-aksi penurunan rezim Soeharto. Setelah memasuki era reformasi pasca tumbangnya rezim Soeharto, KAMMI ini kemudian resmi menjadi bagian dari organ sayap kemahasiswaan Partai Keadilan (PK) yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Para aktivis KAMMI banyak terlibat dalam kepengurusan Bapinda. Bahkan pembinanya salah seorang dosen Fakultas Dakwah yang memiliki kedekatan jaringan dengan PKS.

UKM Bapinda memiliki visi sebagai wadah perjuangan guna membina dan mengembangkan dakwah Islamiyah di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dan masyarakat secara luas. Misinya adalah (a) melakukan proses pembinaan dan pengembangan mahasiswa sehingga menjadi kader *da'i* dan *da'iyah* (b) mengembangkan khazanah keilmuan mahasiswa sehingga mempunyai wawasan luas serta mampu berkontribusi terhadap upaya-upaya perbaikan umat (c) mengoptimalkan fungsi ilmu teknologi sebagai media dakwah. Sebagai UKM di tingkat Universitas, UKM Bapinda memiliki organ di tingkat fakultas, sebagaimana di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UKMF Ibroh, Fakultas Dakwah namanya UKMF Rabbani, Fakultas Syariah namanya UKMF Gemais, Fakultas Ushuluddin namanya UKMF Salam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis namanya UKMF Ikrimah. Para mahasiswa dapat masuk menjadi anggota langsung di tingkat universitas, yakni UKM Bapinda dapat juga bergabung langsung UKMF organ jaringan UKM Bapinda di tingkat fakultas.

Hasil wawancara salah seorang pengurus UKM Bapinda Periode 2017-2018 (23/10/18), proses koordinasi antar organ berjalan sangat baik, terutama dalam proses

rekrutmen anggota dan proses kaderisasi. Tahun 2108 ini menurutnya UKM Bapinda berhasil melakukan rekrutmen kader dari kalangan mahasiswa baru sebanyak 500 orang mahasiswa. Jumlah perekrutan kader yang sangat banyak mengalahkan para organisasi kemahasiswaan lainnya ini karena pendekatan dua hal, yakni para aktivis UKM Bapinda mulai membangun komunikasi dan menarik simpati sejak calon mahasiswa mendaftar di UIN Raden Intan Lampung. Para aktivis UKM Bapinda dengan pendekatan akhlak kesopansantunan membantu memberi informasi cara mendaftar dan bahkan memberikan tumpangan di kos-kosan bagi para calon mahasiswa. Kedua, membangun parade pertunjukan yang menarik saat pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di kalangan para mahasiswa baru sebelum memasuki jadwal perkuliahan.

Ada tiga level training kaderisasi UKM Bapinda, yakni tahap pertama, pembinaan akhlak, tahap kedua, manajemen organisasi dan tahap ketiga pengembangan kemasyarakatan. Untuk memelihara keaktifan anggota setelah memperoleh kaderisasi tahap pertama, UKM Bapinda melakukan strategi pendampingan harian, mingguan dan bulanan. Pendampingan harian yakni melalui pendampingan baca tulis Al-Quran. Sedangkan untuk pendampingan mingguan melalui pengajian mingguan yang dilaksanakan secara bergilir setiap musalla fakultas atau masjid yang terdapat di Fakultas Ushuluddin. Sedangkan pendampingan bulanan yakni melalui Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit) yang biasanya di tempat yang lokasi alamnya sangat nyaman untuk melakukan *tadabbur* alam, dan setiap akhir tahun melakukan kegiatan *tablig akbar*.

UKM Bapinda juga berjejaring erat dengan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang memiliki struktur organisasi di tingkat nasional dengan nama Pusat Komunikasi Nasional (Puskomnas), sedangkan untuk organ di tingkat daerah dinamai Pusat Komunikasi Daerah (Puskomda) Lampung. Pada pergelaran FSLDK ke 5 di IAIN Matro pada bulan Juli 2017, terpilih sebagai Ketua Puskomda Lampung, Wahyu Setiawan, Ketua umum UKM Birohmah Unila.

Di dalam Puskomda-FSLDK ini terdapat Badan-Badan Khusus (BK), salah satunya adalah BK Isu yang berperan dalam mengelola isu-isu strategis di public, seperti isu terkait penyimpangan aqidah, LGBT, penistaan agama, cadar dan lainnya. Isu-isu semacam itu dikaji dan dikelola sedemikian rupa agar memperkuat opini yang menjadi target jaringan FSLDK di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Puskomda Lampung dalam proses memperkuat leveling kaderisasi kurikulum pengkaderan mengikuti kurikulum Gemasi ITB, yang terdiri dari lima tingkatan pra mula, mula, madya dan mandiri.

Dengan memperhatikan struktur keorganisasian, pendekatan pendampingan kader, berbagai even kegiatan kreatif yang dilakukan dan jejaring UKM Bapinda di kampus dan di luar kampus dengan Puskomda-FSLDK Lampung, maka sangatlah wajar bila pengaruh kultural UKM ini di kalangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung sangatlah kuat dan mampu menggeser pengaruh kultural organisasi kemahasiswaan ekstra sekalipun seperti HMI dan PMII. Jejaring dengan para alumninya yang sudah

	Pra Mula	Mula	Madya	Mandiri
Fokus Agenda	Membangun sebuah komunitas informal serta barisan kader inti, pada tahapan ini diharapkan dakwah kultural dan personal terjadi dan pencarian SDM, serta berusaha melegalkan sebuah lembaga dakwah di tingkat universitas	Menyusun dan menata sebuah lembaga dakwah yang sudah formal dan legal. Penataan SDM internal. Melakukan rekrutmen kader secara massal dengan orientasi kualitas. Melakukan syiar yang lebih luas dan tertata dengan baik.	Memilki basis massa simpatisan di seluruh fakultas. Dengan SDM yang ada mencoba melakukan ekspansi dakwah sehingga basis simpatisan bisa terbentuk di seluruh fakultas. Pada tahapan ini diharapkan fungsi utama LDK- *dakwiy* dan *khidamy*) dapat berjalan dengan baik	Memilki basis massa simpatisan di seluruh program studi/jurusan. Melakukan pola dakwah yang masif serta sinergis. Dengan adanya basis massa di semua program studi/jurusan, LDK sudah mempunyai kekuatan tersendiri dalam membangun sebuah paradigma Islam yang lebih komprehensif.
Struktur	Struktur berbentuk informal, dan sudah ada koordinasi diantara para personal aktifis dakwah agar dakwah bisa terstrukur dengan baik.	Pentingnya legalitas LDK. Pada tahapan ini struktur LDK secara sederhana bisa terbentuk.	Struktur LDK sudah harus lebih mencakup semua aspek dakwah , agar dapat berkembang dan mengakomodir semua lini dakwah yang bisa dijalankan.	Penguatan struktur secara stabil di setiap lini kampus yang dikoordinir LDK dan intervensi dalam kebijakan penting kampus lainnya
Pedoman operasional dakwah	Menggunakan Pedoman Dakwah Asasiyah (Al Qur'an dan As Sunnah)	Sudah menyusun pedoman dakwah operasional, yakni AD/ART	Memiliki Garis besar haluan dakwah (GBHD) selama satu periodisasi	Adanya rancangan strategis Jangka Panjang Dakwah Kampus

Gambar 4.6: Tabel Level Kaderisasi (Sumber: *Risalah Manajemen Dakwah Kampus-Revised*; GAMAIS ITB, merujuk tulisan Rudy Santoso)

berkiprah di masyarakat juga terjalin dengan baik, bahkan menurut Ridho Setiawan yang dulu pernah menjabat sebagai UKMF Rabbani dan setelah itu menjadi Ketua UKM Bapinda, *database* keanggotaan dan alumni terdata dengan baik sehingga ketiga ada kegiatan yang membutuhkan pendanaan cara mengaksesnya begitu mudah.

Selain UKM Bapinda, UKM pendatang baru yang berdiri sejak tiga tahun yang lalu adalah UKM Al-Ittihad. Pendiri dan motor penggerak utamanya adalah adalah Ust.

Dr. Buchori Abdus Shomad (BAS), dosen Fakultas Ushuluddin, Koordinator GNPF MUI, pengurus MIUMI dan organisasi salafi lainnya. Relasi dan pengaruh BAS di kampuslah yang membuat UKM Al-Ittihad ini secara mudah berdiri sebagai organisasi intra kampus di tingkat universitas. UKM Al-Ittihad memiliki Visi dan Misi, yakni: membentuk kepribadian mahasiswa cerdas intelektual dan cerdas spiritual berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits. Adapun Misi UKM AL-ITTIHAD adalah: Membumikan Al-Quran dan Al-Hadits, Menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa untuk *izzul Islam wal muslimin*, dan menjadi pelopor dalam membina *akhlaqul karimah*, *ukhuwah islamiyah* dan *ubudiyah*.

UKM ini aliran keagamaannya sangat dekat dengan ideologi pendirinya Ust BAS, yakni aliran Salafi. Model kegiatannya dalam pembinaan kader dan juga meraih simpati mahasiswa agar bergabung, yakni pengajian mingguan yang dilakukan setiap selasa sore di Masjid Arrohmah samping Fakultas Ushuluddin. Para narasumbernya adalah ustaz-ustaz Salafi. Sewaktu peneliti melakukan observasi mengikuti pengajian yang dilakukan, cukup banyak para mahasiswi yang mengikuti pengajian dengan busana bercadar. Dua orang mahasiswi Prodi PAI yang bercadar juga mengikuti pengajian UKM Al-Ittihad ini, saat akan berangkat sempat dialog dangan mereka sebelumnya. Kegiatan bulanan seperti Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit) juga dilakukan.

Menurut Ustaz BAS, pada tahun 2018 ini UKM Al-Ittihad berhasil merekrut kader mahasiswa baru sebanyak 100 orang. Setelah mengikuti kaderisasi tahap pertama berupa Latihan Kader (LK) kepemimpinan dasar, khususnya bagaimana membangun karakter sebagai pemimpin, aspek ubudiyah dan ukhuwah. Tahap kedua nanti setelah melakukan berbagai proses kegiatan yakni, penekan pada tauhid dan amar ma'ruf nahi mungkar. LK tahap ketiga, yakni pemantapan LK1 dan 2 dan penguatan kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, berbagai kegiatan yang terkait dengan Sunnah Rasul menjadi ciri khas dari kegiatan UKM ini, yakni melatih para anggotanya pandai memanah yang dilakukan di lingkungan kampus dan juga latihan berkuda sebagaimana video viral di youtube.

Dalam konteks berjejaring dengan organisasi di luar kampus, aktivis UKM Al-Ittihad ini lebih dekat dengan organisasi Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) yang memang spiritnya memperluas pengaruh ajaran salafi di masyarakat. MPI berdiri pada tanggal 8 Maret 2009 di Jakarta. Latar belakang berdirinya MPI karena gerakan dakwah kampus masih sepenuhnya tegak di atas manhaj *salaf as-salih*, yakni memurnikan tauhid dari anasir ideologi liberalisme, sosialisme, komunisme bahkan nasionalisme jahiliyah. MPI juga menilai banyak gerakan mahasiswa yang berdakwah dan ber-*amar makruf,* namun masih sedikit yang berkiprah dalam kegiatan *nahy munkar*.

MPI kini telah menyebar di beberapa daerah, seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Riau, Lampung, Bandung, Solo dan Medan. Akan disusul daerah-daerah lain seperti Surabaya, Purwokerto, Bekasi, Banten, Malang, Makassar, dll. Adapun semboyan MPI sebagaimana rilisnya di sosial media, yakni *Al-Kitab Al-Hadiy, As-Sayfu*

An-Nashir (Kitab Al-Quran sebagai Petunjuk, Pedang sebagai Penolong). Maksudnya, MPI akan mendakwahkan Islam dengan panduan Al-Quran dan menolongnya dengan pedang jika diperlukan. Kalimat ini merupakan kutipan dari perkataan Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah, yang menggambarkan misi yang dibawa Islam ke panggung dunia. Sampai dengan tanggal 2 Desember 2018, akun instagram MPI Lampung memiliki pengikut 3058 dan aktif menyampaikan pesan-pesan kegiatan dan opini ideologisnya. Anggota MPI Lampung tersebar dari berbagai kampus di Lampung, seperti UIN Raden Intan Lampung, UML, UNILA dan lainnya.

Berikutnya adalah UKM Persatuan Mahasiswa Pecinta Sholawat yang disingkat dengan UKM Permata Sholawat yang berdiri pada tanggal 27 April 2017. UKM ini berdiri sebagai respon atas makin kuatnya pengaruh UKM Bapinda dan UKM AL Ittihad di kalangan para mahasiswa di UIN Raden Intan. UKM Permata Sholawat lahir di tengah hilangnya daya simpatik pimpinan kampus terhadap pendekatan demonstratif mahasiswa yang tergabung dengan PMII. Agar para mahasiswa yang berlatar belakang budaya Nahdliyin tidak banyak yang terpapar oleh berbagai macam ideologi yang tidak selaras dengan ideologi *ahlussunah waljamaah* maka UKM Permata Sholawat ini berdiri dengan dukungan penuh pimpinan kampus, khususnya Rektor UIN Raden Intan Lampung.

Menurut Ketua UKM Permata Sholawat, Moh Mahfudz Nasir yang juga mahasiswa Prodi PAI setelah melakukan dua kali rekrutmen, kini anggota UKM ini sebanyak 900 orang. Kegiatannya antara lain setiap hari Sabtu *diba'*, *burdah barzanji* dan *maulid simtuddurar*, *tahlilan* di setiap malam Jumat dan *khataman Quran* setiap bulan sekali. Ada pula kajian keaswajaan dan fikih yang pelaksanaannya setiap hari Senin dan Rabu di dekat embung samping bangunan masjid baru. Tanah kosong yang luas dekat embung dengan suasana yang nyaman, hampir setiap sore harinya ramai dengan berbagai kelompok diskusi mahasiswa berkegiatan di tempat tersebut.

Dibandingkan dengan dua UKM yang diulas sebelumnya, UKM Permata Sholawat belum memiliki struktur organisasi yang mapan dan sistem kaderisasi yang kuat. Namun dengan berbekal pada pendekatan budaya santri dengan basis NU, berbagai even kegiatan UKM ini selalu dipadati oleh mahasiswa dari berbagai prodi atau fakultas. Melalui UKM Permata Sholawat ini, para mahasiswa yang berasal dari basis NU dan ingin merawat dan mengembangkan amaliyah NU di kalangan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung kembali memiliki eksistensi.

Setelah melakukan observasi terhadap berbagai kegiatan UKM Bapinda, UKM Al-Ittihad dan UKM Permata Sholawat di kalangan anggotanya masih terjalin interaksi sosial yang harmoni dan saling membangun toleransi satu sama lain dalam berkegiatan. Namun ketika dalam konteks isu nasional terjadi konflik pertarungan opini yang berimbas pada aksi massa, tampak sekali perbedaan yang mencolok di antara mereka. Sebagaimana dalam kasus peristiwa aksi bakar bendera HTI yang dilakukan Banser di Garut, yang kemudian menjadi isu nasional dengan *framing* isu Banser membakar bendera tauhid.

Komunitas politik keagamaan di Lampung juga bergolak sampai muncul aksi massa di Tugu Adipura Bandar Lampung yang dipimpin oleh Ust Buchori Abdus Shomad, para simpatisan aksi itu datang dari UKM Bapinda dan UKM Al-Ittihad, namun tidak demikian halnya dengan UKM Permata Sholawat. Jadi sangat terlihat sekali perbedaan posisi ideologis antar UKM di UIN Raden Intan Lampung.

Perbedaan posisi ideologis menyangkut isu-isu keagamaan ini dengan sendirinya akan menciptakan kontestasi dan ketegangan lainnya di lingkungan kampus. Konteks situasi semacam ini hampir terjadi di banyak kampus seperti di Indonesia, bahkan mancanegara sekalipun sebagaimana pengakuan Ed Husain, seorang mahasiswa di salah satu universitas di London Inggris, dengan sangat baik ia membongkar kedok utopisme dan kepalsuan dari gerakan islamisme yang menurutnya makin menjauhkan dari jati diri Islam sejati. Ia menulis pengakuan atas keterlibatannya dengan organisasi Islamisme itu melalui tulisan, *The Islamist; Why I Joined radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left*. Buku ini diterjemahkan dengan sangat baik oleh penerbit Gading Yogyakarta dalam judul *Pengakuan Pejuang Khilafah.*

Catatan Penutup: Kampus Membendung Islamisme

Daya kritis dan analitis komunitas akademik di kampus sepertinya makin kehilangan imunitasnya ketika berhadapan dengan gelombang Islamisme yang makin ekspansif. Pergolakan pemikiran yang selalu menjadi bagian dari ciri masyarakat akademik makin kehilangan daya magisnya sehingga banyak masyarakat kampus, seperti dosen dan mahasiswa seolah kehilangan arah dalam memandu dinamika masa depan, dan pada akhirnya terperangkap dalam dinamika arus islamisme. Moderatisme pemikiran keagamaan yang selama ini menjadi kekuatan kultural kampus makin kehilangan pendukungnya. Warisan kultural dan politik terkait eksistensi kebangsaan dan kebhinekaan makin terancam oleh pandangan mahasiswa dan juga beberapa dosen yang ingin memperjuangkan Islamisme dan menggeser sistem NKRI dalam relasi masyarakat di masa depan.

Secara perlahan dinamika kekuatan kultural kampus makin mengarah pada relasi konservatisme keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya pengajian, *halaqah*, *tablig akbar*, dan gaya berbusana mahasiswa yang makin nyaman dengan menggunakan *niqab* atau cadar. Sementara tradisi riset, debat kritis untuk membongkar berbagai hal yang terkait dengan dimensi ideologisasi pengetahuan makin memudar. Hal semacam inilah setidaknya yang muncul ketika mendiagnosis mahasiswa Prodi PAI yang lebih banyak karakternya dibentuk oleh pengaruh tradisi forum-forum pengajian dari aliran keagamaan tertentu dibandingkan dengan dinamika keilmuan dengan tradisi akademik kritis dan analitis dari lingkungan kampus sendiri.

Pelan tetapi pasti, jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka para guru pendidikan agama Islam makin dibentuk karakternya oleh arus islamisme dibandingkan arus moderatisme Islam. Keterpaparan para guru PAI ke dalam kesadaran Islamisme dapat pula

menular ke dalam kesadaran para calon anak didiknya kelak di kemudian ini. Kondisi ini akan menciptakan siklus relasi ideologi dosen mempengaruhi kesadaran mahasiswanya. Praktik keterpaparan pelajar SMA dalam organisasi rohis dapat menjelaskan situasi semacam ini pula (Muslim, dkk: 2018).

Kementerian Agama dan juga Rektor UIN Raden Intan Lampung sebenarnya mulai memperhatikan kondisi ini, namun sejauh ini dalam membendung arus islamisme yang mulai menjangkiti para mahasiswa masih menggunakan pendekatan *soft power* dan belum secara sistematis membendung melalui pendekatan struktural-sistemik. Padahal pendekatan semacam ini sangatlah penting, bukan saja membatasi yang sudah terpapar, namun juga memproteksi agar gelombang dari luar tidak makin berhembus kencang masuk ke dalam kampus. Pengalaman Fakultas Pendidikan dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang menghentikan kontrak dosen LB yang menjadi aktivis HTI, langkah tegas dan bijak yang patut diapresiasi, meskipun perlu kebijakan yang lebih kuat lagi di tingkat universitas sebagai *guidance* dalam membangun imunitas kampus dari ekspansi gelombang islamisme ini.

Beberapa yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi untuk memperkuat kembali Prodi PAI agar kembali menjadi kekuatan moderatisme keislaman adalah sebagai berikut: *Pertama*, perlunya redesain paradigmatik dan kurikulum Prodi PAI agar tidak sekadar membangun karakter sebagai guru pendidikan agama Islam tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah dan atas, namun juga mengembangkan diri sebagai guru yang memiliki kompetensi lebih mendalam terkait ilmu-ilmu keislaman kritis. Guru juga terlibat dalam dinamika masyarakat, sebab itu perlu juga memiliki kemampuan dalam merespons dinamika keislaman yang makin kompleks pula di masyarakat.

Kedua, perlunya di dalam kurikulum perbaikan nantinya, memasukkan berbagai materi perkuliahan seperti ilmu logika, studi agama-agama dan multikulturalisme agar para mahasiswa Prodi PAI memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. Imunitas mahasiswa Prodi PAI begitu melemah ketika digempur oleh arus islamisme secara *online* dan *offline* karena tidak memperoleh bekal yang memadai di dalam desain kurikulum pembelajaran yang memungkinkan dosen membentuk karakter keislaman yang menyatu dengan kesadaran kebangsaan.

Ketiga, perlunya kebijakan kampus mengembangkan moderatisme keagamaan yang kuat, mulai dari model sistem penerimaan mahasiswa baru, kode etik UKM Intra kampus yang harus menonjolkan nasionalisme kebangsaan yang kuat dalam berkegiatan. Kebijakan kampus perlu melakukan monitoring dan membuat kebijakan baru terkait orientasi ideologis UKM-UKM yang ada, agar lebih berorientasi spirit keilmuan akademik, bukan orientasi ideologis. Memberi ruang yang begitu luas model keberagamaan di luar moderatisme Islam ke di dalam struktur organisasi antar kampus sama dengan menciptakan polarisasi politik keagamaan yang semakin kuat di kalangan mahasiswa sejak awal masuk kampus sampai nantinya ketika lulus kuliah. ***

Referensi

Aryanti, Zuzy, Imam Mustofa, dkk. 2015. "Persepsi dan Resistensi Aktivis Muslim Kampus terhadap Paham dan Gerakan Islam Radikal: Studi Kasus Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung." *Jurnal PENAMAS* 28 (2).

Aziz Muslim, Abdul, dkk. 2018. *Menjaga Benteng Kebihnekaan di Sekolah*. Jakarta: Maarif Institue, PPIM UIN Jakarta.

Brown Wright, Gloria. 2011. "Student-Centered Learning in Higher Education." *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* 23 (3): 92-97.

Fealy, Greg & Sally White. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publisihing Institute of Southeast Asian Studies.

Husaun, (ed.). 2017. *Pengakuan Pejuang Khilafah*, Yogyakarta: Penerbit Gading.

Qohar, Abdul. 2011. "Arah Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Salafi Lampung." *Jurnal TAPIs* 7 (13).

Kasali, Renald. 2018. *The Great Shifting: Series on Disruption*, Jakarta: Gramedia.

Syukur, Abdul. 2003. *Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Turner, R Bryan. 2011. "Religion and Contemporary Sociological Theories." *Sociopedia. isa*. DOI: 10.1177/205684601431.

Tibi, Bassam. 2012. *Islamism and Islam*, Yale University Press.

5

MENYAMBUT MUSIM SEMI RADIKALISME

Produksi Guru PAI di Jakarta dan Banten

Ahmad Salehudin

Pendahuluan

DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat merupakan daerah di Indonesia yang seringkali dianggap sebagai potret dari rendahnya intoleransi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari *release* Setara Institute tahun 2015 dan tahun 2017. Fenomena ini seolah-olah mengonfirmasi publikasi *The New York Times* pada tahun 2012, yang berjudul "*Indonesia's Rising Religious Intolerance*," yaitu Indonesia yang dikenal sebagai negara yang plural, toleran, dan damai, lambat laun berubah menjadi cenderung intoleran dan radikal. Ada pengerasan sikap keberagamaan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, baik atas nama Negara, maupun kelompok-kelompok masyarakat.

Di Kota Serang, Provinsi Banten misalnya, rendahnya intoleransi dapat dilihat ketika penjual warung makan, Saeni, hanya bisa menangis ketika dagangannya disita aparat Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Serang, pada Jumat, 10 Juni 2016, karena dianggap melanggar aturan dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Serang mengenai larangan warung buka siang hari di Bulan Suci Ramadan. Pada Oktober 2016, sejumlah ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Banten menolak pelantikan Listyo Sigit

Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Ahmad Dofiri, karena agama Listyo Sigit Prabowo berbeda dengan keyakinan mayoritas penduduk Banten beragama Islam (PT Viva Media Baru, 2016). Jauh sebelumnya, pada tahun 2003 patung pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa yang berada di simpang Kebon Jahe, Kota Serang dibongkar. Salah satu alasan yang muncul saat itu adalah kekhawatiran menguatnya pengkultusan terhadap Sultan Ageng Tirayasa yang dapat berujung pada perbuatan syirik, yaitu "menyembah" Sultan Ageng Tirtayasa baik sadar atau tidak sadar (Rifa'i, 2018).

Pada tahun 2017, hajatan Pilgub menyebabkan terjadinya penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah Pilgub 2017. Kondisi ini menyebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Sebenarnya, jejak intoleransi keagamaan di Jakarta dapat ditelusuri dari penolakan warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mayoritas Muslim terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli yang beragama non Islam pada tahun 2013 (Kuwado, 2013). Sikap intoleransi masyarakat DKI Jakarta semakin menguat ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI). Mereka menghimbau kepada seluruh umat Islam Jakarta, habaib, kiai, ormas Islam, ormas Betawi, pondok pesantren, majelis taklim, mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk mengikuti 'Aksi Akbar' menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta (Rochmanuddin, 2014). Selama proses kampanye Pilgub DKI 2017, intoleransi keagamaan di Jakarta menjadi semakin menguat dan mengeras. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak Ahok menjadi Gubernur DKI karena beragama Kristen, dalam perkembangannya juga menolak dan memusuhi orang-orang Islam yang menjadi pendukung Ahok, misalnya pelarangan salat jenazah bagi pendukung Ahok atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya (Tempo.co, 2017).

Merupakan sebuah kenyataan bahwa kota-kota dengan tingkat toleransi rendah, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Serang memangku keberadaan prodi-prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidyatullah Jakarta (selanjutnya ditulis PAI UIN Syarif Hidayatullah), Prodi PAI Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (selanjutnya ditulis PAI UMJ), dan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (selanjutnya ditulis PAI SMH Banten). Mahasiswi dan mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ berada pada kondisi rentan untuk terpapar sikap islamisme, intoleransi, dan radikalisme. Ketiga perguruan tinggi tersebut berada pada simpang arus wacana intoleransi, tidak saja karena secara geografis berada di daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi rendah, tetapi juga karena para mahasiswa hidup dan sebagian besar berasal dari daerah-daerah tersebut.

Ada tiga kondisi kerentanan yang dihadapi oleh mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, UIN SMH Banten, dan UMJ. *Pertama*, kerentanan pergaulan. Dengan berada pada titik silang pergaulan dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi rendah, bukan mustahil mereka akan dengan mudah terpapar sikap intoleran keagamaan. Dalam masyarakat yang intoleran, setiap individu yang berada di dalamnya akan mendapatkan internalisasi nilai-nilai yang juga intoleran. Cara individu merespons sangat dipengaruhi kemampuan masing individu dalam menyikapi. Dengan kata lain, individu yang hidup dalam masyarakat intoleran memiliki potensi besar untuk juga menjadi intoleran.

Kedua, kerentanan sosial-budaya. Mereka yang sudah memiliki sikap intoleran terhadap perbedaan dengan sendirinya akan mengalami kerentanan sosial-budaya. Mereka akan cenderung enggan untuk bergaul dengan pihak yang berbeda dan menganggap yang berbeda sebagai ancaman. Salah satu contohnya adalah merasa tidak nyaman jika memiliki tetangga yang berbeda agama, tidak mengizinkan agama lain mendirikan rumah ibadah di dekat rumahnya, dan –-dalam kontestasi politik pemerintahan-– tidak mau dipimpin oleh mereka yang berbeda agama, sebagaimana penolakan terhadap pimpinan polisi di Banten dan lurah di Jakarta karena menganut agama yang berbeda dari kelompok mayoritas.

Ketiga, kerentanan agama. Mereka yang berbudaya intoleran dan secara sosial budaya terasing dari komunitasnya semakin rentan untuk terpapar paham keagamaan radikal. Mereka tidak saja akan mudah dipengaruhi dengan paham-paham tertentu, tetapi akan secara aktif mencari ideologi-ideologi yang mereka butuhkan atau dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterpaparan tidak semata-mata karena mereka menerima paham-paham keagamaan secara pasif, tetapi juga karena secara aktif mencarinya untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya.

Merujuk hasil survei The Wahid Foundation, ada indikasi intoleransi dan radikalisme di kalangan umat Islam di Indonesia cenderung meningkat. Kecenderungan ini dapat dilihat dari tren kenaikan sikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukai berdasarkan etnis, preferensi seksual dan organisasi menjadi 49% dari yang sebelumnya "hanya" 38,4% (Hafiz, 2018). Selain intoleransi level individual, kecenderungan peningkatan intoleransi juga terjadi pada (kelembagaan) ormas, yaitu dari 230 organisasi masyarakat, terdapat 147 organisasi diidentifikasi sebagai intoleran, 49 memiliki kecenderungan radikal, dan 34 organisasi terindikasi kuat sebagai kelompok teror (Hafiz, 2018). Fenomena yang disampaikan oleh The Wahid Foundation sangat penting namun sekaligus mengkhawatirkan. Dikatakan penting karena dapat menjadi dasar merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi agar pertumbuhannya dapat dikurangi atau "dilayukan" sama sekali, namun pada sisi yang lain juga mengkhawatirkan karena bertumbuhnya kelompok intoleran yang laksana cendawan dimusim penghujan memberikan indikasi bahwa ada perubahan narasi keagamaan di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Nampaknya, ada perubahan tren selera "berislam" anak-anak muda Islam Indonesia dari Islam ala masakan rumahan menjadi *fast food*.

Intoleransi dan radikalisme tidak selalu berujung kepada gerakan terorisme, tetapi semua terorisme selalu berangkat dari intoleransi dan radikalisme. Seperti halnya perempuan yang memilih bercadar, mereka tidak serta merta dapat dikatakan intoleran, radikal, dan bahkan terorisme. Namun, terorisme biasanya dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung oleh mereka yang menggunakan cadar. Dikatakan langsung artinya mereka melakukannya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur (Chairunnisa, 2018) atau penusukan terhadap anggota Brimob di Kelapa Dua Depok yang dilakukan dua orang perempuan yang juga menggunakan cadar (Setiawan, 2018). Sedangkan dikatakan tidak langsung karena mereka menjadi pihak yang mendukung kegiatan teror tersebut, misalnya menjadi istri para pelaku teror yang sebagian besar bercadar (Tribun, 2018). Tentu saja, fenomena perempuan bercadar harus disikapi secara hati-hati agar tidak terjebak dalam generalisasi, misalnya mengangap bahwa cadar merupakan identitas teroris. Faktanya, banyak perempuan bercadar yang bukan teroris. Cadar merupakan ruang multi tafsir sehingga perlu hati-hati melihatnya: apakah sebagai ekspresi kesalehan beragama, identitas teologis, atau simbol dari ideologi perlawanan yang menjadi titik berangkat terorisme.

Dalam konteks keindonesiaan, munculnya tren baru berpakaian dengan cadar yang menjadi simbolisme dari pola keberagamaan baru di Indonesia perlu disikapi secara cermat dan hati-hati. Pakaian dengan cadar –dengan menggunakan teori Geertz (1973) tentang simbolisme agama—merupakan pengejawantahan dari sebuah etos. Sebagai simbol etos, maka pakaian tidak dapat lagi dilihat sebagai aksesoris penutup tubuh belaka, misalnya agar penampilan menjadi lebih baik dan anggun, tetapi menyimpan nilai-nilai dari ideologi tertentu. Melalui pakaian yang dikenakan dapat diketahui ideologi apa yang terbungkus dalam tubuh pemilik pakaian tersebut, baik disadari atau tidak disadari oleh pemiliknya. Tindakan orang beragama, walaupun dalam derajat ketebalan yang berbeda, merupakan manifestasi dari pemahaman dan penghayatan agamanya, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar (Salehudin, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi sangat strategis untuk melihat keberadaan PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ. Ada tiga alasan yang mendasari. *Pertama*, sebagai pusat produksi calon guru PAI, tentu menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana ketiga prodi tersebut merespons fenomena meningkatnya intoleransi yang terjadi di lingkungan mereka dengan mempersiapkan calon guru agama Islam yang memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam. *Kedua*, calon guru PAI merupakan anak-anak muda yang cukup rentan terpapar intoleransi. Terbukanya akses informasi yang cukup luas memungkinkan mereka tidak saja menyerap pengetahuan agama dari kampus, tetapi juga secara bebas dan mandiri untuk menerima dan mencari, serta menambah pengetahuan agama dari keluasan teknologi informasi. *Ketiga*, untuk menakar kapasitas calon guru PAI yang secara langsung atau tidak langsung akan mendidik dan melakukan transmisi keislaman di kalangan masyarakat. Peran guru PAI

dalam transmisi keislaman tidak saja menjadi transmitter bagi siswa-siswi di sekolah, tetapi juga menjadi pengayom bagi masyarakatnya.

Menakar Asa Prodi PAI

Ada dua Prodi PAI Negeri dan satu prodi swasta yang menjadi subjek penelitian simpul Jakarta, yaitu PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ. Khusus untuk yang PAI Swasta, pada awalnya direncanakan Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu al Quran (IIQ) Jakarta (selanjutnya ditulis PAI IIQ Jakarta). Pada awalnya, PAI IIQ Jakarta bersedia untuk diteliti, sehingga kuesioner disebarkan ke mahasiswi. Namun ketika hendak ditindak lanjuti untuk pengumpulan data kuesioner dan interview dosen, pihak dekanat Fakultas Tarbiyah IIQ menyatakan tidak bersedia menjadi responden penelitian melalui surat Dekan Nomor: 019.3/DFT/IX/2018 tertanggal 18 September 2018. Dalam suratnya tersebut, Dekan IIQ tidak menjelaskan mengapa tidak bersedia menjadi responden penelitian. Namun terkait data kuesioner mahasiswa, dekan mengizinkan untuk tetap digunakan. Dengan demikian, data kuesioner dari PAI IIQ Jakarta akan tetap digunakan, terutama sebagai pembanding untuk subjek-subjek yang sama dengan tiga Prodi PAI lainnya.

Prodi IIQ kemudian diganti dengan Prodi PAI UMJ. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasarnya. *Pertama*, jumlah mahasiswa PAI UMJ, yaitu rata-rata 5 kelas per angkatan dengan jumlah masing-masing kelas 40an mahasiswa. *Kedua*, menjadi representasi pendidikan kader dakwah dari ormas Islam yang moderat. Dalam konteks kontestasi ideologi keislaman, PAI UMJ memiliki peran strategis tidak saja untuk menghasilkan guru PAI secara formal, tetapi juga menghasilkan kader dakwah yang menjadi *transmitter* Islam moderat yang terbingkai dalam keislaman dan kemuhammadiyahan. *Ketiga*, secara praktis, PAI UMJ dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Muhammadiyah, walau tidak menutup kemungkinan juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum atau madrasah.

PAI UIN Syarif Hidayatullah

Dalam rentang sejarah panjang keberadaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi PAI rata-rata merupakan prodi tertua, tidak saja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi juga di Indonesia. Saat ini, Prodi PAI merupakan satu dari 12 prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari 58 prodi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan melihat sejarah tersebut, dapat dipastikan bahwa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kiprah yang sangat tebal dan mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah terakreditasi BANPT dengan nilai A, serta telah terakreditasi AUNQA.

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi *center of excellence* dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat ASEAN dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.	Menyelenggarakan pendidikan akademik yang profesional inovatif dan efektif di bidang pendidikan Islam; Melakukan penelitian inovatif dalam bidang pendidikan dan studi Islam; Memberikan pelatihan dan konsultasi untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan Asia tenggara	1) Pendidik pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Alumni PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat melaksanakan (a) Pendidikan di sekolah di semua tingkatan SD SMP dan SMA; dan (b) Pendidikan di madrasah semua jenjang MI, MTS, dan MA. 2) Peneliti pendidikan agama Islam, yaitu dengan kategori: (a) peneliti permasalahan pendidikan agama Islam; dan (b) peneliti buku buku pendidikan agama Islam. 3) Konsultan pendidikan agama Islam. Mereka diharapkan menjadi (a) konsultan pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah, dan (b) konsultan pendidikan agama Islam di masyarakat

Gambar 5.1: Matriks Visi Misi Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PAI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK SMH Banten bertujuan menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam berkualitas dan profesional yang dilandasi keluhuran akhlak serta mampu berperan dalam mengembangkan ilmu pendidikan agama Islam di masyarakat. Jurusan PAI berstatus terakreditasi dengan nilai B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015.

Sedangkan profil lulusan yang diharapkan adalah: (1) Sarjana Pendidikan Islam berkualitas yang mampu berkompetisi dalam skala lokal, nasional dan global; (2) Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki keahlian profesi keguruan bidang PAI untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK; (3) Sarjana Pendidikan Islam yang mempunyai dasar-dasar keilmuan pendidikan; (4) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep pendidikan dengan konsep-konsep agama Islam; (5) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu melakukan penelitian bidang pembelajaran pendidikan agama Islam; (6) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu berperan sebagai guru Bimbingan dan Konseling di sekolah/madrasah.

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Keberadaan UMJ merupakan tindak lanjut dari keputusan konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah yang diadakan di Pekalongan untuk mendirikan Fakultas Hukum dan

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi Jurusan terkemuka dan unggul di Indonesia dalam menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan ke-Indonesiaan pada tahun 2020	Menjadikan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu yang melandasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pendekatan trans-disiplinary. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengembangan Pendidikan Profesi untuk menghasilkan tenaga pendidikan dan kependidikan. Melaksanakan penelitian dan kajian pengembangan ilmu pendidikan dan keislaman. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyebaran dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Menjalin kerja sama dan menyediakan informasi sebagai rujukan bagi stakeholders dalam bidang pendidikan dan keislaman.	1) Menjadikan tenaga pendidik yang profesional dalam bidang Pendidikan Agama Islam; 2) Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dilandasi nilai-nilai akhlakul karimah; 3) Menghasilkan karya-karya penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh stake holders; 4) Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi kepada masyarakat dalam penyebaran dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Agama Islam; 5) Membangun kerja sama dalam skala nasional, regional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguatkan.

Gambar 5.2: Matriks Visi Misi Prodi PAI UIN SMH Banten

Falsafah di Padang Panjang. Fakultas ini kemudian secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi'ul akhir 1375 H atau tanggal 18 November 1955. Pada tahun 1956, fakultas ini dipindahkan ke Jakarta dengan nama baru, yakni perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG), yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.

Pada 1958, PTPG Muhammadiyah dirubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pada tanggal 21 September 1961, dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial Mulyadi Djojomartono. Selanjutnya pada tahun 1962, dibuka Fakultas Tarbiyah, dan pada tahun 1963 dibuka 3 (Tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 1963, UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta.

Saat ini UMJ telah memiliki 9 (Sembilan) Fakultas dengan 43 Program Studi, meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan serta sekolah Pasca

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi program studi agama Islam yang bermutu tingkat nasional tahun 2025 yang dapat mencetak tenaga pendidik Agama Islam Profesional	1) Menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis kurikulum yang integratif memadukan tradisi keilmuan dan al-Islam Kemuhammadiyahan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan profesional sosial dan berkepribadian islami; 2) Menyelenggarakan program pembelajaran yang bermutu dan tepat guna untuk dapat mencetak lulusan yang berkualifikasi dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik agama Islam; 3) Memberikan layanan akademik dan non akademik yang prima kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam; 4) Mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem penjaminan mutu prodi untuk menjamin kualitas akademik dan non akademik; 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja program studi pendidikan agama Islam; 6) Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam bidang pendidikan agama Islam dengan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 7) Meletakkan tata kelola program studi secara demokratis transparan dan akuntabel; 8) Mempertinggi dan menggembirakan pendidikan karakter islami sehingga terwujudnya sikap perilaku mahasiswa pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai al-Islam Kemuhammadiyahan.	1) Menyiapkan guru pendidikan agama Islam yang profesional berbeda Dian islami serta memiliki kompetensi akademik pedagogik sosial kepemimpinan dan terampil yang bekerja di lingkungan sekolah madrasah dan lembaga pendidikan dan pelatihan; 2) Menyiapkan tenaga pendidik PKI yang memiliki akidah Islam dan wawasan keilmuan Al-Islam dan kemuhammadiyahan yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai guru PAI di sekolah dan madrasah yang menguasai bidang keahliannya cakap dan percaya diri serta berguna bagi masyarakat; 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kependidikan Islam dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia; 4) Mengembangkan keilmuan pendidikan Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan diridhoi Allah SWT.

Gambar 5.3: Matriks Visi Misi Prodi PAI UM Jakarta

Sarjana, yang memiliki sejumlah program magister, meliputi Magister Ilmu Hukum, Magister Studi Islam, Magister Manajemen, Magister Ilmu Administrasi, Magister akuntansi, Magister Kesehatan Masyarakat, dan Magister Ilmu Keperawatan. Prodi PAI merupakan satu dari 43 prodi di UMJ.

Profil lulusan Prodi PAI UMJ secara garis besar terdiri dari profil utama dan profil tambahan. Profil utama lulusan adalah pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam pada MTS SMP SMA SMK yang berkepribadian baik berpengetahuan luas dan mutakhir berkemampuan dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang mendidik dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan profesi dan Al Islam kemuhammadiyahan. Sedangkan, profil tambahan yang diharapkan adalah setiap lulusan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam SMH Banten memiliki kompetensi tambahan sebagai: (1) pendakwah atau *muballigh-muballighah;* (2) *Leadership* atau berjiwa kepemimpinan; (3) *Entrepreneurship* atau berjiwa kewirausahaan; dan (4) Manajerial.

Kompetensi lulusan Prodi PAI UMJ wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut: (1). Memiliki pengetahuan tentang al-Islam kemuhammadiyahan filsafat Pancasila kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; (2) Mampu mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). (3) Memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). (4) Memiliki kemampuan dalam berpikir kritis logis kreatif inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; (5) Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin;* (6). Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan, keislaman, dan kemuhammadiyahan sebagai paradigma keilmuan; (7). Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan nilai-nilai *al-Islam* kemuhammadiyahan.

Sedangkan pengetahuan khusus yang harus dimiliki oleh sarjana lulusan PAI UMJ adalah: (1) Ilmu-ilmu keagamaan: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsep ilmu agama Islam yang meliputi aspek-aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah serta kajian analisis dalil-dalil naqli dan aqli yang mendasarinya dari Alquran dan hadis; (2) Ilmu-ilmu pedagogis: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsep-konsep ilmu mendidik baik konsep secara umum maupun konsep pendidikan menurut persepsi Islam serta analisis teori dan pandangan klasik dan modern tentang teori dan praktik pendidikan; (3) Ilmu-ilmu pembelajaran pendidikan agama Islam: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsepsi keilmuan yang mendasari interaksi pembelajaran di kelas serta analisis teori dan praktik tentang berbagai aspek pendukung

proses pembelajaran baik yang bersifat manusiawi maupun material untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam; (4) Instrumen keilmuan pendidikan Islam: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan menerapkan metode ilmiah untuk pengembangan keilmuan pendidikan agama Islam secara ilmiah serta memupuk sikap-sikap ilmiah yang mendukung pengembangan keilmuan yang mencerahkan wawasan masyarakat.

Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh Sarjana Strata Satu Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah: (1) Mampu menerapkan pemikiran logis kritis sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur; (3) Mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni; (4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; (5). Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; (3) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; (7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; (8). Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; (9) Mampu mendokumentasikan menyimpan mengamanahkan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi; dan (10) Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja.

Pengetahuan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan program sarjana PAI Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah: (1) Terampil menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran PAI secara baik dan tepat sesuai kerangka dan prosedur; (2) Terampil mengembangkan kurikulum operasional dan mengembangkan materi ajar yang kontekstual dalam pembelajaran PAI; (3) Terampil menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran PAI yang mendidik efektif menyenangkan dan bermutu; (4) Terampil mendesain alat media bahan ajar dan sumber pembelajaran yang relevan bermakna dan mendidik; (5) Terampil menyusun instrumen melaksanakan dan mengolah hasil penilaian secara manual maupun berbasis sistem aplikasi; (6) Terampil melaksanakan perbaikan pembelajaran secara berkesinambungan melalui tindakan reflektif dan lesson studies.

Sangkar Emas Prodi PAI: Membonsai Potensi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan dari Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI

UIN SMH Banten, dan Prodi PAI UMJ sebagaimana telah disebutkan di atas, keberadaan Prodi PAI merupakan pengejawantahan dari semangat untuk menjadi lembaga pendidikan Islam unggul, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, kemanusiaan, dan keindonesiaan, sehingga mampu melahirkan guru PAI yang profesional. Profesional dalam konteks ini bukan hanya mampu mengajar secara baik dengan metode yang canggih, tetapi juga memiliki pengetahuan keislaman yang luas dan mendalam dalam rangka menopang kemanusiaan, dan keindonesiaan. Apabila kerangka ideal ini yang berjalan, tentu tidak akan ditemukan adanya guru PAI yang disinyalir terpapar sikap intoleransi dan radikalisme sebagaimana ditemukan dalam survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah (Sitepu, 2018). Sungguh ironis jika temuan PPIM tersebut benar: Guru PAI yang seharusnya menjadi benteng dan pemutus mata rantai intoleransi keagamaan malah menjadi *transmiter*-nya.

Guru PAI dilahirkan oleh sistem yang memproduksinya. Hanya saja, sikap intoleran dan radikal tersebut tidak sertamerta dibentuk oleh Prodi PAI, tetapi dibentuk oleh banyak faktor yang berkait-kelindan saling mempengaruhi. Guru PAI merupakan pribadi-pribadi aktif yang tidak saja secara pasif menerima nilai-nilai yang datang kepada dirinya, tetapi juga secara aktif dan kreatif mencari nilai-nilai yang sesuai dan dibutuhkan oleh dirinya; termasuk dalam hal ini pola keislamannya. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih dalam apakah pola keislamannya dibentuk oleh Prodi PAI atau faktor-faktor lainnya.

Sebagai sebuah sistem produksi guru, Prodi PAI tidak cukup hanya dilihat pada ranah idealitas sebagaimana terangkai dalam visi, misi, tujuan, dan kompetensi ideal yang dirumuskan, tetapi juga harus memperhatikan ranah realitas, yaitu faktor-faktor lain yang menjadi penopang berjalannya sistem produksi tersebut, seperti (1) input mahasiswa, (2) kapasitas dosen, (3) kurikulum pembelajaran, dan (4) sumber-sumber informasi keagamaan lain yang mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, terhadap proses pencapaian kompetensi (profesional, substansial, sosial, dan emosional) calon guru PAI dalam ruang produksinya.

Tersesat di Jalan yang Salah: Raw Input Mahasiswa

"Prodi PAI berupaya untuk mencetak ustaz dan ustazah," suara itu yang terdengar cukup nyaring disuarakan para dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ. Hal ini tampak lumrah didengar karena seyogyanya para alumni Prodi PAI ketika kembali ke masyarakat tidak semata-mata mengajarkan Agama Islam kepada anak didiknya di sekolah, tetapi juga menjadi *suluh* dan pembimbing keagamaan di masyarakatnya; atau dengan kata lain seorang guru PAI ideal merupakan para ustaz-ustazah yang memiliki kecakapan mengajar. Secara akademik, dengan mempertimbangkan jumlah peminat dan ketatnya persaingan, mereka yang diterima di Prodi PAI tentu memiliki kualifikasi akademik unggul sehingga mampu menyisihkan peminat lainnya. Problemnya adalah kualifikasi unggul secara akademik tidak

sertamerta menjadi jaminan memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman keislaman yang komprehensif, sehingga ketika lulus dari PAI menjadi merupakan ustaz-ustazah (baca: sarjana dengan pengetahuan dan pemahaman Islam) yang memiliki kompetensi mengajar. Di sinilah *raw input* mahasiswa perlu mendapat perhatian.

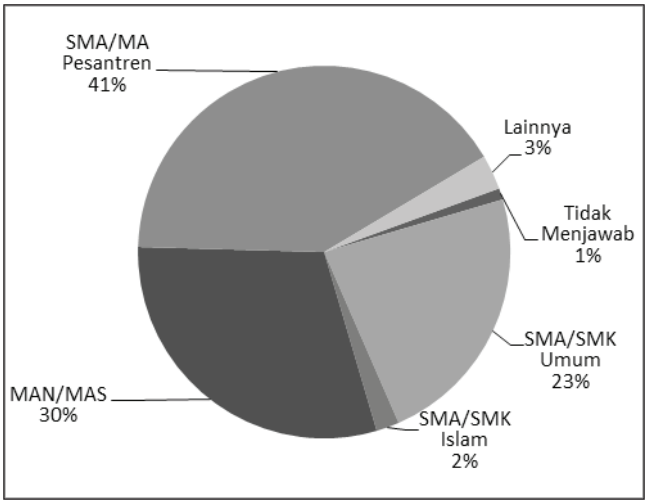

Gambar 5.4: Latar Belakang Sekolah Mahasiswa PAI

Sedikitnya ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tentang *raw input* mahasiswa PAI dalam konteks menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuan masing-masing prodi, yaitu latar belakang pendidikan mahasiswa PAI, jalur seleksi masuk, kemampuan berbahasa Arab, dan motivasi menjadi mahasiswa PAI. *Pertama*, latar belakang pendidikan mahasiswa PAI. Dari empat Prodi PAI yang disurvei, 23% mahasiswa PAI berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK (sekolah umum), 73% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren (atau dianggap memiliki bekal keagamaan), dan 4% sisanya tidak menjawab dan menjawab lain-lain. Jika dilihat dari masing-masing prodi, latarbelakang pendidikan mahasiswa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah sebanyak 77% berasal MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 18% berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan lain-lain 5%; mahasiswa Prodi PAI UIN SMH sebanyak 63% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 31% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, 4% tidak menjawab, dan 2% menjawab lainnya; mahasiswa Prodi PAI UMJ sebanyak 72% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 25% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan 2% lainnya; sedangkan mahasiswa Prodi PAI IIQ Jakarta sebanyak 78% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren (57% berasal dari MA dan SMK pesantren), 20% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan 2% menjawab lainnya. Informasi tentang latar belakang sekolah cukup bermanfaat untuk mengetahui komptensi dasar (modal pengetahuan keagamaan) calon mahasiswa Prodi PAI yang diproyeksikan menjadi guru Agama Islam.

Adanya data bahwa 23% (atau 27% jika ditambahkan dengan mereka yang tidak menjawab atau menjawab lain-lain) mahasiswa PAI berasal dari sekolah umum (SMAN/SMA/SMKN/SMK) harus dibaca cermat dan hati-hati, artinya ada 27% dari mahasiswa PAI yang berpotensi tidak memiliki modal (baca: latarbelakang pengetahuan dan pemahaman) keislaman yang memadai untuk menjadi guru PAI. Namun demikian, bukan berarti yang 73% sisanya yang berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren memiliki modal pemahaman dan pengetahuan Islam yang mencukupi, karena sebagaimana disampaikan oleh salah satu dosen, ada mahasiswa yang berlatar belakang SMA Pondok Pesantren juga tidak mampu membaca al-Quran dengan lancar. "Ada lho yang membaca *a la ma*, dari yang seharusnya *alif laamm miim*, atau *a la ra* dari yang seharusnya *alif lamm raa*", ungkapnya dalam sesi wawancara.

Pengelola prodi tampaknya menyadari bahwa sekitar 30-40% mahasiswanya memiliki pemahaman dan pengetahuan agama Islam yang minimalis atau tidak standar untuk menjadi guru PAI. Hal ini dapat dilihat dari adanya kurikulum standarisasi pemahaman dan pengetahuan agama, seperti matakuliah praktikum *qiraah*, *kitabah*, dan *ibadah* di PAI UMJ; matakuliah Praktikum *Qiraat* di PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mata kuliah *qira'atul qur'an wa tahfidz* (qqwt) di PAI UIN SMH Banten. Tentu saja, keberadaan mahasiswa PAI yang kurang memiliki dasar-dasar keislaman memadai, bukan kesalahan pengelola Prodi PAI, karena mereka pada dasarnya hanya "menerima" secara pasif mahasiswa yang telah lulus dari sistem ujian masuk.

Mereka yang memiliki pemahaman dan pengetahuan keislaman memadai tentu dapat diharapkan menjadi guru PAI yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman yang komprehensif dan mendalam sebagaimana tercantum dalam visi, misi, dan tujuan prodi, tetapi bagaimana dengan mereka yang kemampuannya minimalis? Jawaban dari pertanyaan ini cukup mudah, tetapi menjadi rumit ketika dikaitkan dengan realitas sosial bahwa mereka yang menyandang gelar Sarjana Pendidikan Islam seyogyanya telah memiliki "ijin" untuk menjadi guru agama Islam. Ijazah yang dipegang oleh masing-masing alumni PAI merupakan ijin untuk menjadi guru (ustaz atau ustazah), tanpa perlu dipertanyakan lagi apakah mereka memiliki pengetahuan keislaman yang memadai atau tidak sama sekali. Hal seperti ini yang menjadi kegelisahan beberapa dosen PAI ketika disodori adanya penelitian bahwa banyak guru PAI yang tidak *qualified* untuk mengajar. Mereka mengatakan perlunya penelusuran lebih jauh latar belakang pendidikan mereka, apakah alumni PAI atau bukan, karena di lapangan banyak guru PAI yang bukan alumni PAI. Selain itu, jika guru PAI tersebut memang alumni PAI, maka perlu juga ditelusuri asal-muasal perguruan tingginya.

Jika guru PAI tidak memiliki pengetahuan keislaman yang memadai, kira-kira pengetahuan agama Islam seperti apakah yang akan mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Atau pemahaman keagamaan seperti apa yang akan mereka transmisikan kepada anak didiknya? Jika pertanyaannya dilanjutkan, dari mana mereka akan mendapatkan bahan-bahan untuk mengajar? Akan menjadi bermasalah jika referensi

yang digunakan oleh guru PAI tersebut bersumber dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti internet dan group media sosial (medsos).

Kedua, seleksi masuk. Banyaknya jalur untuk menjadi mahasiswa PAI disinyalir menjadi salah satu biang keladi munculnya masalah di PAI, terutama yang terjadi di PAI PTKIN. Proses seleksi bersama di PTKIN yang hanya melihat kepada kompetensi akademik calon mahasiswa, baik yang berdasarkan nilai rapor (UAN) ataupun hasil ujian tes tulis dianggap oleh banyak kalangan belum mampu menjadi penyaring yang mumpuni untuk mendapatkan kandidat calon guru PAI. Prodi PAI hanya menjadi pihak yang "pasif" terkait siapa saja yang boleh diterima dan berapa jumlah mahasiswa setiap tahunnya yang akan diterima. Mungkin saja, secara akademik yang terekam dalam rapor dan/atau tersaji dalam hasil tes tulis ujian masuk si calon mahasiswa memiliki potensi akademik tinggi, tetapi akan bermasalah jika tidak memiliki bekal dasar keislaman yang memadai. Hal seperti ini yang dialami oleh PAI UIN Syarif Hidayatullah dan PAI UIN SMH Banten, di mana sekitar 30% mahasiswanya memiliki pengetahuan keislaman yang rendah. Hal serupa juga dialami PAI UMJ. Walaupun memiliki kesempatan untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, faktanya hal tersebut cukup sulit dilakukan karena mereka yang mendaftar adakalanya sudah tidak diterima di kampus negeri. Selain itu, mereka juga terbebani untuk menerima banyak mahasiswa sebagai penopang kehidupan dan keberlanjutan operasional kampus.

Ketiga, kemampuan berbahasa Arab. Bagi calon guru agama Islam atau calon ustaz-ustazah, mampu berbahasa arab adalah persyaratan mutlak. Dengan memiliki kemampuan berbahasa Arab, mahasiswa akan mampu mengakses pengetahuan keislaman langsung kepada sumber-sumber utamanya. Berdasarkan tes tulis kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, Prodi PAI UMJ yang *mengikuti Focus Grup Discussion* (FGD), didapatkan data sebagai berikut: Dari ketiga Prodi PAI yang dilakukan tes tulis, 19% mahasiswa PAI berkemampuan bahasa Arab sangat rendah, 39% rendah, 32% baik, dan 10 % sangat baik. Sedangkan jika dirinci per prodi, akan didapatkan data sebagai berikut: Kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah: Rendah 9%, Baik 64%, dan sangat Baik 27%; kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN SMH Banten: Sangat Rendah 25%, Rendah 67%, dan Baik 8%; Sedangkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UMJ adalah: Sangat Rendah 37%, Rendah 38%, dan Baik 25%. Dengan melihat hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa lebih dari 50% mahasiswa Prodi PAI memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Kemampuan bahasa arab yang rendah memiliki dampak terhadap dua hal, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan keislaman dari sumber-sumber utama, dan melakukan verifikasi atas informasi-informasi keislaman yang didapatkan.

Secara umum, mahasiswa PAI menganggap bahwa sangat penting mahasiswa PAI menguasai bahasa Arab. Mereka kemudian mengambil kursus bahasa Arab atau tinggal di pondok pesantren. Namun ada juga mahasiswa yang beranggapan bahwa seiring perkembangan teknologi dan informasi kemampuan berbahasa Arab tidak terlalu penting,

karena saat ini materi-materi keislaman sudah banyak terjemahannya. Kemampuan berbahasa Arab berkaitan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keislaman. Mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Arab mumpuni tentu akan mampu memperdalam, mengembangkan, dan "mengklarisifikasi" pengetahuan dan pemahaman keislaman dengan mengakses sumber-sumber keislaman yang berbahasa Arab secara langsung, tidak sekadar menerima dari hasil interpretasi orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan guru PAI yang memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Mereka akan sangat bergantung kepada hasil terjemahan atau pada buku-buku berbahasa Indonesia, sehingga akan kesulitan untuk mengembangkan dan mengakses beragam pemikiran keislaman.

Dosen-dosen PAI secara umum menganggap bahwa minimnya penguasaan

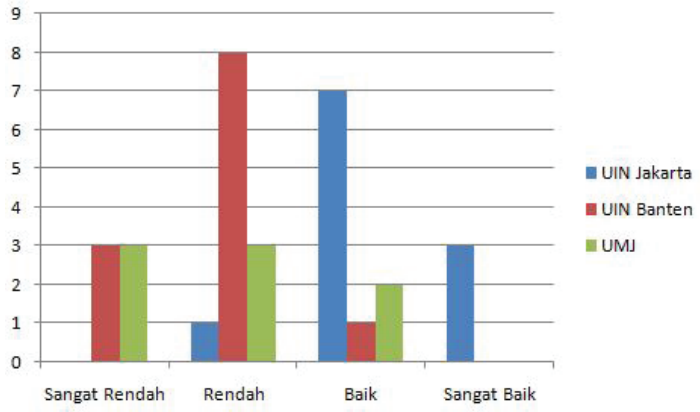

Gambar 5.5: Kemampuan Bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ

bahasa Arab mahasiswa sangat mengganggu dalam penyampaian materi pelajaran. Namun, para dosen tersebut tidak berdaya untuk menerapkan aturan secara ketat karena terbentur oleh sistem pendidikan yang mengharuskan semua mahasiswa harus lulus. Secara umum, ada tiga arus besar dosen dalam memandang pentingnya bahasa Arab. *Satu*, dosen PAI yang menganggap bahwa mahasiswa PAI harus mampu memahami teks berbahasa Arab. Mereka kemudian merumuskan pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa membaca teks-teks berbahasa Arab, dan menjadikan kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab sebagai parameter kelulusan. Dosen dengan tipe ini menganggap bahwa ketidakcakapan mahasiswa dalam bahasa Arab sangat mengganggu proses pembelajaran. Mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab memadai cenderung menghindari dosen-dosen dengan tipe ini. *Dua*, dosen PAI yang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Arab sangat penting, namun cukup realistis dalam menyikapi kemampuan bahasa Arab mahasiswanya. *Tiga*, dosen PAI yang tidak

mempersoalkan kemampuan bahasa Arab mahasiswanya. Mereka tidak mempersoalkan karena titik tekan mereka adalah menyampaikan materi sebagaimana yang telah mereka rumuskan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

Keempat, motivasi masuk PAI. Biasanya ada anggapan bahwa motivasi masuk Prodi PAI karena ingin menjadi guru. Anggapan ini tidak salah, namun tidak sepenuhnya akurat, karena alasan ingin menjadi guru tidak lebih dari 50%. Berdasarkan data kuisoner dari mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta diketahui bahwa sebanyak 48% ingin menjadi guru, 33% untuk dakwah dan ibadah, 9% dorongan orang tua, 7% kepastian kerja, 2% lapangan kerja, dan 1% tidak menjawab. Jika motivasi dilihat berdasarkan prodi, kita akan mendapatkan informasi yang cukup menarik. Motivasi mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, yaitu sebanyak 37% ingin menjadi guru, 36% untuk dakwah dan ibadah, 14% dorongan orang tua, 10% kepastian kerja, dan 3% lapangan kerja. PAI UIN SMH Banten, yaitu sebanyak 56 % ingin menjadi guru, 32% untuk dakwah dan ibadah, 4% dorongan orang tua, 6% kepastian kerja, dan 2% tidak menjawab. PAI UMJ, yaitu sebanyak 37% ingin menjadi guru, 42% untuk dakwah dan ibadah, 10% dorongan orang tua, 8% kepastian kerja, dan 3% lapangan kerja. Sedangkan motivasi mahasiswa PAI IIQ Jakarta, yaitu sebanyak 59% ingin menjadi guru, 23% untuk dakwah dan ibadah, 8% dorongan orang tua, 6% kepastian kerja, 2% lapangan kerja, dan tidak menjawab 2%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa domisili asal mahasiswa berpengaruh terhadap motivasi masuk PAI. *Satu*, motivasi mahasiswa PAI yang mayoritas berasal dari daerah, sebagaimana terpotret dari mahasiswa PAI SMH Banten dan PAI IIQ Jakarta, mayoritas motivasinya untuk menjadi guru. *Kedua*, jika komposisi

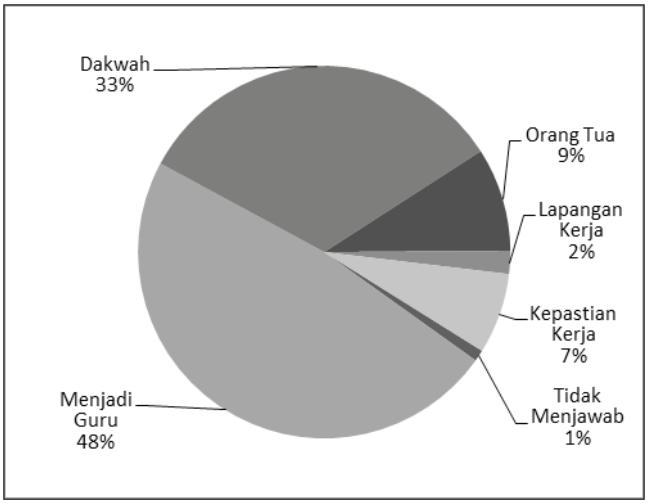

Gambar 5.6: Motivasi masuk PAI

mahasiswanya berimbang antara kota dan daerah, motivasi menjadi guru cenderung berimbang dengan motivasi untuk beribadah dan berdakwah sebagaimana dapat dilihat pada mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah. *Ketiga*, jika mahasiswanya cenderung berasal dari kota, sebagaimana mahasiswa PAI UMJ, motivasi tertingginya untuk beribadah dan berdakwah.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan dua orang mahasiswi yang berlatar belakang SMK Akuntansi, mereka mengatakan bahwa masuk PAI dalam rangka tegak lurus dalam beragama, yaitu untuk beribadah. Setelah lulus SMK, mereka sebenarnya sudah kuliah di prodi akuntansi, namun kemudian berhenti setelah mendapatkan bimbingan dari lembaga kerohanian Islam (Rohis) yang mereka ikuti ketika SMK. Pada awalnya keluarga mereka menentang keinginannya untuk berhenti kuliah dari prodi akuntasi, dan merencanakan masuk PAI untuk berdakwah dan beribadah. Namun pada akhirnya keluarganya mendukung keputusan mereka untuk masuk PAI dan merajut keinginannya berdakwah.

Kapasitas Dosen PAI

Secara umum, dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH Banten, dan Prodi PAI UMJ memiliki latarbelakang pendidikan bergelar Master, Doktor, dan Profesor. Dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya, memiliki 7 orang Profesor, 12 Orang Doktor, dan 13 orang Master. Para dosen yang mengampu matakuliah PAI sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan pesantren, baik pesantren tradisional maupun modern. Mahasiswa juga menganggap bahwa para dosen PAI memiliki pemahaman keislaman yang komprehensif. Menurut mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta, 97% dosen mata kuliah keislaman memiliki pengetahuan keislaman yang komprehensif, dan hanya 3% yang menyatakan tidak setuju.

Sebagai dosen PAI, mereka memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan kategori minimal baik. Penilaian diri (subjektif) para dosen PAI terhadap keahlian mereka berbahasa Arab cukup menarik. Sebanyak 36% dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah menganggap kemampuannya berada pada level cukup, 55% menganggap baik, dan 9% menganggap sangat baik. Dosen PAI UIN SMH Banten 20% merasa kurang, 40% merasa baik, sisanya tidak menjawab dan tidak ada yang merasa sangat baik. Dosen PAI UMJ sebanyak 70% merasa cukup, 20% merasa baik, dan 10% merasa sangat baik.

Kurikulum PAI: Mengembangkan atau Mengerdilkan?

Secara garis besar, kurikulum Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ dapat dipetakan dalam dua kompetensi besar, yaitu kompetensi Profesional (kemampuan mengajar) dan kompetensi substansial keislaman. Dengan melihat kepada kedua komptensi tersebut dan dikaitkan dengan visi, misi dan tujuannya,

alumni Prodi PAI akan menjadi seorang *alim* dalam agama Islam (kompetensi substansi keislaman) dan memiliki skill yang canggih dalam melakukan pembelajaran. Hanya saja, pertanyaannya kemudian apakah kurikulum yang didesain sudah mampu menghasilkan calon guru PAI yang memiliki kedalaman pengetahuan dan pemahaman Islam pada satu sisi, dan kemampuan "mengajar" pada sisi yang lain.

Dalam konteks PTKI, Prodi PAI merupakan salah satu prodi dengan masuk kategori tinggi peminat. Kondisi ini memungkinkan PAI tidak saja menerima mahasiswa dan mahasiswi dalam jumlah banyak dalam setiap angkatan, tetapi juga berkesempatan memilih calon-calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik unggul. Pada dimensi ini, yaitu berkesempatan sangat bebas untuk memilih calon mahasiswa terbaik, Prodi PAI memiliki ruang sangat luas untuk merealisasikan misi dan visinya. Hal ini tentu berbeda dengan prodi-prodi di lingkungan PTKI yang sepi peminat, sehingga siapa saja yang mendaftar "seolah" harus diterima. Hal seperti ini juga berlaku dengan kampus-kampus swasta yang mendasari beban biaya operasional kampusnya dari keberadaan mahasiswa.

Ketika mahasiswa yang diterima merupakan individu terpilih, keberadaan kurikulum menjadi salah satu faktor determinan dalam membentuk lulusan Prodi PAI sesuai dengan visi dan misinya; yaitu guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kecakapan dalam proses pembelajaran. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa alumni Prodi PAI secara umum hanya unggul dalam kecakapan pedagogis (mengajar), sedangkan kemampuan substansial keislaman cenderung rendah. Pada posisi ini, menarik untuk mempertanyakan, ada apa dengan kurikulum PAI?

Berdasarkan wawancara dengan stakeholder dan analisis terhadap kurikulum Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ, ada tiga hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, komposisi antara kompetensi pedagogis, keislaman, dan penunjang berkisar antara 50%-30%-20% atau 55%-30%-15%; 50%-55% untuk kompetensi pedagogis, 30%-35% untuk kompetensi keislaman, dan 15%-20% untuk penunjang. Khusus mata kuliah penunjang, secara umum merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa, apapun prodinya. Dengan melihat komposisi ini, tentu dapat dipahami mengapa alumni Prodi PAI cenderung cakap dalam hal pedagogis, namun relatif kurang dalam bidang materi keislaman.

Kedua, secara aturan, pada awalnya materi PAI di desain untuk memenuhi kebutuhan guru Agama Islam pada sekolah umum. Jika mengacu pada diktum ini, tentu cukup beralasan jika kurikulum dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan "pragmatis" mengajar agama Islam di sekolah umum. Namun dalam perkembangannya, alumni Prodi PAI juga masuk menjadi guru madrasah yang membutuhkan kemampuan lebih luas dan mendalam dengan spesifikasi yang khusus, seperti al-Quran-hadis, akidah-akhlaq, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan bahasa Arab. Dengan melihat konten dan komposisi kurikulum, tampaknya kurang tepat alumni Prodi PAI menjadi guru agama di madrasah.

Mata Kuliah	SKS
Psikologi Belajar PAI	2
Fiqih Ibadah I	2
Fiqih Ibadah II	2
Materi Al Qur'an Hadits I (MI/SD)	2
Materi Al Qur'an Hadits II (MTs/SMP)	2
Materi Al-Qur'an Hadits III (MA/SMA/SMK)	2
Materi Fiqh I (MI/SD)	2
Materi Fiqh II (MTs/SMP)	2
Materi Fiqh III (MA/SMA/SMK)	2
Materi Aqidah Akhlak I (MI/SD)	2
Materi Aqidah Akhlak II (MTs/SMP)	2
Materi Aqidah Akhlak III (MA/SMA/SMK)	2
Materi SKI I (MI/SD)	2
Materi SKI II (MTs/SMP)	2
Materi SKI III (MA/SMA/SMK)	2

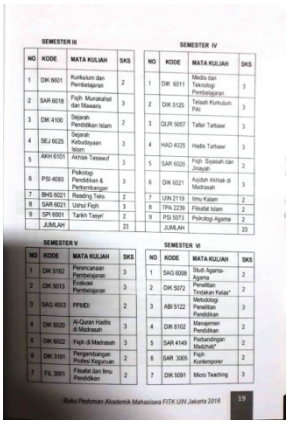

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	DIK 6001	Kurikulum dan Pembelajaran	2
2	SAR 6018	Fiqh Munakahat dan Mawaris	3
3	DIK 4100	Sejarah Pendidikan Islam	2
4	SEJ 6025	Sejarah Kebudayaan Islam	3
5	AKH 6101	Akhlak Tasawuf	3
6	PSI 4093	Psikologi Pendidikan & Perkembangan	3
7	BHS 6021	Reading Teks	2
8	SAR 6021	Ushul Fiqh	3
9	SPI 6001	Tarikh Tasyri'	2
	JUMLAH		23

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	DIK 6011	Media dan Teknologi Pembelajaran	3
2	DIK 5125	Telaah Kurikulum PAI	3
3	QUR 5057	Tafsir Tarbawi	3
4	HAD 4025	Hadis Tarbawi	3
5	SAR 6020	Fiqh Siyasah dan Jinayah	2
6	DIK 6021	Aqidah Akhlak di Madrasah	3
7	UIN 2119	Ilmu Kalam	2
8	TPA 2239	Filsafat Islam	2
9	PSI 5073	Psikologi Agama	2
	JUMLAH		23

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	DIK 5162	Perencanaan Pembelajaran	3
2	DIK 5013	Evaluasi Pembelajaran	3
3	SAG 4053	PPKDI	2
4	DIK 6020	Al-Quran Hadis di Madrasah	3
5	DIK 6022	Fiqh di Madrasah	3
6	DIK 3191	Pengembangan Profesi Keguruan	2
7	FIL 3001	Filsafat dan Ilmu Pendidikan	2

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SAG 6009	Studi Agama-Agama	2
2	DIK 5072	Penelitian Tindakan Kelas*	2
3	ABI 5122	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
4	DIK 6102	Manajemen Pendidikan	2
5	SAR 4149	Perbandingan Mahzhab*	2
6	SAR 3069	Fiqh Kontemporer	2
7	DIK 5091	Micro Teaching	3

Buku Pedoman Akademik Mahasiswa FITK UIN Jakarta 2016 19

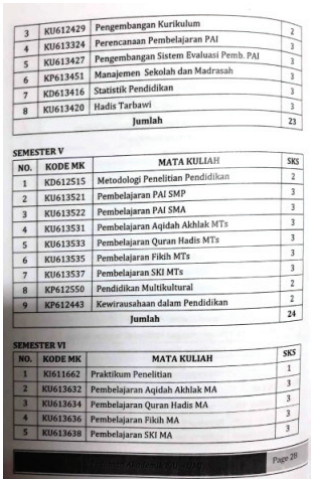

3	KU612429	Pengembangan Kurikulum	2
4	KU613324	Perencanaan Pembelajaran PAI	3
5	KU613427	Pengembangan Sistem Evaluasi Pemb. PAI	3
6	KP613451	Manajemen Sekolah dan Madrasah	3
7	KD613416	Statistik Pendidikan	3
8	KU613420	Hadis Tarbawi	3
		Jumlah	23

SEMESTER V

NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	KD612515	Metodologi Penelitian Pendidikan	2
2	KU613521	Pembelajaran PAI SMP	3
3	KU613522	Pembelajaran PAI SMA	3
4	KU613531	Pembelajaran Aqidah Akhlak MTs	3
5	KU613533	Pembelajaran Quran Hadis MTs	3
6	KU613535	Pembelajaran Fikih MTs	3
7	KU613537	Pembelajaran SKI MTs	3
8	KP612550	Pendidikan Multikultural	2
9	KP612443	Kewirausahaan dalam Pendidikan	2
		Jumlah	24

SEMESTER VI

NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	KI611662	Praktikum Penelitian	1
2	KU613632	Pembelajaran Aqidah Akhlak MA	3
3	KU613634	Pembelajaran Quran Hadis MA	3
4	KU613636	Pembelajaran Fikih MA	3
5	KU613638	Pembelajaran SKI MA	3

Page 28

Gambar 5.7: Cuplikan Daftar Matakuliah PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UM Jakarta, dan PAI SMH Banten

Ketiga, materi keislaman PAI didesain untuk tidak produktif. Jika dilihat dalam struktur kurikulum, materi keislaman dibuat untuk memenuhi tuntutan mampu "mengajarkan" materi keislaman pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, seperti dapat dilihat misalnya pada matakuliah Materi Al-Quran Hadits I (MI/SD), Materi Al Qur'an Hadits II (MTs/SMP), dan Materi Al-Quran Hadits III (MA/SMA/SMK). Contoh lain adalah adanya mata kuliah Materi Fiqh I untuk MI/SD, Materi Fiqh II untuk MTs/SMP, dan Materi Fiqh III untuk MA/SMA/SMK. Dalam proses wawancara disebutkan bahwa mata kuliah tersebut dalam proses revisi dan akan segera diganti dengan kurikulum baru.

Dengan melihat komposisi kurikulum sebagai penopang kompetensi pedagogis, substansial keislaman, dan penunjang tampaknya memang Prodi PAI sejak awal tidak didesain untuk menghasilkan para sarjana Pendidikan Islam yang memiliki pemahaman keislaman yang komprehensif, luas, dan mendalam untuk dapat melakukan transformasi dan transmisi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan yang moderat, tetapi sekadar memenuhi kebutuhan pragmatis perusahaan yang bernama "sekolah" SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMA. PAI tampaknya berperan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) pencetak tukang meja, bukan ahli kayu yang mampu menerka dan mengimajinasikan tentang sebuah kayu yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

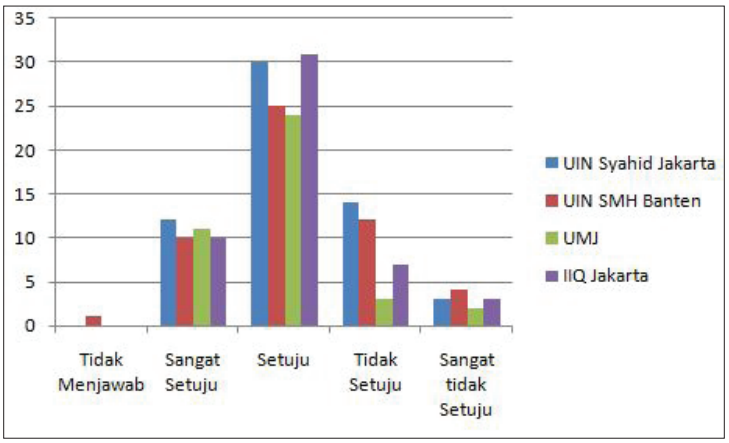

Gambar 5.8: Bergabung dengan grup medsos untuk menambah pengetahuan agama

Proses Pembelajaran: Ruang Semai yang Tandus

Berdasarkan penilaian mahasiswa, dosen-dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta dianggap memiliki pengetahuan keislaman yang komprehensif untuk mengajar mata kuliah keislaman. Mahasiswa juga menganggap bahwa para dosen berpengaruh signifikan dalam membentuk keberagamaan mereka, yaitu di atas 90%. Selain itu, mahasiswa juga sangat antusias membaca referensi yang direkomendasikan dosen, yaitu di atas 81%. Artinya, keberadaan dosen memiliki potensi signifikan dan sangat penting dalam membentuk keberagamaan dan corak pengetahuan mahasiswa. Hanya saja, pada sisi yang lain, tampaknya ada sesuatu yang perlu digali lebih serius terkait pola dan intensitas interaksi dosen dan mahasiswa.

Secara fungsional, dosen memiliki pengaruh signifikan terhadap pola keberagamaan dan pengetahuan mahasiswa, tetapi apakah tersedia ruang dan arena yang memadai sehingga transmisi pengetahuan dari dosen ke mahasiswa dapat berlangsung

secara baik dan produktif. Hal ini perlu dipertanyakan karena penggunaan internet untuk menambah pengetahuan agama di kalangan mahasiswa PAI relatif tinggi, yaitu mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah 49% , mahasiswa PAI UIN SMH Banten 39%, mahasiswa PAI UMJ 72%, dan mahasiswa PAI IIQ Jakarta 37%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mahasiswa PAI UMJ paling banyak bergantung kepada internet untuk menambah pengetahuan agamanya, diikuti PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI IIQ Jakarta. Tingginya penggunaan internet untuk menambah pengetahuan agama mahasiswa PAI mungkin saja karena mereka tidak mendapatkannya di ruang kelas. Ruang kelas menjadi ruang tandus berseminya pemahaman keislaman yang komprehensif, *ready use*, dan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, fenomena pemenuhan informasi agama dari internet mahasiswa PAI UIN SMH Banten, dan PAI IIQ Jakarta cukup menarik, karena ternyata mereka yang berasal dari "desa" dan berafiliasi dengan NU cenderung rendah dalam menggunakan internet sebagai sumber pengetahuan agama.

Selain menambah pengetahuan keagamaan melalui internet, mereka juga bergabung dengan grup media sosial. Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 71%, PAI UIN SMH Banten 67%, PAI UMJ sebesar 87%, dan PAI IIQ Jakarta sebesar 80%. Mereka juga bertanya tentang masalah-masalah keagamaan di grup media sosial yang mereka ikuti dengan proporsi cukup tinggi, yaitu 40% untuk mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 40% untuk mahasiswa PAI UIN SMH Banten, 67% untuk mahasiswa PAI UMJ, dan 57% untuk mahasiswa PAI IIQ Jakarta.

Tingginya penggunaan internet untuk memperdalam pengetahuan agama mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta menunjukkan tiga hal. *Pertama*, dosen-dosen PAI cenderung sulit diakses. Peran para dosen sebenarnya cukup signifikan dalam membentuk keagamaan mahasiswa, namun karena mahasiswa sulit mengakses para dosen yang mungkin sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, mahasiswa kemudian mencari informasi keagamaan dari internet dan media sosial lainnya. Tentu tidak masalah selama yang didapatkan dari internet atau grup-grup medsos adalah informasi keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan yang moderat, tetapi akan menjadi masalah ketika informasi yang diakses berasal dari kelompok intoleran, radikal, atau bahkan teroris.

Kedua, dosen-dosen PAI cenderung berfokus kepada materi perkuliahan sehingga abai terhadap fenomena keagamaan yang secara langsung dihadapi mahasiswa. Dalam wawancara dengan para dosen PAI, ada kecenderungan mereka hanya berfokus kepada materi perkuliahan saja dan cenderung menghindari isu-isu aktual dalam perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa mencari sendiri pengetahuan tentang isu-isu keagamaan kontemporer di internet atau dengan mengikuti grup-grup media sosial. Tentu saja dalam kondisi demikian, keberadaan mahasiswa menjadi cukup rentan untuk terpapar intoleransi dan radikalisme. Salah seorang mahasiswi, misalnya, mengatakan bahwa pada awal-awal kuliah sampai semester lima dia mengikuti grup tahajud berantai, namun

kemudian berhenti karena grup tersebut juga digunakan untuk menyajikan informasi-informasi politik. Jika si mahasiswa memiliki nalar yang cukup kritis tentu dia dapat memfilter informasi-informasi yang diterimanya, namun jika tidak kritis akan sangat mudah untuk terpapar ideologi tertentu dari group media sosial yang diikuti.

Ketiga, melihat kondisi mahasiswa yang cenderung ingin instan, maka kemungkinan keislaman yang ditawarkan oleh para dosen terlalu sulit untuk dicerna dan diamalkan, karena kurang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mengarungi kehidupannya. Mahasiswa sebagai generasi millennial dengan kompleksitas kehidupan yang dimiliki tentu ingin mengonsumsi ajaran agama yang mudah diamalkan dan tidak ribet, seperti yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah yang sering tampil di layar televisi, *youtube*, atau media sosial lainnya, seperti Ustaz Abdul Somad, Habib Rizieq Shibah, Adi Hidayat, Felix Siauw, dan yang lainnya yang secara jitu mampu mengemas Islam sesuai dengan selera mereka.

Terkait tokoh-tokoh yang menjadi idola mahasiswa ini, cukup menarik melihat kecenderungan tokoh agama idola mahasiswa masing-masing PAI yang diteliti. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tokoh-tokoh intelektual Islam yang berkaliber internasional seperti Prof. Azumardi Azra, Prof. Din Syamsuddin, dan Prof. Qurais Shihab. Namun, nama-nama beken tersebut bukan idola mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tokoh idola mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Ustadz Abdus Somad (14%), Ustadz Hanan Attaqi (8%), Ustadz Adi Hidayat (8%), Habib Rizieq Shihab (7%), dan KH Mustofa Bisri (6%).

Tokoh agama idola Mahasiswa di UIN SMH Banten berturut-turut dari yang paling popular adalah Ustaz Abdul Somad (18%), KH Hasyim Asyarie (12%), KH Ma'ruf Amin (6%), Ustaz Adi Hidayat (5%), dan Ustaz Yusuf Mansur (5%). Mahasiswa PAI UIN Banten yang mayoritas berasal dari keluarga NU tampaknya masih cukup mengenal tokoh-tokoh NU. Masuknya nama KH Hasyim Asyarie dan KH Ma'ruf Amin sebagai idola menunjukkan bahwa Banten masih tetap merupakan basis NU. Namun demikian, tetap saja mayoritas dari mereka mengidolakan Ustaz Abdul Somad yang dianggap tegas, alim, dan tidak partisan.

Sedangkan tokoh idola mahasiswa PAI UMJ berturut-turut: Ustaz Abdul Somad (21%), Habib Rizieq Shihab (12%), dan Ustaz Adi Hidayat (6%). Komposisi tokoh idola mahasiswa PAI UMJ cukup menarik karena mereka tidak "mengenal" tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti KH. Ahmad Dahlan, Buya Syafi'i Ma'arif, Amin Rais, dan lainnya. "Ketidak-tahuan" mahasiswa PAI UMJ terhadap para tokoh Muhammadiyah tersebut menunjukkan terganggunya atau terputusnya transmisi keilmuan dan keislaman Muhammadiyah, dan digantikan dengan munculnya model baru keilmuan dan keislaman sebagaimana diusung oleh tokoh idola mereka.

Dengan melihat komposisi tokoh agama idola mahasiswa tersebut, dapat diterka bahwa pemikiran keislaman mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN

SMH Banten, dan PAI UMJ sedikit banyak akan sama seperti tokoh idolanya. Para pemuja akan selau berusaha untuk mengikuti dan mengidentifikasi dirinya seperti tokoh idolanya. Hal ini yang saat ini secara pelan namun pasti sedang berkembang di Prodi PAI. Dengan difasilitasi oleh internet dan media sosial lainnya, lambat laun para ustaz idola tersebut menggantikan peran-peran dosen dengan ruang kelasnya, dan pada saat bersamaan menyemai islamisme di kampus.

Musim Semi Radikalisme di Prodi PAI

> "…. Pernahkah kawan-kawan memikirkan saudara-saudara kita di Palestina? Mereka saat ini hidup dalam penindasan. Mereka dizalimi oleh Israel dan kita di sini, tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Agar kita bisa secara langsung membantu saudara-saudara kita di Palestina melawan Israel, maka mau tidak mau Indonesia harus menjadi negara Islam."

Kata-kata tersebut diucapkan dengan suara bergetar penuh emosi oleh Dian (bukan nama sebenarnya), peserta FGD, seorang mahasiswa PAI UIN SMH Banten berperawakan tinggi agak gemuk, mengaku sudah memiliki istri, dan merupakan "mantan" aktivis HTI. Apa yang disampaikan tersebut seolah-olah menjadi pembungkus atas semua sikap dan ucapannya selama proses FGD. Dengan suara agak tinggi dan terlihat emosional, misalnya, dia menolak berpendapat dan bahkan mempertanyakan konsep radikal ketika diajukan pertanyaan bahwa berdasarkan hasil penelitian, guru-guru PAI banyak yang terpapar intoleransi dan radikalisme. Namun semangatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam ternyata berbanding terbalik dengan kemampuan bahasa Arabnya. Dalam uji tulis memberikan harakat dan mengartikan teks berbahasa Arab, kemampuannya masuk kategori sangat rendah.

Fenomena yang relatif ironis tersebut secara tersirat atau tersurat menginformasikan adanya Islamisme di Prodi PAI. Islamisme sedang bersemi dan tumbuh di prodi-Prodi PAI dengan kecepatan yang berbeda-beda, misalnya mulai maraknya pakaian berjilbab besar, kajian-kajian bertemakan khilafah, sikap keras terhadap kelompok sempalan, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena tersebut, baik secara tebal maupun tipis, menjadi penanda sedang bertumbuhnya Islamisme di Prodi PAI. Islamisme memasuki musim semi di Prodi PAI. Ada lima fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu penggunaan jilbab besar atau cadar, pandangan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, memilih pemimpin nonmuslim, pandangan terhadap Barat, dan tentu saja tentang negara Islam.

Pertama, fenomena cadar. Perdebatan cukup keras tentang cadar bermula dari keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga (walaupun kemudian dicabut kembali) untuk melarang penggunaan cadar, yang kemudian baik secara implisit atau eksplisit diikuti oleh PTKI lainnya di Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah mahasiswi bercadar di Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ tidak banyak, bahkan dibilang sangat sedikit, totalnya tidak lebih dari lima orang. Namun yang berjilbab lebar cukup banyak. Sangat mudah untuk menemui mahasiswi PAI

yang menggunakan jilbab besar, walaupun tentu saja jumlah yang menggunakan jilbab kecil (baca: wajar) lebih banyak. Mereka yang bercadar kebanyakan berafiliasi dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau sejumlah kecil dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hal yang cukup menarik ketika berbicara tentang cadar, sebagian besar mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ menolak jika cadar dilarang. Menurut mereka, bercadar merupakan hak setiap orang untuk menjalankan agamanya.

Sedangkan para dosen PAI di tiga prodi yang diteliti cenderung berbeda pendapat. Dosen-dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PAI UMJ cenderung melarang mahasiswi menggunakan cadar. Bahkan, menurut informasi dari mahasiswa, ada dosen di PAI UIN Jakarta meminta mahasiswi yang bercadar untuk melepas cadar ketika perkuliahan. Selain itu, ada juga dosen yang "mengajak berdiskusi" mahasiswi yang bercadar, untuk mengetahui mengapa mereka menggunakan cadar. Berbeda dengan dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PAI UMJ, Dosen PAI UIN Sultan Maulana Hasanuddin mengatakan tidak sepakat jika ada pelarangan cadar. Bagi mereka, bercadar atau tidak merupakan pilihan bebas masing-masing individu. Dalam konteks PAI UIN Banten, munculnya kelompok-kelompok sesat, seperti kerajaan Ratu Ubur-Ubur, lebih mendapatkan perhatian daripada isu Islam fundamentalis atau Islam transnasional yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tema diskusi yang cukup seksi, terutama jika dikaitkan dengan konteks NKRI.

Dalam proses penelitian, peneliti tidak sempat mewawancarai mahasiswi yang bercadar, namun hanya tiga orang mahasiswi menggunakan jilbab besar yang pernah berkeinginan untuk menggunakan cadar, sebut saja namanya Eva, Diyah, dan Pipin. Eva bercerita bahwa sejak SMA dia sudah ingin menggunakan cadar. Pada awalnya dia ingin kuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat, namun tidak diterima. Dia malah diterima di Prodi PAI. Sebagai mahasiswi Prodi PAI berlatar belakang SMA, dia merasa Islamnya masih sangat kurang. Kemudian dia ikut beberapa kegiatan keagamaan seperti kajian LDK dan Tahajud Berantai. Dalam salah satu kesempatan, dia ikut kegiatan keislaman di Masjid Istiqlal dan mendapati ada salah satu *stand* "pembagian" jilbab besar gratis ukuran 130 cm dan 150 cm. Ketika dia mendatangi *stand* tersebut, salah seorang penjaganya memberikan jilbab berukuran 130 cm, karena melihat jilbab yang dipakai saat itu jilbab kecil. Pada saat dia menggunakan jilbab besar tersebut, si mbak penjaga stand bilang, "Dirimu tampak semakin cantik dan anggun dengan jilbab seperti ini". Sejak saat itu dia menggunakan jilbab besar, dan sempat ingin memakai cadar namun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ketika memutuskan mondok, dia lebih banyak menggunakan jilbab standar, walau terkadang masih juga menggunakan jilbab besar. Dalam dua kesempatan wawancara, Eva menggunakan ukuran jilbab yang berbeda, standar dan lebar.

Lain lagi dengan Pipin dan Diyah, mahasiswi PAI dengan latar belakang SMK Akuntansi. Mereka mulai memakai jilbab standar pada saat SMP dan berlanjut hingga kelas 1 SMK. Perubahan terjadi ketika mereka naik kelas 2 SMK dan mulai aktif di

Rohis. Bahkan mereka sempat berkeinginan menggunakan cadar, namun di SMK tidak memungkinkan dan selain itu orang tua juga tidak setuju. Selain tampak semakin cantik, dengan jilbab besar mereka merasa lebih nyaman, dan tidak lagi merasa risih dengan pandangan laki-laki terhadap dada dan pinggulnya. Walaupun pada awal menggunakan pakaian besar dengan berangkap-rangkap merasa gerah dan tidak nyaman, tetapi lama kelamaan menjadi nyaman. Fenomena Eva, Pipin, dan Diyah ketika menggunakan jilbab besar cukup menarik untuk dianalisis lebih jauh. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan jilbab besar terkait informasi keagamaan yang diterimanya. Semakin beragam informasi yang didapat, maka ada peluang untuk berubah. Selain itu, prosesnya juga bertahap, mulai dari terlihat cantik, menjadi lebih nyaman karena tidak menjadi sasaran pandangan laki-laki, dan lain sebagainya.

Kedua, pandangan terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Dalam konteks Islam Indonesia, isu tentang Ahmadiyah dan Syiah cukup sensitif, khususnya dalam 10 tahun terakhir di DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Para pengikut Ahmadiyah dan Syiah seringkali menjadi korban persekusi, baik yang bersifat fisik atau ujaran. Mereka menjadi korban kekerasan karena dianggap mencemari Islam. Ada pola menarik terkait upaya membungkam Ahmadiyah dan Syiah. Jika untuk membungkam Ahmadiyah dilakukan dengan elemen-elemen Islam yang cair, artinya tidak ada organisasi khusus yang melakukan eksekusi, maka untuk Syiah cenderung lebih tertata dan sistematis, seperti pembentukan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Di Jakarta, ANNAS dideklarasikan pada 25 Oktober 2015 (Padati, 2016) dan di Banten pada 19 Februari 2017 (ANNAS Indonesia, 2017).

Jejak anti Ahmadiyah dan Syiah juga dapat ditelusuri di kalangan mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta. Berdasarkan hasil kuesioner dari total empat prodi tersebut, sebanyak 47% menganggap Ahmadiyah dan Syiah bukan Islam, 49% menganggap Islam, dan 4% tidak menjawab. Jika diurutkan berdasarkan tingginya pandangan bahwa Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam di dapat data sebagi berikut: PAI UMJ (60%), PAI SMH Banten (48%), IIQ (47%), PAI Syarif Hidayatullah Jakarta (35%).

Secara komparatif, jumlah mahasiswa PAI yang menganggap Ahmadiyah dan Syiah bukan Islam sebanyak 47% berbanding dengan 49% yang menganggap Islam. Data tersebut cukup mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, khusus PAI UMJ, jumlah yang menganggap Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam sangat tinggi, yakni sebanyak 60%. Bahkan, ketika dilontarkan pertanyaan dalam forum FGD apakah mereka perlu dilindungi dari ancaman kekerasan? Sebagian besar mengatakan selama tidak "mencemari" Islam perlu dilindungi. Celakanya, isu yang dikembangkan terkait Syiah dan Ahmadiyah selalu berkaitan dengan pelecehan atau penistaan Islam.

Ketiga, memilih pemimpin yang seiman (Muslim). Dalam konteks demokrasi, memilih pemimpin sesuai dengan pertimbangan subjektif masing-masing pemilih tentu dibenarkan dan tidak salah, termasuk mempertimbangkan dimensi kesamaan agama

atau keimanan. Dalam konteks pilihan yang demikian, maka setiap keputusan memilih berdasarkan agama atau keyakinan tidak dapat dikatakan bahwa mereka fundamentalis atau intoleran. Demikian juga dengan mereka yang tidak mempertimbangkan agama sebagai landasan untuk memilih juga tidak dapat dikatakan tidak islami atau liberal. Oleh karena itu, pilihan berdasarkan atau tidak berdasarkan agama perlu diperdalam sehingga mampu mengungkap apakah pilihan seiman atau seagama berlatar belakang islamisme atau tidak. Dalam konteks ini, memilih pemimpin yang seiman menarik untuk diajukan.

Di tiga prodi yang diteliti, secara umum mayoritas mengatakan harus memilih pemimpin yang seiman. Namun alasan di balik pilihan tersebut ternyata memiliki level ketebalan keislaman yang berbeda-beda. Di Prodi PAI UIN SMH Banten dan PAI UMJ, alasan kenapa memilih pemimpin muslim karena Islam mayoritas. "Masak mayoritas dipimpin minoritas atau minoritas memimpin mayoritas," demikian kira-kira yang disampaikan. Artinya, keputusan memilih lebih didasari pertimbangan mayoritas dan minoritas, walaupun ukuran mayoritasnya berdasarkan agama. Sedangkan untuk PAI UIN Syarif Hidayatullah, alasan memilih pemimpin muslim sangat tebal nuansa keislamannya, yaitu untuk menyelamatkan akidah. Dengan perspektif ini, maka apabila ada dua calon pemimpin yang seagama dan yang berbeda agama, mereka akan tetap memilih yang seagama walaupun tidak kompeten untuk memimpin. "Menyelamatkan akidah," demikian kata kuncinya. Khusus untuk PAI UIN Jakarta, mereka sepakat dengan konsep "menyelamatkan akidah," sebagai dasar memilih pemimpin.

Keempat, sikap terhadap negara Barat. Salah satu ceruk islamisme yang cukup dalam adalah sikap anti Barat. Barat dengan semua nilai-nilai yang didukungnya, baik berdasarkan fakta atau sekadar imajinasi, dianggap sebagai ancaman terhadap Islam. Ketika diajukan pernyataan kepada mahasiswa Prodi UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta bahwa keterpurukan umat Islam merupakan bagian dari skenario Barat, 74% menyatakan setuju, 22% menyatakan tidak setuju, dan 4% tidak menjawab. Jika dilihat berdasarkan Prodi, mahasiswa Prodi UIN Syarif Hidayatullah 76% menyatakan setuju, 21% menyatakan tidak setuju, dan 3% tidak menjawab. Sebanyak 82% mahasiswa PAI UIN SMH Banten setuju, 16% menyatakan tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Sebanyak 77% mahasiswa PAI UMJ menyatakan setuju, 21% menyatakan tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Dan sebesar 63% dari mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan setuju, 22% menyatakan tidak setuju, dan 8% tidak menjawab.

Tingginya persentase mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta cukup mengkhawatirkan, terutama jika dikaitkan dengan masyarakat saat ini yang *borderless*. Memposisikan Barat sebagai ancaman akan melahirkan semangat Islamisme, dari konservatisme hingga gerakan terorisme. Penolakan terhadap Barat, tidak semata-mata Barat dalam artian fisik, tetapi juga Barat sebagai sebuah nilai yang berhadapan secara diametral dengan Islam, seperti liberalisme, kapitalisme, demokrasi, dan sekularisme.

Kelima, respons terhadap negara Islam. Menakar perlunya NKRI yang berasaskan Pancasila diganti dengan negara Islam menjadi isu yang timbul tenggelam dalam sejarah Islam Indonesia. Mimpi menjadikan NKRI sebagai negara Islam secara historis seumur dengan terbentuknya NKRI. Banyak upaya telah dilakukan baik secara fisik, politik, atau gabungan keduanya, walaupun hingga saat ini semua upaya tersebut gagal. Namun, jika perkembangan Islamisme yang semakin padat tidak disikapi secara cermat dan tepat, bukan mustahil pada akhirnya NKRI yang berasaskan Pancasila hanya akan menjadi catatan sejarah.

Kekhawatiran didasarkan kepada tiga hal, yaitu respons terhadap pernyataan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam; sistem pemerintahan Indonesia bukan *thaghut*; dan respons atas pernyataan Islam hanya tegak dengan sistem negara Islam (*khilafah*). *Satu*, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Dari survei didapatkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 88%, berpendapat setuju bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Hanya saja, jumlah yang tidak setuju juga relatif tinggi, yaitu mencapai 11%. Jika dilihat berdasarkan prodi, 97% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai Islam, dan hanya 2% yang menyatan tidak setuju; 94% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menyatakan setuju, dan 4% menyatakan tidak setuju; 70% mahasiswa PAI UMJ menyatakan setuju, dan 30% menyatakan tidak setuju; dan 86% mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan setuju dan 14% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, persentase jumlah mahasiswa PAI negeri lebih tinggi dari PAI swasta.

Dua, sistem pemerintahan Indonesia bukan *thaghut*. Setelah mendapatkan informasi tentang pandangan mahasiswa PAI atas kesesuaian Pancasila dengan Islam, kita beranjak untuk mengetahui pandangan bahwa Indonesia bukan negara *thaghut*. Data dari empat prodi menunjukkan bahwa 41% mahasiswa PAI di empat prodi yang diteliti menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia bukan Negara *thaghut*, 54% menyatakan setuju, dan 5% tidak menjawab. Jika dilihat berdasarkan prodi, sebanyak 27% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan tidak setuju, 69% menyatakan setuju, dan 4% tidak menjawab; sebanyak 42% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menyatakan tidak setuju, 52% menyatakan setuju, dan 6% tidak menjawab; sebanyak 55% mahasiswa PAI UMJ menyatakan tidak setuju, 38% setuju, dan 7% tidak menjawab; dan sebanyak 43% mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan tidak setuju, 51% setuju, dan 6% tidak menjawab. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia bukan negara *thaghut* jumlahnya sangat besar 41%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan prodi, yang terendah menganggap Indonesia sebagai negara *thaghut* adalah mahasiswa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar 27% , dan dengan persentase tertinggi adalah mahasiswa PAI UMJ, yaitu sebesar 55%. Jika dilakukan gradasi pandangan terkait Indonesia bukan *thaghut* akan didapatkan data: PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (69%); PAI UIN SMH Banten (52%), PAI IIQ (51%), dan PAI UMJ (38%).

Tiga, Islam hanya tegak dengan sistem Negara Islam (*khilafah*). Setelah mengetahui tentang pandangan mahasiswa Prodi PAI terkait kesesuaian antara Pancasila dan Islam, serta mengukur pandangan mereka tentang Indonesia sebagai negara *thaghut*, selanjutnya perlu "diukur" mimpi mereka tentang perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam. Dari empat Prodi PAI, didapatkan bahwa 39% setuju perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam, 59% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Jika diiris berdasarkan prodi, akan diketahui bahwa 24% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah menginginkan negara Islam, 74% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; 49% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menginginkan negara Islam, 47% tidak setuju, dan 4% tidak menjawab; 50% mahasiswa PAI UMJ menginginkan negara Islam, 48% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; dan 35% mahasiswa Prodi PAI IIQ Jakarta menginginkan negara Islam, 63% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Jika melihat data tersebut, maka didapatkan data bahwa persentase tertinggi yang menginginkan negara Islam adalah PAI UMJ (50%), diikuti SMH Banten (49%), PAI IIQ (35%), dan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (24%).

Untuk mendirikan negara Islam (*khilafah Islamiyah*) tersebut, data survei menunjukkan bahwa sebanyak 7% dari responden menyatakan setuju jika kekerasan fisik bahkan aksi bunuh diri digunakan untuk menegakkan negara Islam. Jika dilihat berdasarkan prodi, datanya sebagai berikut: PAI UIN Syarif Hidayatullah terdapat 8% setuju, 90% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; PAI UIN SMH Banten terdapat 10% setuju dan 90% tidak setuju; PAI UMJ sebanyak 5% setuju, 93% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; dan IIQ Jakarta 4% menyatakan setuju, dan 96% tidak setuju. Jika dilihat proporsinya yang 7%, maka jelas bahwa di PAI radikalisme sedang memasuki musim semi.

Berdasarkan pandangan Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta tentang kesesuaian Pancasila dengan Islam (11% tidak setuju), pandangan mereka bahwa pemerintah Indonesia bukan *thaghut* (41% tidak setuju), perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam (39% menyatakan setuju), dan persetujuan untuk menegakkan negara Islam dengan kekerasan fisik atau aksi bunuh diri (7%), tampaknya radikalisme Islam di Indonesia merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena mereka adalah para calon guru PAI yang akan mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat (murid-muridnya).

Musim semi radikalisme di Prodi PAI tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sebab. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya faktor pendorong (*push*) dan penarik (*pull*) yang bekerja pada level individu maupun masyarakat (PEER, n.d.). Faktor pendorong pada ranah individu dapat berupa perasaan terancam oleh globalisasi terhadap identitas diri atau kelompoknya, kegersangan hidup yang mendorong seseorang untuk melakukan *"hijrah"*, pengalaman pribadi yang pahit, dan perasaan terasing yang mendorong seseorang untuk bertindak agar eksistensinya mendapatkan pengakuan.

Sedangkan faktor pendorong pada ranah sosial dapat berupa ancaman terhadap kelompoknya, baik secara nyata atau sekadar persepsi, seperti isu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini memusuhi Islam, panggilan atau kewajiban untuk membela dan menyelamatkan Palestina dari agresi militer Israel, dan rasa dendam kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap merusak dan menyakiti umat Islam, seperti keberadaan Syiah dan Ahmadiyah.

Sedangkan faktor penarik munculnya radikalisme karena pergaulan dengan orang-orang yang radikal, baik secara langsung atau tidak langsung. Kasus teror bom bunuh diri di Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga merupakan contoh nyata betapa lingkungan teroris akan melahirkan para calon teroris. Faktor penarik lainnya adalah keinginan untuk menjadi ahli surga dengan hidup di negara Islam, seperti yang dialami oleh Nurshadrina, seorang perempuan dari Indonesia yang secara sadar dan suka rela bergabung dengan ISIS. Dia tertarik bergabung dengan ISIS setelah melihat video-video propaganda yang diproduksi oleh ISIS dan simpatisannya. Mereka mengajak semua Muslim untuk hijrah dan hidup dalam sistem pemerintahan Islam. Anak-anak akan terjamin kehidupannya, sekolah gratis, biaya ke Suriah akan diganti, semua hutang ditanggung, disediakan pekerjaan dengan gaji tinggi, dan dijamin masuk surga (Erdianto, 2017).

Selain itu, fenomena berseminya radikalisme di Prodi PAI tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses bertahap dan bahkan bergerak dengan sangat lambat. Adanya keinginan untuk berislam secara *kaffah*, yaitu untuk hidup sebagaimana yang tertulis dalam al-Quran dan Hadis, serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa melakukan kontekstualisasi merupakan proses Islamisasi yang jika terus berlanjut dapat berujung kepada radikalisasi. Salah seorang informan dalam penelitian ini, sebut saja namanya Jaja, mahasiswa PAI, aktif di PMII tetapi sempat ikut kajian-kajian keislaman yang dilaksanakan oleh LDK dan HTI (sebelum dilarang). Pada sore hari di sela-sela wawancara, saya mengajaknya makan di sekitaran UIN Syarif Hidaytaullah. Kami sama-sama makan rendang dan minum teh hangat. Saya perhatikan dia mengggunakan tiga jari tangan untuk makan. Setelah selesai makan, dia *mengoreti* sisa-sisa makanan di piringnya, dan "menjilati" jari-jari tangannya sampai bersih sama sekali. Jaja menjelaskan bahwa yang dia lakukan dalam rangka mengamalkan sunah nabi. Tentu saja, perbincangan tentang islamisme tidak boleh berada pada stigma salah dan benar dalam beragama, karena basis dari benar dan tidaknya dalam beragama adalah keyakinan, tetapi perlu diletakkan pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multi agama dan multi budaya. Dengan kata lain, Islamisme dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI yang multi agama dan multi religius. Dalam konteks Prodi PAI, semangat ini disebut selaras dengan semangat keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dalam konteks studi agama, ada tiga problem beragama, yaitu problem informasi, interpretasi, dan aksi (Salehudin, 2018). Radikalisme sebagai fenomena baru merupakan

manifestasi dari munculnya informasi keberagamaan baru yang berbeda dari model informasi keberagamaan mainstream, atau bisa saja keberagamaan mainstream yang mengalami pemekaran, penguatan, pengerasan, dan/atau penyesuaian terhadap kondisi yang terus berubah. Dalam konteks ini, menarik untuk menelusuri konteks sosial-budaya dan ekonomi-politik tumbuhnya radikalisme, aktor-aktor yang mendorongnya, dan media-media yang digunakan untuk menyemai ide radikalisme tersebut. Informasi yang diterima tentu akan menyebabkan problem lanjutan dalam beragama, yaitu problem interpretasi. Bagaimana seseorang menginterpretasikan teks-teks keagamaan tidak semata-mata oleh teks itu sendiri, tetapi juga faktor-faktor lain jenis pendidikan, strata sosial, afiliasi politik, dan lain sebagainya. Bagaimana menginterpretasikan teks-teks keagamaan juga akan melahirkan problem ketiga, yaitu problem tindakan. Orang yang memutuskan bercadar, menginginkan untuk mengubah NKRI menjadi negara Islam, atau bahkan berela hati untuk melakukan kekerasan dalam rangka mendirikan negara Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan bebas penggunanya, tetapi perlu juga menelisik lebih jauh tentang informasi keislaman seperti apa yang didapatkan, dan kepentingan apa yang melatarbelakangi sehingga mereka memutuskan untuk menggunakannya.

Salah Resep Mengatasi Problematika PAI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PAI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN SMH Banten, dan UMJ, dapat diambil pemahaman bahwa mereka sebenarnya telah memahami problem akut yang dihadapi oleh Prodi PAI, dan telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Mereka sudah mampu mendiagnosis penyakitnya, namun obat yang diresepkan kurang tepat. Kesalahan dalam memberikan resep obat tidak semata-mata karena mereka tidak tahu, tetapi disengaja karena ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Akibatnya, alih-alih disembuhkan, penyakit PAI bahkan menjadi semakin akut.

Beberapa program yang dijalankan untuk mengatasi masalah Prodi PAI, baik pada ranah produksi maupun pada ranah Islamisme, sedikitnya ada empat hal. *Pertama*, program baca kitab kuning sebagai matakuliah dan pada saat ujian komprehensif, sebagaimana dilakukan oleh Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program ini sangat bagus sebagai "portal" untuk memastikan bahwa alumninya memiliki kemampuan untuk membaca kitab kuning apa pun latar belakang pendidikannya. Oleh karena adanya kebijakan ini, mahasiswa PAI UIN Jakarta banyak yang mengikuti kursus bahasa Arab atau memilih untuk belajar di pondok pesantren di sekitar UIN Syarif Hidayatullah untuk memperdalam bahasa Arabnya. Hanya saja, ternyata tidak semua dosen keislaman menerapkan dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa yang tidak mampu baca kitab kuning akan memilih dosen yang tidak mensyaratkan membaca kitab kuning di kelas, sebagaimana disampaikan oleh Diah (bukan nama sebenarnya) pada saat wawancara. Demikian juga dengan ujian komprehensif membaca kitab kuning, idenya sangat bagus

namun menyebabkan mahasiswa terhambat lulus. Selain itu, untuk alasan akreditasi, mereka yang beberapa kali tidak mampu akan mendapatkan dispensasi. Bahkan, ada dosen yang tidak sepakat jika membaca kitab kuning dijadikan portal untuk memastikan yang lewat benar-benar mampu membaca kitab kuning.

Kedua, program kelas *bilingual* dan *excellent class*. Program ini sangat gagah dan keren untuk melahirkan para calon guru sesuai dengan visi dan misi prodi. Program ini sangat bagus dalam rangka mendorong dan memfasilitasi mahasiswa agar mampu berbahasa Inggris dan Arab secara bagus. Hanya saja, program ini cenderung berorientasi hanya pada marwah lembaga, bukan pada mahasiswa secara umum, apalagi yang dipilih untuk masuk kelas unggulan tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang sejak awal memang memiliki kemampuan bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris. Jika yang difasilitasi adalah mereka yang lancar berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris, bagaimana dengan mereka yang berasal dari SMA atau SMK, atau yang lemah dalam bahasa Arab dan/atau Inggris? Secara umum, Prodi PAI tidak memiliki program secara khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswanya.

Ketiga, menjadikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai lembaga intra-kampus. Secara teori, menjadikan LDK sebagai organisasi intra-kampus sangat strategis untuk memastikan agar organisasi keagamaan tidak liar dan menjadi sarang kelompok Islam yang membahayakan NKRI. Sebagaimana yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah dan UIN SMH Banten, LDK merupakan kepanjangan tangan organisasi ekstra kampus, yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang dalam beberapa aksinya selalu menyuarakan *khilafah Islamiyah* (Pengurus Pusat KAMMI, n.d.). Bahkan, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, LDK seringkali mendatangkan politisi PKS atau ustaz-ustaz hijrah. Niat hati untuk menjinakkan dengan menjadikannya lembaga intrakampus, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, LDK malah mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana secara legal untuk mentransmisikan ide-idenya.

Keempat, program seperti *qira'atul qur'an*, *tahfizul Qur'an*, *tahsinul Qur'an*, dan bimbingan ibadah cukup bagus untuk memastikan bahwa mahasiswa PAI memiliki penghayatan dalam berislam. Hanya saja, jika tidak ditopang dengan pemahaman kritis dan penguasaan yang memadai terhadap ilmu-ilmu keislaman, program-program tersebut akan menjadi jalan bagi menguatnya konservatisme Islam. Para mahasiswa PAI hanya akan sibuk untuk menampilkan aspek simbolik Islam, seperti berjilbab besar/cadar, hafal al-Quran tanpa pemahaman yang memadai, dan sekian identitas keislaman lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas yang bersemangat mengikuti program-program tersebut adalah mereka yang aktif di LDK dengan jilbab besar sebagai penanda dan sedikit anggota HMI. Para calon guru PAI harus didorong agar memiliki "alat" untuk membaca sumber-sumber keislaman secara langsung, memiliki sikap keberagamaan yang kritis, moderat, transformatif, dan berwawasan NKRI.

Catatan Penutup

Jika berbicara tentang kompetensi guru PAI sebagaimana dirumuskan dalam visi-misi dan tujuannya, maka akan didapatkan kenyataan betapa pentingnya keberadaan Prodi PAI, terutama untuk mempersiapkan para ahli agama Islam yang memiliki kemampuan untuk mengajar. Prodi PAI merupakan sebuah sistem produksi yang dibuat untuk melahirkan ustaz-ustazah (baca: guru) yang memiliki kecakapan mengajar sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuannya. Hanya saja, dalam praktiknya apa yang tertulis dalam visi-misi dan tujuannya tersebut tidak sertamerta dapat direalisasikan. Sebagai sebuah sistem, maka hasil yang dicapai merupakan akibat dari keterjalinan secara berkait kelindan antara beragam faktor, seperti *raw input* mahasiswa, model *rekrutmen*, proses pembelajaran, kapasitas dosen, kurikulum, dan faktor lingkungan.

Secara umum, mahasiswa PAI memiliki kualifikasi akademik unggul. Hanya saja kualifikasi akademik unggul tersebut tidak sepenuhnya ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman dasar keislaman yang memadai untuk menjadi calon guru PAI. Hal ini disebabkan karena sekitar 30% mahasiswa Prodi PAI berlatar belakang SMA/SMK non keagamaan dan sekitar 58% memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Selain itu, kurikulum PAI hanya memfasilitasi calon guru PAI hanya untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam pada level SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, bukan untuk menguasai materi keislaman secara mendalam dan kritis. Lebih lanjut, kurikulum juga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi gersang, apalagi para dosen matakuliah keislaman cenderung hanya berfokus pada penyampaian materi perkuliahan dan kurang memberi ruang untuk mendiskusikan fenomena keislaman terbaru. Kondisi ini menyebabkan mereka mencari informasi keagamaan dari internet atau mengikuti group-group media sosial. Selain itu, para dosen juga kurang peka terhadap munculnya islamisme dan radikalisme, sehingga tidak ada kebijakan yang didesain secara sadar untuk menangkalnya. Bahkan, kebijakan yang diambil berpotensi menyuburkan konservatisme, intoleransi, dan radikalisme ketika kurang ditata dengan baik.

Dalam konteks islamisme, Prodi PAI tampaknya sedang menyambut musim semi radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase yang menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam (11%), Indonesia negara *thaghut* (41%), mimpi tentang perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam (39%), dan menyetujui cara kekerasan untuk merealisasikan (7%). Dikatakan musim semi, karena jika tidak dilakukan tindakan yang antisipatif dan komprehensif, bukan mustahil jumlah mahasiswa PAI yang menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam, Indonesia negara *thaghut*, perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam, dan menyetujui cara kekerasan untuk merealisasikannya akan semakin tinggi. Dalam konteks ini, keberadaan mahasiswa PAI yang *notabene* calon guru PAI menjadi sangat penting dan strategis, karena mereka yang akan menjadi *transmitter* corak keislaman bagi siswa-siswanya.

Dengan mengandaikan bahwa sistem produksi PAI dapat menghasilkan guru yang memiliki kompetensi professional, pengajaran, sosial, dan emosional, sedikitnya ada lima

hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, memperbaiki pola rekruitmen mahasiswa PAI. Sejak awal harus dipastikan bahwa calon mahasiswa PAI harus memiliki potensi akademik unggul, dan memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman agama yang memadai, serta memiliki kemampuan bahasa arab yang baik. *Kedua*, merombak kurikulum PAI. Kurikulum PAI harus didesain agar mampu memfasilitasi bibit-bibit unggul mahasiswa PAI agar menjadi guru PAI (ustaz/ustazah) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman yang luas dan mendalam pada satu sisi, dan memiliki kemampuan pedagogis yang mumpuni pada sisi yang lain. *Ketiga*, perlunya membekali dosen PAI dengan pemahaman keislaman yang *up to date*, sehingga mahasiswa tidak menggantungkan pengetahuan keislamannya kepada internet dan media sosial. *Keempat*, perlunya menerapkan pembelajaran keislaman yang tidak saja kritis dan *up to date*, tetapi juga berbasis kepada keragaman agama, suku, dan budaya masyarakat Indonesia. Sikap intoleran dapat muncul karena banyaknya "tembok-tembok" keagamaan yang dibangun untuk membatasi satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya. Materi agama Islam harus mampu menjadi jembatan bagi keragaman. *Kelima*, perlunya kebijakan fundamental terkait kebutuhan guru PAI. Di Indonesia, ada 627 lebih Prodi PAI yang setiap tahun meluluskan calon guru PAI, namun belum ada pasti berapa kebutuhan guru PAI setiap tahunnya. Tidak boleh lagi Prodi PAI hanya berfokus kepada penerimaan sejumlah mahasiswa (berapa kelas) tanpa mempertimbangkan daya serap pasar. Prodi PAI perlu membuat *tracer study* untuk mengetahui keterserapan alumninya pada satu sisi, dan mendapatkan *feedback* bagi perbaikan prodinya, seperti revisi kurikulum. Jika memang jumlah guru yang diproduksi sudah melebihi kebutuhan, maka tahap selanjutnya perlu dibuat regulasi tentang moratorium pembukaan Prodi PAI baru dan/atau pembatasan jumlah mahasiswa PAI.

Referensi

Kurikulum Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun, 2016.

Kurikulum Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2010.

Mudzakkir, Amin, dkk. 2018. *Menghalau Ekstremisme: Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.

Hikam, Muhammad AS. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit buku Buku Kompas.

Pedoman Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018-2019.

Pedoman akademik Akademik program Program strata Strata-1 universitas Universitas Islam negeri Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017/2018, biro administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Revisi Kurikulum Jurusan PAI UIN SMH Banten Tahun 2014.

Hefner, Robert W (ed),). 2009. *Making Modern Muslim: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: university University of Hawaii pressPress.

Salehudin, Ahmad. 2018. "Theologizing Farming: Religiosity and Economic Rationality of Muslim Peasants in The the Dieng Mountains," Sekolah Pasca Sarjana UGM: Disertasi.

ANNAS Indonesia. 2017. "Deklarasi dan Penetapan Pengurus ANNAS Banten." ANNAS Indonesia. 2017. http://www.annasindonesia.com/read/782-deklarasi-dan-penetapan-pengurus-annas-banten.

Chairunnisa, Ninis. 2018. "Pelaku Bom Di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya." Tempo. May 13, 2018. https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya.

Erdianto, Kristian. 2017. "Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap 'Pabrik Anak' - Kompas.Com." September 15, 2017. https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08523811/eks-wni-simpatisan-isis-perempuan-hanya-dianggap-pabrik-anak.

Kuwado, Fabian Januarius. 2013. "Lurah Susan Ditolak Warga, Jokowi Tanggapi Dingin." Kompas.Com. September 25, 2013. https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/25/1725460/Lurah.Susan.Ditolak.Warga.Jokowi.Tanggapi.Dingin.

Padati, Kudo. 2016. "Aliansi Nasional Anti Syiah DKI Jakarta Resmi Dideklarasikan." Kiblat.Net. October 25, 2016. https://www.kiblat.net/2015/10/25/aliansi-nasional-anti-syiah-dki-jakarta-resmi-dideklarasikan/.

PEER. n.d. "Push and Pull Factors." Preventing Extremism through Educational Research (PEER). Accessed November 29, 2018. https://www.mcgill.ca/peer/key-terms/push-and-pull-factors.

Pengurus Pusat KAMMI. n.d. "Tentang Kammi." *Pengurus Pusat KAMMI* (blog). Accessed January 29, 2019. https://www.kammi.or.id/tentang-kammi.

PT Viva Media Baru. 2016. "Ditolak Jadi Kapolda Banten, Ini Kata Eks Ajudan Jokowi – VIVA." October 13, 2016. https://www.viva.co.id/berita/nasional/834008-ditolak-jadi-kapolda-banten-ini-kata-eks-ajudan-jokowi.

Rifa'i, Bahtiar. 2018. "Patung Pahlawan Sultan Ageng Dibongkar Dan Dibuang Karena Syirik?" Detiknews. November 10, 2018. https://news.detik.com/read/2018/11/10/155030/4296025/10/patung-pahlawan-sultan-ageng-dibongkar-dan-dibuang-karena-syirik.

Rochmanuddin. 2014. "Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI, FPI Demo Balaikota Jakarta Hari Ini." Liputan6.Com. September 24, 2014. https://www.liputan6.com/news/

read/2109471/tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-fpi-demo-balaikota-jakarta-hari-ini.

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2018. "2 Wanita Diamankan Karena Diduga Akan Menusuk Polisi Di Mako Brimob." Kompas.Com. May 12, 2018. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/21450571/2-wanita-diamankan-karena-diduga-akan-menusuk-polisi-di-mako-brimob.

Sitepu, Mehulika. 2018. "Enam Dari Sepuluh Guru Muslim 'Intoleran', Kemajemukan Harus Masuk Penilaian Akreditasi," October 18, 2018, sec. Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45887762.

Tempo.co. 2017. "Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga." Tempo.Co. February 25, 2017. https://metro.tempo.co/read/850115/masjid-tolak-salatkan-pemilih-ahok-begini-reaksi-warga.

Tribun. 2018. "Istri Terduga Teroris, Dicerai Jika Tak Bercadar dan Aneh Saat Belanja Sayur." Tribun Jateng. May 17, 2018. http://jateng.tribunnews.com/2018/05/17/istri-terduga-teroris-dicerai-jika-tak-bercadar-dan-aneh-saat-belanja-sayur.

6

MEMPERSIAPKAN GURU AGAMA PROFESIONAL DAN MODERAT

Program Studi PAI UIN Sunan Kalijaga, UMY, dan IIM Surakarta

Sukiman

Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pertimbangan bahwa kedua kota tersebut memiliki sejarah dan karakteristik yang unik terkait dengan fokus penelitian. Banyak orang mengidentifikasi kedua kota tersebut sebagai Kota Kembar. Baik Yogyakarta maupun Surakarta adalah kota budaya. Nuansa Jawa kental membungkus kehidupan masyarakat keduanya. Kedua kota tersebut memiliki hubungan historis (Wardhana, 2015). Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 antara Pangeran Mangkubumi dan VOC di bawah Gubernur-Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua bagian yakni wilayah sebelah timur yang menjadi milik Paku Buwono dan wilayah sebelah barat yang menjadi bagian Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar

Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC. Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibukota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (Jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai Winongo dan Sungai Code. Ibukota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari dua pusat kerajaan baru itulah bermula perkembangan Kota Yogyakarta dan Surakarta (Ngatinah, 2008: 175).

Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan seni, kota wisata, dan kota pendidikan. Sebagai kota budaya, seni dan wisata, banyak wisatawan yang datang ke kota ini. Sebagai Kota Pendidikan, banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di tanah air bahkan juga mancanegara yang datang dan tinggal di Yogyakarta. Keberagaman etnis, budaya, suku dan agama ada di kota ini (Zudianto, 2008: 96). Kondisi seperti ini membawa dampak positif tersendiri bagi para pelajar, mahasiswa atau penduduknya, dalam hal pengembangan pribadi mereka. Di sisi lain juga ada dampak negatifnya, misalnya rawan terjadinya konflik ketika keragaman ini tidak dikelola dengan baik.

Yogyakarta hingga saat ini masih sering diwarnai kasus intoleransi dan aksi tindakan kekerasan atas nama agama. Kasus intoleransi atau kekerasan yang mengatasnamakan agama di Yogyakarta dari tahun 2015 hingga 2017 memiliki kecenderungan semakin menguat. Berdasarkan sejumlah penelitian, kasus intoleransi di Yogyakarta bertambah. Data dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT) mencatat terdapat 23 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berekspresi oleh kelompok intoleran di Yogyakarta pada 2016. Jumlah itu diyakini meningkat dibanding pelanggaran di tahun 2015 (Hidayati, 2018).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang dan Yogyakarta. Dari sisi keragaman agama dan kepercayaan yang dianut, masyarakat di Surakarta cukup beragam sejak dulu. Enam agama yang diakui Indonesia berkembang di kota ini. Berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, mayoritas penduduk kota Surakarta menganut Agama Islam (451.872 jiwa). Dari segi jumlah secara berturut-turut diikuti masyarakat yang menganut agama Kristen sebanyak 78.756 jiwa, agama Katolik sebanyak 40.812 jiwa, agama Hindu sebanyak 4.642 jiwa, agama Buddha sebanyak 1.000 jiwa, lainnya sebanyak 120 jiwa (BPS Jawa Tengah, 2018).

Pluralitas Kota Surakarta terlihat dari banyaknya bangunan rumah ibadah bersejarah di Surakarta, mulai dari masjid besar dan sakral yang terletak di bagian barat kota yaitu Masjid Agung Surakarta, Masjid Mangkunegaran, Masjid Laweyan, Gereja St. Petrus di Jl. Slamet Riyadi, Gereja St. Antonius Purbayan, hingga tempat Ibadah Tri Dharma Tien Kok Sie, Vihara Am Po Kian, dan Sahasra Adhi Pura. Selain Jawa, ada etnis Tionghoa, dan Arab yang tinggal di Surakarta. Perkampungan Arab menempati wilayah Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi dan Kedung Lumbu di Kecamatan Pasar Kliwon.

Penempatan kampung Arab secara berkelompok tersebut sudah diatur sejak jaman kolonial untuk mempermudah pengurusan etnis asing di Surakarta dan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan. Etnis Arab mulai datang di Pasar Kliwon diperkirakan sejak abad ke-19. Sementara itu perkampungan Tionghoa banyak terfokus di wilayah Balong, Coyudan, dan Keprabon. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bangunan-bangunan kelenteng dan tempat ibadah, seperti Kelenteng Tien Kok Sie. Walaupun tidak ada data pasti berapa jumlah masing-masing kepercayaan maupun etnis penduduk dalam sensus terakhir (2010), mereka banyak membaur di tengah-tengah warga Solo pada umumnya (Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Surakarta, 2018).

Keragaman agama dan kepercayaan ini di satu sisi merupakan kekayaan masyarakat, tetapi di sisi lain sangat berpotensi menjadi konflik atas nama agama jika tidak dikelola dengan baik. Wilayah Surakarta dan sekitarnya, yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta, merupakan lima dari sembilan daerah rawan konflik berdasarkan pemetaan Unit Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selain itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyebut Surakarta, bersama Kabupaten Temanggung, sebagai wilayah yang perlu diwaspadai terkait insiden kekerasan antar-umat beragama (Nurdin, 2015).

Menurut Baidhawy (2010), sejatinya Surakarta merupakan kota dengan masyarakat yang cenderung permisif. Berbagai aliran dapat ditemukan di kota ini. Sayangnya, pertumbuhan radikalisme lebih mendominasi perwajahan kota Surakarta. Radikalisme Islam di Surakarta terus membentuk hubungan-hubungan sosial sejak tahun 1990-an. Radikalisme Islam juga lebih bergaung paska kejadian Bom Bali pada tahun 2001. Para pelaku bom bali disinyalir memiliki hubungan erat dengan pemimpin pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, imam Majelis Mujahidin Indonesia, dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Surakarta juga terkenal dengan sebutan kota bersumbu pendek. Kota ini memiliki sejarah tiga abad konflik komunal. Berbagai peristiwa konflik dan kekerasan atas nama agama dan terorisme menjadi poros dinamika radikalisme di kota Surakarta. Tercatat, lebih dari 20 pelaku teror yang mengatasnamakan agama ditangkap di Surakarta. Dari beberapa kasus tersebut nama Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dituduh sebagai tempat latihan teroris ("*School of Jihad*").

Kondisi dan karakteristik Kota Yogyakarta dan Surakarta sebagaimana diuraikan di atas secara langsung atau tidak langsung tentu akan mempengaruhi aktivitas pendidikan di perguruan tinggi yang ada di kedua kota tersebut. Ada tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang terletak di dua kota Yogyakarta dan Surakarta yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi PAI Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta yang berlokasi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Profil Program Studi PAI UIN Sunan Kalijaga, UMY, dan IIM Surakarta

Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Prodi PAI tertua di Indonesia. Kelahiran dan perkembangan Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga ini seiring dan seusia dengan lahirnya PTAIN Yogyakarta yang kemudian menjadi IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang telah berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga. PTAIN Yogyakarta yang diambil dari Fakultas Agama UII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 1950 dan diresmikan pada tanggal 26 September 1950 dengan tiga jurusan, yang salah satunya adalah Pendidikan (kelak Tarbiyah) (Rektor, 2001: 396). Ketika itu, Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) hanya memiliki satu bagian (istilah sekarang program studi), yaitu Pendidikan Agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa Tarbiyah saat itu identik dengan Jurusan Pendidikan Agama. Dibukanya jurusan pendidikan di PTAIN tidak terlepas dari alasan dibutuhkannya ahli didik/guru di bidang agama pasca keluarnya Surat Penetapan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai keharusan pendidikan agama sejak kelas IV Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1946. Dengan demikian, pengembangan Jurusan Tarbiyah (dalam hal ini Pendidikan Agama) bukan untuk pengembangan akademik murni, misalnya, untuk membina lulusan yang berkeahlian riset di bidang ilmu pendidikan/keguruan melainkan untuk menyiapkan tenaga ahli didik/guru guna memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (Syafruddin, 2000: 124).

Jurusan PAI sejak awal berdirinya hingga sekarang ini telah mengalami empat kali pergantian nama. Pada awal berdirinya PTAIN, Jurusan PAI bernama Jurusan Tarbiyah. Kemudian ketika awal perubahan PTAIN menjadi IAIN, Jurusan PAI bernama Jurusan Pendidikan Agama. Pada akhir tahun 1960-an, Jurusan Pendidikan Agama berubah menjadi Jurusan Ilmu Agama. Awal tahun 1980-an, ketika diberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS), Jurusan Ilmu Agama berubah menjadi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) hingga sekarang ini. Dalam perkembangannya, orientasi dan tujuan Prodi PAI mengalami perluasan, yakni di samping mewujudkan atau menghasilkan tenaga guru agama Islam untuk sekolah dan madrasah, juga melahirkan calon peneliti dan konselor dalam bidang agama Islam Perkembangan ini tentu dilakukan dalam rangka merespons tuntutan perkembangan yang ada di masyarakat.

Prodi PAI termasuk prodi yang favorit di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Setiap tahun peminatnya cukup tinggi dengan daya tampung yang terbatas. Pada tahun akademik 2018/2019, rasio pendaftar calon mahasiswa baru dengan yang diterima adalah 1:49 (Rofik, wawancara, 6 September 2018). Hal ini berarti tingkat persaingan masuk di Prodi PAI UIN Sunan Kaliajaga cukup ketat.

Prodi PAI FAI UMY yang pada awal pendiriannya bernama Fakultas Tarbiyah, dibuka mulai tahun akademik 1987/1988 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina UMY Nomor 004/BP/UMY/A.2-II/VII/'87 tertanggal 5 Zulqa'dah 1407 H/1 Juli

1987 M dan mendapatkan izin operasional pada tahun 1989 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I No. 285/E/PP.00.9/L/89. Pada perkembangannya, Menteri Agama melalui Surat Keputusannya Nomor 72 Tahun 1995 tertanggal 8 Februari 1995 menetapkan perubahan dan penggabungan Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah menjadi Fakultas Agama Islam (FAI). Dampak dari ketetapan tersebut adalah semakin jelasnya keberadaan Prodi PAI (Tim, 2018).

Prodi PAI FAI UMY berorientasi ke masa depan dengan bertumpu pada upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah swt. serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah Islamiyah), dalam membentuk Guru Agama Islam yang profesional, bermoral, inovatif, dan mandiri. Lulusan Prodi PAI FAI UMY akan diorientasikan menjadi pendidik Agama Islam pada madrasah dan sekolah, manajer pendidikan, dan peneliti pendidikan yang memiliki kompetensi tinggi yang dapat bekerja secara amanah dan professional. Dalam rangka penjaminan kualitas alumni, Prodi PAI telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sejak tahun 2013 dan pada tahun 2015 melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan KKNI dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Upaya ini difokuskan untuk optimalisasi pengembangan proses pembelajaran dan sistem informasi melalui aktivitas penguatan capaian pembelajaran dan daya saing lulusan, yang meliputi peningkatan kualitas *practical skills*, peningkatan kualitas *soft skills*, peningkatan efektivitas pembelajaran dengan model *Student Centered Learning* (SCL) dan efisiensi penyusunan tugas akhir (Tim, 2018). Selain itu, Prodi PAI FAI UMY juga telah merintis penyelenggaraan kelas bilingual untuk menyiapkan calon guru PAI bertaraf internasional, yang dimulai dari proses perkuliahan hingga pelaksanaan praktik pembelajaran (PPL) di luar negeri. Pembukaan kelas bertaraf internasional ini dalam rangka menyiapkan calon guru PAI untuk mengajar di kelas-kelas internasional yang dibuka pada lembaga pendidikan madrasah/sekolah (*Sadam Fajar Shodiq, wawancara, 29 Agustus 2018).*

Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IIM Surakarta merupakan wakil perguruan tinggi Islam yang bersifat netral, dalam arti tidak bernaung pada yayasan organisasi Islam tertentu. Yayasan yang menaungi IIM Surakarta ini adalah bernama YAPERTIS. Prodi PAI ini merupakan salah satu prodi yang ada di IIM Surakarta yang berdiri semenjak tahun 1963 dan semula bernama Jurusan Tarbiyah. IIM Surakarta beralamat di Jl. Sadewa No. 14 Serengan, Surakarta 57155.

IIM Surakarta memiliki sejarah yang panjang. Secara kelembagaan, hingga sekarang IIM telah mengalami lima kali perubahan. Diawali dari Universitas Islam Indonesia (UII) cabang Surakarta, pada tahun 2 Mei 1979 dibukalah Universitas Islam Surakarta (UNIS) dengan delapan Fakultas, yaitu: Fakultas Kependidikan, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syari'ah (Suprobo dkk., 2011). Pada tahun

1983, UNIS hanya menyisakan fakultas agama, yakni Tarbiyah dan Syari'ah. Sedangkan fakultas umum hanya dipertahankan tiga fakultas, yakni Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pertanian, tetapi dipisahkan menjadi Universitas Kyai Mojo (UIM), yang kemudian berganti menjadi UNIBA. Pada perkembangan selanjutnya, status UNIS terpaksa harus diganti menjadi institut karena hanya memiliki dua fakultas sejenis, yaitu Fakultas Agama, yang berarti tidak memenuhi syarat sebagai universitas. Oleh karena itu pada tahun 1988 nama UNIS diganti Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta dengan menambah satu fakultas, yaitu Fakultas Dakwah. (Suprobo dkk., 2011).. Tahun 1997, IIM berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta (STAIMUS), dan kembali menjadi IIM pada tahun 2015.

Fakultas Tarbiyah IIM memiliki dua jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (Mukhlis Fathurrohman, wawancara, 4 Oktober 2018). Di antara Prodi yang ada di IIM Surakarta, Prodi PAI adalah yang paling banyak peminatnya. Setiap tahun, Prodi PAI menerima 4 kelas dengan rata-rata setiap kelas antara 30-35 orang mahasiswa. Kondisi mahasiswa Prodi PAI khususnya dan umumnya IIM Surakarta sangat beragam. Di IIM Surakarta secara defakto tidak melarang mahasiswi bercadar. Kemudian untuk mahasiswa putra juga ada yang penampilannya agak berbeda dengan yang lain misalnya berjenggot dan memakai celana congklang. Selama ini IIM Surakarta telah bekerjasama dengan berbagai ma'had yang ada di sekitar Surakarta, misalnya Ma'had Darus Syahadah, Ma'had Abu Bakar, Ma'had Takmirul Islam, dan Pondok Pesantren Ngruki yang sebagian santri-santrinya bercadar. Mengenai alasan mengapa kampus ini menerima mahasiswa dengan berbagai latar belakang seperti itu bahkan dari pesantren yang ustadznya saja juga "keras-keras". Menurut penjelasan Wakil Rektor 2, Bapak Muh. Syamsuri, bahwa IIM Surakarta hadir di tengah-tengah masyarakat antara lain untuk ikut serta membina peserta didik dari latar belakang yang cenderung eksklusif dan ekstrem tersebut. Asumsi yang diacu adalah jika anak-anak seperti itu dihindari dan dimusuhi, mereka nantinya justru akan semakin menjadi radikal. Oleh karena itu mereka harus dirangkul dan dibina agar mereka menjadi lebih terbuka dan moderat. IIM Surakarta hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengembangkan wawasan keislaman yang *rahmatan lil alamin* sesuai dengan visi-misi lembaga ini (Muh. Syamsuri, wawancara, 7 Oktober 2018).

Kebijakan IIM Surakarta menerima calon mahasiswa yang berlatar belakang seperti di atas, berarti Prodi PAI IIM Surakarta memiliki potensi islamisme yang tinggi ketika pembinaan wawasan Islam *rahmatan lil alamin* sesuai kekhasan visi-misi lembaga tersebut tidak dilakukan secara maksimal. Akan tetapi jika dilakukan secara maksimal dan pada akhirnya membawa hasil seperti yang diharapkan berarti Prodi PAI IIM Surakarta memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat, bangsa dan negara ini terutama dalam proses deradikaliasi dan pencegahan menyebarnya islamisme di kalangan calon guru PAI.

Islamisme Mahasiswa dan Dosen Prodi PAI

Secara umum sikap keberagamaan dan keragaman mahasiswa termasuk kategori baik. Sikap keberagamaan dan keragaman mahasiswa ini diungkap dengan menggunakan 20 indikator yang dikelompokan menjadi 6 aspek. Pengelompokan ini mengacu pada teori yang dkemukakan oleh Bassam Tibi sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan, yaitu: (1) purifikasi, (2) formalisasi syariat Islam, (3) kekerasan atas nama agama, (4) anti demokrasi, (5) anti terhadap agama lain, dan (6) anti terhadap Barat. Skor rata-rata sikap keberagamaan dan keragaman di kalangan mahasiswa ketiga Prodi PAI adalah 2,75 yang berdasarkan kriteria berada dalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum sikap keberagamaan dan keragaman di kalangan mahasiswa di ketiga Prodi PAI adalah baik. Tentu kondisi ini belum ideal, karena idealnya jika sikap keberagamaan dan keragaman di kalangan mahasiswa Prodi PAI itu berada pada kategori sangat baik.

Sikap keberagamaan dan keragaman dosen juga diungkap dengan menggunakan 20 indikator yang juga dikelompokkan menjadi 6 sebagaimana yang digunakan untuk mengungkap sikap keberagamaan dan keragaman mahasiswa. Skor rata-rata sikap keberagamaan dan keragaman dosen ketiga Prodi PAI adalah 3,21 yang berdasarkan kriteria (2,52-3,26) berada dalam kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum sikap keberagamaan dan keragaman di kalangan dosen di ketiga Prodi PAI adalah baik. Tentu akan ideal jika sikap keberagamaan dan keragaman di kalangan dosen di ketiga Prodi PAI itu kalau berada pada kategori sangat baik.

Meskipun sikap keberagamaan dan keragaman mahasiswa dan dosen ketiga Prodi PAI secara umum kategori baik, namun ketika dicermati lebih lanjut ternyata ditemukan adanya potensi-potensi islamisme baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Gejala Islamisme mahasiswa lebih kuat daripada dosen. Gejala islamisme mahasiswa dapat dilihat dari indikator-indikator berikut: (1) terdapat 27,5% mahasiswa yang berpandangan setuju dengan penggunaan kekerasan untuk membela agama, (2) terdapat 3,9% mahasiswa yang setuju melakukan kekerasan fisik bahkan aksi bunuh diri untuk menegakkan negara Islam, (3) terdapat 7,2% mahasiswa yang memiliki kepercayaan bahwa berjihad menggunakan bom bunuh diri adalah syahid, (4) terdapat 78,4% mahasiswa yang menyatakan setuju bahwa orang laki-laki harus siap berperang membela agama, (5) terdapat 7,2% mahasiswa yang memiliki pandangan bahwa Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai Islam, (6) terdapat 37,3% mahasiswa yang berpandangan bahwa Islam tegak dengan sistem khilafah, (7) terdapat 74,5% mahasiswa berpandangan setuju bahwa keterpurukan umat Islam karena skenario Barat, (8) terdapat 28,1% mahasiswa yang tidak setuju kalau harus taat pada pemerintahan di Indonesia, (9) terdapat 76,5% mahasiswa yang punya pandangan setuju bahwa umat Islam harus menguasai segala sendi kehidupan di Indonesia, (10) terdapat 58,2% mahasiswa yang punya pandangan setuju bahwa tradisi lokal yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis secara tekstual harus ditinggalkan, dan (11) terdapat 71,9% mahasiswa yang punya pandangan bahwa

semua negara Barat memiliki tujuan-tujuan politik dan kekuasaan tertentu untuk menguasai umat Islam. Kemudian gejala intoleran di kalangan mahasiswa dapat dilihat dari indikator-indikator berikut: (1) terdapat 2,6% mahasiswa yang menyatakan tidak setuju bertetangga dengan orang yang berbeda agama, (2) terdapat 56,9% mahasiswa berpandangan bahwa dalam memilih teman sangat mempertimbangkan kesamaan iman dan (3) terdapat 62,1% mahasiswa berpandangan tidak setuju bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah termasuk Islam.

Temuan hasil survei di atas ketika dikonfirmasi melalui wawancara pada saat FGD ternyata juga ditemukan adanya potensi sikap islamisme di kalangan mahasiswa. Gejala sikap islamisme tersebut misalnya ditemukan adanya mahasiswa yang memiliki pandangan pentingnya ditegakkan sistem khilafah di Indonesia. Ia menginginkan sistem pemerintahan di Indonesia ini diganti dengan sistem khilafah. Karena sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukan sistem yang terbaik Meskipun mereka dalam kondisi saat ini masih bisa menerima, tetapi ketika ada kesempatan ia menginginkan sistem demokrasi di Indonesia seperti sekarang ini diganti dengan sistem khilafah.

Gejala islamisme di kalangan dosen ditandai dengan adanya indikator-indikator berikut: (1) terdapat 3 dari 28 (10,7%) responden dosen berpandangan setuju dengan penggunaan kekerasan untuk membela agama, (2) terdapat 14 dari 28 (50 %) responden dosen menyatakan setuju bahwa orang laki-laki harus siap berperang membela agama, (3) terdapat 5 dari 28 (17,9%) responden dosen berpandangan bahwa Islam tegak dengan sistem khilafah, (4) terdapat 10 dari 28 (35,7%) responden dosen setuju bahwa keterpurukan umat Islam karena skenario Barat, (5) terdapat 1 dari 28 (3,6 %) responden dosen tidak setuju kalau harus taat pada pemerintahan Indonesia, (6) terdapat 18 dari 28 (67,9%) responden dosen setuju bahwa umat Islam harus menguasai segala sendi kehidupan di Indonesia, (7) terdapat 6 dari 28 (21,4%) responden dosen setuju bahwa tradisi lokal yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis secara tekstual harus ditinggalkan, dan (8) terdapat 10 dari 28 (35,7%) responden dosen punya pandangan bahwa semua negara Barat memiliki tujuan-tujuan politik dan kekuasaan tertentu untuk menguasai umat Islam.

Kemudian gejala sikap intoleran di kalangan dosen ditunjukkan dengan adanya indikator-indikator berikut: (1) terdapat 16 dari 28 (57,1%) responden dosen berpandangan bahwa dalam memilih teman sangat mempertimbangkan kesamaan iman dan (2) terdapat 11 dari 28 (39%) responden dosen berpandangan tidak setuju bahwa kelompok Ahmadiyah dan Syiah termasuk Islam.

Core Values, Visi, dan Misi Lembaga: Menuju Kampus Moderat

Core values di suatu universitas atau lembaga pendidikan tinggi adalah nilai-nilai inti atau nilai-nilai utama yang dianut bersama oleh seluruh civitas akademika yang menciptakan kekhasan dan menumbuhkan budaya kelembagaannya. *Core values* atau nilai-nilai inti ini

dimaksud untuk membentuk perilaku dan karakter kerja yang selaras dengan strategi universitas. *Core values* yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi pilar utama dalam pembentukan budaya akademik dan non akademik serta kelembagaan yang kuat. Ketika *core values* sudah menjadi pilar utama, ia akan mempersatukan cara kerja civitas akademika, untuk secara solid merealisasikan tujuan, visi, misi, dan program universitas (Al Makin, dkk., 2017). Di antara ketiga PTKI itu yang secara eksplisit merumuskan *core values* adalah UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan IIM Surakarta tidak merumuskannya secara eksplisit.

Core values UIN Sunan Kalijaga terdiri atas 6 nilai inti, yaitu: integratif-interkonektif, dedikatif-inovatif, inklusif-*continuous improvement. Core values* integratif-interkonektif mengembangkan sistem keterpaduan dalam pengembangan akademik, manajemen, kemahasiswaan, kerja sama, dan entrepreneurship. *Core values* integratif-interkonektif didasarkan pada paradigma kesatuan dan terpadu/non dikotomis antara agama dan sains. *Core values* dedikatif-inovatif menuntut setiap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga bersikap dedikatif, amanah, pro mutu, berpikir dan bergerak aktif, kreatif, cerdas, inovatif, tidak sekadar bekerja rutin dan rajin. *Core values* ini lebih menitikberatkan pada karakter, moralitas, akhlak, budi pekerti dalam membentuk kepribadian islami yang memiliki tanggung jawab atas kelangsungan NKRI serta kualitas bangsa dan negara dalam segala aspek hidup dan sistem kehidupan di NKRI. *Core values* inklusif-c*ontinuous improvement* menuntut civitas akademika UIN Sunan Kalijaga bersifat terbuka, akuntabel, dan komit terhadap perubahan dan keberlanjutan. *Core values continuous improvement* merupakan keterbukaan dalam menerima perubahan berdasarkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sembunyi dalam segala bidang yang berkaitan dengan pengintegrasian ilmu pengetahuan, keislaman, dan peradaban di era global dan modern ini.

Nilai-nilai utama UIN Sunan Kalijaga tersebut dijadikan arah dalam menyusun kebijakan pengembangan akademik dan semua program dan kegiatan dalam rangka mencapai yang telah digariskan. Di samping itu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneguhkan diri sebagai kampus inklusif dan benteng kebhinekaan. Sebagai kampus inklusif UIN Sunan Kalijaga telah berkomitmen menjadi kampus inklusif dengan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk para penyandang *different ability* (difabel). Faktanya hingga saat ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan segala macam budaya, etnis, ras, dan sebagian dari difabel. Dengan begitu, perguruan tinggi ini telah berperan sebagai benteng kebhinekaan. UIN Sunan Kalijaga berkomitmen menjaga kebhinekaan dalam cara pandang, berkehidupan, beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

UMY memiliki motto sebagai universitas unggul dan Islami. Unggul dalam keilmuan, pengetahuan, dan wawasan. Islami dalam artian memiliki nilai-nilai keluhuran dan ketawadhuan, sesuai dengan akhlak Islam. Kedua nilai ini ibarat koin mata uang yang

tidak dapat dipisahkan. Unggul dalam pengetahuan tanpa dibarengi oleh pendalaman agama, penanaman nilai-nilai moral, keluhuran akhlak, dan ajaran-ajaran substansif dari Islam, maka akan melahirkan sikap kesombongan, egois, elitis, arogansi keilmuan atau diistilahkan dengan satanisme intelektual. Segenap civitas akademika UMY harus menonjolkan nilai ketawadhuan dalam bersikap, demi menggapai visi, orientasi, dan prestasi.

Untuk mencapai apa yang tertuang dalam motto tersebut UMY memiliki nilai-nilai utama yang dibangun sejak awal mula berdirinya. Ada tiga nilai utama yang menjadi landasan bagi setiap gerak langkah civitas academica UMY, yaitu; keikhlasan, kesungguhan, dan kebersamaan (Darmawan, 2016).. Keihlasan menggambarkan kesungguhan untuk bekerja tak kenal lelah meski dalam keterbatasan sarana dan fasilitas. Keihlasan akan melahirkan komitmen, kejujuran, amanah, dedikasi, loyalitas, kesederhanaan, pengorbanan, harga diri dan berbagai nilai spiritualitas yang transenden dan bersifat trans historis. Kesungguhan akan melahirkan kerja keras, tanggung jawab, profesionalitas, kompetensi, kreatif, inovatif, dan tak mudah menyerah. Kebersamaan akan melahirkan kesetiakawanan, dapat bekerja sama, mampu kerja bersama dan bersedia bekerja bersama sama, empati, harmoni, toleransi, saling mengisi. Nilai-nilai utama UMY telah dikembangkan menjadi: 1) Keihlasan, 2) Amanah, 3) Kejujuran, 4) Keadilan, 5) Profesional, 6) Kebersamaan, 7) Mawasdiri, 8) Kepedulian 9) Disiplin, dan 10) Tanggung jawab.

IIM Surakarta meskipun tidak merumuskan *core values*-nya secara eksplisit, tetapi menurut penuturan Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Ahmad Fatol, M.Ag., bahwa IIM Surakarta memiliki kekhasan sebagai PTKI yang *rahmatan lil alamin*. Pada tahun 2015 IIM Surakarta mengalami perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum Surakarta (STAIMUS) menjadi Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta (IIM). Perubahan tersebut tidak sekadar perubahan bentuk kelembagaan saja tetapi juga diikuti penyempurnaan visi dan misinya. Keunikan (distingsi) yang diusung IIM Surakarta adalah menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bercirikan *rahmatan lil alamin*. Keunikan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi Surakarta yang sangat plural dengan berbagai macam aliran yang ada. Ciri kas ini kemudian diterjemahkan dalam proses pendidikan mulai dari perumusan kurikulum, silabus, RPS, sampai pada proses pembelajaran di kelas, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa terutama kegiatan intra kampus.

Makna *rahmatan lil alamin* sebagai ciri khas IIM adalah bahwa Islam adalah agama yang mengandung ajaran yang sempurna sebagai pedoman hidup manusia untuk dapat menggapai keselamatan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan baik di dunia dan akhirat. Inti ajaran Islam terdiri aqidah, syari›ah dan akhlak merapakan satu kesatuan yg utuh, padu yang dapat membentuk pola pikir, pola sikap humanis, toleran dan inklusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pemahaman keislaman yang dikembangkan adalah yang dapat memberi kemaslahatan yang mendorong rekatnya

ukhuwah Islamiyah, *ukhuwah basyariah*, dan *ukhuwah wathoniyah*. Sejalan dengan pemaknaan seperti itu proses pendidikan di IIM diarahkan agar mahasiswa dan semua civitas akademika memiliki sikap keagamaan yang *rahmatan lil 'alamin* tersebut dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan bermasyarakat. Aplikasi nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* ini dalam perilaku kehidupan bermasyarakat secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 macam yakni *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah bashariyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah 'ubudiyah*.

Mencermati rumusan nilai-nilai utama (*core values*), visi, misi, dan tujuan pendidikan, baik pada level universitas, fakultas, maupun jurusan atau Prodi dari ketiga PTKI pada hakikatnya memiliki titik kesamaan. Pertama, ketiga PTKI tersebut ingin menjadikan lembaganya sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, keunggulan dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Ketiga, dengan ungkapan yang berbeda masing-masing PTKI Islam tersebut memiliki visi dan misi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang inklusif, moderat, dan *rahmatan lil alamin*.

Profil Lulusan dan Kurikulum Prodi PAI

Pada masa awal rintisan berdirinya Jurusan PAI pada masa PTAIN Yogyakarta Tahun 1950, orientasi pengembangan Jurusan PAI bukan untuk pengembangan akademik murni, misalnya, untuk membina lulusan yang berkeahlian riset di bidang ilmu pendidikan/keguruan melainkan untuk menyiapkan tenaga ahli didik/guru Agama Islam guna memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Syafruddin, 2000: 124).. Dalam perkembangannya dewasa ini, telah terjadi perluasan orientasi pengembangan Jurusan PAI, yakni tidak lagi sekadar menghasilkan tenaga guru agama Islam di sekolah dan madrasah, tetapi juga tenaga ahli lainnya seperti peneliti, konselor dalam bidang agama Islam, manajer pendidikan, dan penulis buku. Perkembangan ini tentu dilakukan dalam rangka merespons tuntutan perkembangan yang ada di masyarakat dan memberikan fleksibilitas dan keleluasaan bagi para lulusan untuk dapat mengisi berbagai alternatif lapangan pekerjaan. Perluasan orientasi pengembangan Jurusan PAI ini dapat dicermati dari rumusan profil lulusan Jurusan/Prodi PAI pada ketiga PTKI.

Profil utama lulusan Jurusan PAI FITK UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai Pendidik/Guru PAI di Sekolah dan Madrasah, yang berkepribadian baik dan memiliki integritas, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidang pendidikan agama Islam, dan mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan profesi. Profil tambahan pertama adalah sebagai konselor Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah, yang kompeten, menguasai psikologi anak dan mampu melakukan bimbingan pembelajaran dan pengamalan agama Islam anak usia sekolah serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi

kesetaraan, keadilan dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian serta profesi. Profil tambahan yang kedua adalah sebagai peneliti pada bidang Pendidikan Agama Islam yakni menjadi peneliti pada bidang Pendidikan Agama Islam yang produktif, mengusai metode penelitian dengan baik, dan mampu mengevaluasi pendidikan agama Islam serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian serta profesi.

Profil utama lulusan Prodi PAI FAI UMY adalah sebagai Pendidik (Guru PAI), yakni seseorang yang bisa bekerja secara amanah dan profesional sebagai guru PAI di madrasah dan sekolah. Profil alternatif tambahannya adalah sebagai manajer pendidikan, yang bisa bekerja secara amanah dan profesional sebagai manajer di lembaga pendidikan Islam. Alternatif lainnya adalah sebagai peneliti pendidikan, yang bisa bekerja secara amanah dan profesional sebagai peneliti muda di bidang pendidikan Islam.

Profil utama lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IIM Surakarta adalah sebagai pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya dan berkemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan profesi. Profil tambahannya adalah sebagai peneliti pendidikan tingkat dasar dan penulis buku ajar.

Lulusan Prodi PAI Fakultas Tarbiyah selama ini dinilai memiliki keunggulan dalam penguasaan aspek teknis metodologi pembelajaran seperti penguasaan metode/ strategi pembelajaran, pengembangan media dan sumber belajar, dan sebagainya. Sisi kekurangan lulusan Prodi PAI Fakultas Tarbiyah adalah lemah dalam penguasaan materi kajian keislaman. Di antara faktor penyebab kondisi seperti ini adalah desain kurikulum yang dikembangkan Prodi PAI dan juga proses pembelajaran yang terlihat memberikan porsi yang lebih banyak untuk pengembangan aspek teknis metodologi pembelajaran dibandingkan dengan penguasaan kajian keislaman. Selain itu, muatan kajian keislaman yang dikembangkan dalam kurikulum Prodi PAI tersebut kurang begitu luas dan mendalam. Dengan kenyataan seperti itu berarti apa yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra masih dialami oleh Prodi PAI hingga sekarang, bahwa LPTK termasuk Jurusan PAI dianggap kurang berhasil mencetak calon-calon guru yang profesional. Menurutnya LPTK umumnya termasuk Jurusan PAI, masih menganut paradigma *technical based teacher education*, pendidikan keguruan yang berbasiskan hal-hal teknis tentang pengajaran. Sangat banyak waktu dihabiskan untuk "hal-hal teknis" kepengajaran dalam proses belajar-mengajar pada LPTK. Sementara, penguasaan substansi keilmuan yang lebih dalam -yang bahkan lebih krusial bagi keberhasilan *transfer of knowledge* kepada peserta didik- menjadi cenderung diabaikan (Azra, 2002: 51). Sejalan dengan Azyumardi Azra, Muhaimin juga menyatakan bahwa selama ini pengembangan kurikulum di Jurusan PAI terjebak pada aspek-aspek praktis, teknis metodologis dan melupakan aspek akademisnya sehingga lulusannya lebih kaya dengan keterampilan dan kemampuan teknis metodologi

pengajaran daripada penguasaan keilmuan keislaman dan pengembangan wawasan. Jargon yang sering didengungkan ialah *"al-ṭarīqah ahammu min al-māddah"* (metode lebih penting daripada materi). Dengan kondisi semacam ini, maka tidak heran kalau luarannya bahkan tidak berani mengajar ilmu-ilmu keislaman (Muhaimin, et.al, 2004: 131).. Uraian pada bagian ini berupaya menelusuri sisi kelemahan dari desain/rancangan kurikulum yang dikembangkan pada Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UMY, dan Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta.

Pada saat penelitian ini dilakukan, di Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga diberlakukan dua jenis kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum 2016 yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum 2013 yang diberlakukan di Jurusan PAI memiliki jumlah beban ekuivalen sebanyak 156 sks. Jumlah beban ekuivalen minimal yang harus diambil mahasiswa sebanyak 146 sks dengan ketentuan jumlah mata kuliah wajib beban ekuivalen 136 sks dan mata kuliah pilihan yang harus diambil minimal 10 sks dari yang ditawarkan sebanyak 20 sks. Komposisi mata kuliah kurikulum 2013 dalam hubungannya dengan pengembangan kompetensi guru adalah untuk pengembangan penguasaan kompetensi pedagogis sebesar 78 sks (50%), kompetensi profesional sebesar 30 sks (19,23%), selebihnya 48 sks (30,76%) untuk mendukung penguasaan dasar-dasar keilmuan dan penguasaan bahasa.

Mata kuliah yang ditawarkan dalam Kurikulum 2016 memiliki jumlah beban ekuivalen sebanyak 157 sks. Jumlah beban ekuivalen minimal yang harus diambil mahasiswa sebanyak 147 sks dengan ketentuan jumlah mata kuliah wajib beban ekuivalen 137 sks dan mata kuliah pilihan yang harus diambil minimal 10 sks dari yang ditawarkan sebanyak 20 sks. Komposisi mata kuliah kurikulum 2016 dalam hubungannya dengan pengembangan kompetensi guru adalah untuk pengembangan penguasaan kompetensi pedagogis sebesar 68 sks (43,3%), kompetensi profesional sebesar 43 sks (27,4%), selebihnya 46 sks (29,3%) untuk mendukung penguasaan dasar-dasar keilmuan dan penguasaan bahasa.

Kurikulum Program Studi PAI FAI UMY memiliki beban studi paling sedikit dibanding Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga dan Prodi PAI IIM Surakarta. Beban studi yang ditawarkan secara keseluruhan terdiri dari 144 sks. Komposisi mata kuliah terdiri dari 62 sks (43%) untuk penguasaan kompetensi pedagogis, 36 sks (26%) untuk penguasaan kompetensi profesional, dan 46 sks (32%) untuk penguasaan wawasan umum dan bahasa. Kurikulum Prodi PAI UMY ini jauh lebih banyak muatan untuk pengembangan kompetensi pedagogisnya dibandingkan dengan pengembangan kompetensi profesional (penguasaan matei keislaman).

Kurikulum Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Islam Mambaul Ulum (IIM) Surakarta secara keseluruhan terdiri dari 150 sks. Komposisi bobot sks dalam hubungannya dengan pengembangan kompetensi guru relatif berimbang, tetapi untuk pengembangan kompetensi pedagogis juga masih lebih banyak dibanding untuk

pengembangan kompetensi profesional. Bobot sks untuk penguasaan kompetensi pedagogis sebanyak 48 sks (32%), penguasaan kompetensi profesional sebanyak 46 sks (31%), dan untuk penguasaan wawasan umum dan bahasa sebanyak 56 sks (37%).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa muatan kurikulum Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dan Prodi PAI FAI UMY secara umum memberikan porsi yang lebih besar untuk pengembangan kompetensi pedagogis dari pada untuk pengembangan kompetensi profesional (penguasaan kajian keislaman). Sedangkan kurikulum Prodi PAI IIM Surakarta relatif berimbang. Dari ketiga Prodi PAI tersebut, Prodi PAI UMY memiliki muatan mata kuliah untuk pengembangan kompetensi pedagogis yang paling banyak, disusul Prodi PAI UIN Sunan Kalijga, dan berikutnya Prodi PAI IIM Surakarta.

Pada kurikulum Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga terdapat mata kuliah keislaman yang dihubungkan dengan pembelajarannya seperti Pembelajaran Akidah Akhlak, Pembelajaran Al-Quran Hadis, Pembelajaran Fikih, dan Pembelajaran SKI. Mata kuliah tersebut terasa kurang tepat karena sebenarnya strategi dan prosedur pembelajaran materi tersebut cukup diwadahi dengan mata kuliah yang lebih umum, seperti Strategi/ Metode Pembelajaran. Dengan mata kuliah tersebut, pembelajaran di Prodi PAI semakin terjebak pada paradigma *technical based teacher education* sebagaimana kritik yang dilontarkan oleh Prof. Azyumardi Azra terhadap praktik pembelajaran di Prodi PAI selama ini.

Dilihat dari sisi kedalaman dan keluasan, muatan kajian sejumlah mata kuliah keislaman terlihat kurang luas dan mendalam. Ketika dibandingkan dengan bahan kajian dalam kurikulum Madrasah Aliyah (MA) khususnya MA Peminatan Keagamaan, topik-topik atau tema-tema kajian kajian dalam pembelajaran Prodi PAI terlihat tidak jauh berbeda. Mata kuliah yang masuk kategori ini adalah Akhlak dan Tasawuf, Fikih dan Ushul Fikih, Tauhid, Fikih Munakahat dan Mawaris, Fikih Ibadah dan Muamalah, Fikih Siyasah dan Jinayah, Aqidah/Akhlaq, Qur'an Hadis di Madrasah dan Sekolah, Aqidah-Akhlak di Madrasah dan Sekolah, Fikih di Madrasah dan Sekolah, Fiqh di Madrasah dan Sekolah, Tarikh di Madrasah dan Sekolah, Aqidah Tauhid, Akhlak Tasawuf, Fikih, Sejarah Peradaban Islam, Ilmu Kalam, Fikih 2, Usul Fikih, Mawaris Islam, Materi PAI 1, dan Materi PAI 2.

Dilihat dari keluasan dan kedalaman bahan kajian mata kuliah keislaman, kurikulum Prodi PAI belum sepenuhnya sesuai dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan profil lulusan yakni sebagai pendidik atau guru PAI di sekolah dan madrasah. Rumusan bahan kajian yang ada dalam kurikulum Prodi PAI tersebut baru memadai untuk mendidik calon guru PAI di sekolah umum dan kurang memadai untuk mendidik guru rumpun PAI di Madrasah yang meliputi guru Al-Quran Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih/Ushul Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Terlepas dari kekurangan tersebut, ada sisi keunggulan dalam kurikulum Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dan IIM Surakarta, yakni dalam konteks pengembangan

sikap moderasi beragama dengan adanya sejumlah mata kuliah keislaman yang mendukung. Untuk Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga, ada mata kuliah Studi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal, serta Pengantar Studi Islam. Sedangkan dalam kurikulum Prodi PAI IIM terdapat tiga mata kuliah Masailul Fiqh, Perbandingan Madzhab, dan Metodologi Studi Islam. Sementara itu di Prodi PAI UMY tidak terdapat mata kuliah-mata kuliah seperti di atas.

Proses Pendidikan di Prodi PAI

Proses Rekrutmen Calon Mahasiswa

Pada dasarnya ketiga PTKI memiliki prinsip yang sama dalam menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) yakni memberikan kesempatan yang sama bagi setiap calon mahasiswa baru dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan etnis. Dalam rangka untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas, ketiga PTKI menyelenggarakan beberapa jalur sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB).

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan 5 jalur PMB, yaitu SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, dan Mandiri. Program studi-program studi Keagamaan, termasuk Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), dalam proses penerimaan mahasiswa baru sejak tahun akademik 2015/2016 tidak lagi mengikuti jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kebijakan ini di dasarkan pada hasil evaluasi bahwa ternyata mahasiswa-mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN itu tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diharapkan. Sistem seleksi melalui ke dua jalur tersebut bersifat umum yang dikelola Kemenristek Dikti, dalam arti tidak ada materi tes yang berkaitan dengan keislaman dan penguasaan bahasa Arab. Oleh karena itu sejak tahun akademik tersebut untuk program studi rumpun keagamaan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga hanya ditempuh melalui tiga jalur yaitu jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan jalur Mandiri. Ketiga jalur tersebut telah mempertimbangkan pengukuran kompetensi penguasaan materi keislaman atau biasa disebut dengan Dirasah Islamiyah dan kemampuan bahasa Arab.

SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan pola seleksi prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya bagi siswa tahun berjalan SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru UIN/IAIN/STAIN melalui

ujian tertulis bagi siswa yang lulus dari satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK/ Pesantren *Mu'adalah* atau yang setara yang dilakukan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk Prodi PAI materi ujian meliputi: Tes Kemampuan Dasar (TKD), Tes Potensi Akademik (TPA), Bahasa (Arab dan Inggris), Keislaman dan Kemampuan IPS.

Jalur Mandiri adalah mekanisme seleksi masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui tes (*Computer-Based Test*, *Paper-Based Test*, Portofolio) dan Non Tes, bagi siswa SMA/SMK/MA MAK/Pesantren *Mu'adalah*/luar negeri atau sederajat yang dikelola langsung oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jalur Mandiri terdiri dari beberapa jenis meliputi: (1) *Computer-Based Test* (CBT) yaitu seleksi dengan pola ujian menggunakan komputer. Calon mahasiswa datang langsung ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan tes, dan langsung mengetahui pengumuman 1 (satu) hari hasil tes dengan skor rerata minimal 60; (2) *Paper-Based Test* (PBT) merupakan seleksi dengan pola ujian tertulis. Pada jalur Mandiri CBT dan PBT ini terdapat program Mandiri Khusus Difabel untuk calon mahasiswa baru difabel. Materi tes pada jalur CBT dan PBT meliputi: Tes potensi akademik (TPA), Tes *Dirasah Islamiyah* (Al-Quran dan Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, Tauhid, Akhlak, Fiqih), Bahasa (Bahasa Arab dan Inggris), TKD IPS (Tes Kemampuan Dasar IPS terdiri atas Sosiologi, Sejarah, Geografi dan Ekonomi); (3) Non Tes, yaitu jalur Mandiri yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai keahlian dan prestasi hafal Alquran minimal 26 juz , juara qari (juara 1-5 nasional, juara 1-3 provinsi, juara 1 kabupaten) melalui verifikasi langsung; dan (4) Portofolio, yaitu jalur penerimaan calon mahasiswa baru melalui seleksi berkas akademik dan pendukung akademik untuk calon mahasiswa baru luar negeri yang telah lulus setara dengan pendidikan menengah.

Sistem penerimaan mahasiswa baru di UMY secara umum ada dua macam yakni jalur prestasi dan jalur tes. Jalur prestasi merupakan jalur seleksi calon mahasiswa baru yang didasarkan pada nilai rapor siswa yang diperoleh sejak semester 1 sampai semester 5 di tingkat SLTA dengan ketentuan minimal nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran adalah 7 dan nilai Ujian Akhir Nasional. Di samping berdasarkan nilai rapor dan nilai UAN, juga didukung prestasi akademik dan non akademik lainnya misalnya kejuaraan dalam berbagai perlombaan selama menempuh pendidikan di SLTA. Seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan jalur prestasi dibagi dalam 4 jenis yakni: PMDK (Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan), PSB (Penerimaan Siswa Berprestasi), PBUP (Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan), dan PNUAN (Penerimaan berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional).

Jalur tes masuk yang dilaksanakan oleh UMY ada dua jenis, yaitu *Paper Based Test* (PBT) dan *Computer Based Test* (CBT). CBT merupakan tes penerimaan mahasiswa baru berbasis komputer yang dikenal dengan nama *One Day Service*. Calon mahasiswa datang mendaftar dan langsung melakukan tes yang hasilnya dapat diketahui setelah tes. Tes dilaksanakan di Kampus UMY dan calon mahasiswa dapat memilih dua program

studi dari semua program studi di UMY. Setiap calon mahasiswa dapat mengikuti CBT maksimal tiga kali. Jalur *Paper Based Test* (PBT), adalah tes seleksi yang diselenggarakan dengan menggunakan soal tertulis dalam lembar kertas. Calon mahasiswa dapat memilih dua program studi dari semua program studi yang ada di UMY. Calon mahasiswa dapat mengikuti PBT maksimal empat kali. Materi yang diujikan pada jalur CBT maupun PBT adalah materi tes potensi akademik (TPA) dengan jumlah soal 100 butir. Menurut informasi dari pengelola admisi UMY tidak ada materi Dirasah Islamiyah atau keislaman dan bahasa Arab. Mencermati sistem seleksi yang dikembangkan di UMY ini khususnya untuk Prodi PAI tampaknya belum cukup efektif untuk dapat menyeleksi calon mahasiswa untuk Prodi PAI yang memiliki bekal kemampuan keislaman dan penguasaan bahasa Arab yang memadai. Hal ini dikarenakan tidak ada materi tes yang mengukur dua kemampuan tersebut.

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan di Institut Islam Mamb'aul 'Ulum Surakarta ada dua sistem yaitu lewat jalur prestasi dan lewat tes tertulis. Jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi hasil belajar calon mahasiswa pada jenjang pendidikan di SLTA. Jalur tes dilakukan dengan melaksanakan tes tertulis dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan agama dan bahasa. Di samping itu, di IIM juga ada jalur kerja sama dengan pesantren-pesantren yang menyelenggarakan Ma'had Aly yang setara dengan Diploma 2 atau Diploma 3. Mata kuliah keislaman seperti mata kuliah Bahasa Arab, Fiqih, Al Quran Hadis, Tafsir, Akidah Akhlak dan sebagainya. yang telah mereka tempuh di Ma'had Aly dapat diakui dan dikonversi di IIM. Mereka tidak perlu menempuh lagi mata kuliah-mata kuliah yang telah diakui tersebut. Mereka yang masuk lewat jalur seperti itu di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IIM ada yang langsung menduduki semester 3 atau bahkan semester 5. Mereka tinggal mengambil mata kuliah-mata kuliah yang belum dipelajari. Dengan demikian waktu tempuh studi mahasiswa yang punya latar belakang pendidikan Ma'had Aly relatif lebih cepat dibanding mahasiswa lainnya.

Tingkat keketatan seleski calon mahasiswa baru di ketiga PTKI, Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga yang paling ketat. Menurut penuturan Ketua Prodi PAI, bahwa tingkat keketatan persaingan masuk di Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga pada tahun akademik 2018/2019 adalah 1:49. Ini artinya bahwa input yang masuk di Prodi PAI itu seleksinya cukup ketat. Tingkat keketatan pada Prodi PAI UMY menurut Ketua Prodinya adalah 1:4. Sedangkan di Prodi PAI IIM Surakarta sampai saat ini, semua pendaftar tidak ada yang ditolak karena jumlah calon mahasiswa yang mendaftar belum melebihi jumlah kuota yang ditetapkan. Dengan data ini maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada seleksi secara memadai yang dilakukan di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IIM Surakarta.

Meskipun di Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga tingkat keketatan seleksi masuk begitu tinggi/ketat, tetapi apakah sistem seleksi yang diterapkan itu sudah menjamin dapat memilih calon mahasiswa yang betul-betul berkualitas atau tidak. Oleh karena itu

perlu ditelusuri dari ketentuan dan instrumen-instrumen seleksi yang digunakan. Sistem dan jalur yang diterapkan untuk penerimaan calon mahasiswa baru khususnya untuk Prodi PAI tampaknya belum sepenuhnya mampu menjaring calon-calon mahasiswa yang sesuai dengan karakteristik dan kualifikasi sebagai mahasiswa Prodi PAI. Hal ini terlihat dari ketentuan dan instrumen yang digunakan. Calon mahasiswa PAI idealnya memiliki bekal wawasan keislaman dan penguasaan bahasa Arab yang memadai. Di samping itu juga memiliki kepribadian dan sikap keberagamaan yang sesuai dengan visi- misi Prodi PAI dan UIN. Dengan kualifikasi seperti ini diharapkan dapat menjadi bekal sebagai calon guru agama Islam baik di sekolah maupun madrasah yang kompeten/profesional.

Jalur SPAN-PTKIN memiliki kuota cukup banyak yaitu sekitar 30% dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru yang diterima Program Studi PAI. Kelemahan penerimaan calon mahasiswa lewat jalur ini antara lain dari segi dasar/kriteria pertimbangan penerimaan calon mahasiswa yang digunakan. Dasar/kriteria yang digunakan untuk calon yang berasal dari jurusan selain agama tidak mempertimbangkan nilai mata pelajaran agama, tetapi hanya mempertimbangkan nilai mata pelajaran umum. Nilai mata pelajaran yang dipertimbangkan untuk Jurusan IPA (Sains) meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika. Nilai mata pelajaran yang dipertimbangkan untuk Jurusan Sosial adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, dan Matematika. Nilai mata pelajaran yang dipertimbangkan untuk Jurusan Bahasa adalah Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Bahasa Asing (selain Bahasa Inggris), Bahasa Inggris, Antropologi, dan Matematika. Nilai mata pelajaran yang dipertimbangkan untuk SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Mencermati dasar pertimbangan yang digunakan berarti seleksi calon mahasiswa lewat jalur SPAN-PTKIN ini bersifat umum sehingga bagi Prodi PAI tampaknya tidak atau belum menjamin bisa menyeleksi calon mahasiswa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai calon guru PAI karena bisa jadi anak-anak yang mungkin pandai atau menguasai dalam bidang agama tetapi karena nilai mata pelajaran umum tidak memenuhi kriteria atau tidak bisa bersaing dengan siswa yang lain, maka tidak dapat diterima di Prodi PAI. Sebaliknya anak-anak yang sebenarnya kurang kompeten dalam ilmu agama tetapi karena nilai mata pelajaran umum baik, maka mereka bisa diterima di Prodi PAI. Sehingga jalur SPAN PTKIN dengan dasar kriteria penerimaan yang seperti sekarang ini kurang cocok untuk menyeleksi calon mahasiswa baru khususnya Prodi PAI. Sebaiknya dasar penerimaan itu tidak semata-mata pada mata pelajaran umum, tetapi juga didasarkan pada nilai mata pelajaran lain sesuai dengan karakteristik prodi, misalnya dengan lebih mempertimbangkan mata pelajaran agama dan prestasi-prestasi yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Dengan demikian calon mahasiswa yang diterima akan lebih sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan sebagai calon guru agama Islam yang profesional.

Kemudian sistem penerimaan yang melalui jalur UM-PTKIN dan Mandiri meskipun sudah ada sudah ada materi keislaman dan Bahasa Arab, tetapi kualitas instrumen tesnya masih perlu dicermati. Kelemahan lain adalah selama ini sistem seleksi

calon mahasiswa baru di ketiga PTKI masih menekankan pada aspek kualitas akademik. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan sikap, khususnya sikap keberagamaan, belum mendapat perhatian. Sehingga ketika ada calon mahasiswa yang memiliki sikap keberagamaan yang cenderung eksklusif atau radikal belum bisa terdeteksi dan terseleksi dengan baik.

Kegiatan Pembelajaran/Perkuliahan

Menurut hasil survei kegiatan pembelajaran/perkuliahan di Prodi PAI ketiga PTKI menurut persepsi mahasiswa diperoleh skor rata-rata 2,97 yang berdasarkan kriteria (2,52-3,26) termasuk kategori baik. Ukuran yang dijadikan dasar untuk melihat proses perkuliahan ini dari persepsi mahasiswa ada 11 indikator yang dikelompokkan pada 4 aspek, yaitu: 1) kompetensi dosen, 2) respons terhadap isu-isu kontemporer, 3) pengaruh dosen terhadap mahasiswa, dan 4) pembelajaran kritis.

Menurut persepsi dosen kegiatan pembelajaran/perkuliahan di Prodi PAI ketiga PTKI dinilai sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh adalah 3,71 yang berdasarkan kriteria (3,27-4,00) termasuk kategori sangat baik. Dasar untuk melihat aspek ini ada 8 butir indikator yang dikelompokkan menjadi empat aspek yaitu: (1) pemutakhiran (*up dating)* perkuliahan, (2) respons terhadap isu-isu kontemporer, dan (3) pembelajaran kritis.

Meskipun menurut hasil survei secara umum proses pembelajaran menurut persepsi mahasiswa termasuk kategori baik dan bahkan menurut persepsi dosen sangat baik, namun ketika dilihat dari per aspek menurut persepsi mahasiswa masih ada sisi-sisi yang kurang bahkan ada yang sangat kurang. Aspek yang masuk kategori masih sangat kurang adalah aspek pengaruh dosen terhadap mahasiswa yang diukur lewat 6 indikator. Skor rata-rata aspek ini adalah 1,60 yang berdasar kriteria (1,00-1,75) termasuk kategori sangat kurang. Artinya menurut pengakuan mahasiswa bahwa dalam pengembangan wawasan pengetahuan keislaman mereka lebih dipengaruhi oleh sumber lain selain dosen utamanya adalah media internet dan media sosial. Kemudian aspek yang masuk kategori kurang adalah pembelajaran kritis. Skor rata-rata aspek ini adalah 1,99 yang berdasarkan kriteria (1,72-2,51) termasuk kategori kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen serta berdasarkan hasil observasi di kelas juga ditemukan sisi-sisi kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Kekurangan dari sisi motivasi belajar mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan secara umum masih didominasi motivasi yang bersifat ekstrinsik. Mereka aktif melakukan kegiatan belajar lebih karena untuk dapat lulus dengan nilai yang baik. Sedangkan kekurangan terkait dengan kinerja dosen dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan adalah dosen belum sepenuhnya menumbuhkan dan membangun daya kritis mahasiswa. Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap mahasiswa PAI selama ini adalah bahwa daya kritis mereka kurang. Pembantu Dekan 3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membenarkan kritik tersebut.

> "Secara umum kondisi mahasiswa Jurusan PAI ya seperti itu (daya kritis mereka kurang). Tetapi sebenarnya kesalahannya bukan ada pada mahasiswa sendiri. Kesalahannya ada pada proses yang di dalamnya ada banyak pihak yang terlibat termasuk dosen. Kecenderungan perkuliahan selama ini untuk menerima apa yang ada di perkuliahan itu sangat kuat. Mereka hanya menerima apa yang diberikan di perkuliahan saja sehingga mereka terjebak pada tugas-tugas rutin yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kalau tugas-tugas tersebut mampu untuk mengembangkan wawasan mereka tidak masalah. Tetapi kebanyakan tugas-tugas tersebut sifatnya sebatas pemberian tugas, dalam artian belum mampu mengembangkan wawasan mahasiswa dan daya kritis mereka. Proses seperti itu sebab utamanya ada pada dosen pengampu mata kuliah (Wawancara, 5 Nopember 2018)."

Perkuliahan yang dilakukan dosen umumnya dengan model ceramah yang diikuti tanya jawab, tugas membuat makalah (baik makalah individu maupun kelompok), presentasi dan diskusi, dan ada sebagian dosen yang memberikan tugas mini riset. Pada awal perkuliahan dosen memberikan materi kuliah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian setelah mahasiswa selesai menulis makalah dilanjutkan presentasi dan diskusi. Model diskusi yang yang dilakukan beragam ada yang model diskusi kelas dan ada yang diskusi kelompok kecil. Kasus di Prodi PAI IIM Surakarta umumnya menggunakan diskusi kelas, dan sangat jarang menggunakan diskusi kelompok. Hal ini antara lain disebabkan kursi atau tempat duduk kuliah mahasiswa terbuat dari kayu yang cukup berat sehingga kesulitan untuk dipindah-pindah/ditata sesuai dengan strategi perkuliahan yang digunakan, khususnya untuk melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Kalau kursi di Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dan UMY berupa kursi lipat yang lebih ringan sehingga lebih memudahkan penataan sesuai dengan model diskusi yang digunakan dosen.

Ketika kegiatan diskusi khususnya diskusi kelas jumlah mahasiswa yang aktif relatif sedikit. Jumlah mahasiswa dalam setiap kelas rata-rata 25 sampai 40 orang. Dari jumlah tersebut yang terlibat aktif dalam proses diskusi hanya sebagian saja. Penyebabnya adalah di samping karena adanya keterbatasan waktu, juga mahasiswa umumnya kurang memiliki bekal pengetahuan/wawasan tentang materi yang didiskusikan. Hal ini terjadi karena budaya membaca di kalangan mahasiswa Prodi PAI rendah. Sisi kelemahan lain model penugasan dalam bentuk penulisan makalah ini adalah ketika menulis makalah mahasiswa cenderung sekadar bersifat kopi tempel (*copy paste*), belum ada analisis yang memadai. Dari pihak dosen pengampu mata kuliah juga kurang memberikan review dan masukan untuk peningkatan kualitas karya tulis mahasiswa. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran/perkuliahan di Prodi PAI belum mampu menumbuhkan budaya berpikir kritis karena model pembelajaran meskipun menggunakan diskusi sifatnya monoton dan mahasiswa cenderung pasif. Dengan model seperti itu mahasiswa kurang terlatih untuk berpikir secara lebih kritis dan kreatif.

Aktivitas Mahasiswa Prodi PAI

Sebagian mahasiswa Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dari yang terpilih sebagai sampel penelitian aktif mengikuti kegiatan organisasi intra maupun ekstra kampus. Organisasi intra yang diikuti adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) JQH Al-Mizan, Lembaga Studi Dakwah (LDK) Sunan Kalijaga, Difabel UIN SUKA, LDK Fakultas, Lasdaf FITK, Pembinaan Keagamaan dan Tahsinul Qur'an (PKTQ), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) PAI, Kelompok Studi Ilmu Pendidikan (KsiP), dan UKM Futsal. Sedangkan kegiatan ekstra kampus yang diikuti adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulama (KMNU), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Di antara kegiatan ekstra kampus tersebut yang paling banyak anggotanya adalah PMII.

Selain aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus, mahasiswa Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga juga ada yang aktif di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Di antaranya adalah anggota Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Komunitas Moster PES, pengurus/anggota organisasi etnis/daerah, aktivis Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Yogyakarta, Guru TPA, Pembimbing Rohis di SMK, marbot masjid/mushala, Rumah Tahfidz, remaja masjid, direktur TPA, Organisasi Remaja Desa, Relawan Hamada Foundation, aktif di Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pengurus Ikatan Alumni Pondok Pesantren, dan mengaji di Masjid Syuhada.

Tidak jauh berbeda dengan mahasiswa Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga, sebagian mahasiswa Prodi PAI FAI UMY juga aktif mengikuti kegiatan organisasi intra dan ekstra kampus, serta kegiatan organisasi di masyarakat. Organisasi intra/ekstra kampus yang diikuti mahasiswa Prodi PAI UMY adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (HIMA) PAI UMY, LPTQ, Tapak Suci, Hizbul Wathan (HW), IPMPY, FMPP, BASEMKI, KOPMA UMY, LDK Kampus, Jama'ah Al-Anhar, Release Photography Club, Askho Voice, Sentra Mudya, KSR PMI UNIT IX, dan Kopma. Sedangkan kegiatan ekstra kampus yang diikuti adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komunitas Untuk Jogja, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), KAMMI, Mujadid. Organisasi ekstra kampus yang banyak diikuti oleh mahasiswa PAI UMY adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Karena di lingkungan UMY kegiatan organisasi ekstra kampus yang diakui resmi oleh pihak kampus hanya IMM. Adapun kegiatan di luar kampus yang diikuti dan dilakukan oleh mahasiswa PAI UMY antara lain adalah mengajar TPA, kegiatan majelis ta'alim, remaja masjid, karang taruna, takmir/marbot, relawan Kampung Dongeng, relawan Yogyakarta Mengajar, Mahandika, Komunitas Perpustakaan Masjid Gedhe Kauman, kegiatan olahraga seperti futsal, sepak bola, dan memanah, dan bermain musik.

Berbeda dengan mahasiswa Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga dan UMY, mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IIM Surakarta hanya sedikit yang mengikuti kegiatan di

organisasi intra maupun ekstra kampus. Dari 50 sampel yang mengikuti organisasi di kampus hanya 15 orang (30%). Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian mahasiswa Prodi PAI IIM Surakarta sudah bekerja baik sebagai guru maupun profesi lainnya. Organisasi intra/ekstra kampus yang diikuti adalah: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Mahacita Al-Falah (organisasi pencinta alam), Lembaga Dakwah Kampus (LDK) An-Nami, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA), Keluarga Mahasiswa (KM) IIM Surakarta, Kopma, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mahasiswa Prodi PAI IIM Surakarta banyak yang melakukan aktifivitas di luar kampus. Di antara mereka ada yang kuliah sambil mengajar di sekolah, madrasah, atau pesantren. Hal ini yang menjadi salah satu sebab mahasiswa tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Aktivitas mengajar mereka antara lain: mengajar BTA di TPQ, mengajar tahfidz, mengajar BTA di SDN, guru les privat, membantu di asrama pondok, mengajar tahsin, guru TK, guru RA, mengajar di MI, guru privat agama, mengajar di majlis ta`lim, musyrif kamar di Al Azhar Solo Baru, guru BA Aisiyah, Les Privat, dan mengajar di PP Quryatul Qur`an. Di samping itu mereka sebagian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang di luar kampus. Kegiatan-kegiatan organisasi tersebut antara lain: IPPNU, Rumah Zakat, Saka Bayangkara, karang taruna, Kegiatan Dakwah MI, Organisasi Pembinaan LDII, IMM Cabang Karanganyar, remaja masjid, aktif di Mahad Aly Al Mukmin, menjadi Pengurus Takmir, pengurus Ma'had, Komunitas Bisnis Indonesia, Cikal Sakti outbond Team, dan menjadi anggota POLRI bagian pembinaan kerohanian.

Sebagian mahasiswa IIM Surakarta juga aktif mengikuti kajian-kajian yang diadakan di luar kampus. Kegiatan kajian di luar kampus yang mereka ikuti antara lain kajian yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tempat mahasiswa mengajar (ada sebagian mereka yang mengajar di TK/RA, MI, SMP/MTS, maupun SMA/K dan MA), kajian keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat, kajian yang di selenggarakan di lingkungan organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA), Kajian Remaja Masjid, Kajian Remaja Solo Utara, dan aktif mengikuti halaqah.

Kompetensi Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi dosen yang profesional seseorang wajib memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara umum kompetensi dapat diartikan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja. Dari pengertian ini dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud kompetensi dosen adalah hasil penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Pada bahasan ini kompetensi dosen dilihat dari beberapa aspek, yaitu

penguasaan Bahasa Arab, penguasaan wawasan pengetahuan keislaman, latar belakang pendidikan, karya ilmiah dan kesesuaiannya dengan mata kuliah yang diampu, dan sikap keberagamaan dan keragaman.

Penguasaan Bahasa Arab dan Keislaman

Data tentang penguasaan dosen bahasa Arab didasarkan pada persepsi masing-masing dosen yang dikumpulkan dengan menggunakan angket. Ada dua hal yang diungkap, yaitu kemampuan dosen berbicara menggunakan bahasa Arab dan kemampuan membaca teks Arab. Kemampuan dosen berbicara dengan bahasa Arab secara umum termasuk kategori baik, demikian juga untuk kemampuan membaca teks Arab berada pada kategori baik. Ketika mencermati buku-buku referensi yang digunakan oleh para dosen yang tertuang dalam silabus atau RPS mata kuliah rumpun keislaman sebagian referensi yang digunakan berbahasa Arab, bahkan ada yang mencapai 50% dari keseluruhan referensi yang digunakan. Akan tetapi referensi yang dicantumkan dalam silabus atau RPS tersebut sebagian besar ternyata sudah ada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Kemudian ketika dikonfirmasi dengan mahasiswa ternyata dosen mata kuliah keislaman jarang sekali yang menggunakan referensi berbahasa Arab tersebut dalam proses perkuliahan di kelas. Mahasiswa pun juga jarang mengakses referensi-referensi yang berbahasa Arab baik ketika mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dalam bentuk menulis makalah atau paper, ataupun ketika mereka belajar untuk ujian. Mereka lebih banyak mengakses buku-buku yang berbahasa Indonesia.

Data tentang penguasaan wawasan keislaman dosen didasarkan pada persepsi mahasiswa yang dikumpulkan dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa menurut penilaian mahasiswa dosen mata kuliah keislaman secara umum memiliki pengetahuan agama yang sangat baik.

Latar Belakang Pendidikan, Penugasan, dan Karya Ilmiah Dosen

Dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan, dosen yang mengampu mata kuliah keislaman di ketiga Prodi PAI semuanya sudah berpendidikan S2 bahkan sebagian sudah S3 (doktor), sehingga dari sisi ini dosen-dosen tersebut sudah termasuk dalam kategori dosen professional. Namun sebagian besar latar belakang pendidikan mereka pada jenjang S1, S2 dan S3 adalah dari dalam negeri.

Dilihat dari sisi penugasan dalam mengampu mata kuliah, dosen keislaman pada ketiga Prodi PAI nampaknya masih ada persoalan. Penugasan dosen hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat profesionalitas dosen yang bersangkutan. Dosen profesional adalah ketika dosen tersebut mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang keahlian serta didukung dengan karya-karya yang dihasilkan dalam bidang keahliannya tersebut. Realita yang ada pada ketiga Prodi PAI menunjukkan sebagian besar dosen yang mengampu mata kuliah keislaman itu kurang

sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya dosen pengampu mata kuliah Fiqih Dan Ushul Fiqih diampu oleh dosen yang latar belakang pendidikan S1-nya Prodi PAI dan S2-nya Studi Islam. Mata kuliah Aqidah Tauhid diampu oleh dosen yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 PGMI. Idealnya dosen pengampu mata kuliah Fikih/ Ushul Fikih adalah berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Syariah baik jenjang S1 maupun S2-nya, atau paling tidak pada salah satu jenjang pendidikannya. Demikian juga mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam atau Aqidah idealnya diampu oleh dosen yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 dari aqidah filsafat Ushuluddin atau Prodi yang sejenis.

Persoalan kekurangsesuaian antara penugasan mata kuliah dengan latar belakang pendidikan seperti ini masih cukup banyak terjadi di Prodi PAI pada ketiga PTKI. Pada Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga dari 13 orang dosen, 6 orang yang kurang sesuai dan 7 orang yang sesuai. Pada Prodi PAI UMY dari 8 dosen yang mengampu mata kuliah keislaman hanya 2 orang yang latar belakang pendidikannya terlihat relevan. Kemudian pada Prodi PAI IIM Surakarta dari 15 orang dosen, yang betul-betul sesuai dengan latar belakang pendidikan hanya 2 orang.

Problem lain adalah sebagian dosen mata kuliah keislaman mengampu banyak mata kuliah yang berbeda-beda. Misalnya ada seorang dosen yang bidang keahliannya Hadis, tetapi dia mengajar mata kuliah Tauhid/Aqidah, Akhlak-Tasawuf. Ada juga dosen yang sebenarnya bidang keahliannya Filsafat Pendidikan Islam, tetapi dia mengajarkan materi-materi keislaman misalnya Tafsir, Hadis dan sebagianya. Dari sini nampaknya memang belum ada spesifikasi dari tugas mengampu mata kuliah keislaman yang sesuai dengan bidang keahlian yang tertulis dalam SK fungsional dosen. Persoalan lain yang perlu dicermati adalah sebagian besar dosen mengampu mata kuliah keislaman belum memiliki karya ilmiah monumental sesuai bidang keahliannya yang dapat menjadi rujukan bagi para mahasiswa dan juga khalayak yang lebih luas.

Kompetensi Mahasiswa

Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa

Latar belakang pendidikan mahasiswa ketiga Prodi PAI adalah SMA/SMK umum 45.1%, SMA/SMK Islam 2.6%, MAN/MAS 30,1%, dan SMA/SMK Pesantren 19.6%, dan 2,6% lainnya. Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa mahasiswa Prodi PAI yang dominan adalah berlatar belakang pendidikan SMA/SMK umum.

Kemudian jika dilihat pada setiap Prodi PAI, adalah mahasiswa Prodi PAI FITK UIN Sunan Kalijaga yang berlatar belakang SMA/SMK Umum 29.4%, SMA/SMK Islam 2.0%, MAN/MAS 49,0%, dan SMA/SMK Pesantren 19.6%. Mahasiswa Prodi PAI UMY yang berlatar belakang SMA/SMK Umum 62,3 %, SMA/SMK Islam 1,9%, MAN/MAS 22,6%, dan SMA/SMK Pesantren 13.2%. Mahasiswa Prodi PAI IIM Surakarta yang berlatar belakang SMA/SMK Umum 46,9%, SMA/SMK Islam 4,1%,

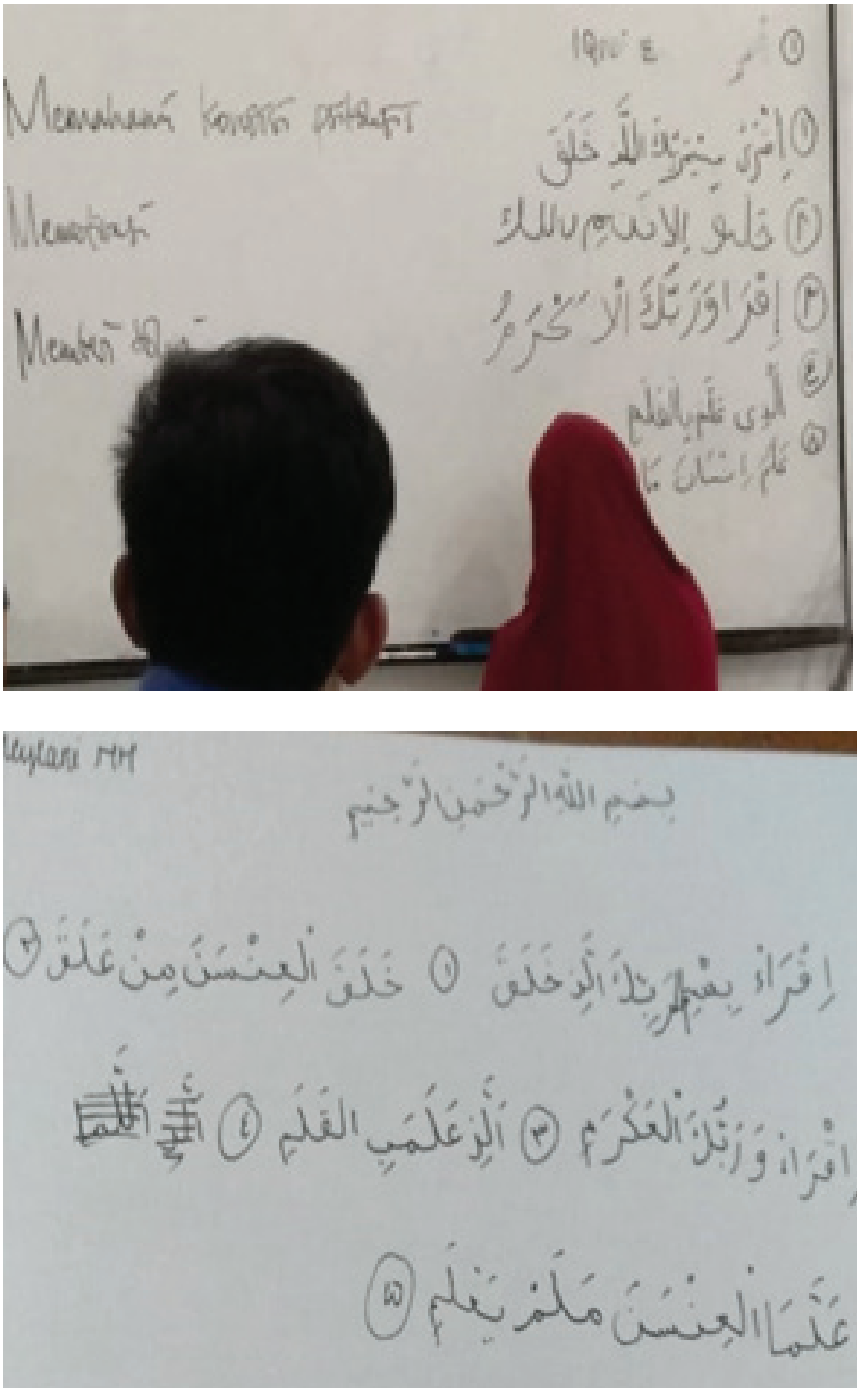

Gambar 6.1: Hasil tes kemampuan Mahasiswa menulis ayat-ayat Al-Quran

MAN/MAS 16,3%, dan SMA/SMK Pesantren 22.4%, lainnya 8,2%. Dari ketiga prodi yang mahasiswanya dominan dari MAN/MA adalah Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga, sedangkan yang dominan dari SMK/SMK umum adalah Prodi PAI UMY.

Kemampuan Baca Tulis Al-Quran

Data kemampuan mahasiswa membaca Al-Quran diperoleh melalui hasil survei dengan menggunakan angket. Secara umum kemampuan mahasiswa dalam membaca Al-Quran diperoleh skor rata-rata sebesar 2,64 yang berdasarkan kriteria (2,52-3,26) termasuk kategori baik. Meskipun demikian ternyata masih cukup banyak kemampuan mahasiswa yang termasuk kurang (31,4%) dan yang termasuk kategori sangat baik hanya sedikit sekali (7,1%). Hal ini memberikan pemahaman secara umum kemampuan membaca Al-Quran mahasiswa Prodi PAI sebagai calon guru PAI di madrasah/sekolah belum cukup ideal dan masih perlu ditingkatkan.

Kemampuan mahasiswa Prodi PAI dalam menulis ayat-ayat Al-Quran secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi di kelas ketika ada dosen meminta beberapa mahasiswa menuliskan ayat-ayat tertentu masih banyak yang salah dan kualitas tulisannya pun juga kurang baik. Ketika peneliti melakukan tes menulis ayat Al-Quran ternyata secara umum hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil observasi.

Data di atas diperkuat juga dari penuturan salah seorang dosen pengampu mata kuliah Al-Quran di Prodi PAI yang mengatakan, "Menurut saya dari sisi penguasaan materi keislaman mahasiswa kurang, contoh sederhana ketika mereka diminta menulis surat-surat pendek saja masih banyak yang mengalami kesulitan" (Mahmud Arif, wawancara, 21 September 2018).

Penguasaan Bahasa Arab

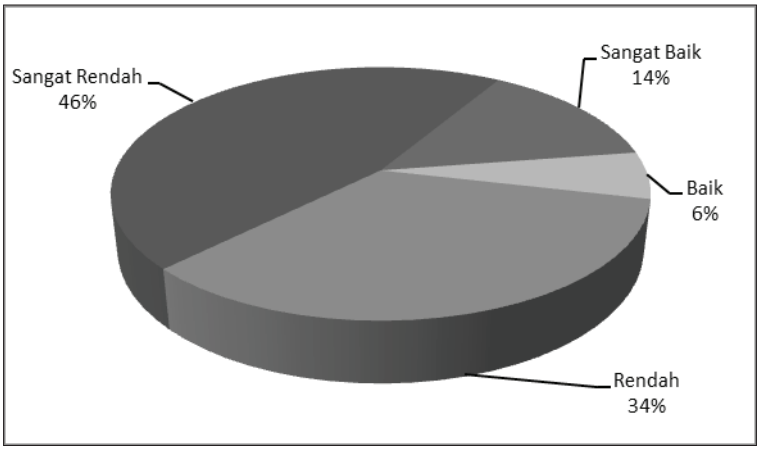

Gambar 6.2: Hasil tes kemampuan bahasa Arab mahasiswa

Kemampuan penguasaan mahasiswa dalam berbahasa Arab digali lewat survei kepada mahasiswa, tes tertulis, dan wawancaa. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa berbicara bahasa Arab sebagian besar masuk kategori sangat rendah (56,2%). Jika dilihat skor rata-rata pada aspek ini yakni sebesar 1,52 yang berdasarkan kriteria (1,00-1,75) termasuk kategori sangat kurang. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kemampuan bahasa Arab mahasiswa Prodi PAI di ketiga PTKI tersebut masih sangat kurang. Kemudian kemampuan mahasiswa membaca teks bahasa Arab yang dominan adalah masuk kategori kurang (42,5%). Jika melihat skor rata-rata pada aspek ini yakni sebesar 1,76 yang berdasarkan kriteria (1,76-2,51) termasuk kategori kurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil tes yang dilakukan terhadap sampel mahasiswa Prodi PAI di ketiga PTKI diperoleh data sebagaimana dalam Gambar 6.2. Data tersebut menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam bahasa Arab yang mencakup kemampuan membaca teks dan memahami isi teks bahasa Arab yang dominan adalah kategori sangat rendah (45,7%) dan rendah (34,3%). Jika melihat rata-rata skor pada aspek ini yakni sebesar 1,89 yang berdasarkan kriteria (1,76-2,51) termasuk kategori rendah. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa secara umum kemampuan bahasa Arab mahasiswa Prodi PAI di ketiga PTKI tersebut masih kurang.

Hasil survei dan tes ini sejalan dengan hasil wawancara. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa, mereka umumnya juga menyampaikan kekurangan mereka dalam soal penguasaan bahasa Arab baik secara tulis maupun lisan. Ketika menulis makalah mereka jarang sekali mengakses buku-buku referensi yang ditulis dalam Bahasa Arab. Umumnya mereka mengakses sumber referensi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau buku terjemahan. Sehingga dari sini dapat disimpulkan penguasaan Bahasa Arab mahasiswa secara umum masih kurang.

Wawasan Keislaman

Wawasan keislaman ini yang dimaksudkan adalah wawasan keislaman yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer. Indikator untuk melihat kompetensi penguasaan materi keislaman ini dilihat dari kemauan mahasiswa untuk membaca buku-buku keislaman dan wawasan mahasiswa terkait dengan isu-isu kontemporer yang digali melalui diskusi/ wawancara dengan mahasiswa. Kemauan membaca mahasiswa dapat dipilah menjadi dua, kemauan membaca literatur yang terkait dengan mata kuliah dan literatur terkait dengan pengembanagan wawasan tentang isu-isu keislaman kontemporer. Berdasarkan data hasil survei mahasiswa yang membaca literatur yang ditunjukkan dosen (berkaitan dengan mata kuliah) adalah 82,3%. Hal ini menunjukkan kemauan mahasiswa membaca buku literatur yang digunakan dalam perkuliahan cukup tinggi. Menurut penuturan mahasiswa, mereka membaca literatur tersebut terutama ketika mau mengerjakan makalah yang ditugaskan oleh dosen atau ketika menjelang ujian.

Selanjutnya kemauan mahasiswa untuk membaca literatur yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer misalnya tentang radikalisme, ekstrimisme, terorisme, toleransi, masih sangat kurang, bahkan ada mahasiswa yang menuturkan tidak pernah membaca literatur seperti itu. Salah serang dosen di Prodi PAI UMY menuturkan:

> "Kalau berdasarkan beberapa kelas yang saya ajar selama ini pemahaman agama mahasiswa masih kurang. Ya ada mahasiswa PAI yang akatif membaca buku-buku dan mengikuti perkembangan pemikiran kontemporer tetapi memang tidak banyak. Rata-rata mahasiswa yang saya ajar itu polos. Jadi yang pertama mereka itu polos, yang kedua basis keagamaan mereka masih kurang, yang ketiga mereka sepertinya tidak begitu tertarik untuk mengikuti perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Tapi di sini peluang bagi saya untuk memberikan pemahaman kepada mereka (Fajar, wawancara, 5 Oktober 2018)."

Berdasarkan kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa wawasan mahasiswa tentang isu-isu keislaman kontemporer relatif terbatas, apalagi dikaitkan dengan narasi pemikiran Islam radikal, Islam moderat, Islam liberal dan isu-isu sejenis. Fakta lain adalah ketika mereka diajak diskusi peneliti tentang isu-isu tersebut juga tidak begitu paham.

Upaya Pencegahan Islamisme Mahasiswa Prodi PAI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan berkembangnya islamisme di kalangan mahasiswa. Kebijakan-kebijakan ini berlaku untuk semua Prodi termasuk Prodi PAI. Upaya pencegahan di samping melalui proses perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang telah dirumuskan, juga melalui beberapa program. Salah satu program tersebut adalah Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru yang materinya meliputi profil UIN Sunan Kalijaga, keteladanan Sunan Kalijaga, pembinaan kemahasiswaan (pengenalan organisasi mahasiswa), macam-macam Unit Kegiatan Mahasiswa, profil fakultas dan prodi, pedoman akademik dan tata tertib mahasiswa, pembinaan mental spiritual dan pembinaan kebangsaan Indonesia dan cinta tanah air. Program untuk mahasiswa baru lainnya adalah Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru yang materinya meliputi *core values*, visi-misi UIN, pengembangan soft skill mahasiswa, gerakan deradikalisasi mahasiswa, pilar kebangsaan, dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Masih untuk mahasiswa baru, ada program pesantrenisasi selama satu tahun khususnya bagi mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan sekolah umum (SMA/SMK) yang tidak berbasis pesantren. Selain program di atas, ada juga kode etik/tata tertib mahasiswa yang salah satunya diharapkan dapat mencegah meluasnya islamisme di kalangan mahasiswa. Kegiatan lainnya berupa kegiatan pembinaan yang langsung ditangani oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan, seperti pelatihan *living values education* (LVE) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi.

UMY membuat kebijakan yang hampir sama dengan yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya untuk mencegah gejala islamisme di kalangan para mahasiswa. Upaya tersebut selain melalui proses perkuliahan mata kuliah sebagaimana yang telah digariskan dalam kurikulum juga melalui beberapa kegiatan yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan Orientasi Studi Dasar Islam (OSDI) dan masa taaruf bagi semua mahasiswa baru yang materinya antara lain tentang *self discovery*, *social relation*, *career readiness;* (2) pelaksanaan kegiatan Kuliah Intensif Al-Islam (KIAI) bagi semua mahasiswa pada semester pertama; (3) melaksanakan pembinaan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui kegiatan keorganisasian mahasiswa baik pada tingkat universitas fakultas maupun program studi; (4) menerbitkan dan menerapkan kode etik/tata tertib untuk semua mahasiswa.

Kebijakan yang dilakukan oleh IIM Surakarta dalam upaya pencegahan islamisme di kalangan para mahasiswanya terlihat lebih simpel dibandingkan dengan yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga dan UMY. Selain melalui perkuliahan, upaya tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu: (1) melaksanakan kegiatan Orientasi dan Sosialisasi Pengenalan Kampus (Ospek) bagi mahasiswa baru yang materinya meliputi visi, misi dan tujuan yayasan, visi, misi dan tujuan IIM, pengenalan tentang organisasi mahasiswa dengan pemateri para pimpinan institut dan fakultas; (2) melaksanakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa pada saat mereka akan melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL) dan kuliah kerja nyata (KKN); (3) melaksanakan kegiatan pembinaan kegiatan kemahasiswaan; dan 4) penerbitan dan pemberlakukan kode etik mahasiswa.

Mencermati kebijakan dan proses pendidikan di ketiga Prodi PAI mulai dari *core values*, visi-misi, kebijakan-kebijakan, desain kurikulum, hingga ke proses pembelajarannya tidak ditemukan indikasi bahwa ada upaya pengembangan narasi sikap keberagamaan yang eksklusif, radikalis, dan intoleran. Ketiga PTKI memiliki visi-misi dan upaya membekali mahasiswa dengan sikap beragama yang moderat, terbuka, dan toleran.

Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa melalui organisasi intra kampus berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PTKI baik pada tingkat fakultas maupun prodi dan dengan mencermati program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi intra kampus tidak ditemukan adanya indikasi pengembangan wawasan keislaman dan sikap keagamaan mahasiswa yang eksklusif apalagi radikal. Pihak pimpinan fakultas maupun program studi atau jurusan telah berupaya mengontrol dan memantau program dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa lewat organisasi intra kampus tersebut. Bentuk pengontrolannya antara lain dari awal penyusunan program kerja dan kegiatan dari pihak pimpinan fakultas maupun prodi telah memberikan arahan bahwa semua program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa lewat organisasi intra kampus tersebut harus disesuaikan atau sejalan dengan *core values*, visi-misi universitas, fakultas, dan prodi. Ketika mahasiswa akan melaksanakan suatu kegiatan, mereka harus berkonsultasi

dan mendiskusikannya dengan pimpinan fakultas ataupun prodi, mulai dari bentuk kegiatan hingga penentuan pemateri atau narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, sehingga dengan cara seperti itu kegiatan dapat dikontrol. Berdasarkan hasil pemantauan dari pihak fakultas dan jurusan/prodi selama ini tidak ditemukan adanya indikasi mahasiswa melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan *core values*, visi-misi universitas, fakultas, maupun prodi.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa melalui kegiatan ekstra kampus seperti PMII, HMI, IMM, KMNU, KAMMI secara umum juga terlihat berdampak positif dan tidak ditemukan indikasi ke arah pengembangan sikap keagamaan yang eksklusif-radikal. Sisi positif mahasiswa yang aktif di organisasi ekstra kampus terlihat memiliki wawasan pemikiran keislaman kontemporer lebih baik daripada yang tidak aktif. Hal ini karena di organisasi ekstra kampus tersebut umumnya memiliki agenda kegiatan secara rutin dalam bentuk kajian-kajian dan bedah buku yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran atau isu-isu kontemporer. Memang ditemukan pula ada organisasi ekstra kampus yang cenderung agak eksklusif.

Pihak kampus dari ketiga PTKI telah berupaya sedemikian rupa membentuk sikap keberagamaan mahasiswa yang terbuka, moderat, dan toleran sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Namun realitasnya masih dijumpai kecenderungan sebagian mahasiswa yang memiliki sikap islamisme dan intoleran. Adanya gejala sikap islamisme di kalangan mahasiswa ini sepertinya lebih dipengaruhi oleh kegiatan mahasiswa di luar kampus dan juga akses media sosial. Aktivitas di luar kampus tersebut utamanya adalah kajian-kajian yang diikuti oleh mahasiswa. Misalnya kasus seorang mahasiswa yang memiliki pandangan pentingnya ditegakkan sistem khilafah di Indonesia. Ia menginginkan sistem pemerintahan di Indonesia ini diganti dengan sistem khilafah. Karena sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia bukan sistem yang terbaik. Pandangan mahasiswa seperti ini saat dikonfirmasi ke yang bersangkutan dimiliki sebagai hasil dari mengikuti kajian di luar kampus.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan lebih lanjut pihak kampus perlu melakukan identifikasi dan mengontrol secara lebih intensif kegiatan atau aktivitas mahasiswa di luar kampus misalnya dengan mengoptimalkan peran dosen penasihat akademik (DPA). DPA tidak hanya difungsikan untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan persoalan akademik saja seperti pertimbangan pemilihan mata kuliah, penulisan skripsi, dan sebagainya, tetapi juga dioptimalkan untuk ikut memantau perkembangan sikap keberagamaan para mahasiswa. Ketika ada indikasi mahasiswa mengikuti kegiatan yang mengarah pada pengembangan sikap beragama yang eksklusif, radikal, dan intoleran, dapat segera diarahkan sesuai dengan visi-misi kampus. Kemudian langkah berikutnya adalah kampus perlu melakukan pengontrolan sejauh mana sikap keberagamaan mahasiswa tersebut sebelum mereka lulus, misalnya pada saat ujian komprehensif. Ketika ujian komprehensif materi yang diujikan sebaiknya tidak hanya fokus untuk mengukur tingkat penguasaan keilmuan mahasiswa setelah menjalani proses perkuliahan di kampus,

tetapi juga untuk mengecek sejauh mana sikap keberagamaan mahasiswa. Dengan cara seperti itu akan dapat dikontrol dan dipantau ketika ada indikasi sikap keberagamaan mahasiswa yang tidak sejalan dengan visi dan misi lembaga, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan upaya seperti itu, ketika mahasiswa lulus sudah ada upaya secara maksimal untuk menyiapkan calon guru agama Islam yang di samping memiliki kompetensi dalam bidang keilmuan (kompetensi profesional) dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pembelajaran (kompetensi pedagogis), juga memiliki sikap keberagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran (kompetensi personal dan sosial) sebagaimana visi-misi lembaga.

Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi

Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI) di ketiga PTKI sebagai produsen calon pendidik atau guru Pendidikan Agama Islam di madrasah dan sekolah telah berupaya sedemikian rupa untuk mencetak calon-calon guru Pendidikan Agama Islam yang profesional dan sesuai dengan konteks keislaman di Indonesia yakni Islam yang moderat dan *rahmatan lil alamin.* Namun demikian, berdasarkan hasil riset ini masih ditemukan sejumlah kekurangan yang dihadapi oleh Prodi PAI dari ketiga PTKI, sehingga belum secara maksimal bisa mewujudkan calon-calon guru PAI yang profesional dalam konteks keislaman di Indonesia tersebut. Sejumlah kekurangan yang perlu mendapat perhatian oleh semua pihak khususnya para pengelola ketiga Prodi PAI tersebut adalah: (1) sistem seleksi calon mahasiswa baru; (2) desain kurikulum yang masih menekankan pada pengembangan aspek pedagogis dan teknis pembelajaran daripada penguasaan keilmuan keislamannya; (3) proses pembelajaran yang kurang membangun budaya berpikir kritis mahasiswa; (4) kompetensi sebagian dosen masih kurang memadai dan masih dijumpai adanya *mismatch* dalam penugasan dosen; (5) adanya gejala islamisme dan intoleran di kalangan sebagian dosen dan mahasiswa. Gejala islamisme di kalangan mahasiswa lebih kuat daripada dosen dan gejala islamisme di kalangan mahasiswa lebih dipengaruhi oleh aktivitas mahasiswa di luar kampus; dan (6) belum adanya pemetaan, pengontrolan, dan pemantauan secara sistematis yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap aktivitas yang dilakukan mahasiswa di luar kampus.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut maka dikemukakan saran-saran untuk perbaikan. Pertama, perlunya penyempurnaan sistem seleksi calon mahasiswa baru. Hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan sistem seleksi calon mahasiswa baru jalur prestasi adalah dasar/kriteria yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kualifikasi profil lulusan Prodi PAI. Kemudian sistem seleksi jalur tes, kualitas instrumen tes harus baik dan materi yang diujikan harus dapat mengukur kemampuan penguasaan keislaman calon mahasiswa. Di samping itu juga perlu ada instrumen untuk mengukur aspek kecenderungan sikap keberagamaan calon mahasiswa agar diperoleh calon peserta didik yang punya kecenderungan sikap keberagamaan yang lebih moderat.

Kedua, perlunya penyempurnaan desain kurikulum. Berdasarkan hasil riset ini, di antara kelemahan desain kurikulum ketiga Prodi PAI adalah komposisi kurikulum secara

umum masih memberikan porsi yang lebih besar pada penguasaan kompetensi pedagogis, maka perlu mengubah formula ini. Porsi untuk penguasaan kompetensi profesional harus lebih banyak daripada muatan untuk kompetensi pedagogis. Kelemahan lain adalah muatan untuk penanaman sikap moderasi beragama dan sikap toleran perlu diperkuat, misalnya dengan muatan mata kuliah seperti perbandingan mazhab, studi agama-agama, dan sejenisnya. Kelemahan lainnya adalah terkait dengan muatan mata kuliah untuk memberikan bekal kemampuan berpikir kritis perlu diberikan mata kuliah ilmu mantiq/logika. Sisi kelemahan lain adalah pada Prodi PAI tertentu terdapat mata kuliah Pembelajaran Al-Quran dan Hadis, Pembelajaran Fikih, dan sebagainya perlu ditinjau ulang. Karena menurut hemat penulis mata kuliah tersebut cukup diwadahi dengan mata kuliah strategi/metode pembelajaran agar tidak terjebak pada paradigma *technical based teacher education.* Kelemahan lain adalah masih kurangnya keluasan dan kedalaman kajian keislaman dalam kurikulum Prodi PAI ketiga PTKI, maka untuk menyiapkan calon guru PAI di madrasah perlu dikembangkan model konsentrasi sesuai kebutuhan yang ada di madrasah.

Ketiga, kelemahan terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini kurang mampu melatih kemampuan kritis mahasiswa. Selama proses perkuliahan dosen perlu mengajak dan melatih mahasiswa berpikir tingkat tinggi dengan menerapkan strategi yang tepat. Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa yang rata-rata masih lemah, upaya perbaikannya adalah di samping memperkuat dan mengefektifkan pembelajaran bahasa di tingkat prodi atau lembaga pusat bahasa, perlu mewajibkan mahasiswa pada setiap mata kuliah keislaman setidaknya ada satu referensi berbahasa Arab yang digunakan sebagai rujukan wajib. Dengan pengkondisian seperti itu kemampuan bahasa Arab mahasiswa akan terlatih dengan baik.

Keempat, hasil penelitian ini menemukan adanya gejala islamisme di kalangan sebagian dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu perlu ada upaya pengontrolan, pengidentifikasian, dan pembinaan lebih lanjut agar gejala islamisme tersebut tidak berkembang dan meluas di kalangan mahasiswa. Upaya penanggulangan gejala islamisme di kalangan mahasiswa ini perlu dilakukan mulai dari proses seleksi calon mahasiswa, proses pembelajaran dan ketika mereka akan lulus agar dapat dihasilkan calon-calon guru PAI yang profesional dan moderat sesuai dengan konteks keislaman di Indonesia. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah perlunya mahasiswa Prodi PAI diberi bekal kemampuan dalam ikut terlibat menanggulangi islamisme di kalangan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dimana mereka akan bertugas sebagai guru PAI.

Referensi

Al Makin. 2017. *Sosialisasi Pembelajaran.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokrasi.*

Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Baidhawy, Zakiyuddin. 2010. "Dinamika Radikalisme Dan Konflik Bersentimen Keagamaan Di Surakarta." *Studia Philosophica et Theologica* 10 (2).

BPS Jawa Tengah. 2018. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah, 2015."

Darmawan, Alfian. 2016. "Jelang Milad, UMY Kontekstualisasikan Tiga Pilar Utama." *Suara Muhammadiyah.*

Hidayati, Mega. 2018. "Kasus Intoleransi di Yogyakarta Meningkat, 10 Kampus Ini Akan Jadi Bahan Riset." *Tugu Jogja, Kumparan.com.*

Muhaimin, et.al. 2004. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ngatinah. 2008. "Karakter Busana Kebesaran Raja Surakarta dan Yogyakarta Hadiningrat Periode 1755-2005." *ITB J. Vis. Art & Des.* 2 (2): 173-196.

Nurdin, Nazar. 2015. "9 Daerah di Jateng Rawan Konflik Antar-umat Beragama." *Compas.com.*

Rektor. 2001. *Laporan Rektor pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Mensyukuri Kelahiran IAIN Sunan Kalijaga (Dies Natalis ke-50).* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 26 September 2001.

"Selayang Pandang Kota Surakarta." 2018.

Suprobo, Bambang, Nur Hidayah, dan Mukhlis Fathurrohman. 2011. "Implementasi Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Pendekatan dalam Pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam untuk Peningkatan Mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta Tahun 2011)."

Syafruddin, Didin. 2000. *"Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam.* Jakarta: Direktorat Pembinaan PTAI Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI.

Tim. 2018. "Sejarah Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta." http://pai.fai.umy.ac.id/sejarah.

Wardhana, Hendra. 2015. "Yogyakarta dan Surakarta, Si Kembar yang Sangat Beda Rupa." *Kompasiana.com.*

Zudianto, Herry. 2008. *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur.* Yogyakarta: Kanisius.

7

TANTANGAN ISLAMISME DI KAMPUS MODERAT

Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim dan Universitas Islam Malang

Fatimah Husein

Pendahuluan: Malang sebagai Titik Penting Persemaian Islamisme

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Selain dikenal sebagai kota wisata, Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan dengan Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang dan beberapa universitas lainnya. Hal ini membuat urbanisasi di Malang cukup tinggi.

Yusli Effendi, Dosen Universitas Brawijaya (UB) Malang, mengatakan bahwa Malang merupakan "titik penting dalam simpul gerakan teror di Jawa Timur" (*Malang Post*, 17 Mei 2018). Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Malang bukan ladang baru

bagi terorisme karena pada tahun 2014 telah dideklarasikan ISIS di daerah Dau. Yusli menambahkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya wilayah sebaran terorisme di Malang meluas dan mencakup Singasari, Karangploso, dan Dau (*Malang Post*, 16 Mei 2018).

Berdasarkan riset terbaru yang dilakukan terhadap 1.888 mahasiswa UB yang mengikuti matakuliah umum (Pancasila, Pendidikan Agama Islam, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) secara lintas fakultas, Yusli Effendi menemukan bahwa 22,7% mendukung *khilafah*. Keterpaparan mahasiswa terhadap Islamisme antara lain dipengaruhi oleh hubungan antar mahasiswa, atau melalui asistensi (cari kos, asistensi laboratorium) maupun melalui kegiatan non-akademik melalui kelompok-kelompok kajian ikhwan-akhwat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa menjadi sasaran empuk karena jauh dari rumah, merasa asing dengan lingkungan baru, dan mengalami krisis identitas (Effendi, 2018).

Hal ini diperkuat dengan survei tentang Skema Religiositas Mahasiswa Baru UIN Maliki Malang terhadap mahasiswa baru yang berjumlah 2.644 orang. Survei yang diinisiasi oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan ini dilakukan untuk mendeteksi dini radikalisme di kampus UIN. Dari jumlah ini, 51% menyatakan pernah belajar di pondok pesantren, dan 49% tidak pernah. Satu temuan yang positif adalah bahwa lebih dari 90% mahasiswa baru memiliki pandangan keadilan, penuh toleransi, dan didasari oleh kemampuan melakukan pilihan keberagamaan secara rasional. Namun demikian, sebanyak 19% (499 mahasiswa) memiliki potensi intoleransi. Dari jumlah total survei ini juga didapatkan bahwa 29,3% (744 mahasiswa) menyatakan akan membela sampai mati ajaran agamanya, dan sebanyak 18% (475 orang) menyatakan bahwa memerangi orang kafir adalah puncak jalan ke surga (Tim Penelitian Psikologi UIN Maliki Malang, 2018).

Penelitian ini mengambil sampel Program Studi Pendidikan Agama Islam (Prodi PAI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang dan Universitas Islam Malang (Unisma). Selain karena alasan penting terkait keberadaan kedua universitas ini di kota Malang dalam kaitannya dengan persemaian Islamisme di atas, pengambilan sampel ini juga didasarkan pada pertimbangan universitas negeri-swasta, dan orientasi keagamaan kampus. Dari penelitian ini dihasilkan gambaran mengenai kompetensi keislaman calon guru agama Islam yang dihasilkan oleh Prodi PAI serta pandangan dan sikap keagamaan mereka, khususnya terkait dengan Islamisme.

Bagian pertama dari tulisan ini memaparkan sejarah berdirinya kedua universitas tersebut dan kerangka epistemologis yang mendasarinya. Dari situ kita dapat melihat bagaimana bangunan epistemologi tersebut mewarnai visi dan misi kedua universitas dan utamanya Prodi PAI. Untuk melihat bagaimana visi dan misi kedua universitas tersebut diupayakan, tulisan ini kemudian membahas kebijakan universitas yang terkait langsung dengan kedua Prodi PAI, khususnya sistem seleksi mahasiswa baru, program pembinaan mahasiswa baru, dan program peningkatan bahasa Arab bagi mahasiswa. Kurikulum, yang disusun untuk menghasilkan alumni Prodi PAI dengan profil tertentu, menjadi

pembahasan berikutnya. Di sini dikaji keberimbangan komposisi antara muatan-muatan pedagogis, profesional, dan penunjang untuk menghasilkan lulusan yang dicita-citakan. Kemudian dipaparkan tentang profil mahasiswa Prodi PAI terutama terkait dengan asal sekolah, kemampuan bahasa Arab, dan aktivitas mereka di organisasi. Terkait dengan profil dosen Prodi PAI, tulisan ini difokuskan pada latar belakang pendidikan, metode pengajaran, dan kapasitas bahasa Arab mereka. Bagian akhir tulisan ini menyajikan tantangan Islamisme dan bagaimana kedua kampus yang notabene moderat tersebut meresponsnya. Tulisan ini ditutup dengan beberapa rekomendasi.

Sejarah Universitas: Antara Epistemologi Pohon Ilmu dan Landasan Aswaja

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berdiri pada tanggal 21 Juni 2004. Universitas ini pada awalnya merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. Fakultas yang pertama kali didirikan di Malang adalah Fakultas Tarbiyah, bersama dengan Fakultas Syariah di Surabaya. Pada 1 Oktober 1964 didirikan Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri. Ketiganya menjadi cikal bakal lahirnya IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diresmikan pada tahun 1964. Selanjutnya Fakultas Tarbiyah Malang menjadi cabang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mulai pertengahan tahun 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Malang berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Pada tanggal 21 Juli 2002 sempat ditetapkan sebagai Universitas Islam Indonesia-Sudan (UIIS) yang merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Sudan, dan berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang pada tahun 2004. Menarik untuk dicatat bahwa kampus ini tidak mengalami perubahan dari STAIN ke IAIN terlebih dahulu, sebagaimana proses yang biasa dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi agama Islam lainnya, namun langsung bertransformasi menjadi universitas (www.uin-malang.ac.id).

Kampus I UIN Maliki Malang yang berkedudukan di Jln. Gajayana Malang saat ini memiliki 7 fakultas, yaitu: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Syari'ah, Humaniora, Psikologi, Ekonomi, Sains dan Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 6 program studi, yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Raudhatul Atfal, dan Manajemen Pendidikan Islam. Prodi PAI terakreditasi A.

Sejalan dengan perubahan STAIN Malang menjadi universitas, Prof. Imam Suprayogo sebagai rektor pada masa itu mencanangkan sebuah perubahan epistemologis tentang "integrasi" antara ilmu umum dan kajian Islam yang digambarkan melalui pohon ilmu UIN Maliki Malang. Imam Suprayogo menyatakan:

> Pohon itu, terdiri atas beberapa bagian, setidaknya ada akarnya, batang, dahan, ranting, daun dan buah. Bentuk pohon dengan aneka bagiannya itu, saya bayangkan

> sangat cocok untuk menjelaskan tentang konsep integrasi keilmuan.... Kehidupan dan pertumbuhan pohon juga dapat untuk menggambarkan, bahwa ilmu juga selalu tumbuh dan berkembang…. Saya berpikir, bahwa untuk memahami al Qur'an dan hadits maupun apa yang disebut orang sebagai ilmu-ilmu umum, harus menggunakan beberapa alat. Apa yang saya sebut sebagai alat itu adalah bahasa, yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, pengetahuan dasar tentang filsafat, ilmu alam dan ilmu sosial. Pengetahuan tersebut sangat penting dikuasai oleh siapa pun yang mengkaji ilmu yang bersifat integratif itu.... (Suprayogo, n.d.).

Prof. Imam menegaskan bahwa perubahan dari STAIN Malang menjadi universitas dilandasi oleh cita-cita ideal untuk membangun keterpaduan ilmu dan agama yang tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk kurikulum melainkan pada tataran perilaku warga kampus. Di UIN Maliki Malang seluruh proses pendidikan dan sistem yang ada diarahkan untuk menghasilkan "Intelek Profesional yang Ulama' dan Ulama' Profesional yang Intelek." Melalui proses pendidikan seperti itu diharapkan para mahasiswa UIN Maliki Malang mampu mengembangkan empat kekuatan sekaligus, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional (Suprayogo, 2016).

Semua aspek yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademik dirumuskan dalam sembilan pilar utama yang disebut dengan *Arkanu Jami'ah* (rukun perguruan tinggi): 1) tenaga dosen yang mumpuni secara akademik dan spiritual, 2) masjid sebagai pusat kegiatan spiritual dan intelektual, 3) *ma'had* sebagai wadah untuk membiasakan praktik ibadah, menghargai waktu, dan belajar disiplin, 4) perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber penelitian, 5) laboratorium sebagai sarana observasi, 6) ruang kuliah, ruang dosen, ruang diskusi, 7) pelayanan administrasi kampus yang memberi pelayanan cepat, tepat, dan berakhlak santun, 8) pusat pengembangan seni dan oleh raga, 9) sumber pendanaan yang luas dan kuat dengan memberi imbalan pada dosen yang cukup, dan merumuskan program peningkatan kualitas dan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat (Suprayogo, 2016).

Sementara lahirnya Universitas Islam Malang (Unisma) diawali oleh gagasan dan semangat para tokoh masyarakat dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendirikan perguruan tinggi Islam yang besar, berkualitas dan mandiri. Embrio Unisma, yang secara eksplisit menyebut dirinya sebagai universitas NU, berawal dari Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIA) yang kemudian berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Watta'lim (FTT) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) pada 12 Januari 1963. Pada tahun 1971 fakultas ini berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sunan Giri (UNSURI). Ketika Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang (sekarang berubah menjadi Yayasan Universitas Islam Malang) berdiri maka Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian UNSURI bergabung menjadi fakultas-fakultas di Unisma pada 27 Maret 1981.

Unisma terletak di deretan beberapa universitas lain di jalan menuju ke arah kawasan Kota Wisata Batu, Malang. Kampus ini memiliki 10 fakultas, yaitu: Fakultas

Agama Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Kedokteran. Pada tahun 2015, kampus ini masuk 10 besar kampus unggulan dari 384 perguruan tinggi Kopertis wilayah VII. Fakultas Agama Islam memiliki 4 prodi, yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Ahwal al Syakhsiyyah (AS). Prodi PAI terakreditasi B.

Untuk mendukung kebutuhan civitas akademik, Unisma memiliki beberapa fasilitas pendukung, termasuk Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan, Laboratorium Halal Center, dan Pondok Pesantren Ainul Yaqin. Harus diakui bahwa epistemologi keilmuan yang mendasari Unisma kurang tampak dengan jelas. Memang benar bahwa Unisma juga memiliki tekanan penting untuk memadukan IPTEKS dan budaya yang berlandaskan Islam Ahlussunnah waljama'ah (Aswaja) dan berorientasi menuju universitas bertaraf internasional. Selain itu, universitas ini memiliki slogan "Dari NU untuk peradaban Indonesia dan Dunia." Di sini tampak sangat kuat kerangka ideologis dalam bentuk penyebarluasan akses pendidikan dan ajaran Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip Aswaja, yaitu: *tawasuth* (moderat/tidak memihak), *tawazun* (berimbang), *tasamuh* (toleransi), dan *ta'adul* (berkeadilan). Namun, sebuah kerangka filosofis keilmuan yang mendasari dan menyinari cara pandang universitas dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan kampus belum tampak.

Visi dan Misi Prodi PAI

Epistemologi "pohon ilmu" di atas sangat mewarnai visi dan misi yang dicanangkan oleh UIN Maliki Malang. Visi universitas adalah "Menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, berdaya saing dan bereputasi internasional." Pada level Program Studi PAI, visi tersebut diadaptasi menjadi "Pada tahun 2030 menjadi Jurusan/Program Studi terkemuka dalam menyiapkan tenaga pendidik Agama Islam dan pengelola pada satuan pendidikan keagamaan Islam yang berkarakter ulul albab dan memiliki wawasan internasional." Karakter *Ulul Albab* yang dimaksud di sini adalah manusia yang dapat menyatukan antara "pikir, zikir, dan amal saleh" yang memiliki "nilai-nilai religius, sabar, ikhlas, tawakal, tawadu', istikamah, berserah diri, adil, jujur, berhati lembut, bersemangat juang tinggi/kerja keras, kritis, berilmu pengetahuan yang luas, mampu melihat/membaca fenomena alam dan sosial secara tepat (cerdas), peduli sesama, empati, toleran, kerja sama, dan professional" (Walid, 2011).

Hal ini kemudian diuraikan menjadi enam misi Prodi PAI, yaitu:

1) Menyelenggarakan pendidikan unggul yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik agama Islam di sekolah/Madrasah dan jenis pendidikan keagamaan Islam lainnya, serta menjadi pengelola satuan pendidikan keagamaan Islam.

2) Mempersiapkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan Islam.

3) Mengembangkan paradigma baru manajemen pendidikan dan menciptakan iklim akademis religius dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan kompetensi sebagai pendidik agama Islam.

4) Mengembangkan penelitian yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Islam baik pada jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.

5) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat proaktif dan antisipatif dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

6) Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan, dan stakeholders lainnya. Mengembangkan dan menjaga nilai, etika profesional dan moral akademis untuk pengendalian mutu program studi.

Sedangkan visi dari Prodi PAI Unisma adalah "Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan guru agama Islam yang profesional, unggul, dan kompetitif di bidang IPTEKS, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah." Ajaran Islam Ahlussunnah ini dijabarkan dalam konsep Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah yang berarti "ajaran Islam yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan berlaku khusus di lingkungan warga Nahdliyyin, dengan metode berpikir, bersikap dan berperilaku yang memegang teguh prinsip-prinsip keaswajaan." Prinsip-prinsip ini mendasari penyelenggaraan prodi sehingga diharapkan mahasiswa dan lulusannya memiliki karakter toleran, tidak menang sendiri, adil, dan tetap menjaga keseimbangan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Prodi PAI Unisma mencanangkan beberapa misi berikut:

1) Menyelenggarakan proses pembelajaran dalam ranah pendidikan agama Islam dengan mengedepankan sikap professional, kreatif, mandiri, berbasis teknologi dan manajemen modern sesuai standar pendidikan nasional.

2) Mengkaji dan mengembangkan ilmu pendidikan Islam dan IPTEKS dalam proses pembelajaran secara aktif, efektif, inovatif, adaptif, kreatif, menyenangkan, dan berkesinambungan dengan didukung oleh teknologi, sarana dan prasarana yang memadai, dilandasi akhlakul karimah.

3) Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan Islam secara periodik guna mendukung peningkatan kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial bagi dosen dan mahasiswa.

4) Melaksanakan pengabdian dalam bentuk pembinaan guru-guru agama di Madrasah dan Sekolah serta pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

Kebijakan Program Studi PAI

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, dan juga karena menyadari bahwa sebagai calon-calon guru agama Islam di sekolah dan madrasah alumni PAI diharapkan memiliki kompetensi yang cukup baik dalam bahasa Arab dan pengetahuan keislaman, maka sejak 2015 sistem rekrutmen mahasiswa di Prodi PAI UIN Maliki Malang mengalami perubahan. Jika sebelumnya calon mahasiswa baru diseleksi melalui berbagai jalur, termasuk SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), sejak 3 tahun yang lalu Prodi PAI hanya menerima mahasiswa melalui SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dan Jalur Mandiri (dilakukan oleh UIN Maliki Malang).

Dalam tiga model seleksi terakhir tersebut materi agama Islam dan Bahasa Arab termasuk menjadi bahan yang diujikan secara tertulis, sehingga calon mahasiswa yang memiliki dasar ilmu keislaman diharapkan dapat lebih banyak terjaring. Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Kaprodi PAI, calon mahasiswa PAI yang berasal dari pesantren dan madrasah diberikan "pembobotan nilai" yang lebih tinggi dalam tes seleksi masuk untuk meminimalkan input yang berasal dari sekolah umum non agama: "Jadi okelah yang dari SMA tapi SMA yang *basic*-nya di lingkungan pesantren tidak apa-apa" (intervew, Kaprodi PAI UIN Maliki Malang, 25 September 2018).

Hal ini kemudian diperkuat dengan program peningkatan bahasa yang berlaku untuk seluruh mahasiswa yang dilakukan di tahun pertama melalui *ma'had* (asrama) dan program PKPBA (Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab) selama 1 tahun. Program *Ma'had al-Jami'ah* ini memiliki 3 misi: 1) untuk mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional, 2) memberikan keterampilan berbahasa Arab dan Inggris, dan 3) memperdalam bacaan dan makna Al-Quran dengan benar dan baik. Dalam asrama ini mahasiswa mengikuti berbagai kajian harian, yaitu Shabah al-Lughoh (*language morning*), Ta'lim Al-Quran, Tashih Qiroatul Qur'an, Tahsin Tilawatul Qur'an, dan Ta'lim Afkar al-Islamiyah. Bahasa Arab dan Inggris digunakan sebagai bahasa komunikasi di *ma'had* ini.

Ma'had ini juga berkolaborasi dengan PKPBA yang menyelenggarakan Pendidikan Bahasa Arab sebagai bekal mahasiswa untuk mampu membaca, menulis dan berbicara. Dalam 1 semester, pertemuan tatap muka di kelas berlangsung 10 kali dan disambung dengan praktik di *ma'had* pada pagi dan malam hari. Seluruh mahasiswa baru UIN Malang yang mengikuti kegiatan PKPBA ini dibagi menjadi 3 level, yaitu dasar,

menengah, dan lanjut. Satu catatan penting dari program ini adalah jika mahasiswa yang tidak mendapatkan sertifikat lulus dari *ma'had*, mereka tidak dapat mengikuti matakuliah keislaman lainnya seperti Studi Qur'an dan Hadis atau *Qiro'atul Kutub* (Interview, PKPBA, 26 November 2018).

Menurut informasi dari salah seorang pengelola Pusat Bahasa UIN Maliki Malang, mulai tahun 2018 ini ditetapkan syarat lulus TOAFL (Test of Arabic as a Foreign Language) bagi mahasiswa. Namun skornya tidak diseragamkan bagi semua lulusan. Untuk mahasiswa angkatan 2013, misalnya, diberlakukan ketentuan lulus tes bahasa Arab dengan skor 300. Untuk angkatan 2015 dengan skor 400, dan untuk angkatan 2018 dan selanjutnya harus memiliki skor 450. Namun diakui oleh pengelola tersebut, bahkan untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (di FITK) pun kemampuan rata-rata bahasa Arabnya hanya sedang. (Interview, PKPBA, 26 November 2018).

Selain program reguler, Prodi PAI UIN Maliki Malang memiliki kelas-kelas internasional yang dinamakan International Class Program (ICP) dalam Bahasa Arab dan Inggris. Penjurusan ini dilakukan pada semester 2 dengan syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan bahasa mahasiswa. Selain pengajaran yang menggunakan kedua bahasa ini, mahasiswa juga sangat dianjurkan untuk mengikuti aktivitas tambahan termasuk Al-Quran Interpretation, Hadith Studies, dan TOEFL/IELTS Preparation Program yang diadakan sekali setiap bulan.

Di lain pihak, sebagai kampus swasta maka penerimaan mahasiswa baru di Unisma murni menggunakan jalur seleksi mandiri. Seleksi masuk dilakukan sebanyak tiga gelombang oleh universitas, dan komponen kemampuan agama belum menjadi salah satu tolok ukur penting untuk diterima menjadi mahasiswa PAI. Mahasiswa yang bukan berasal dari Madrasah Aliyah (MA) atau belum pernah mengikuti pendidikan di pesantren tetap dapat diterima sebagai mahasiswa PAI jika lulus tes seleksi masuk. Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) dan Kaprodi PAI juga tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan unsur tes agama dan bahasa Arab sebagai syarat masuk. Baru setelah mahasiswa masuk di PAI, maka prodi melakukan tes bahasa Arab untuk mengelompokkan kemampuan mereka. Pembinaan bahasa Arab baru akan dilakukan bagi mahasiswa angkatan 2018 (Interview, Kaprodi PAI, 25 Oktober 2018).

Unisma tidak memiliki sistem *ma'had* wajib bagi seluruh mahasiswa baru. Alasan utamanya adalah keterbatasan lahan, sehingga bangunan *ma'had* yang ada di dalam kampus hanya mampu mengakomodasi sebagian kecil mahasiswa saja. Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mahasiswa PAI Unisma, dijelaskan bahwa karena selama ini mereka belum mendapat pelatihan intensif bahasa Arab di kampus, maka mereka membuat kelompok-kelompok dengan mahasiswa lulusan pesantren untuk menjadi pembimbing. Pada bulan Oktober 2018 yang lalu dibuka Program Intensif Bahasa Arab oleh Pusat Pengembangan Bahasa Asing Unisma. Satu hal menarik yang perlu dicatat di sini adalah dari sekitar 100 pendaftar program, sekitar 55% berasal dari mahasiswa PAI Unisma (suryamalang.tribunnews.com, 10 Oktober 2018). Kepala Pusat Pengembangan

Bahasa Asing Unisma, Dr. Mutmainah Mustofa, menyampaikan program ini akan digelar dalam 1 tahun dengan penekanan pada kemampuan komunikasi berbahasa Arab (duta.co, 10 Oktober 2018).

Salah satu hal penting yang dilakukan oleh Unisma bagi seluruh mahasiswa baru, termasuk mahasiswa PAI, adalah masa orientasi selama 1 semester yang disebut dengan Master Maba (Masa Transformasi dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru). Latar belakang adanya program yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 ini adalah keragaman mahasiswa baru, baik dari asal daerah maupun asal sekolah. Pengembangan karakter mahasiswa baru ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu tahap pembekalan dan tahap pengembangan. Tahap pembekalan dikemas melalui Orientasi Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (OSHIKA MABA) selama 3 hari yang berisi informasi umum tentang Unisma dan pengenalan keislaman sebagai identitas kampus. Tahap berikutnya adalah *Halaqoh Diniyah* yang dimaksudkan untuk menstandardisasi perilaku minimal yang harus dimiliki mahasiswa Unisma. Salah satu kegiatan penting dalam orientasi 3 hari ini, selain praktik ibadah, adalah pemetaan kemampuan baca tulis Al-Quran mahasiswa baru untuk kemudian dilakukan pembinaan bagi yang memerlukan. Tahap pengembangan dilakukan dengan cara pembiasaan melalui pengembangan tiga karakter positif mahasiswa, yaitu: karakter ilmiah, karakter islami, dan karakter keindonesiaan. Kegiatan per kelompok karakter ini dilakukan pada *student day*, setiap hari Rabu dari jam 7 pagi hingga 12 siang selama 10 pertemuan. Dalam kelompok karakter islami, mahasiswa dibina dan diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Aswaja sebagaimana telah disebutkan di atas. Kegiatan ini di bawah koordinasi Lembaga Pengkajian Islam dan Keaswajaan (Tim Penyusun, Pedoman Master Maba, 2017).

Kurikulum Prodi PAI dan Kemampuan Berpikir Kritis

Profil utama lulusan Prodi PAI UIN Maliki Malang adalah sebagai "pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan dan profesi." Sedangkan profil tambahan lulusan PAI adalah sebagai: konselor dan penyuluh Pendidikan Agama Islam di sekolah dan keluarga, pendidik PAI di luar negeri, trainer Pendidikan Agama Islam, pengelola lembaga pendidikan Islam, pembimbing haji, pemimpin sosial-keagamaan di sekolah/madrasah dan masyarakat, jurnalis pendidikan Islam, sosiolog pendidikan Islam, *entrepreneur* Islam, dan juru dakwah/mubalig.

Untuk melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi tersebut di atas, kurikulum PAI UIN Maliki Malang memuat 150-152 SKS, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pedagogis, profesional/konten keislaman, dan penunjang. Kategori pedagogis terdiri dari 49 SKS (32,6%), profesional/konten keislaman 55 SKS (36,6%), dan penunjang 44 SKS (29,3%). Menarik untuk dicatat bahwa mata kuliah pedagogis

yang seringkali diasumsikan mendominasi prodi-Prodi PAI di PTKI tidak terjadi di UIN Maliki Malang. Hal ini mungkin dapat dikaitkan dengan filosofi pohon ilmu yang dicanangkan Imam Suprayogo yang mensyaratkan pemaduan antara ilmu umum, ilmu alat, dan ilmu agama.

Komposisi matakuliah keislaman yang diajarkan pada mahasiswa PAI UIN Maliki Malang sebenarnya cukup banyak dan tidak hanya diarahkan secara sempit agar lulusan mampu mengajar matakuliah tertentu di sekolah. Pengajaran bahasa Arab pun, terutama di semester 1 dan 2 cukup intensif dengan masing-masing bobot 6 SKS per semester yang dilaksanakan oleh PKPBA. Hal ini mencakup 4 keterampilan berbahasa yaitu: *maharah istima'* (keterampilan mendengar), *maharah kitabah* (keterampilan menulis), *maharah kalam* (keterampilan berbicara), dan *maharah qira'ah* (keterampilan membaca). Beberapa matakuliah penting terkait keislaman seperti Qur'an Hadis, Fiqh, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam diajarkan di dua semester (semester IV dan V) dengan masing-masing bobot 3 SKS. Selain itu diajarkan juga Teosofi (2 SKS), Qiroatul Kutub (3 SKS), Hikmatut Tasyri (3 SKS), Ushul Fiqh (2 SKS), dan Masail Fiqh (3 SKS).

Selain matakuliah-matakuliah tersebut di atas, mahasiswa PAI UIN Maliki Malang juga diperkuat dengan beberapa matakuliah pendukung seperti Pancasila, Kewarganegaraan, dan Studi Agama-agama. Namun matakuliah Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Anti Korupsi yang ditawarkan masih berupa pilihan sehingga tidak semua mahasiswa mengambilnya. Matakuliah-matakuliah ini sebenarnya dapat membekali calon-calon guru dengan pemahaman yang inklusif dan nilai-nilai etis yang diperlukan bagi anak-anak muda Indonesia. Begitu pula jika dicermati epistemologi pohon ilmu sebagaimana dijelaskan di atas, mata kuliah penting terkait pengetahuan dasar filsafat yang membekali mahasiswa dengan kemampuan *critical thinking*, seperti Logika, justru tidak diajarkan. Matakuliah ini sebenarnya memampukan mahasiswa untuk berpikir kritis dan memahami kesalahan-kesalahan berpikir (*logical fallacies*), seperti *appeal to belief* (argumen untuk mendukung atau menolak sesuatu lebih didasarkan pada kepercayaan personal), atau *ad hominem* (lebih menekankan pada orangnya daripada argumen yang diperdebatkan). Matakuliah Filsafat Ilmu memang diajarkan di semester 1 dengan 2 SKS yang tujuannya mencakup "mengupayakan mahasiswa PAI agar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal cara berpikir logis, sistematis, metodologis, dan prosedural sesuai kaidah-kaidah ilmiah." Namun dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat dikatakan bahwa matakuliah ini lebih menekankan pada kajian teoretis, dan tidak pada level praktik. Hal ini belum cukup membekali mahasiswa untuk berpikir kritis, karena *tools* (alat) yang dibutuhkan belum diajarkan.

Selain itu, matakuliah keislaman yang cukup banyak di atas dirasakan oleh sebagian mahasiswa, khususnya alumni MA dan pesantren, sebagai terlalu umum dan dasar. Dalam *Focus Group Discussion* dengan mahasiswa PAI UIN Maliki Malang, salah seorang mahasiswa mengatakan:

> …. Nah kalau kekurangannya itu di situ, ketika kita membicarakan masalah fikih, ya mahasiswa Syariah juga bisa, tuntas juga terkait Fikih. Kemudian ketika membahas

> terkait hadis mahasiswa Ilmu Tafsir Hadis juga bisa. Sedangkan yang kita pelajari sampai sekarang itu, misalnya hadis, terlalu umum dan hanya hadis-hadis yang sudah dipelajari ketika masih MA. Itu kurang fokus kalau menurut saya (FGD UIN Maliki Malang, 24 September 2018).

Sampai di sini muncul pertanyaan apakah Prodi PAI UIN Maliki Malang sudah menyiapkan pendidik agama Islam di sekolah dan madrasah sebagaimana yang ditargetkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kaprodi PAI, jika latar belakang mahasiswa dari pesantren maka proses yang dilakukan oleh Prodi PAI akan cukup membekali mereka untuk mengajar agama Islam di madrasah. Namun input mahasiswa PAI yang sangat beragam ditambah dengan rendahnya minat beberapa mahasiswa untuk menjadi pendidik agama Islam berakibat pada kompetensi lulusan PAI, khususnya kompetensi keislamannya. Kelemahan kompetensi profesional ini, menurut Kaprodi PAI, dapat dikompensasikan dengan kemampuan metodologis: "kalau aspek metodologinya itu bagus, insyaallah dia bisa mengajar efektif... sehingga itu aspek pedagogisnya juga kita kuatkan, bagaimana cara mengajar dan membelajarkan lalu memperkaya media sumber belajarnya itu," (interview, Kaprodi PAI UIN Maliki Malang, 25 September 2018).

Lulusan yang ingin dihasilkan oleh Prodi PAI Unisma juga memiliki profil yang hampir sama dengan UIN Maliki Malang, yaitu sebagai pendidik, pengelola lembaga pendidikan, asisten peneliti, *edupreneur*. Di sini tidak dibedakan antara profil utama dan profil tambahan, dan antara pendidik di sekolah umum dan madrasah. Untuk mewujudkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi tersebut di atas, kurikulum KKNI 2016 PAI Unisma memuat 155 SKS, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pedagogis (66 SKS, 42,6%), profesional/konten keislaman (44 SKS, (28,3%), dan penunjang (45 SKS, 29%). Dari komposisi ini terlihat bahwa matakuliah pedagogis masih mendominasi Prodi PAI di Unisma.

Sebenarnya ada beberapa matakuliah penting dan menarik yang diajarkan di Prodi PAI Unisma seperti Aswaja, Logika, dan HAM & Gender. Selain itu, untuk mengarahkan mahasiswa pada metode berpikir yang moderat juga ditambahkan 1 matakuliah baru dalam kurikulum 2016 ini, yaitu Pendidikan Islam Multikultural. Matakuliah-matakuliah keislaman pun cukup banyak diajarkan sejak semester 1 sampai semester 7, termasuk Ilmu Kalam, Ulumul Hadis, Ulumul Qur'an, Ushul Fiqh, Bimbingan Baca Kitab dan Filsafat Islam. Memang benar bahwa matakuliah-matakuliah keislaman tersebut tidak secara spesifik diarahkan untuk mengajar di sekolah atau madrasah. Untuk memberi bekal mengajar Fiqh di sekolah, misalnya, hanya diselipkan di matakuliah Pembelajaran PAI dan Analisis Materi MTs-MA yang masing-masing hanya 2 SKS. Namun bobot matakuliah-matakuliah pedagogis memang sangat kental, dan sebagian besar matakuliah keislaman hanya berbobot masing-masing 2 SKS. Lalu matakuliah yang mengasah kekritisan berpikir juga sangat terbatas. Matakuliah Filsafat Islam, misalnya, lebih difokuskan sebagai "produk pikir" para filsuf Muslim mulai al-Kindi hingga Mulla Sadra. Tentu saja pembahasan banyak tokoh seperti itu kurang mengantarkan mahasiswa untuk mempelajari Filsafat Islam sebagai "proses" berpikir kritis.

Di titik ini juga bisa diajukan pertanyaan yang sama, apakah Prodi PAI Unisma sudah menyiapkan pendidik, terutama dalam aspek kompetensi keislamannya, sebagaimana yang ditargetkan. Sebagaimana disampaikan oleh Kaprodi PAI Unisma, rata-rata mahasiswa masih mengalami kesulitan ketika kuliah yang mensyaratkan penguasaan bahasa Arab, membaca kitab-kitab berbahasa Arab, dan kuliah keislaman lainnya. Pendampingan yang ada baru direncanakan untuk angkatan 2018, dan melalui Program Master Maba khusus untuk pendampingan membaca al-Quran (Interview, Kaprodi PAI Unisma, 23 Oktober 2018).

Mahasiswa Prodi PAI

Jumlah total mahasiswa PAI UIN Maliki Malang adalah 1108, dan rata-rata mahasiswa per angkatan adalah 258 orang. Dari hasil survei terhadap 50 mahasiswa PAI, jumlah tertinggi (54%) berasal dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) atau Madrasah Aliyah Swasta (MAS), 28% dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan pesantren, dan 18% berasal dari SMA/SMK umum. Dengan total 82% mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam ini kita mungkin dapat mengatakan bahwa upaya Prodi PAI untuk menjaring calon-calon mahasiswa dari latar belakang pendidikan Islam mulai menampakkan hasilnya.

Hal ini juga ditunjang dengan pendidikan agama nonformal yang pernah diikuti mahasiswa. Pendidikan pesantren merupakan pendidikan nonformal terbanyak yang diikuti mahasiswa PAI UIN Maliki Malang (78%). Dari jumlah ini, mayoritas pesantren yang pernah ditinggali mahasiswa PAI adalah pesantren modern (38%) dan pesantren tradisional (30%). Sebagian kecil dari mahasiswa pernah mengikuti pendidikan nonformal melalui madrasah (8%) dan majelis taklim (8%). Hal ini menjadi modal yang cukup baik untuk mendidik calon-calon guru agama Islam.

Dari hasil survei juga didapatkan data kemampuan mahasiswa PAI UIN Maliki Malang dalam berbahasa. Hal ini menarik juga untuk dianalisis berdasarkan kerangka pohon ilmu yang disebutkan di atas, dimana bahasa (Arab dan Inggris) sebagai alat sangat diperlukan untuk mendapatkan ilmu yang integratif. Dari hasil survei atas kemampuan percakapan Bahasa Arab mahasiswa PAI didapatkan hasil bahwa 57% kurang memiliki kemampuan, 28% memiliki kemampuan cukup, dan 15% berkemampuan baik. Hal ini senada dengan pengakuan mereka akan kemampuannya dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab. Jumlah total mahasiswa yang mengatakan berkemampuan cukup (53%) dan kurang (24%) jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mengaku berkemampuan baik (23%). Walaupun hasil survei di atas hanya berisi pengakuan mahasiswa atas kemampuannya dalam berbahasa Arab, kita dapat membandingkannya dengan hasil tes tertulis dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil dari 11 peserta FGD yang mengerjakan soal (memberi tanda baca dan menerjemahkan teks) bahasa Arab menunjukkan bahwa 36,3% berkemampuan baik, sedangkan 63,6% memiliki kemampuan kurang.

Sisi lain dari kehidupan mahasiswa UIN Maliki Malang yang dapat diamati adalah keaktifan mahasiswa dalam organisasi kampus. Menurut pengakuan mahasiswa, organisasi keagamaan yang paling berpengaruh adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu mahasiswa juga terlibat aktif di Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pramuka, dan musyrif/musyrifah ma'had.

Walaupun UIN Maliki Malang adalah kampus negeri, namun nilai-nilai Nahdlatul Ulama terasa sangat kental. Hal ini juga terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas (48%) mahasiswa mengatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh idolanya, dan beberapa tokoh NU lainnya seperti Gus Mus, K.H. Hasyim Asyarie, K.H. Marzuki, dan Emha Ainun Najib. Namun ada juga sebagian kecil mahasiswa yang mengidolakan tokoh lain seperti Abdul Somad (16%), dan Quraish Shihab (10%).

Jumlah total mahasiswa Prodi PAI di Unisma adalah 1.098, rata-rata mahasiswa PAI per angkatan adalah 250 orang. Dari hasil survei terhadap 50 mahasiswa PAI, jumlah tertinggi (32%) berasal dari SMA/MA di lingkungan pesantren, dan 30% berasal dari MAN atau MAS. Namun demikian, jumlah mahasiswa yang berasal dari SMA cukup tinggi, yaitu 24%. Mayoritas pendidikan nonformal yang pernah diikuti oleh mahasiswa PAI adalah pesantren (58%). Dari jumlah ini, mahasiswa yang pernah mengikuti pesantren modern adalah 48% dan pesantren tradisional 17%. Sebagian kecil mahasiswa mengikuti pendidikan di madrasah (16%) dan majelis taklim (14%).

Data asal sekolah dan aktivitas mahasiswa dalam pendidikan pesantren tersebut berkait erat dengan hasil survei atas kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI. Dalam hal kemampuan percakapan Bahasa Arab, 46% mahasiswa mengaku memiliki kemampuan cukup, 39% kurang memiliki kemampuan, dan 15% berkemampuan baik. Sementara itu pengakuan mereka akan kemampuannya dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab cukup berimbang antara yang cukup (35%), baik (33%), dan kurang (32%). Hal ini terkonfirmasi dalam test bahasa Arab tertulis dalam FGD, 58.3% dari mereka berkemampuan cukup, 33.3% berkemampuan kurang, dan 8% berkemampuan baik.

Sebagai kampus NU, organisasi mahasiswa yang paling berpengaruh adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang mahasiswa Prodi PAI banyak bergabung. Selain itu mahasiswa PAI juga cukup aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU), UKM Jam'iyyatul Qurra' wal Huffadz (JQH), dan UKM Pramuka. Menarik untuk dicatat juga bahwa sebagian mahasiswa PAI juga aktif di beberapa forum kajian mingguan yang dikelola oleh dosen PAI. Ahmad Shams Madyan, dosen PAI Unisma, misalnya, mengelola pengajian Haraka Institute di Kota Batu Malang dengan topik-topik terkait Akidah, Syariah, dan Akhlak di tengah arus perbedaan dan kontestasi ideologi.

Senada dengan mahasiswa Prodi PAI UIN Maliki Malang, sebagian besar mahasiswa Prodi PAI Unisma menempatkan Gus Dur, K.H. Hasyim Asyarie, dan Cak

Nun sebagai tokoh idolanya. Sebagian kecil lainnya mengidolakan Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Quraish Shihab. Menarik untuk dicatat, misalnya, alasan sebagian mahasiswa tersebut mengidolakan Ustaz Adi Hidayat:

> Adi Hidayat itu tidak langsung men-*judge* ini tidak boleh, jadi misalnya kayak maulid Nabi, kenapa masih nyambung sama Aswaja, maulid Nabi tidak dikatakan haram oleh Adi Hidayat. Jadi secara fokus memang dibahas betul, definisi maulid itu apa. Maulid itu lahir, misalnya. Masak lahir haram? Mana ada hukumnya lahir haram? Nah, berarti benar tidak haram. Karena Adi Hidayat juga tegas dalam hal-hal yang mungkin sudah ada nasnya atau dalilnya sehingga dia di garis tengah, menurut saya, tengah condong ke kanan, tapi *nggak* ke kiri. Jadi, saya suka betul bagaimana logika hukum yang diberikan oleh beliau, bukan langsung sudah ini… ini… ini…, tetapi intinya diberikan dulu, baru nasnya masuk, sejarahnya masuk (FGD Unisma, 24 Oktober 2018).

Dosen Prodi PAI

Jumlah total dosen di PAI UIN Maliki Malang adalah 42 orang, dengan 31 (74%) orang bergelar doktor dan 11 (26%) orang bergelar master. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sendiri pada tahun 2014 mendapat penghargaan dari rektor sebagai fakultas dengan jumlah dosen bergelar doktor terbanyak.

Dosen-dosen UIN Maliki Malang yang diwawancarai mencakup dosen muda dan dosen senior. Salah satu matakuliah yang kami ikuti, Manajemen Pendidikan, disampaikan oleh dosen muda dengan metode yang terbuka, dialogis dan memberi peluang pada mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini mengafirmasi data hasil survei mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas yang menunjukkan bahwa 60% dosen menggunakan strategi pembelajaran aktif. Namun 40% dosen mengaku jarang menggunakan strategi tersebut.

Hasil survei terkait metode pembelajaran aktif tersebut di atas juga terkait erat dengan pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Mayoritas dosen (80%) UIN Maliki Malang mengatakan bahwa mereka sering melakukan pemutakhiran materi dan referensi perkuliahan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada tiap semester. Hanya 1 orang (10%) yang mengatakan tidak pernah melakukan pemutakhiran RPS. Dari hasil wawancara dengan beberapa dosen PAI didapat penjelasan bahwa mereka mengadakan rapat setiap semester untuk me-*review* RPS. Di sini dosen-dosen serumpun bertemu untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan minat yang sama. Mayoritas (80%) dosen mengatakan bahwa untuk menambah wawasan materi perkuliahan mereka memanfaatkan media teknologi dan komunikasi, sedangkan 20% mengatakan tidak. Selain itu dalam proses pembelajaran, mayoritas (80%) dosen mengaku sering menyelipkan isu-isu aktual keagamaan, pentingnya toleransi, dan bahaya ekstremisme dalam beragama. Dari hasil wawancara juga didapat penjelasan bahwa dalam matakuliah yang tidak langsung terkait dengan isu-isu kontekstual pun, beberapa dosen menyisipkannya.

Dari hasil survei terhadap dosen PAI UIN Maliki Malang terkait dengan kapasitas berbahasa Arab, rata-rata mengaku memiliki kemampuan baik dan cukup dalam komunikasi, dan rata-rata baik dalam membaca teks. Hanya 1 orang (10%) yang mengaku kurang memiliki kemampuan membaca teks berbahasa Arab. Dalam berbicara bahasa Inggris, rata-rata mengaku berkemampuan cukup dan baik. Sedangkan dalam membaca teks Inggris, rata-rata berkemampuan baik dan cukup. Hanya 1 orang (10%) mengaku berkemampuan sangat baik, dan 1 orang lainnya memiliki kemampuan yang sangat kurang.

Sebagian besar dosen PAI UIN Malang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya, namun ada beberapa dosen yang mengajar matakuliah di luar bidang keahliannya. Sebagai contoh, dosen dengan bidang keahlian Sosiologi juga mengajar matakuliah Teosofi. Seorang dosen lain dengan bidang keahlian pemikiran pendidikan Islam mengajar Studi Agama-agama. Beberapa dosen juga cukup produktif dalam bidang publikasi. Memang untuk publikasi pada jurnal-jurnal internasional, masih sangat jarang dosen yang berhasil melakukannya, nmun beberapa dosen sudah menerbitkan buku-buku daras untuk kepentingan perkuliahan. Dr. Su'aib Muhammad, misalnya, menulis beberapa jilid naskah Al-Quran Lengkap berjudul *Mushaf Ulil Albab* yang meneliti akar kata, arti kata, statistika, tanda *i'rab*, dan nomor indeks. Dr. Marno dan Dr. Triyo Supriyatno menulis buku *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam.*

Sampai di titik ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas dosen-dosen PAI UIN Maliki Malang melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat juga dari perspektif mahasiswa. Mahasiswa sepakat (100%) bahwa dosen-dosen matakuliah keislaman memiliki pengetahuan agama yang komprehensif. Selain itu 100% mahasiswa mengafirmasi bahwa dalam proses pembelajaran, dosen-dosennya sering menyelipkan isu-isu aktual keagamaan, pentingnya toleransi, dan bahaya ekstremisme dalam beragama. Memang benar bahwa sebagian mahasiswa (36%) biasa bertanya tentang masalah keagamaan pada group-group media sosial (terutama Facebook dan Instagram), namun mayoritas (98%) dari mereka merasa lebih percaya pada penjelasan-penjelasan dosen untuk menjawab masalah keagamaan dibandingkan dengan jawaban yang mereka temukan di internet dan media sosial.

Satu catatan penting dari hasil FGD dengan mahasiswa PAI UIN Maliki adalah beberapa mahasiswa alumni pesantren merasa bahwa pengajaran dosen masih terlalu dasar dan kurang mendalam pada aspek penguasaan materi keislaman. Hal ini menurut mereka karena PAI tidak fokus pada satu subjek tertentu, tetapi lebih mempelajari Islam secara umum. Materi yang dipelajari pun tidak banyak yang berbeda dari apa yang sudah dipelajari di Madrasah Aliyah atau pesantren. Selain itu, dalam proses belajar di kelas sebagian mahasiswa merasa bahwa mereka harus mengutamakan hormat pada dosen dan tidak boleh memotong penjelasan mereka. Dalam konteks ini dapat dimengerti jika 46% mahasiswa mengaku dalam survei bahwa mereka lebih sering menggunakan mesin pencari di internet untuk mencari alternatif informasi tentang agama.

Bagaimana dengan dosen-dosen PAI di Unisma? Jumlah dosen bergelar master di Unisma jauh lebih banyak dibandingkan dosen bergelar doktor. Dari total 46 orang dosen PAI, hanya 7 orang (15%) yang bergelar doktor, sedangkan 14 dosen sedang melanjutkan studi ke jenjang S3. Beberapa dosen Unisma merangkap sebagai kiai di pesantren. Hubungan antara dosen dengan mahasiswa, bahkan antara dosen muda dengan dosen yang lebih tua, sangat takzim (hormat). Panggilan umum terhadap dosen adalah *ustaz* atau *gus*. Dosen-dosen yang kami wawancarai mencakup dosen muda dan dosen senior. Satu hal menarik yang bisa langsung diamati adalah proses belajar di kelas yang diawali dan diakhiri dengan pembacaan selawat yang terpampang di depan kelas. Menurut pengakuan beberapa dosen, hal ini baru dilakukan sekitar empat tahun terakhir sesuai dengan kebijakan rektor yang menjabat saat itu.

Dari data survei mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas, 100% dosen mengatakan bahwa mereka menggunakan strategi pembelajaran aktif. Hal ini juga terkait erat dengan pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mayoritas (90%) dosen mengatakan bahwa mereka sering melakukan pemutakhiran materi dan referensi perkuliahan dalam RPS pada tiap semester. Hanya 1 orang (10%) yang mengatakan jarang melakukan pemutakhiran RPS. Mayoritas (90%) dosen mengatakan bahwa untuk menambah wawasan materi perkuliahan mereka memanfaatkan media teknologi dan komunikasi. Selain itu dalam proses pembelajaran, mayoritas (80%) dosen mengatakan sering menyelipkan isu-isu aktual keagamaan, pentingnya toleransi, dan bahaya ekstremisme dalam beragama.

Seorang dosen, yang memiliki latar belakang pendidikan di al-Azhar Mesir dan Universitas Gadjah Mada serta sering terlibat dalam berbagai forum internasional, menjelaskan bahwa dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu, ia berbicara tentang problem-problem hukum Islam terkait isu-isu kontemporer. Sebagai contoh, ia memasukkan pembahasan terkait hukum nikah beda agama dalam Fiqih Munakahat dan hukum pemimpin non-muslim dalam Fiqih Siyasah (Interview, Ahmad Shams Madyan, 26 Oktober 2018).

Hasil survei terhadap dosen PAI Unisma terkait dengan kapasitas berbicara bahasa Arab adalah cukup (50%). Hanya 10% yang mengaku memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab dengan baik. Sedangkan kemampuan membaca teks Arab rata-rata baik (60%). Hanya 10% yang mengaku kurang memiliki kemampuan tersebut. Dalam berbicara bahasa Inggris, rata-rata (40%) dosen mengaku memiliki kemampuan cukup. Sementara 50% lainnya mengaku memiliki kemampuan yang baik. Dalam membaca teks bahasa Inggris, rata-rata berkemampuan baik (60%) dan cukup (30%).

Beberapa dosen yang mengisi survei kurang memiliki kesesuaian antara bidang keahlian dengan matakuliah yang diampu. Sebagai contoh, seorang dosen dengan bidang keahlian Ulumul Hadis mengajar matakuliah Filsafat Umum dan Sosiologi Hukum. Seorang dosen lainnya dengan bidang keahlian Manajemen Pendidikan Islam mengajar Ilmu Kalam. Proses pendidikan pun beragam sesuai dengan latar belakang

dosen dan kompetensi yang dimilikinya. Beberapa dosen muda yang diwawancarai sudah menggunakan teknologi semacam mengunggah materi perkuliahan ke Google Drive. Sementara dosen-dosen yang lebih senior masih menggunakan metode yang lebih konvensional.

Hampir sama dengan publikasi di Prodi PAI UIN Maliki Malang, dosen-dosen di Unisma juga sudah menerbitkan beberapa buku daras. Salah satu buku antologi yang ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Agama Islam Unisma berjudul *Pendidikan Islam dalam Tantangan Globalisasi* mencoba untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dewasa ini. Namun, sebagaimana juga terjadi di UIN Maliki Malang, hasil publikasi berupa artikel-artikel di jurnal internasional masih belum ada.

Menarik untuk melihat penjelasan di atas tentang berbagai aspek kompetensi dan pengajaran dosen dari perspektif mahasiswa PAI Unisma. Terkait dengan pertanyaan apakah dosen-dosen mata kuliah keislaman memiliki pengetahuan yang komprehensif, 98% mahasiswa menyetujuinya. Selain itu, hanya 6% mahasiswa mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran dosen-dosen jarang menyelipkan isu-isu aktual keagamaan, pentingnya toleransi, dan bahaya ekstremisme dalam beragama.

Ada beberapa hal menarik dari hasil survei dan FGD dengan mahasiswa terkait dengan hal ini. Sementara mereka mengakui kompetensi dosen-dosennya, 54% mahasiswa PAI Unisma mengaku bahwa mereka sering menggunakan internet untuk mencari informasi tentang agama. Selain itu, 68% dari mereka biasa bertanya tentang masalah keagamaan pada group-group media sosial (terutama Facebook dan Instagram). Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari 20% mahasiswa yang lebih percaya pada penjelasan-penjelasan di internet dan media sosial untuk menjawab masalah keagamaan dibandingkan dengan jawaban dari dosen-dosennya. Hal ini mungkin dapat dilacak, salah satunya, dari penjelasan mahasiswa bahwa konsep hormat pada guru dan dosen masih dijunjung tinggi di Unisma, terutama oleh alumni pesantren. Mahasiswa merasa kurang sopan jika bertanya secara kritis pada dosen, apalagi memotong penjelasan mereka di kelas. Di sini kemudian media sosial berperan dalam memberikan ruang belajar tanpa harus terhalang oleh konsep takzim pada guru.

Tantangan Islamisme dan Respons Kampus

Dari seluruh pembahasan di atas, perlu dilihat kembali cita-cita ideal UIN Maliki Malang untuk membangun keterpaduan ilmu dan agama yang tidak semata-mata diwujudkan dalam bentuk kurikulum, melainkan berupa pengembangan aspek spiritual, akhlak, ilmu, dan profesionalisme, serta visi Prodi PAI untuk menjadi Program Studi terkemuka dalam menyiapkan tenaga pendidik Agama Islam yang berkarakter Ulul Albab. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita Prodi PAI Unisma untuk mencetak guru-guru agama Islam yang profesional, unggul, dan kompetitif di bidang IPTEKS, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang

mengedepankan nilai-nilai yang inklusif dan toleran. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pandangan keagamaan dosen-dosen PAI di kedua universitas tersebut dalam kaitannya dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Prodi PAI di universitas masing-masing? Sejauh mana pandangan keagamaan mereka tersebut berhubungan dengan pandangan keagamaan mahasiswanya?

Dari hasil survei terhadap dosen-dosen dan mahasiswa PAI UIN Maliki Malang terlihat bahwa mereka memiliki pandangan yang cukup terbuka. Mayoritas dosen (90%) dan mahasiswa (92%) mengatakan tidak setuju dengan argumen bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem *khilafah*. Selain itu, mayoritas dosen (90%) dan mahasiswa (96%) juga tidak setuju penggunaan kekerasan fisik atau bunuh diri untuk menegakkan negara Islam. Pandangan yang inklusif ini tercermin juga dalam pandangan mereka dalam kehidupan bertetangga. Mayoritas dosen (90%) dan mahasiswa (98%) mengatakan bahwa bertetangga dengan orang yang beda agama itu tidak masalah.

Namun beberapa catatan menarik terhadap dosen-dosen dan mahasiswa PAI UIN Maliki Malang ini bisa disampaikan. Pertama, sementara mayoritas dosen (90%) setuju bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem yang tidak Islami (*thaghut*) dan oleh karena itu harus ditaati, total mahasiswa yang sependapat dengan hal ini 74%. Kedua, walaupun mayoritas dosen (90%) dan mahasiswa (88%) tidak setuju untuk membela Islam dengan menggunakan kekerasan, terdapat 10% dosen dan 12% mahasiswa yang menyetujuinya. Ketiga, terdapat 30% dosen dan 42% mahasiswa yang tidak mengakui penganut Ahmadiyah dan Syiah sebagai Muslim.

Apakah pola yang sama juga terjadi di Prodi PAI Unisma? Beberapa catatan penting bisa disampaikan. Sebagaimana di UIN Maliki Malang, hampir seluruh dosen PAI Unisma memiliki pandangan keislaman yang inklusif. Dari hasil survei, 100% dosen PAI Unisma mengaku tidak setuju dengan argumen bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem *khilafah*, dan 90% setuju bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan sistem yang tidak Islami (*thaghut*) dan oleh karena itu harus ditaati. Hal ini sejalan dengan pandangan mereka yang 100% tidak setuju dengan penggunaan kekerasan fisik untuk menegakkan negara Islam. Pandangan yang inklusif ini tercermin juga dalam pandangan mereka dalam kehidupan bertetangga. Mayoritas dosen (90%) mengatakan bahwa bertetangga dengan orang yang beda agama itu tidak masalah.

Namun, respons mahasiswa PAI Unisma menunjukkan hasil yang cukup berbeda. Walaupun mereka sejalan dengan pendapat dosen-dosen terkait larangan penggunaan kekerasan fisik untuk menegakkan negara Islam dan inklusifitas dalam bertetangga dengan orang yang berbeda agama, namun mereka cukup berbeda dalam beberapa hal lainnya. Terdapat 26% mahasiswa yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah *thaghut* (tidak Islami). Hal ini juga sangat senada dengan pandangan 28% mahasiswa bahwa Islam hanya dapat tegak dengan sistem *khilafah*. Selain itu terdapat 30% mahasiswa yang tidak mengakui penganut Ahmadiyah dan Syiah sebagai Muslim.

Mengapa dan dari mana mahasiswa dari kedua universitas tersebut di atas memiliki pandangan keagamaan yang mengarah pada Islamisme? Dari hasil FGD dengan mahasiswa UIN Maliki Malang, diakui oleh sebagian mahasiswa bahwa paham radikal masuk ke kampus melalui mahasiswa-mahasiswa yang bukan berasal dari pondok pesantren atau yang "haus akan agama." Mereka ini kemudian mencari berbagai informasi keagamaan melalui media sosial dan kurang mengerti sumber-sumber yang otoritatif. Para mahasiswa yang diistilahkan ingin "*go back to Muslim identity*" ini kemudian memulainya dengan ekspresi kesalehan yang bersifat fisik, seperti bercadar bagi perempuan atau bercelana cingkrang di atas mata kaki bagi laki-laki.

Mahasiswa Prodi PAI UIN Maliki Malang sepakat bahwa kampus mereka sebenarnya lebih berorientasi pada nilai-nilai NU yang bersifat moderat. Namun beberapa organisasi kampus sangat kuat dalam mengajak mahasiswa masuk dalam kelompok-kelompok kajian Islam garis keras. Hal ini bagai gayung bersambut bagi sebagian mahasiswa yang masih awam terhadap agama Islam dan merasa bahwa ilmu agama Islam yang dipelajari di Prodi PAI kurang mendalam. Di sini peluang mahasiswa untuk mencari informasi tentang agama Islam dari sumber-sumber lain cukup besar. Sebagian mahasiswa berlatar belakang pesantren mengakui bahwa mereka pernah coba-coba mengikuti pengajian-pengajian "radikal" dan kemudian pengelola pengajian tersebut menindaklanjuti dengan ajakan-ajakan untuk berjihad. Namun mereka mengaku bahwa jika memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang kuat maka ajakan-ajakan seperti itu akan mudah ditangkal.

Di sisi lain mahasiswa Prodi PAI Unisma juga menggarisbawahi pentingnya menjunjung nilai-nilai NU yang moderat. Diakui mahasiswa bahwa "Islam radikal" mulai masuk ke kampus secara "hening" dan tiba-tiba sudah hadir di kampus. Sasaran mereka adalah *person to person* yang dilakukan secara personal. Mereka mengakui bahwa Unisma sendiri sebenarnya dari dulu sudah mengupayakan pencegahan radikalisme agama, namun hal itu masih di tataran universitas dan belum sampai sosialisasi kepada mahasiswa.[1] Mahasiswa mengatakan bahwa di kampus NU ini mulai mudah ditemukan mahasiswi bercadar yang menyuarakan *hijrah* dalam bentuk pakaian *syar'i*.

Tentu kita tidak dapat menarik hubungan langsung antara penggunaan cadar atau celana cingkrang dengan ideologi radikal atau radikalisme agama. Namun kegalauan beberapa mahasiswa tersebut di atas, baik dari PAI UIN Maliki Malang maupun PAI Unisma, tampaknya sejalan dengan keresahan pihak kampus yang melihat keterkaitan antara ekspresi kesalehan secara fisik tersebut dengan ideologi Islamisme atau bahkan radikalisme agama di kampus mereka.

Beberapa pimpinan dan mahasiswa berbeda pendapat soal istilah yang tepat untuk melabeli fenomena keagamaan baru di kampus ini. Salah seorang dosen di Prodi PAI UIN Maliki Malang, misalnya, mengatakan bahwa radikalisme adalah "sebuah pemikiran yang

[1] Ketika FGD ini dilakukan di Unisma pada 24 Oktober 2018 SK Rektor tanggal 2 Oktober tersebut belum tersosialisasikan pada mahasiswa.

melabeli hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan itu sebagai kafir, sebagai tindak lanjutnya maka ia dapat melakukan tindakan-tindakan yang a-manusiawi." Salah seorang pimpinan UIN Maliki Malang mengatakan bahwa istilah yang tepat untuk menggambarkan fenomena keagamaan baru ini bukanlah radikalisme, tetapi adalah "ekstremisme."

Memang fenomena penggunaan cadar yang tampak secara kasat mata di UIN Maliki Malang, termasuk Prodi PAI, mengundang beberapa reaksi yang berbeda di kalangan dosen dan pimpinan. Beberapa dosen memilih untuk menawarkan *counter narrative* tentang wacana ini melalui penjelasan-penjelasan yang disisipkan di matakuliah. Salah seorang dosen PAI, misalnya, memilih untuk menjelaskan di kelas yang ada mahasiswi bercadar, bahwa penggunaan cadar masuk pada wilayah-wilayah *ijtihadi*. Mahasiswa diberikan penjelasan bahwa wilayah *ijtihadi* itu tidak ada yang mutlak kebenarannya, dan karena itu mahasiswa harus berpikir terbuka dan toleran. Dosen lain yang mengajar Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki *asbab an-nuzul* dan hadis memiliki *asbab al-wurud*, sehingga mahasiswa mampu memahami konteks, dan tidak hanya mengambil penafsiran yang tekstual. Dosen lainnya yang mengampu matakuliah Keterampilan Dasar Mengajar menawarkan pendekatan persuasif pada mahasiswinya terkait praktik mengajar di sekolah karena beberapa sekolah yang menerima mahasiswa bercadar mengeluh bahwa ideologi yang dibawa melalui bentuk cadar itu mungkin akan berpengaruh pada siswa sekolah.

Terkait dengan etika profesi keguruan inilah maka pada tanggal 4 Mei 2018 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Edaran Tata Tertib berpakaian mahasiswa. Cukup menarik untuk dicatat bahwa mahasiswi dilarang menggunakan pakaian berbahan tipis/transparan, bercadar, robek-robek, berbahan jeans, bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain. Di sini larangan bercadar disejajarkan dengan tata cara berpakaian yang dianggap tidak tepat untuk para calon guru agama Islam. Ketika dilacak lebih jauh latar belakang keluarnya surat edaran tersebut, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah UIN Malang mengatakan:

> Sesuai dengan program pemerintah untuk deradikalisi, maka tiap perguruan tinggi diwajibkan mulai dari PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan) untuk memberikan materi-materi tentang bahaya radikalisme, bahaya terorisme di kampus. Usaha dimulai dari memberikan materi tentang bahaya radikalisme pada saat awal... Nah, kemudian yang kedua, memang pada saat PBAK itu kita jaring orang yang terindikasi radikal, salah satu di antaranya adalah tentang cadar atau cara berpakaian. Nah, jauh sebelumnya kita sudah menyosialisasikan bahwa di FITK ini dilarang untuk berpakaian cadar pada saat acara formal, satu contoh, untuk perkuliahan di kelas, konsultasi kepada dosen, masuk perkantoran, tidak boleh pakai cadar, tetapi kalau hanya kegiatan di luar perkuliahan, *mangga lah*.... Lalu yang ketiga, yang kita lakukan adalah memanggil secara langsung mereka yang menggunakan cadar itu.

Dari hasil observasi di tempat-tempat kuliah yang biasa dipakai oleh Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maliki Malang ditemukan beberapa banner yang cukup besar di lingkungan Kantor Tata Usaha FITK dan di dekat ruang-ruang kuliah yang menunjukkan "cara berpakaian yang sesuai dengan aturan." Namun beberapa mahasiswa PAI yang menggunakan cadar tampak memasuki beberapa ruang kuliah. Belum ada sanksi yang tegas bagi mahasiswa yang tidak mengikuti aturan tersebut.

Tidak lama setelah keluarnya surat edaran tersebut, pada tanggal 25 Mei 2018 muncul Surat Keputusan Rektor UIN Maliki tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru. Pada poin tentang pakaian yang harus dikenakan mahasiswi saat mengikuti PBAK tertulis: "baju putih lengan panjang, rok hitam panjang, sepatu hitam, kaus kaki putih, jas almamater, berjilbab putih (bukan kaus), dan tidak bercadar." Terkait dengan hal ini WR 1 menjelaskan bahwa pelarangan cadar di UIN Maliki dilakukan secara persuasif.

> Kalau yang masih pakai cadar ya memang ada, ya kita perlu persuasi. Di satu sisi itu hak mereka, tetapi di sisi lain kita punya aturan, kalau *nggak* ada aturan nanti bagaimana? Termasuk di *ma'had*. Seluruh mahasiswa harus di *ma'had* itu *kan* aturan internal. Kalau *nggak* mau ya jangan kuliah di sini. *Cuman* tujuannya adalah baik. Dan kalau pakai cadar seperti kemarin ada dan diminta dilepas oleh dosennya.

Perlu digarisbawahi bahwa aturan tersebut di atas diperuntukkan bagi mahasiswa baru dalam acara PBAK. Pendekatan persuasif yang sudah dijelaskan di atas tampaknya memang merupakan sikap UIN Maliki Malang. Hal ini juga tersirat dalam puisi yang dibuat Rektor, Prof. Abdul Haris, terkait penggunaan cadar. Rektor ini memang terkenal dengan karya-karya puisinya sebagai media komunikasi kepada publik terkait isu-isu tertentu yang sedang tren. Puisi berjudul "Cadar Perempuan, Sudah Lama Diperdebatkan" tertanggal 20 Maret 2018 itu berbunyi:

> Kalau saja kita buka lagi
> Kitab-kitab terutama kitab fikih
> Perbedaan berbagai mazhab terjadi
> Wajib di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali
> Sunnah di kalangan mazhab Maliki dan Hanafi
> Sesungguhnya sudah lama para ulama berselisih
> Perbedaan tidak memicu permusuhan para ahli
> Sesungguhnya di balik yang nampak ada pesan yang tersembunyi
>
> Pesan yang tersembunyi
> Justru ajaran yang sangat esensi
> Menjaga keamanan jangan sampai terganggu ajnabi
> Bila ini sudah terlindungi maka hijab tidak wajib lagi
> Apalagi berdasar kaidah al hukmu yaduru ma'a illati
> Jika ilah tidak ada maka hukum tidak diakui
>
> Persoalan persepsi
> Harus segera selesai

Tidak boleh terjadi selisih
Memecah belah umat apalagi
Seharusnya dakwah Islam simpati
Tidak boleh terkesan ekstrim sekali
Orang-orang bukan dekat justru akan lari
Makna Islam yang berarti damai harus terealisasi
Dalam kehidupan berbangsa sehari-hari

Mungkin kita sendiri
Harus mencari sebuah strategi
Dakwah dengan metoda yang lihai
Sebagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
Konflik dan permusuhan harus selalu dihindari
Sesama umat Islam harus diupayakan menjadi harmoni
Dengan bicara yang ethis dan nilai-nilai Islam dijujung tinggi
Inshaallah semua perbedaan tentang cadar akan selesai
Manfaatkan moment cadar untuk membangun ukhuwah kembali

Bukankah tugas kita mendidik?
Untuk membangun bangsa pandai dan cerdik
Dengan pendekatan humanis yang metodik

Pesan-pesan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa merebaknya isu soal cadar harus diatasi dengan cara yang bijak dan jangan sampai memecah belah tubuh umat Islam sendiri. Sampai saat ini pun juga tidak ada aturan tertulis di level universitas yang mengatur penggunaan pakaian pada saat kuliah.

Di sisi lain, Unisma juga merasakan merebaknya tantangan atas Islamisme yang terlihat dari tampilan fisik, utamanya penggunaan cadar. Diakui bahwa masuknya Islamisme ke Unisma melalui mahasiswi-mahasiswi yang menggelar beberapa *halaqah* saat istirahat salat zuhur (11.30-12.30). Selain itu, salah seorang pimpinan Unisma mengatakan ada organisasi radikal yang sengaja mengirimkan orang-orangnya untuk kuliah di kampus ini dan kemudian menyebarkan ideologinya di dalam.

Keresahan ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Unisma tanggal 2 Oktober 2018 tentang aturan berpakaian bagi sivitas akademika yang memasuki lingkungan kampus atau sedang melakukan kegiatan atas nama Unisma di luar kampus. Di antara beberapa aturan bagi sivitas akademika laki-laki termasuk ketentuan bercelana panjang sampai mata kaki. Sedangkan bagi sivitas akademika perempuan termasuk larangan untuk "menutup wajah dengan penutup bentuk apapun, kecuali alasan sakit yang dapat dibuktikan secara inderawi atau dibuktikan dengan surat keterangan dokter." Salah satu pertimbangan yang tertuang dalam SK tersebut di atas adalah "dalam rangka menjaga adab atau tata krama berpakaian bagi civitas akademika yang santun sesuai norma kesopanan dan norma agama Islam." SK ini juga mencantumkan sanksi bagi mahasiswa dalam bentuk larangan untuk memasuki lokasi kampus, menggunakan fasilitas kampus,

dan mengikuti kegiatan atas nama kampus. Sanksi rencananya akan mulai diterapkan tanggal 1 Desember 2018, namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan penetapan pemilihan Rektor Unisma, maka masih belum diterapkan. Saat ini pihak kampus masih terus mendekati mahasiswa bercadar untuk membukanya dan mengatakan akan segera memberlakukan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

Mahasiswi Bercadar: Praktis, Modis, atau Ideologis?

Riset ini berhasil mewawancarai dua orang mahasiswi bercadar dari Prodi PAI, masing-masing satu orang dari UIN Maliki Malang dan dari Unisma. Narasi dari mereka ini penting untuk memahami apa makna penggunaan cadar bagi mereka dan apa alasan mereka menggunakannya. Selain itu, menarik juga untuk melihat bagaimana mereka menyikapi kebijakan kampus terkait tata cara berpakaian, khususnya cadar, yang pada gilirannya akan mengantarkan kita untuk memahami sejauh mana mereka meyakini dan mempertahankannya.

Seorang mahasiswi PAI UIN Maliki Malang mengatakan bahwa ia menggunakan cadar selepas SMA di satu wilayah di Kalimantan. Hal ini berangkat dari kajian *tahsin* Al-Quran yang diikutinya, yang sebagian besar pesertanya berpakaian hitam dan bercadar. Namun saat itu ia masih belum secara konsisten menggunakannya karena kedua orang tuanya merasa keberatan. Keberadaannya di Malang yang jauh dari keluarga membuatnya lebih bebas untuk bercadar. Proses satu tahun di *ma'had* juga mempertemukannya dengan teman-teman lain yang bercadar dan menjadi momen untuk saling menguatkan. Ia mengatakan bahwa di antara teman-teman sekelasnya ada yang awalnya tidak bercadar, tetapi kemudian menggunakannya karena berbagai alasan. Namun ia menyadari adanya tata tertib di FTIK dalam berpakaian dan bersedia membuka cadarnya jika dalam proses perkuliahan ada dosen-dosen yang memintanya. Mahasiswi ini mengatakan alasan utama bercadar adalah untuk lebih bisa menjaga diri dan lebih dihargai oleh laki-laki, dan tidak bersifat ideologis. Ia memegang pendapat yang menganggap cadar itu sunah, sesuai situasi dan kondisi. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa salah satu manfaat praktis penggunaan cadar adalah sebagai penghalang debu.

Penggunaan cadar yang non-ideologis ini juga ditemukan pada beberapa mahasiswi PAI UIN Maliki Malang lainnya. Dosen-dosen PAI menjelaskan alasan penggunaan cadar beberapa mahasiswanya, sebagai berikut: "Ini mode saja, Pak. Saya hanya ingin membedakan antara agama yang ada di kampung saya dan agama yang saya anut ketika saya pulang ke kampung." Seorang mahasiswi lainnya yang terkadang terlihat menggunakan cadar, namun juga beberapa kali tidak menggunakannya, memberikan alasannya bercadar: "Saya memang berjualan cadar, Pak. Jadi saya menggunakan ini juga dalam rangka mempromosikan produk-produk saya."

Mahasiswi bercadar dari Prodi PAI Unisma yang kami wawancarai sangat menarik. Ia masuk Unisma tidak langsung selepas SMA, karena ia masuk pondok

pesantren beberapa tahun sebelum memulai kuliah. Mahasiswi ini terlihat sudah sangat mantap menggunakan cadar dan memiliki alasan yang kuat. Ia mulai menggunakan cadar ketika menjadi santri di salah satu pesantren di Jawa Timur. Karena lingkungannya banyak yang bercadar maka ia ikut menggunakannya. Ketika ia kembali ke daerahnya selepas pendidikan pesantren ia mulai berdakwah. Perjalanan dakwahnya membawanya kepada komunitas istri-istri pejabat. Di titik ini ia berpikir bahwa ia harus meningkatkan pengetahuannya tentang agama Islam, dan memilih Unisma sebagai tempat belajar.

Pilihannya ke Unisma bukan tanpa kaitan dengan penggunaan cadar. Ia mengaku sudah menanyakan ketika mendaftar, jika diterima menjadi mahasiswa apakah Unisma memperbolehkannya untuk tetap bercadar? Jawaban positif yang ia dapatkan semakin memperkuat tekadnya. Ia sudah memilih untuk terus bercadar dan merasa nyaman dengannya, serta tetap bercadar dalam setiap perkuliahan. Lebih jauh mahasiswi Prodi PAI ini berpendapat bahwa budaya penggunaan cadar bukan budaya yang asing di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam "Rimpu" di Bima yang telah hidup dan berkembang sejak adanya masyarakat Bima. Ia sangat aktif mendaki gunung bersama teman-temannya dan selalu ingin menyuarakan pada teman-temannya yang bercadar bahwa "cadar tidak menghalangi sekolah kamu, aktivitas kamu, dan hobi kamu."

Kini dengan adanya SK Rektor Unisma tersebut di atas yang melarang penggunaan cadar, ia berdiri di persimpangan jalan. Tidak mungkin ia mundur dan keluar dari Unisma, namun tidak mungkin pula baginya untuk membuka cadar. Ia sangat menyayangkan, bahkan mempertanyakan "mengapa cadar harus ditumpas," karena baginya, "pikiran yang radikal lebih berbahaya daripada pakaian." Ia pun mengatakan, "siap untuk dikeluarkan dari Unisma jika terbukti radikal." Sebagaimana mahasiswa Unisma yang lain, konsep takzim pada dosen-dosennya terus ia jaga sambil mengatakan bahwa sebaiknya larangan bercadar didasarkan pada hasil riset yang menunjukkan kaitan langsung antara penggunaan cadar dengan radikalisme agama, sehingga alasan-alasan yang lebih substantif lebih dapat diajukan sebagai dasar. Alih-alih mengeluarkan larangan bagi mahasiswi untuk bercadar, ia mengatakan siap jika diberi mandat oleh pihak universitas untuk membina teman-teman mahasiswi bercadar di Unisma.

Dari diskusi dengan salah seorang dosen Unisma dijelaskan bahwa sebenarnya isu penggunaan cadar itu sudah sejak dua tahun lalu dibicarakan oleh sesepuh Unisma, dan ada pendataan mahasiswa bercadar di kampus tersebut. Mereka kemudian dikumpulkan dan diberi pengarahan. Semenjak ada desas-desus pelarangan itu beberapa orang menegosiasi cadar dengan masker, karena bagi sebagian mahasiswi yang sudah terbiasa menggunakannya larangan itu membuat mereka tidak nyaman: "Padahal beberapa mahasiswi bercadar itu *fine gitu lho*, bahkan dia nyanyi.. *band itu lho* pakai cadaran, bergaul dengan laki-laki juga dengan tetap menggunakan cadar." Namun, sebagaimana dikatakan oleh dosen tersebut "momentumnya saja sekarang ini yang sedang terjadi penuduhan bahwa cadar itu menjadi simbol-simbol radikalisme sehingga perlu dilarang, entah itu larangan sementara atau seterusnya."

Dua narasi di atas tentang penggunaan cadar oleh dua mahasiswi di UIN Maliki Malang dan Unisma dan beberapa pengalaman dosen dalam berhubungan dengan mahasiswa bercadar memang tidak mewakili pandangan semua pengguna cadar di kedua universitas. Namun hal tersebut setidaknya memberikan beberapa perspektif yang berbeda dari sisi pengguna cadar. Penggunaan cadar bisa didasarkan pada alasan yang sangat praktis, modis, sampai ideologis. Ketika penggunaan cadar merupakan pilihan ideologis pun ternyata argumen yang dimiliki oleh pengguna juga tidak selalu bisa dikaitkan dengan ideologi yang mengarah pada kekerasan agama.

Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi

Beberapa kesimpulan penting terkait kompetensi calon guru-guru agama dan tantangan atas masuknya Islamisme ke dua kampus moderat, serta rekomendasi bisa disampaikan di sini. *Pertama*, dalam hal kompetensi calon-calon guru agama masih terdapat masalah dalam hal input calon mahasiswa Prodi PAI. Di UIN Maliki Malang, sistem penyaringan mahasiswa baru sudah dilakukan dengan pemberian pembobotan yang lebih tinggi bagi alumni pesantren atau SMA berbasis Islam. Namun perlu dipastikan bahwa tes yang dilakukan benar-benar dapat mengukur kemampuan calon mahasiswa dalam bahasa Arab dan ilmu keislaman. Tes wawancara dalam seleksi mahasiswa baru yang sebelumnya pernah dilakukan dapat dilakukan kembali sebagai cara yang lebih pasti dalam mengukur kompetensi calon mahasiswa. Sebenarnya pelatihan tambahan bahasa Arab di UIN Maliki Malang yang sudah dilakukan sangat komprehensif, tetapi karena input masih sangat beragam maka susah untuk mencapai hasil yang maksimal. Di Unisma, walaupun sebagai universitas swasta, kompetensi keagamaan Islam bagi para calon guru agama Islam ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam seleksi masuk. Jika hal ini sulit dilakukan maka penguatan mahasiswa Prodi PAI terkait kompetensi keagamaan Islam (termasuk bahasa Arab) perlu dilakukan sejak semester-semester awal.

Kedua, adanya pandangan bahwa Prodi PAI memang lebih menyiapkan tenaga pendidik akan mengarah pada kurangnya kompetensi keislaman calon-calon guru agama karena penekanan lebih banyak diberikan pada kemampuan pedagogis. Sebagai akibatnya, hanya alumni pesantren dan madrasah khusus keagamaan yang siap menjadi guru di madrasah, sebab proses perkuliahan di Prodi PAI kurang menyiapkan mereka ke arah sana. Jika Prodi PAI UIN Maliki Malang tetap memegang misinya untuk "menyelenggarakan pendidikan unggul yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik agama Islam di sekolah/madrasah," dan Prodi PAI Unisma tetap memegang misinya untuk "menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan guru agama Islam yang profesional, unggul, dan kompetitif di bidang IPTEKS, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah" maka penekanan pada kompetensi keislaman perlu dilakukan. Prodi Pendidikan Agama Islam yang dianggap terlalu luas dapat membuka beberapa konsentrasi, seperti Konsentrasi Guru Fiqih, Konsentrasi Guru Qur'an Hadis, Konsentrasi Guru Aqidah dan Akhlak, atau Konsentrasi Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Ketiga, perlu matakuliah *critical thinking* seperti Filsafat Ilmu dan Logika bagi mahasiswa Prodi PAI. Walaupun matakuliah-matakuliah ini sudah diajarkan, namun penekanan yang diperlukan bukan pada pembahasan teoretisnya melainkan lebih ke penerapan praktisnya dalam mengajak mahasiswa berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini pada gilirannya akan membantu mahasiswa untuk dapat melihat dengan lebih cermat berbagai informasi yang mengepung mereka, baik informasi-informasi yang didapat secara *online* maupun *offline*.

Keempat, terkait dengan tantangan Islamisme di kampus, beberapa pimpinan UIN Maliki Malang dan Unisma yang kami wawancarai meyakini bahwa radikalisme agama mulai masuk kampus. Baik UIN Maliki Malang maupun Unisma sebenarnya sudah cukup menyiapkan mahasiswanya untuk berpikir moderat. Program penguatan karakter mahasiswa baru seperti sistem *ma'had* di UIN Maliki Malang atau Master Maba di Unisma yang menekankan pada pendidikan karakter dapat dijadikan model untuk membekali mahasiswa dengan nilai-nilai yang inklusif dan bahasa Arab/pengetahuan keislaman yang baik. Namun hal tersebut perlu untuk terus dilanjutkan sepanjang masa studi mahasiswa. Program Standarisasi Kepenasehatan Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, termasuk Prodi PAI, yang menyaratkan 4 kali bimbingan dosen dalam 1 semester sebenarnya dapat dimanfaatkan. Dalam konteks ini perlu penekanan ulang agar proses pembimbingan tidak sekadar berupa setoran hafalan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis serta kemampuan teknis PAI lainnya, namun lebih menjadi sarana bagi dosen untuk membimbing pemahaman keagamaan mahasiswa ke arah yang inklusif.

Kelima, perlu langkah-langkah yang lebih strategis dalam mendekati dan membina mahasiswa-mahasiswa yang dianggap telah terpapar pada Islamisme. Diperlukan pendekatan yang lebih merangkul mereka. Metode *counter narrative* dengan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif, atau metode mendiskusikan isu-isu aktual terkait topik-topik hijrah, jihad, cadar perlu dilakukan di kelas dengan sistem diskusi yang terbuka dan tidak otoriter. Dengan demikian mahasiswa akan melihat bahwa dalam wilayah-wilayah yang bersifat *ijtihadi* itu tidak ada yang mutlak kebenarannya. Sebagai akibatnya kampus juga harus terbuka menerima perbedaan pandangan sejauh prinsip-prinsip utama yang menjadi visi dan misi universitas tidak dilanggar.

Referensi

Duta.co. n.d. "Unisma Jadikan Bahasa Arab Alat Komunikasi di Kampus". www.duta.co, akses tanggal 15 Oktober 2018.

Effendi, Yusli. 2018. "Mengenali Pola dan Gerakan Radikalisme di Indonesia," Makalah. Dipresentasikan di Hotel Atria, 15 Oktober 2018.

Effendi, Yusli. 2018. "Karangploso, Dau, Singosari: Titik Merah Terorisme" *Malang Post*, 16 Mei 2018. www.malangpost*online*.com, akses tanggal 27 Oktober 2018.

Effendi, Yusli. 2018. "Jejak Teror di Bumi Angrok," *Malang Post*, 17-05-2018. www.malangpost*online*.com, akses tanggal 27 Oktober 2018.

Suprayogo, Imam. 2016. "Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: Pengalaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang." Proceeding IAIN Batusangkar 1 (1): 27–46.

Suprayogo, Imam. n.d. "Pohon Ilmu UIN Maliki Malang." Tulisanterkini.com. Diakses 28 Oktober 2018. https://tulisanterkini.com/artikel/keislaman/umum/5575-pohon-ilmu-uin-maliki-malang-.html.

Suryamalang.tribunnews.com. "Unisma Miliki Program Intensif Belajar Bahasa Arab". www.suryamalang.tribunnews.com, akses tanggal 15 Oktober 2018.

Tim Peneliti Psikologi UIN Maliki Malang. 2018. "Skema Religiositas Maba UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian tidak dipublikasikan.

Tim Penyusun Universitas Islam Malang. 2017. *Pedoman Master Maba Tahun Akademik 2017/2018*. Malang: Unisma.

Walid, Muhammad. 2011. "Model Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Agama Islam (Studi Tentang Pendidikan Karakter Berbasis Ulul Albab Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)." *El-Qudwah*, 1 (5). http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/1943.

8

MASYARAKAT RELIGIUS PEMBELAJAR AGAMA, BENTENG ATAS PENYEBARAN NARASI RADIKAL DI KALIMANTAN SELATAN

UIN Antasari Banjarmasin dan IAI Darusalam Martapura

Rachmad Hidayat

Pendahuluan

Di Kalimantan Selatan, proyek penelitian ini memilih Universitas Islam Negeri Antasari (selanjutnya disebut UIN Antasari) di kota Banjarmasin dan Institut Agama Islam Darusalam (selanjutnya disebut IAI Darusalam) di Kota Martapura, sebagai lokasi penelitian. Jarak kota Martapura dari Banjarmasin adalah satu jam perjalanan darat. Kedua PTKI dipilih karena mengelola Program Studi Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan daya tampung 200-400 mahasiswa setiap tahunnya dan masing-masing telah meluluskan ribuan calon guru agama.

UIN Antasari berdiri sejak tahun 1964 dan pada saat penelitian ini dilakukan memiliki kapasitas daya tampung untuk 2.500 mahasiswa baru. PTKI ini mengelola lima fakultas, termasuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FTK dengan program studi Pendidikan Agama Islam. PAI termasuk prodi yang paling tua, disahkan pada tahun

1965 dan kini memiliki tiga puluh lima dosen tetap. Pada tahun 2018, UIN Antasari menerapkan metode tambahan dalam penyaringan mahasiswa baru, yaitu penilaian kemampuan baca-tulis Al-Quran.

IAI Darussalam dikelola oleh Yayasan Darusalam yang juga membawahi Pondok Pesantren Darusalam. Pendiriannya diinisiasi oleh KH. M. Sya'rani Arif pada tahun 1970 dengan badan hukum resmi bernama Perguruan Tinggi Pondok Pesantren Darussalam. Tahun 1987 terjadi perubahan badan hukum menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam. Status ini pada tahun 2017 berubah menjadi Institut Agama Islam Darussalam. Prodi PAI ada di Fakultas Tarbiyah, satu dari tiga fakultas yang dikelola oleh IAI Darussalam. Selain Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah membawahi dua jurusan lain yaitu, Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Peneliti mewancarai pejabat kunci yang berhubungan dengan pengelolaan Prodi PAI di kedua PTKI, dari level universitas, fakultas hingga prodi. Wawancara juga dilakukan dengan empat dosen non pejabat di masing-masing PTKI. Keterlibatan mahasiswa pada penelitian ini dilakukan lewat sesi FGD yang masing-masing dihadiri oleh delapan mahasiswa UIN Antasari dan dua belas mahasiswa IAI Darusalam. Terdapat 56 kuesioner mahasiswa yang dianggap valid dari UIN Antasari dan 50 kuesioner dari IAI Darusalam. Survei juga melibatkan sepuluh dosen PAI dari masing-masing PTKI. Observasi diterapkan terutama pada kelas, interaksi informal antar dosen, kegiatan mahasiswa, dan ruang kerja dosen dan pejabat. Peneliti juga melakukan review atas dokumen, arsip, data tertulis yang relevan dalam penyelenggaraan Prodi PAI di kedua PTKI.

Dalam penelitian ini, semua responden survei, peserta FGD, narasumber interview, dan kelas untuk observasi dipilih secara *purposive* menurut pertimbangan tertentu. Responden survei mahasiswa dipilih berdasar statusnya sebagai mahasiswa tingkat akhir (semester V atau VII), tingkat keaktifan di organisasi mahasiswa beserta perbedaan organisasi tersebut, dan keberimbangan gender. Kriteria pilihan yang sama digunakan untuk mahasiswa peserta FGD ditambah dengan kesediaan dan kesanggupan keikutsertaan kegiatan tersebut. Responden dosen dipilih berdasarkan variasi mata kuliah yang mereka ajar (antara mata kuliah kompetensi pokok dan pendukung), aktivitas mereka di luar kampus, senioritas, dan keberimbangan gender. Kriteria pilihan yang sama diterapkan untuk narasumber dosen dalam interview. Beberapa narasumber dosen dipilih untuk interview karena posisi jabatan mereka yang secara langsung atau tidak berhubungan dengan pengelolaan Prodi PAI (wakil rektor, wakil dekan, dan kaprodi).

Penelitian ini secara garis besar menemukan bahwa sistem produksi guru agama Islam di tingkat PTKAI di Kalimantan Selatan beroperasi dengan berbagai kelemahan dan ketidakcukupan, mulai pada komponen yang mendasar hingga pada aspek-aspek yang praktis. Kendati lemah, sistem ini masih relatif kebal dari paparan narasi Islamisme dan radikalisme karena dilindungi oleh budaya dan iklim religius yang kuat. Budaya dan

atmosfer kuat religius ini dijaga oleh para imam atau guru-guru agama sebagai pemegang otoritas religius tradisional yang sangat mapan dan telah terlembaga selama berpuluh-puluh tahun. Situasi ini tidak berarti bahwa watak intoleran tidak memiliki tempat di dalam sistem dan cara pandang civitas akademika kedua PTKI, karena kenyataannya tendensi intoleransi muncul dalam modus dan narasi yang berbeda.

Setelah bagian pendahuluan, tulisan ini akan mendeskripsikan tentang konteks Islam pada kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan. Kemudian bagian berikutnya akan mengurai berbagai aspek konseptual, sistemik, dan praktis dari kelemahan pada Prodi PAI di kedua PTKI subjek penelitian ini. Setelah itu akan didiskusikan bagaimana sistem Prodi PAI ini berhubungan dengan narasi intoleran dan radikal serta bagaimana sistem ini dapat bertahan. Bagian akhir dari tulisan ini akan menyediakan refleksi kritis atas temuan dan analisis mengenai problematika sistem produksi guru agama Islam di Kalimantan Selatan dan menutup diskusi pada bagian ini dengan beberapa rekomendasi tentang penguatan sistem produksi guru agama Islam berdasarkan konteks Islam Kalimantan Selatan.

Masyarakat Pembelajar Agama di Kalimantan Selatan

Masyarakat Kalimantan Selatan terkenal sangat religius dengan sejarah perkembangan Islam yang cukup panjang. Diduga penyebaran Islam pada masyarakat pesisir di wilayah ini telah terjadi lebih dari empat abad yang lalu (Daud, 1997). Ulama dan pesantren memiliki kedudukan yang fundamental dalam kehidupan budaya, sosial, hukum dan politik masyarakat. Aktivitas 'mengaji', terlibat dalam komunitas belajar, dan 'berdekatan' dengan guru-guru agama atau imam menjadi ciri utama kehidupan religius di Kalsel (Daud, 1997). Praktik mengaji yang begitu meluas ini menyediakan sumber daya budaya yang menurut Apple (2012) dapat membentuk budaya kurikulum dari aktivitas belajar. Berbagai macam bentuk dan praktik pengajian agama publik dari yang melibatkan beberapa peserta saja hingga dihadiri ribuan jamaah adalah praktik belajar atau 'pengajian' yang berlangsung secara rutin dan menjadi ritme kolektif bagi masyarakat Muslim Kalsel.

Selain pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada UIN Antasari Banjarmasin, sejumlah perguruan tinggi swasta di Kalsel membuka Prodi PAI sebagai prodi unggulan mereka dengan kapasitas yang tidak bisa dibilang kecil (antara 200 hingga 300 mahasiswa diterima setiap tahun). Status unggulan ini juga menciptakan prestise di kalangan mahasiswa Prodi PAI sebagai calon guru agama yang menjadi model dan preferensi keagamaan bagi masyarakat.

Hal yang paling mendasar berhubungan dengan dan merupakan implikasi dari kuatnya atmosfer kehidupan religius di Kalsel salah satunya adalah tingginya permintaan atau kebutuhan akan ketersediaan guru agama Islam, khususnya di kantong-kantong komunitas muslim seperti Kota Martapura, Banjarmasin, Amuntai, Barabai, dan

Kabupaten Banjar. Ritualitas agama adalah bagian utama dari rutinitas sosial budaya, lebih dari sekadar ritual wajib bagi individu, tetapi terlembaga dalam bentuk budaya untuk mempelajari ilmu agama itu sendiri yang sangat mewarnai praktik keberagamaan di Kalimantan Selatan (Daud 1997, Lukens-Bull, 2001).

Berbagai praktik pengajian, secara langsung atau tidak, turut membentuk perilaku religius masyarakat Banjar. Banyak ulama, guru beserta murid-murid mereka menyediakan forum pelajaran agama untuk masyarakat awam di komunitas masing-masing. Praktik ini membuat suatu komunitas atau kampung memiliki seorang figur religius yang memberikan pelajaran agama, dan komunitas tersebut mengikutinya secara bergairah. Etos untuk terus menambah pengetahuan agama ini menyebar sangat luas di kalangan masyarakat awam di Kalimantan Selatan (Daud, 1997: 521).

Di antara beberapa pusat pembelajaran agama, Martapura adalah kota santri yang paling menonjol . Di kota ini, Pondok Pesantren Darusalam adalah lembaga religius yang paling luas pengaruhnya. Pondok ini ada di bawah pengelolaan Yayasan Darusalam yang juga mengorganisasi Institut Agama Islam Darusalam. Kompleks lokasi kampus Institut Agama Islam Darusalam terhampar seluas lima hektare. Dalam kompleks itu juga berdiri lima kompleks sekolah dari Madrasah Tsanawiyah hingga Aliyah yang semuanya dikelola oleh Yayasan Darusalam. Setiap hari Sabtu, ribuan jamaah pengajian memadati kompleks tersebut. Mereka mengikuti kajian kitab oleh guru-guru utama, untuk ibu-ibu di pagi hari dan untuk bapak-bapak di sore harinya. Jumlah jamaah yang sama memadati kompleks Masjid Ar-Raudah Sekumpul setiap Minggu untuk berziarah ke makam ulama yang paling populer di Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani yang lebih populer dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Kabupaten Banjar adalah sumber atmosfer religius yang lebih kuat dibandingkan Kota Banjarmasin yang lebih metropolis.

Dalam ritme dan atmosfer religius yang terlembaga dan membudaya secara luas dalam masyarakat Muslim Kalsel individu-individu yang menjadi sumber pengetahuan agama seperti imam dan guru agama memiliki posisi dan memainkan peran yang fundamental yang menjaga atmosfer dan rutinitas ini terus berlangsung. Skala budaya 'mengaji agama' yang sangat luas ini pada masyarakat Kalsel menuntut reproduksi peran individu-individu ini dalam proporsi yang luas dan untuk memainkan perannya dalam berbagai lembaga pendidikan agama yang semakin membesar jumlahnya.

Menjadi guru agama menyediakan prospek profesi yang sangat menjanjikan bagi mahasiswa dan bagi orang tua mahasiswa. Menjadi guru agama adalah juga menduduki posisi sosial dan kultural yang bermartabat dan terhormat bagi masyarakat Muslim Kalsel. Ini berarti alumni Prodi PAI dapat berharap untuk menempati posisi yang terhormat dan secara religius otoritatif bagi masyarakat Kalsel.

Menjadi bagian dari institusi pendidikan agama, baik perguruan tinggi dan khususnya pesantren lebih jauh juga berarti menjadi bagian dari jejaring sosial dan politik yang berpengaruh pada lingkup Kalsel. Hubungan antara pesantren dengan struktur

pemegang kekuasaan pada pemerintahan daerah dan propinsi sangatlah penting dan menentukan posisi seseorang. Lebih dari itu, keterhubungan ini juga sangat ditentukan oleh afiliasi dengan jaringan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi masyarakat yang paling dominan di Kalsel. Lingkaran keterhubungan antara pesantren, perguruan tinggi dan Nahdlatul Ulama merupakan tiga pilar hubungan yang sangat menentukan kehidupan keberagamaan dan praktik pendidikan agama di Kalsel.

Filosofi, Kebijakan, dan Desain Pendidikan Agama yang 'Defisit' Ilmu Agama

Penelitian ini menemukan aspek-aspek konsepsional yang berkontribusi pada lemahnya sistem produksi guru Agama Islam di Kalsel. Aspek-aspek ini meliputi ketidakjelasan filosofi pendidikan yang diadopsi, kebijakan kurikulum prodi, dan desain pendidikan dengan orientasi pedagogis yang kuat. Aspek-aspek ini bersifat mendasar karena sangat menentukan tujuan, bentuk dan praktik penyelenggaraan Prodi PAI dalam mewujudkan profil lulusan atau calon guru agama yang komponen utamanya adalah kemampuan pedagogis. Bab ini akan mendiskusikan secara lebih detail mengenai isu-isu yang muncul dalam ranah fundamental ini bagi sistem produksi guru agama.

Desain Pendidikan Tinggi dengan Orientasi Pedagogis yang Kuat

Pemahaman tentang makna terdalam pendidikan, atau filsafat pendidikan, adalah fondasi pelaksanaan pendidikan yang menentukan bentuk, arah dan tujuan pelaksanaan aktivitas pendidikan (Lukens-Bull, 2005). Dalam berbagai wawancara, diskusi kelompok maupun observasi, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan diberlakukannya suatu landasan pemikiran atau filosofi mengenai pendidikan yang menjadi acuan bersama dalam desain, kurikulum, silabus dan metode pengajaran di kelas dan luar kelas. Setiap dosen yang terlibat dalam penelitian ini tidak menarasikan suatu pemahaman bersama yang koheren atau praktik yang mencerminkan bagaimana mereka berbagi pemahaman mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini terutama pada aspek pemahaman mengenai pendidikan Agama Islam.

Desain, metode dan praktik pengajaran untuk calon guru agama Islam dilaksanakan dengan dasar pemikiran yang tidak padu dan koheren yang merefleksikan absennya suatu dasar filosofi pendidikan yang dipahami dan diterima bersama di lingkungan institusi. Peneliti tidak menemukan indikasi-indikasi yang menunjukkan konsistensi di antara para narasumber di kedua PTKI subjek penelitian dalam menjelaskan dasar pemikiran dari aktivitas pengajaran yang mereka lakukan. Hal ini terkecuali dalam hal yang lebih praktis seperti penerapan metode tertentu dalam kuliah. Satu hal yang menonjol adalah penerapan metode presentasi dalam kelas oleh mahasiswa secara berkelompok yang menuntut kemampuan mahasiswa dalam penggunaan teknologi presentasi serta

kemampuan *public speaking* dalam kelas.

Dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada Prodi PAI UIN Antasari tidak menjelaskan filosofi pendidikan apa yang diadopsi pada Prodi PAI UIN Antasari. Demikian pula dosen mata kuliah Pendidikan dan Strategi Pengajaran pada IAI Darusalam, hanya menyebutkan aspek-aspek teknis, seperti kemampuan penyampaian, penampilan dan tata bahasa, sebagai profil lulusan guru agama yang diidamkan. Saat ditanya mengenai landasan pemikiran tentang pendidikan yang adopsi oleh para dosen atau Prodi PAI di UIN Antasari, narasumber yang mengajar mata kuliah bersangkutan mengatakan,

> "Oh yah,...terus terang saya baru terpikir bahwa kita (para dosen PAI) perlu duduk bersama mendiskusikan hal tersebut." Hal yang kurang lebih senada dinyatakan oleh dosen mata kuliah yang sama di IAI Darusalam, narasumber bersangkutan menyatakan, "Yah pemikiran tentang pendidikan itu beragam, di kelas saya hanya menjelaskan berbagai mazhab dan aliran pendidikan. Tujuannya agar mahasiswa mengetahui."

Ketiadaan pemahaman bersama atas makna atau tujuan fundamental pendidikan di kalangan dosen-dosen PAI di kedua PTKAI mendorong terjadinya perbedaan dalam pendekatan, sikap kepada mahasiswa, dan metode pengajaran yang diterapkan. Lebih jauh, absennya pemahaman bersama akan makna pendidikan ini menciptakan gap antara visi-misi pendidikan yang dicanangkan oleh Prodi PAI dengan praktik pengajaran masing-masing dosen dan kebijakan perguruan tinggi.

Di luar pernyataan normatif tentang makna dan tujuan pendidikan, terdapat narasi lain dari para narasumber dosen dan mahasiswa yang merefleksikan pemahaman bersama mereka tentang pendidikan. Pertama, data ini mencerminkan pada pemahaman bahwa pendidikan adalah pengajaran yang terikat dengan aspek-aspek teknis penyampaian ide dari pelaku pendidikan satu ke subjek pendidikan. Salah satu aspek penting dalam desain pendidikan calon guru adalah gambaran atau konsep guru yang ideal. Gambaran guru ideal adalah kemampuan kelas, mendapat simpati-perhatian, mampu menyampaikan materi dengan baik, penampilan yang baik dan menarik perhatian, kemampuan *public speaking*, penyusunan silabus dan RPS, melakukan evaluasi belajar. Metode mengajar juga diorientasikan untuk kemampuan *public speaking* dan kemampuan menyampaikan dan menyusun bahan ajar.

Gagasan atau *prototype* guru yang ideal ini dinyatakan secara konsisten baik oleh mahasiswa maupun subjek dosen khususnya pengampu maka kuliah Ilmu Pendidikan. Beberapa mahasiswa peserta FGD dari UIN Antasari dan IAI Darusalam menyatakan kriteria guru agama yang ideal dengan aspek-aspek yang kurang lebih sama. Aspek-aspek tersebut meliputi: penampilan, bisa berbahasa Arab, berkomunikasi dengan baik, dapat menghibur mahasiswa dengan humor, dan tidak galak. Seorang dosen senior di IAI Darusalam, misalnya, saat ditanya tentang gambaran ideal tentang guru agama, menjawab, "Guru ideal *yah* yang memiliki penampilan yang baik, menguasai materi, dapat menyampaikan materi dengan baik, dan dapat mengikuti perkembangan situasi

masyarakat." Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa guru-guru agama dipandang terbatas pada aspek-aspek teknis. Seorang mahasiswa UIN Antasari, misalnya, melihat sosok guru ideal ada pada Tuan Guru Sekumpul, seorang ulama yang sangat ditakzimi di Kalsel. Hal ini karena: "Saat Sidin (Guru Sekumpul) berceramah, kesimpulan sudah dapat, tinggal pendalaman saja, walaupun tidak ada sesi tanya jawab. Pendalamannya yang panjang. Ini yang dibutuhkan, tidak perlu metode macam-macam. Disampaikan sistematis, cukup ideal." Pada kesempatan yang berbeda, seorang dosen senior UIN Antasari yang lain menekankan aspek asal pendidikan dan sikap dalam pengajaran. Narasumber bersangkutan menjelaskan:

> "Yang ideal calon guru agama itu orang pondok, 3-6 tahun, terus masuk kuliah. Pertama tertolong bahasa Arab, kemudian adabnya. Kalau mahasiswa sekarang majemuk. Dari MAN sekarang sangat terbatas, beda. Apalagi kalau dari jurusan IPS dan IPA, atau SMA, susah diajari, kurang memperhatikan. Sedangkan sikap keislamannya sangat kurang" (Firman, dosen UIN Antasari).

Kedua, praktik dan motivasi pengajaran serta posisi antara guru dan peserta didik di kedua perguruan tinggi mencerminkan pemahaman pendidikan sebagai mekanisme penjagaan standard moral dan simbol agama. Guru sebagai contoh dan sumber pengetahuan dari ajaran moral tersebut dengan berbagai instrumen dan aspek-aspeknya. Pemahaman ini mendorong praktik pelaksanaan pendidikan sebagai rutinitas dan bagian dari praktik beragama itu sendiri. Dalam konteks ini, praktik pendidikan seperti dijalankan pada Prodi PAI, berlangsung sebagai reproduksi budaya (Torres, 2006). Pemahaman ini sangat tampak pada sikap dan *statemen* mahasiswa. Lebih jauh, terdapat indikasi pemahaman bahwa penanaman dan pembentukan akhlak dan ajaran moral terutama harus dilakukan dengan menanamkan keyakinan yang kuat pada peserta didik akan nilai kebenaran dari ajaran tersebut serta urgensi penerapannya. Ani, seorang mahasiswa PAI semester V, misalnya memandang posisi guru terutama sebagai model penerapan moral operasional. Ani menjelaskan pandangannya tentang guru agama:

> Menurut saya, lebih diutamakan akhlaknya. Guru sebagai panutan. Pandangan guru agama dengan guru biasa bisa beda di masyarakat. Guru agama lebih dilihat akhlaknya, salah sedikit bisa langsung dinilai masyarakat. Kemudian juga secara *gak* langsung memberi pandangan guru agama. Tidak langsung namun memberikan putusan, jelek, baik, secara langsung atau haram hukumnya (Ani, Mahasiswa UIN Antasari).

Sekilas guru adalah pengajar nilai-nilai moral, penjaga standard moral masyarakat, pembentuk institusi nilai pada komunitas. Pendidikan dijalankan sebagai proses yang rutin dan merupakan dari praktis reproduksi budaya dan terutama penjagaan atas symbol-simbol moral dan akhlak. Pendidikan dikaitkan secara mendalam sebagai reproduksi dan penjagaan simbol dan standard moral. Dengan moral dan etika diasosiasikan sebagai simbol-simbol perilaku, cara berbusana, tutur kata dan ketaatan pada perintah Agama. Standard berbusana adalah salah satu simbol yang penting bagi moral agama. Lebih jauh Ani mengatakan:

> Masalah pakaian, saat kita sebagai guru seperti apa. Peserta didik akan meniru. Anak, banyak anak zaman sekarang berani kepada ortu. Kemudian cara berpakaiannya. Seorang perempuan, pakaiannya terbuka, banyak yang kerudungnya lebih panjang, malah tidak didukung dan yang pendek justru didukung (Ani, mahasiswa UIN Antasari).

Pandangan Ani kurang lebih mencerminkan pandangan rekan-rekannya di UIN Antasari. Kadang tata busana ini harus dipraktikkan secara lebih *rigid*, sebagaimana penjelasan Rita berikut:

> Jadi tahu dan lebih banyak tahunya, terutama masalah pakaian. Yang dulu tidak pernah pakai lapisan jilbab, jadi pakai lapisan. Juga peraturannya di Tarbiyah, *kul* nya lebih teratur dibanding *fak* lain. *Fak* lain terlihat santai. Di Tarbiyah terasa sekali *kul*-nya, pakaiannya jua diatur, kalau *fak* lain tidak ada diatur pakaian seperti yang ada di spanduk. Ini sangat mempengaruhi cara berpakaian" (Rita, mahasiswa UIN Antasari).

Di Prodi PAI UIN Antasari, praktik penjagaan moral telah diatur sejak fase mahasiswa khususnya dengan metode pendisiplinan dalam busana. Setiap hari Senin dan Kamis, khusus mahasiswa PAI diharuskan untuk menggunakan seragam atasan putih polos dengan bawahan hitam polos. Sekilas peraturan ini akan tampak sebagai pengekangan bagi sudut pandang dari luar lingkungan PAI. Namun ternyata mahasiswa justru memahami dan merasa bangga mengikuti peraturan ini. Emi, seorang mahasiswa PAI UIN Antasari sangat mendukung praktik pendisiplinan moral ini. Emi mengatakan:

> Justru dengan seragam hitam-putih yang dipakai dari Senin sampai Kamis melambangkan dipandang baik sebagai pendidik, dan calon guru, dari situ orang sudah bisa menilai. Dari diri kita sudah bisa menjaga sikap kita. Kalau kita bersosial, kita bisa lebih menjaga sikap dan omongan kita (Emi, mahasiswa UIN Antasari).

Visi dan Misi Pendidikan yang Terlepas dari Kurikulum

Dalam kaitannya dengan ketiadaan pemahaman tentang makna pendidikan yang konsisten dan diterima bersama oleh para pejabat dan dosen PAI di kedua PTKI subjek penelitian, penelitian ini menemukan adalah bahwa tidak diperoleh gambaran atau narasi yang konsisten mengenai kebijakan atau perencanaan spesifik jangka panjang yang melandasi atau menuntun pelaksanaan Prodi PAI di kedua PTKI lokasi penelitian. Faktor pendorong dan alasan yang tampak paling menonjol dalam penyelenggaraan Prodi PAI adalah tingginya kebutuhan masyarakat Kalsel akan ketersediaan guru-guru agama baik pada tingkat sekolah maupun komunitas. Prodi PAI di kedua PTKI menyatakan rencana jangka panjang lembaga mereka pada visi dan misi prodi. Namun sulit ditemukan koherensi visi misi tersebut pada tingkat sistem pembelajaran, kebijakan organisasi, dan kurikulum.

Visi dan Missi pendidikan baik sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan Universitas maupun fakultas tidak menyediakan sebuah gambaran mengenai model pendidikan yang spesifik selain bahwa sistem ini diharapkan mampu menjaga relevansinya dengan

perkembangan masyarakat yang semakin cepat dalam pelaksanaan pengajaran. Visi dan Misi pendidikan pada Prodi PAI UIN Antasari 2018 dinyatakan sebagai:

Unggul dan kompetitif tingkat nasional pada tahun 2020 dalam melahirkan Sarjana PAI yang profesional, berakhlak mulia, kreatif, dan responsif terhadap berbagai persoalan pendidikan Agama Islam kontemporer.

Misi Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Antasari:

1) Membina mahasiswa agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang profesional, unggul dan kompetitif.
2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang islami melalui pengkajian dan penelitian;
3) Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* dalam bentuk keteladanan dan inovasi di bidang konsep, teori dan aplikasi ilmu pengetahuan serta teknologi kependidikan Islam.
4) Melaksanakan berbagai kerja sama dengan berbagai pihak negeri dan swasta untuk kelancaran pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dan
5) Menerapkan pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan secara modern dan IT.

Sementara visi dan misi dari Prodi PAI pada IAI Darusalam adalah: "Tahun 2022 mencetak guru PAI yang profesional dalam kajian fiqh." Tiga dari enam poin misi Prodi PAI IAI Darusalam adalah:

1) Menyelenggarakan dan meningkatkan suasana akademik secara profesional
2) Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai guru agama yang profesional dan berwawasan pendidikan Islam serta mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional
3) Berperan aktif memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pendidikan Islam, baik melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Lebih detail daripada Prodi PAI di UIN Antasari, Prodi PAI di IAI Darusalam juga merumuskan tujuan prodi mereka dalam konteks menyerupai misi jangka pendek.

Tujuan Program studi PAI di IAI Darusalam yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1) Terlaksananya kegiatan akademik yang lebih baik dan professional berdasarkan nilai-nilai Agama Islam.

2) Terbentuknya sumber daya manusia (dosen, mahasiswa/alumni, dan staff) yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam/faham *Ahlussunnah wal jamaah an Nahdliyah.*

3) Menghasilkan lulusan/guru agama Islam yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang pendidikan, terutama ilmu pendidikan Islam.

4) Menghasilkan lulusan lulusan/guru agama Islam yang profesional, berwawasan pendidikan Islam, dan berakhlak mulia berdasarkan paham *Ahlussunnah wal jamaah an Nadliyah.*

Dokumen tertulis mengenai visi dan misi masing-masing Prodi PAI tersebut belum terwujud secara signifikan dan konsisten pada kebijakan dan praktik pendidikan di kedua kampus. Bahkan dari tujuh dosen yang tiga di antaranya adalah pejabat struktural pada UIN Antasari dan Fakultas Tarbiyah UIN Antasari, tidak satupun informan yang merasa secara yakin dapat menjelaskan makna Visi dan Misi tersebut apabila diturunkan dalam sistem pendidikan calon guru agama. Demikian juga pada IAI Darusalam, sejumlah narasumber mengakui bahwa ciri ke *nahdiyin*-an ini sejauh penelitian dilakukan belum sepenuhnya dirumuskan ke dalam format dan desain pendidikan pada Prodi PAI. Hal ini menunjukkan bahwa praktik belajar mengajar di kedua Prodi PAI tidak dibangun di atas konsep yang koheren dengan arah yang dibayangkan akan dituju, selain bahwa praktik tersebut dilangsungkan sebagai rutinitas untuk memproduk guru-guru agama.

Latif, salah seorang pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari menjelaskan bahwa terdapat keinginan di kalangan pejabat universitas untuk menciptakan ciri khusus bidang keahlian dengan mencontoh apa yang telah berhasil dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat dengan konsep membangun peradaban sungai. Namun, mereka bermaksud untuk mempertahankan ciri "ke-UIN-annya". Namun perspektif ini masih jauh dari kejelasan dalam perencanaan program universitas. Tentang ketidakjelasan konsep visi misi ini Latif menjelaskan:

> Kalau kita (Prodi PAI) acuannya hanya visi dan misi universitas, mengatakan unggul dan berakhlak. *Tapi* rumusan unggul dan berakhlak-nya seperti apa? Unggul pengertiannya seperti apa? Apakah mampu bersaing lebih tinggi di banding UIN yang lain? Kalau sistem dan cara ketika menjelaskan unggul dan berakhlak yang dimaui dari mahasiswa seperti apa? Kita ingin berbeda dengan Universitas Lambung Mangkurat *tapi* kita tidak bisa lepas dari UINnya. Standar keilmuannya sama dengan ULM dan keagamaanya sama dengan UIN.

Latif lebih jauh menginformasikan bahwa desain Prodi PAI harus menunggu rumusan dari rektorat berkenaan dengan visi dan misi tersebut di tingkat fakultas dan

prodi. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, belum ada tafsir yang tegas tentang visi dan misi ini. Pihak rektorat UIN Antasari menyebut rumusan visi misi tersebut harus berbasis lokal dan berwawasan global. Gagasan keunggulannya sendiri belum dijelaskan. Menurut Latif,

> Sebenarnya ada tiga hal yang ada dalam Tri Dharma PT, meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Lalu apa yang mau diunggulkan, yang menjadi pegangan? Kalau rektorat rumusannya belum kelihatan. Memang selalu dimunculkan berbasis lokal berwawasan global. Tetapi tidak hanya itu, juga ada kebangsaan dan keislaman.

Penjelasan Latif di atas merefleksikan tengah beredarnya berbagai bagian rumusan, keinginan dan harapan tentang arah pendidikan PAI. Namun aspek-aspek tersebut belum menemukan formulasi yang koheren satu sama lainnya serta dapat dilaksanakan pada tingkat kurikulum.

Sementara itu, visi IAI Darusalam menunjukkan arah pendidikan untuk menghasilkan lulusan dengan spesialisasi ke ahli fikih. Namun visi tersebut belum tercermin pada komposisi mata kuliah program PAI mereka. Karena mata kuliah *Fiqh* hanya diajarkan sebanyak 4 SKS saja dari total 144 SKS. Sementara Prodi PAI di UIN Antasari menetapkan spesialisasi pada semester lima dengan empat pilihan konsentrasi, yaitu: akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan SKI. Namun pada semester V, masing-masing mata kuliah yang mengajarkan spesialisasi ini hanya disediakan maksimal 4 SKS di masing-masing spesialisasi.

Apabila pada tingkat formulasi visi dan misi PAI terdapat derajat ketidakjelasan yang signifikan, pada rumusan profil lulusan dan kurikulum Prodi PAI UIN Antasari terbaca tendensi pada pembentukan dimensi pedagogis, jauh lebih kuat daripada penguasaan keilmuan keagamaan. Petunjuk paling nyata tentang tendensi ini ada pada dokumen *Draft Format KKNI Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan* UIN Antasari yang dilaporkan ke Rektor UIN Antasari pada April 2018. Draft tersebut adalah dokumen yang sangat penting dan berisi rumusan visi, misi, tujuan, profil lulusan, serta kurikulum Prodi PAI tahun 2018. Dalam bagian tentang "Profil Lulusan Prodi PAI", terdapat enam poin "Kompetensi Utama" lulusan program. Poin pertama hingga ketiga menyatakan kompetensi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, sedangkan poin keempat tentang perilaku dan akhlak. Poin kompetensi berkaitan dengan penguasaan ilmu keislaman ada pada urutan kelima. Proporsi dan komposisi poin-poin kompetensi ini mendemonstrasikan bahwa Prodi PAI UIN Antasari sesungguhnya terutama bertujuan untuk mencetak lulusan yang terampil dalam hal pembelajaran, bukan untuk menguasai ilmu keagamaan.[1] Dalam rumusan "Capaian Pembelajaran

[1] Poin-poin kompetensi utama lulusan Prodi PAI UIN Antasari dalam draft KKNI UIN Antasari tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memahami secara komprehensif wawasan pendidikan dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam
2) Memiliki keterampilan dalam mengembangkan kurikulum PAI
3) Memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Bidang Pengetahuan Khusus", tidak disebut satu pun komponen tentang pemahaman ilmu-ilmu keislaman di antara daftar panjang komponen pengetahuan pendidikan dan pengajaran. Pada titik ini, aspek "agama Islam" dalam rumusan desain Prodi PAI UIN Antasari hampir hilang, menjadi sepenuhnya prodi "pendidikan" saja.

Tendensi yang kuat ke arah pedagogis ini semakin tampak pada desain kurikulum yang berlaku dan akan diberlakukan di Prodi PAI di kedua PTKI. Porsi terbesar mata kuliah yang diajarkan di Prodi PAI di kedua PTKI adalah mata kuliah yang memberi tekanan pada keterampilan pedagogis dan pengetahuan penunjang. Mata kuliah profesional yang menyediakan penguasaan pada ilmu keislaman mendapat porsi rendah antara 35% (di UIN Antasari) dan 20% (di IAI Darusalam). Di UIN Antasari dari total 144 SKS beban mata kuliah yang harus ditempuh untuk kelulusan mahasiswa PAI, hanya 51 SKS (UIN Antasari) saja yang dialokasikan untuk mata kuliah professional atau KeIslaman. Sedangkan untuk kategori mata kuliah yang sama hanya teralokasi 28 SKS di IAI Darusalam. Komposisi kurikulum seperti merefleksikan bahwa sejak pada tahap desain prodi, penguasaan ilmu-ilmu keIslaman bukanlah tujuan utama dari pencapaian Prodi PAI baik di UIN Antasari maupun IAI Darusalam.

Tantangan Manajerial dan Keterbatasan Sumber Daya dalam Mewujudkan Kompetensi Calon Guru Agama

Selain aspek yang bersifat konseptual dan normatif, sejumlah kelemahan sistem produksi guru agama Islam di Kalimantan Selatan ada pada aspek-aspek organisasi, manajemen dan praktik pendidikan yang berlangsung. Bagian ini akan mendiskusikan titik-titik lemah ini secara lebih detail.

Pejabat yang Kurang Pengalaman dengan Segunung Tugas Teknis

Pada saat penelitian ini dilakukan, Fakutas Tarbiyah di kedua PTKI masing-masing dipimpin oleh seorang Dekan perempuan. Kedua Dekan ini relatif baru terpilih dengan latar belakang pengalaman kepemimpinan yang cukup berbeda, salah seorang Dekan memiliki pengalaman langsung yang panjang dalam mengelola Prodi PAI yang dia pimpin, sementara Dekan yang lain dipilih dengan pengalaman organisasi yang sangat terbatas. Pada tingkat manajemen dan kepemimpinan lembaga, sejumlah pejabat, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi, ternyata tidak selalu dipilih berdasar

4) Memilki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
5) Memiliki kemampuan penguasaan materi agama Islam secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional.
6) Memiliki kemampuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik.

kesesuaian latar belakang studi dan keahlian mereka dengan tanggung jawab sebagai pejabat terkait.

Sejumlah seorang narasumber menyebutkan betapa latar belakang studinya sama sekali tidak berkaitan dengan posisinya di bidang pendidikan. Hal tersebut misalnya terjadi pada Latif, salah seorang pejabat di tingkat fakultas di UIN Antasari, yang menjelaskan, "Malahan studi saya dari S1 hingga S3 tidak pernah ada hubungannya dengan akademik kelembagaan, kurikulum, dan tarbiyah. Semua tidak ada hubungannya dengan tarbiyah. Saya justru belajarnya setelah di sini saat sudah menjabat." Hal yang kurang lebih sama terjadi pada posisi jabatan yang sama di IAI Darusalam. Sofyan, narasumber pejabat pada posisi tersebut fakultas menjelaskan posisinya, "Saya tidak tahu sama sekali tentang pendidikan dan Fakultas Tarbiyah. Tapi mungkin karena lama jadi pejabat saya ditaruh saja jadi wakil dekan di sini." Sofyan memiliki pengalaman yang panjang dalam kepemimpinan dan termasuk figur senior di departemen pemerintahan terkait dengan pengelolaan PAI di Kota Martapura. Sementara, pejabat Prodi PAI di IAI Darusalam, adalah figur yang lebih muda dengan situasi yang sama dengan jabatannya. Rofiah, narasumber pejabat bersangkutan mengatakan, "Saya itu tidak tahu sama sekali tentang organisasi PAI di Darusalam dan saya sebenarnya tidak berminat jadi pejabat."

Semua narasumber pejabat yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengaku bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan, minat, terlebih ambisi untuk menduduki jabatan yang sekarang mereka duduki di PTKI masing-masing. Mereka dipilih karena fakultas sangat membutuhkan tenaga mereka. Salah seorang pejabat bahkan dalam proses mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan konflik kepentingan antara studi yang sedang ia jalankan dan tanggung jawab kelembagaan. Beberapa pejabat adalah pelaku yang sama sekali baru di dunia organisasi pendidikan, meski telah lama menjadi dosen. Dalam situasi demikian, Latif menjelaskan bahwa institusi dapat menjalankan roda organisasi karena pratik kepemimpinan kolektif yang membantu pejabat terkait menjalankan tugasnya. Narasumber bersangkutan menjelaskan:

> Kepemimpinan tidak jalan sendiri. Saya biasanya, kalau tidak tahu saya tanya langsung ke Ketua Prodi yang senior. Kalau tidak yakin saya baca lagi. Saya lebih banyak tanya kepada mereka yang FTK yang mengelola. FTK penuh padat, kita ada 12 prodi, kalau masing-masing prodi 1 kegiatan dan rata-rata akademik. Seminar macam-macam. Sebelum mereka seminar saya nanya dulu. Mereka bicara apa. Sebenarnya kalau dari segi kesulitan ada aja, tapi karena saya sudah terbiasa di organisasi, jadi bisa diselesaikan." (Latif, pejabat FTK UIN Antasari)

Terdapat indikasi bahwa praktik kepemimpinan yang sama juga terjadi di IAI Darusalam. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan pada lembaga pendidikan tinggi ini tidak dapat berjalan secara efektif terutama akibat beban kerja administratif dan birokratis yang menumpuk. Kesibukan-kesibukan teknis dan administratif terbukti sangat menyita waktu dan energi pimpinan fakultas dan prodi. Semua pejabat yang diwawancarai dalam penelitian ini mengeluhkan beban kerja administratif yang

menggunung. Latif, narasumber pajabat fakultas tarbiyah di UIN Antasari mengeluh dengan santai tentang hari-harinya sebagai pejabat.

> Saya di kantor ini hampir sampai malam dan kadang-kadang terpaksa kita bawa tugas ke rumah. Saya berusaha tidak bawa kerjaan dirumah, kalau bisa saya selesaikan di kantor. Saya kalau kecapean tidak bisa lagi merubah kurikulum yang ada. Harus malam-malam, kalau lewat sudah hilang waktunya. Prodi-prodi yang laporan, malam di proses. Kecuali ini (Ijazah yang minta dilegalisir) mau cepat pak, orangnya nunggu, langsung ditanda tangani. Biasanya datang ke rumah dengan 1 tas berisi dokumen. Semua malam dikerjakan (Latif, pejabat FTK UIN Antasari).

Saat *fieldwork* ini dilakukan di kedua PTKI, kedua prodi dan FTK sedang mempersiapkan akreditasi untuk masing-masing lembaga pendidikan dengan target minimal B. Persiapan akreditasi ini tampak memberikan beban kerja yang berlipat-lipat yang harus mereka lakukan dengan ekstra waktu dan tenaga, terutama untuk pejabat dengan pengalaman yang terbatas di organisasi pendidikan tinggi. Azwardi, seorang pejabat prodi mengeluhkan, "Persiapan akreditasi ini benar-benar menyedot semua perhatian dan waktu kita. Sudah tidak ada lagi waktu untuk evaluasi dan memikirkan peningkatan bahan ajar."

Tugas-tugas administratif ini membuat pejabat bersangkutan tidak memiliki waktu lagi untuk melakukan riset dan penerbitan karya ilmiah. Latif, narasumber pejabat FTK UIN Antasari menjelaskan keadaannya:

> "Khusus jadi Wakil Dekan full (tidak ada waktu), dulu waktu di Ma'had saya masih sempat nulis, penelitian. Satu semester satu artikel. Sekarang saya sudah nggak tahan lagi". Azwardi, narasumber pejabat di Prodi PAI UIN Antasari menyampaikan hal yang sama. Ia mengeluhkan, "Terus terang saya juga heran, tugas saya sebagai pimpinan prodi ini hanya sifatnya administratif. Tidak ada yang strategis. Lihat semua tumpukan dokumen ini. Kapan saya bisa mikir program untuk perbaikan prodi ini?"

Observasi yang dilakukan di kantor Prodi PAI UIN Antasari memperlihatkan kantor ini relatif sempit dan sederhana meskipun tertata rapi. Sementara meja kerja Azwardi sendiri penuh dengan tumpukan dokumen sedemian hingga peneliti kesulitan mencari ruang gerak selama observasi dan Azwardi harus menggunakan meja lain untuk bekerja dengan laptopnya. Para pejabat juga mengeluhkan bahwa tidak pernah ada program penguatan kapasitas pejabat dan pimpinan baik di tingkat fakultas maupun prodi. Kekurangan ini sepenuhnya di sadari oleh kedua institusi pendidikan. Namun keterbatasan-keterbatasan elementer seperti pendanaan dan beban kerja yang banyak membuat upaya pencarian solusi seperti tidak pernah berlangsung sungguh-sungguh.

Tantangan Kualitas dan Kompetensi Dosen PAI

Kecuali dua dosen dari IAI Darusalam, semua narasumber dosen yang diwawancarai dalam penelitian ini telah mengajar setidaknya sepuluh tahun di institusi mengajar mereka. Selain mengajar di PTKI induk mereka, adalah hal yang umum terjadi bila

seorang dosen juga memiliki kelas untuk di ajar dengan proporsi yang tidak jauh berbeda. Beberapa dosen tetap di IAI Darusalam misalnya, juga adalah dosen di UIN Antasari.

Jika dibandingkan berdasarkan jenjang kualifikasinya, profile dosen PAI di IAI Darusalam sangat terbatas kompetensinya dibandingkan dengan dosen-dosen PAI di UIN Antasari. Dari 36 dosen PAI di IAI Darusalam yang tercatat dalam jadwal mengajar Semester Ganjil Tahun akademik 2018/2019, hanya dua dosen yang berkualifikasi S3 dan satu telah bergelar guru besar. Sebagian besar (17 orang) dosen dengan gelar M.Pd, sisanya M.Ag, M.Hi. dan M.Si. Sementara terdapat delapan dosen PAI dengan kualifikasi doktor di UIN Antasari, dari 94 nama dosen yang tercatat pada periode kalender akademik yang sama. Ada dua guru besar yang mengajar di Prodi PAI UIN Antasari. Melihat dari proporsi jenjang pendidikan dosen antara mereka yang bergelar doktor dan master, kualifikasi dosen PAI di kedua PTKI masih jauh dari mencukupi. Saat penelitian lapangan dilakukan di kedua PTKI, sejumlah dosen bergelar master sedang menempuh studi doktoral.

Semua dosen yang diwawancarai memegang mata kuliah sesuai dengan bidang minat dan keahlian mereka. Hal tersebut terkecuali untuk dua dosen yang kadang-kadang harus memegang mata kuliah diluar bidang mereka. Beban mengajar tiap dosen untuk setiap PTKI di Prodi PAI berkisar antara 4 SKS hingga 6 SKS. Beban ini tidak termasuk beban mengajar di fakultas lain dalam satu PTKI, atau PTKI lainnya. Hanya terdapat empat dosen yang secara meyakinkan menyatakan bahwa mereka juga melakukan penelitian dan publikasi. Pada umumnya para dosen mengeluhkan rendahnya support untuk melakukan penelitian dan publikasi, selain beban kerja mengajar dan aktivitas lainnya termasuk pengabdian pada masyarakat.

Dalam survei, hampir seluruh dosen PAI melaporkan bahwa mereka menerapkan pendekatan kritis dalam pengajaran mereka dengan menggali persoalan yang dihadapi sekaligus menyajikan alternatif solusi. Keterbukaan pemikiran terhadap referensi luar tampaknya juga ditekankan oleh para dosen, dimana mayoritas respondem menyatakan mendorong siswanya untuk memperluas akses wacana. Semangat keterbukaan akan sumber pengetahuan diperkuat dengan temuan bahwa sebagian besar dosen melakukan pembaharuan materi dan juga referensi-referensi lain yang digunakan untuk proses belajar-mengajar. Hampir keseluruhan dosen juga tidak menempatkan ustad atau ulama sebagai rujukan utama dalam urusan agama. Para dosen ini, sebagian besar juga menyatakan bahwa mereka juga menyinggung persoalan agama terbaru di ruang kelas (90%), dimana toleransi dan bahaya esktrimisme termasuk di dalamnya (60%).

Para dosen PAI yang diwawancarai merasakan kebutuhan yang tinggi akan peningkatan kapasitas mereka sebagai pengajar. Inisiatif dan alokasi program refresmen keilmuan dan penguatan kapasistas dosen ini dirasakan sangat kurang dan menjadi kebutuhan yang cukup mendesak bagi dosen-dosen PAI.

Terbatasnya sarana prasarana baik dalam jumlah maupun kualitas, perubahan kelas dan jadwal kuliah, keterbatasan sumber bacaan, serta tidak adanya program

pengembangan *skill* adalah hal-hal yang sangat mewarnai pelaksanaan proses belajar di kedua PTKI. Di IAI Darusalam misalnya, beberapa kelas mahasiswa harus membeli alat pengeras suara secara bersama untuk kelas mereka sendiri. Di UIN Antasari, ruang kelas PAI dalam kondisi yang kusam, mudah terpapar kebisingan dari luar kelas, dan sarana penyegar udara dan temperatur yang tidak memadai. Seorang narasumber dosen mengeluh harus membawa alat pengeras suaranya sendiri karena prodi tidak menyediakan di kelas.

Berdasar hasil observasi, wawancara dan FGD dengan mahasiswa, peneliti mendapat kesan yang kuat bahwa proses kegiatan belajar mengajar di Prodi PAI di kedua PTKI berlangsung sebagai rutinitas karena merupakan bagian utama dalam reproduksi budaya mengaji agama yang sangat kuat. Meski demikian strategi pendidikan partisipatif dengan melibatkan kontribusi peserta terutama dengan metode presentasi dan diskusi dapat diduga telah menjadi praktik yang banyak dilakukan. Pada enam kelas yang diobservasi, hanya satu kelas yang tidak menerapkan bentuk presentasi dan diskusi dari mahasiswa untuk mahasiswa ini. Metode mendapat respon yang baik dari mahasiswa serta memberikan nuansa yang aktif dalam kelas.

Dalam survei, hampir semua (94%) mahasiswa setuju bahwa dosen-dosen mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan keagamaan mereka. Proporsi mahasiswa yang hampir sama (96%) juga percaya bahwa dosen mereka memiliki pengatahuan agama yang komprehensif. Secara keseluruhan mahasiswa percaya bahwa dosen mereka sangat kompeten di bidang mereka.

Kendati demikian, menurut survei mahasiswa juga, skala pembelajaran kritis di kelas cenderung rendah dan sangat rendah. Pada praktiknya terdapat beberapa keluhan dari mahasiswa tentang pengalaman belajar mereka di Prodi PAI. Rahman, mahasiswa PAI UIN Antasari, misalnya mengeluhkan beberapa dosen yang sangat sibuk dan jarang muncul di kelas. Rahman menceritakan:

> Kadang banyak terdapat dosen yang karakteristik tidak disenangi. Dosen ini banyak kesibukan, sering tidak bisa masuk, dan dihubungi tidak bisa. Banyak tidak masuk, lalu ujian mid dan final jadi satu. Presentasi semua kelompok maju dalam satu hari (Rahman, mahasiswa PAI Antasari).

Keluhan yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Emi, mahasiswa UIN Antasari:

> Kalau susahnya. Dosen tidak masuk, mengganti ke hari yang lain. Kadang mahasiswa nya di hari lain sudah ada agenda juga, ada yang berorganisasi, mengerjakan tugas dari dosen lain. Jadi kadang full, kalau dosen yang tidak hadir itu terlalu sering (Emi, mahasiswa PAI UIN Antasari).

Ada dosen PAI yang suka mengganti kelasnya karena kepentingan yang lain dan meminta mahasiswa untuk mengusahakan kelas pengganti. Ada juga dosen PAI yang gemar menumpuk-numpuk tugas untuk mahasiswa dan menyulitkan mereka. Ini adalah

pengalaman Tari mahasiswa UIN Antasari. Sebagaimana Tari berkeluh kesah, "Kalau ada kelas pengganti, jarang dosennya mencari kelasnya sendiri dan biasanya mahasiswa yang diminta untuk mencari kelasnya. Kemudian numpuk tugasnya sampai final. Tugasnya banyak. Ini menyulitkan kami." Mahasiswa juga merasa pernah mendapat tugas yang sangat sulit dan merasa mendapat nilai dengan kriteria penilaian yang tidak mereka pahami. Hal ini disampaikan oleh Iwan dari UIN Antasari, "Ada dosen yang memberi tugas diluar kemampuan kita dan seenaknya memberi nilai. Ini yang mungkin terlalu jenuh ketemu dosen seperti itu." Di IAI Darusalam, sejumlah mahasiswa semester tujuh mengeluh sulit menemui dosen untuk meminta bimbingan tugas akhir, karena dosen IAI Darusalam biasanya hanya hadir di kampus saat jam mengajar. Praktik kelas kosong tanpa pemberitahuan atau kelas berganti jadwal dan lokasi secara mendadak juga kerap terjadi berdasarkan hasil observasi dan pengakuan mahasiswa. Beberapa mahasiswa IAI Darusalam lebih jauh mengeluhkan dosen-dosen yang mengajar secara monoton dan membuat mereka kehilangan semangat belajar.

Dalam hal kepemimpinan, pengorganisasian dan praktik pengelolaan Prodi PAI, IAI Darusalam sebagai institusi swasta memperlihatkan derajat kompleksitas persoalan yang lebih buruk dibandingkan UIN Antasari. Kendati baru berjalan setahun IAI Darusalam meningkatkan statusnya sebagai 'institut', sehingga terdapat berbagai kekurangan kelengkapan dan mekanisme kelembagaan, perguruan tinggi ini telah dikelola selama lebih dari dua puluh tahun dengan Prodi PAI di sana. Sebagai sebuah sistem produksi calon guru agama, Prodi PAI pada IAI Darusalam, saat penelitian ini dilakukan, adalah lembaga yang jauh lebih lemah dibandingkan Prodi PAI UIN Antasari.

Pada kedua perguruan tinggi, kemampuan bahasa Arab mahasiswa dirasakan sangat kurang baik oleh mahasiswa maupun oleh dosen dan pejabat struktural. Di Prodi PAI di kedua PTKI, mata kuliah Bahasa Arab hanya dialokasikan 2 SKS, komposisi yang dirasakan jauh dari cukup oleh dosen pengampu dan mahasiswanya. Hal ini terutama menjadi keluhan di UIN Antasari karena porsi mahasiswa yang berlatar belakang pesantren yang lebih kecil dibandingkan IAI Darusalam. Di UIN Antasari, program standarisasi kemampuan bahasa Arab untuk mahasiswa dilakukan melalui *diklat* bahasa selama enam bulan. Namun dikarenakan jumlah mahasiswa yang semakin banyak, rentang waktu pelatihan tersebut semakin pendek. Namun pada kasus IAI Darusalam, sebagian besar mahasiswa memperoleh kemampuan keilmuan agama mereka dari kegiatan belajar pada berbagai pesantren yang menjadi praktik umum di Martapura. Hasil *assesment* kemampuan bahasa Arab untuk mahasiswa menunjukkan kemampuan mahasiswa PAI IAI Darusalam jauh lebih memadai dari pada mahasiswa PAI di UIN Antasari.

Salah satu temuan pokok dalam penelitian ini adalah baik mahasiswa PAI maupun dosen PAI merasa bahwa pengetahuan keislaman yang mereka peroleh dari bangku kuliah tidak cukup membekali peran mahasiswa nanti sebagai guru agama. Dalam sesi FGD di kedua PTKI, mahasiswa sangat menyadari keterbatasan ilmu keagamaan yang

mereka peroleh, betapapun capaian tersebut bagi mereka sangat signifikan. Sejumlah dosen dan pejabat FTK juga menyadari hal yang sama dan memikirkan cara-cara di luar perkuliahan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Para mahasiswa PAI di IAI Darusalam sangat terbantu dengan aktivitas mereka belajar di pesantren di luar jam kuliah untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka.

Praktik belajar di PTKI dan pesantren pada saat yang bersamaan ini menjadi *trend* yang dipraktikkan oleh hampir setiap mahasiswa. Meski dirasakan sangat membantu dalam peningkatan pengetahuan agama, praktik ini membuat waktu dan kesempatan mahasiswa untuk melakukan kegiatan lain di luar perkuliahan nyaris tidak ada. Sementara beban belajar dan tugas dari kedua aktivitas belajar, PTKI dan pesantren, kadang datang secara bersamaan dan tidak bisa terhindarkan. Kultur belajar dan metode pengajaran kedua institusi pengajaran agama tersebut ternyata juga tidak selalu saling mendukung. Hal ini dirasakan menciptakan tantangan tersendiri bagi proses pembelajaran di IAI Darusalam.

Sikap dan Kesadaran Keberagamaan Lokal Tradisional

Atmosfer dan Etos Religius Lokal yang Menjaga dari Radikalisme

Pandangan, sikap dan praktis keberagamaan masyarakat Muslim di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh budaya dan atmosfer religius yang sangat kuat di Kalimantan Selatan. Atmosfer religius ini bersumber dari pesantren-pesantren yang berjumlah ratusan dan tersebar terutama di sejumlah wilayah penyebaran Islam di Kalsel seperti Balimau, Martapura, Amuntai, Negara, Barabai, Alabio dan Banjarmasin. Beberapa pesantren ini telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda dan memiliki jaringan yang mapan di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Pesantren-pesantren ini dipimpin oleh generasi-generasi ulama yang sangat dihormati dan menjadi rujukan bagi ajaran dan praktik keberagamaan di Kalimantan Selatan. Salah satu ulama lokal yang memiliki pengaruh sangat kuat bagi religiositas masyarakat Muslim Kalsel adalah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau lebih terkenal dengan sebutan Tuan Guru Sekumpul (w. 2006). Tokoh ini, kendati telah wafat, adalah figur ulama paling favorit (60%) di kalangan responden mahasiswa di UIN Antasari dan IAI Darusalam lebih dari Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Quraish Shihab. Saat penelitian ini dilakukan, di Kalimantan Selatan terdapat tiga tokoh religius penting yang dapat dikatakan paling berpengaruh bagi masyarakat Kalsel. Mereka adalah Tuan Guru H. Akhmad Zuhdiannoor di Banjarmasin, Tuan Guru H. Muhammad Bakhiet di Barabai, dan Tuan Guru H. Asmuni atau Tuan Guru Danau di Amuntai.

Di Banjarmasin dan Martapura, Tuan Guru Zuhdiannoor memberikan pengajian setiap minggu yang dihadiri oleh ribuan jamaah pembelajar baik dari Banjarmasin maupun kota-kota lain di sekitarnya. Kegiatan pengajian mingguan lainnya dengan skala sedikit

lebih kecil dilaksanakan oleh para tuan guru lainnya. Pengajian-pengajian ini berbasis pada teks klasik kitab kuning dengan masing-masing guru memiliki spesialisasi. Salah satu tema besar yang memayungi berbagai materi pengajian rutin ini adalah sufisme dan penerapannya dalam perilaku praktis sehari-hari. Selain ilmu agama, berdekatan secara fisik dengan para tuan guru pada kegiatan pengajian seperti itu dipercaya membawa berkah yang seringkali diterima sebagai keutamaan melebihi ilmu itu sendiri. Terutama di Kota Martapura, dosen dan khususnya mahasiswa PTKI adalah bagian dari pelaku kegiatan pengajian ini dalam posisi mereka sebagai jamaah pembelajar maupun sebagai guru agama itu sendiri.

Sifat ajaran mereka yang non-politis, berpusat pada aplikasi ritual (individual atau jamaah) yang *rigid*, melibatkan perjumpaan fisik, serta memiliki akar panjang pada budaya Banjar (Daud, 1997) menyediakan alam religius tersendiri yang dapat menjadi pembendung narasi intoleran dan radikal. Situasi ini dicerminkan oleh pernyataan sejumlah narasumber dosen dan mahasiswa, salah satunya sebagai berikut oleh Anwar, dosen senior dan pejabat tingkat fakultas di IAI Darusalam.

> Tentang paham radikal di IAI Darussalam Martapura 100% tidak ada, tetapi pernah ada gejala, aktivis HTI juga pernah masuk Ke IAI Darusalam Martapura. Alhamdulillah tidak berkembang karena berkat guru-guru dan para ustadz yang juga memberikan bimbingan-bimbingan di beberapa pengajian-pengajian ataupun lembaga formal lainnya (Anwar).

Pernyataan yang kurang lebih sama oleh Ridwan, dosen IAI Darusalam, tentang pentingnya ajaran Islam lokal oleh para ulama setempat dalam pencegahan radikalisme.

> Di dalam lingkungan IAI Darusalam tentang masalah intoleran dalam Islam masih ada sebagian mahasiswi yang memakai cadar, akan tetapi mereka yang meyakini dengan kearifannya dan tetap mengambil sumber kepada kiai atau ulama-ulama di sini (Kalsel) (Ridwan).

Selama lebih dari tiga puluh tahun IAI Darusalam berdiri, hanya sejak tahun 2017-2018 IAI Darusalam memiliki mahasiswa bercadar dengan jumlah yang dapat dihitung dengan jari dengan *tren* yang mengecil. Dapat disangsikan bahwa cadar adalah gejala radikalisme. Namun, ide dari pernyataan Ridwan di atas adalah bahwa ulama dan guru-guru agama di Kalimantan Selatan menyediakan pandangan keislaman secara tersendiri yang mengandung kearifan religius berdasar budaya lokal yang dapat menyaring unsur-unsur religius dari luar Kalimantan Selatan.

Kepercayaan Diri terhadap Islam Banjar Mengecilkan Rasa Urgensi atas Isu Intoleransi dan Radikalisme

Atmosfer dan etos religius yang kuat di Kalimantan Selatan ini menimbulkan kepercayaan diri akan sumber daya religius dan kultural masyarakat Muslim Kalimantan Selatan. Namun rasa kepercayaan diri tersebut dapat menciptakan sikap pengabaian

atau rendahnya rasa urgensi atas persoalan politik keagamaan yang tengah bereskalasi dengan cepat.

Dalam survei, sebagian besar (60%) responden dosen PAI menyatakan bahwa mereka juga menyinggung toleransi dan bahaya esktremisme di ruang kelas yang mereka ajar. Kendati demikian, baik dalam interview maupun FGD, penelitian ini mendapati bahwa merebaknya pandangan dan sikap intoleran dan kecenderungan radikalisme di kalangan masyarakat Muslim bukan merupakan persoalan yang mendapat perhatian serius oleh pejabat kampus, dosen-dosen dan mahasiswa PAI. Hanya ada empat dari total empat belas narasumber dosen yang menyatakan pengakuan akan pentingnya memberi perhatian pada isu-isu seputar intoleransi dan radikalisme pada konteks pengajaran. Empat dari narasumber tersebut adalah pejabat fakultas, sementara tiga narasumber lainnya adalah dosen. Penelitian ini lebih jauh menemukan bahwa inisiatif untuk melibatkan isu-isu tersebut secara khusus ke dalam materi pengajaran, kurikulum pendidikan dan praktik belajar mengajar sangatlah rendah. Hal tersebut diakui oleh Latif, pejabat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari, dengan menjelaskan, "Menurut saya isu radikalisme itu harus mendapat perhatian serius di sini (Prodi PAI). … Namun harus diakui kita memang belum memiliki perhatian dan program khusus untuk menghadapi masalah tersebut."

Salah satu alasannya adalah kepercayaan diri bahwa Kalimantan Selatan masih merupakan wilayah yang aman dan terjauh dari isu intoleransi dan radikalisme. Pernyataan berikut oleh Azwardi, seorang dosen sekaligus pejabat PAI UIN Antasari, mencerminkan rasa percaya diri yang juga mengandung rasa urgensi yang rendah, "Masalah seperti itu (intoleransi dan radikalisme) hanya ada di Jawa. Di Kalsel ini masih aman dan kita menjaga betul kehidupan perdamaian di sini. Di sini masalah tersebut tidak ada yang seperti itu. Masyarakat Islam di sini saling menghargai". Kepercayaan diri serupa dinyatakan oleh Chairul seorang dosen PAI IAI Darusalam. Narasumber bersangkutan meyakinkan hal ini dengan mengatakan:

> Di Martapura sendiri pun masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan *alhamdulillah* di Martapura kasus seperti itu memang jarang terjadi rusuh atau tawuran dan yang lainnya. Jadi dapat dikategorikan di Martapura khususnya masih aman untuk hal-hal semacam itu (intoleransi dan radikalisme) (Chairul).

Rendahnya rasa urgensi atas eskalasi isu intoleransi dan radikalisme di Indonesia juga muncul dari rasa kepercayaan diri pada kemampuan kurikulum PAI yang tengah dijalankan dalam membangun kesadaran kebangsaan. Mata kuliah Pancasila, misalnya, yang diajarkan sebagaimana adanya di Prodi PAI diyakini dapat menangkal isu intoleransi dan radikalisme. Keyakinan ini selain dinyatakan oleh dosen senior mata kuliah bersangkutan, juga oleh Riana, dosen senior mata kuliah pendukung, sebagai berikut:

> Guru atau dosen juga harus peka dengan perkembangan intoleransi, radikalisme. Kalau di pondok pesantren mungkin tidak diberi pelajaran tentang Pancasila akan tetapi kalau

> sudah kuliah ini insya Allah akan diberikan pelajaran atau pemahaman tentang pancasila, yang mana artinya mereka sudah ada *basic* untuk menangkal paham-paham (radikal) ini. Apalagi ditambah dengan paham-paham agama Islam (di Kalsel). Dan demonstrasi di martapura ini juga kurang karena martapura juga termasuk kota religius, dan (bagi masyarakat Muslim di Kalsel) tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila. Dan HTI itu dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila (Riana, Dosen IAI Darusalam).

Dalam salah satu sesi interview, Sofyan, dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila di Prodi PAI dan pejabat tingkat fakultas terkait, meyakinkan peneliti dengan menegaskan, "Saya selalu menekankan pada mahasiswa bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Kalau Anda melaksanakan Pancasila berarti Anda menjalankan Islam juga."

Kepercayaan atas kesolidan Islam di Kalimantan Selatan dan rendahnya perhatian pada isu intoleransi dan radikalisme yang kurang lebih sama ditunjukkan oleh para responden mahasiswa dalam sesi FGD di kedua PTKI. Namun sejumlah narasumber mahasiswa menunjukkan rasa urgensi yang lebih besar atas isu tersebut. Dalam kedua sesi FGD, dibutuhkan beberapa pertanyaan pengantar untuk menggali pandangan mahasiswa PAI akan urgensi masalah intoleransi dan radikalisme. Secara garis besar, mahasiswa PAI kedua PKTI memegang prinsip bahwa toleransi adalah norma yang penting bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat, sementara persoalan intoleransi dan radikalisme di Kalimantan Selatan belum perlu dikhawatirkan karena kehidupan beragama masih sangat harmonis.

Diskusi di atas tentang kepercayaan akan kekuatan sumber daya religius dan budaya Islam di Kalsel lebih jauh merefleksikan sikap kolektif di kalangan dosen, pejabat dan mahasiswa PAI di kedua PTKI tentang kecukupan sistem pendidikan yang sedang mereka jalani tanpa perlunya unsur tambahan dalam sistem tersebut untuk secara khusus merespons isu intoleransi dan radikalisme. Sistem dan praktik pendidikan calon guru agama yang telah berlangsung di kedua PTKI, dengan segala keterbatasannya, dipercaya mampu menyediakan bekal bagi para calon guru agama dalam menghadapi berbagai tantangan berkaitan dengan narasi intoleran dan radikalisme.

Sikap Keberagamaan Moderat yang Kurang Konsisten

Kepercayaan yang kuat pada bentuk dan ajaran Islam di Kalimantan Selatan di atas pada kenyataannya tidak sepenuhnya menjamin terlembagakannya pandangan atau sikap keberagamaan yang toleran di kalangan civitas akademika Prodi PAI di kedua PTKI. Hasil FGD dan survei mahasiswa (dan dosen) menyediakan petunjuk bahwa pandangan dan sikap skala keberagamaan mahasiswa tidak selalu konsisten dalam beberapa aspek yang membentuk sikap toleransi. Bahkan ditemukan indikasi adanya persetujuan pada narasi radikalisme dalam skala sikap mahasiswa PAI dalam persentase yang signifikan, meski dukungan pada ideologi negara juga hampir total.

Dalam dua sesi FGD yang diikuti mahasiswa PAI di masing-masing PTKI, sikap keberagamaan mahasiswa PAI di UIN Antasari dan IAI Darusalam pada umumnya tampak bersifat terbuka dan moderat. Mahasiswa PAI memandang Islam di Indonesia adalah yang paling sesuai bagi mereka, toleransi sebagai nilai bersama yang harus dipegang, demokrasi dan negara bangsa adalah sistem yang terbaik untuk Indonesia, serta perlunya sikap saling terbuka dan menghargai antar pemeluk agama. Namun pada saat yang sama, dengan semangat religius lokal *nahdliyin* juga muncul penolakan dan resistensi terhadap kebutuhan religius dari kelompok agama minoritas, seperti pendirian tempat ibadah pemeluk agama minoritas atau keberadaan aliran Islam diluar *ahlus sunnah wal jamaah*, di Kalimantan Selatan, muncul dalam FGD dengan mahasiswa. Sikap seperti ini terutama tampak pada komunitas Muslim Martapura.

Namun pandangan mahasiswa dalam FGD pada aspek-aspek tertentu tampak kontradiksi dengan hasil survei. Hampir seluruh dari 106 responden mahasiswa merasa tidak berkeberatan hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain. Namun tampaknya keterbukaan terhadap pemeluk agama lain mengalami reduksi apabila dibawa ke ranah yang lebih personal. Hal ini terindikasi dalam memilih lingkungan pertemanan di mana sebagian besar (69%) lebih memilih untuk berteman dengan individu yang seiman dengan mereka. Bahkan 18% di antara mereka memandang kesamaan iman sebagai urgensi dalam hal pemilihan teman.

Dalam hal kehidupan bernegara hampir seluruh responden (93%) tidak mempertentangkan Islam dengan Pancasila. Bahkan 50% responden menunjukkan dukungan kuat atas kesesuaian keduanya. Sebagian besar responden (63%) mengakui bahwa pemerintahan Indonesia telah sejalan dengan agama Islam dan karenanya harus dipatuhi. Akan tetapi ketika dipertautkan antara nilai Islam dengan konsep negara Islam (*khilafah*), sikap mendukung *khilafah* (51%) hanya sedikit lebih tinggi ketimbang mereka yang menolak (47%). Kemungkinan hal ini terjadi karena meski Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan nilai Islam, dan pemerintahan yang berkuasa saat penelitian ini dilakukan tidak dianggap *thaghut*, namun mahasiswa yang menganggap hal tersebut cukup untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam proporsinya lebih kecil. Sehingga dalam hal ini lebih banyak mahasiswa percaya pada narasi negara Islam dalam menegakkan Islam secara menyeluruh, meski pada saat yang sama menerima Pancasila. Sikap anti demokrasi di UIN Antasari menunjukkan indikasi relatif lebih tinggi. Sedangkan responden mahasiswa PAI di IAI Darusalam menunjukkan sikap penerimaan lebih tinggi terhadap demokrasi. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, hampir seluruh (85%) responden mahasiswa mendukung klaim bahwa umat Islam sebagai mayoritas memiliki hak lebih besar dalam menguasai sendi-sendi kehidupan bernegara daripada umat beragama lain.

Lebih dari separo responden (54%) menyatakan dukungannya bahwa poligami merupakan praktik agama sebagaimana Rasulullah melakukannya. Namun terdapat ambivalensi ketika berkaitan dengan prasyarat bersikap adil, mayoritas (78%) menilai

bahwa hal itu akan sulit dipenuhi dan karenanya praktik monogami lebih diutamakan daripada poligami. Dalam kaitan keterbukaan akan gagasan kepemimpinan perempuan meskipun terdapat kecenderungan dukungan pada kepemimpinan perempuan, namun nilai perbedaan pendapat antara dukungan dan penolakan pada kepemimpinan perempuan hanya sedikit. Beberapa responden mahasiswa menolak tegas ide kepemimpinan perempuan. Hal ini senada dengan temuan bahwa hampir seluruh responden (90%) menilai bahwa kedudukan utama dalam urusan agama tetap berada di tangan laki-laki daripada perempuan. Proporsi yang signifikan (34%) mahasiswa di antaranya bahkan menunjukkan dukungan kuat atas keutamaan laki-laki dalam agama.

Keutamaan kedudukan laki-laki dalam urusan agama juga berkorelasi dengan pandangan bahwa laki-laki memanggul kewajiban utama untuk terlibat jika ada panggilan untuk menegakkan agama melalui perjuangan fisik, dimana hampir seluruh responden (90%) mengamini pernyataan ini. Namun sebagian besar responden mengindikasikan penolakan keras atas penggunaan kekerasan seperti bom bunuh diri. Ketidak setujuan atas penggunaan kekerasan dalam menegakkan agama juga diperkuat pemahaman bahwa para ekstremis yang menggunakan cara tersebut tidak dapat disebut syahid. Dalam skala dukungan terhadap pendekatan kekerasan dalam rangka penegakan agama, responden mahasiswa di kedua PTKI menunjukkan skala sikap yang rendah.

Responden dosen PAI dari UIN Antasari dan IAI Darusalam menunjukkan sikap keberagamaan yang relatif lebih moderat dan lebih konsisten, dibandingkan mahasiswa mereka. Mengenai persoalan toleransi, para dosen menunjukkan sikap serupa dengan mahasiswa, di mana seluruh dosen menyatakan tidak keberatan untuk hidup dengan orang dari agama lain. Namun dalam ruang lebih personal, untuk pertemanan, mayoritas (60%) responden dosen tetap menekankan pentingnya menjaga interaksi sosial mereka dengan orang-orang seiman. Mayoritas (70%) responden dosen juga sepakat bahwa sebagai mayoritas, umat Islam selayaknya menguasai banyak sendi kehidupan di negeri ini.

Mayoritas (80%) responden dosen sepakat bahwa negara Islam **tidak** harus ditegakkan menurut narasi *khilafah*. Mereka percaya bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga **tidak** berpikir bahwa pemerintahan saat ini adalah pemerintahan *thaghut* karena itu setuju bahwa pemerintahan saat ini patut ditaati.

Pertanyaan survei berkenaan dengan praktik-praktik keagamaan mendapat respons secara lebih bervariasi. Dalam hal poligami, sikap pro dan kontra muncul di kalangan dosen dengan proporsi yang berimbang. Namun hampir keseluruhan responden dosen PAI menyadari bahwa prasyarat keadilan sulit dipenuhi dan lebih sesuai dengan konsep monogami. Tentang keutamaan laki-laki dalam urusan keagamaan, terdapat perbedaan signifikan antara responden dosen yang menyatakan bahwa keutamaan urusan agama ada di pundak laki-laki (60%) dan yang tidak menyetujui keutamaan tersebut (40%). Sebagian besar responden dosen mendukung gagasan bahwa perempuan bisa duduk di tampuk pimpinan jika memiliki kapasitas (85%). Hampir seluruh responden dosen

menolak kekerasan dalam penegakan agama dan tidak menilai kematian dalam upaya yang dilakukan melalui kekerasan sebagai *syahid.*

Jika dibandingkan, pandangan keberagamaan dari narasumber dosen dan mahasiswa dari kedua PTKI (sebagai PTKI Negeri dan Swasta) tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok. Namun demikian narasumber dosen dan mahasiswa dari UIN Antasari menunjukkan kesadaran yang sedikit lebih tinggi akan risiko dari menyebarnya ajaran intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat muslim. Narasumber dosen dan pejabat dari UIN Antasari mengungkapkan perhatian dan keprihatinan yang lebih besar akan isu tersebut dibandingkan narasumber dosen dan pejabat dari IAI Darusalam. Lebih dari itu, beberapa narasumber IAI Darusalam juga menampilkan sikap eksklusif dan resisten terhadap aliran dan praktik keberagamaan yang tidak berafiliasi dengan *ahlus sunnah wal jamaah.* Mahasiswa PAI UIN Antasari menyuarakan pandangan yang lebih lugas mengenai perlunya mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan sosial politik dan penerimaan terhadap perbedaan keyakinan atau praktik beragama. Sementara mengenai kesadaran kebangsaan dan keislaman, mahasiswa dari kedua PTKI menunjukkan pandangan dan sikap yang kurang lebih sama.

Pandangan keberagamaan dosen dan mahasiswa PAI sebagaimana didiskusikan di atas mengimplikasikan bahwa sikap keberagamaan civitas akademika di Prodi PAI, terutama mahasiswa, menyimpan potensi intoleransi dengan memandang identitas agama, proporsi kewarganegaraan (mayoritas) dan gender (laki-laki) sebagai dasar klaim keutamaan. Namun temuan ini tidak menanggalkan fakta lain yang sangat positif dalam sikap keberagamaan tersebut terutama dalam kaitannya dengan penerimaan prinsip-prinsip mendasar kehidupan berbangsa. Fakta tersebut termasuk penerimaan terhadap Pancasila, dukungan yang kuat pada demokrasi dan pemerintahan yang sah, penolakan terhadap kekerasan atas nama agama, dan penerimaan pada nilai toleransi dan semangat religius yang berkebangsaan.

Poin-Poin Pembelajaran dan Rekomendasi Penguatan Prodi PAI

Diskusi dan pembahasan tentang berbagai problematika sistem, tantangan dan dinamika praktik produksi guru agama di Prodi PAI UIN Antasari dan IAI Darusalam di atas menyodorkan sejumlah poin-poin pembelajaran penting sebagai berikut:

1) Guru-guru agama Islam di Kalsel dihasilkan oleh sistem dalam lembaga pendidikan tinggi yang memiliki begitu banyak komponen yang melemahkan. Komponen ini meliputi aspek-aspek yang bersifat konseptual dan normatif seperti filosofi dasar pendidikan yang diacu, visi dan misi, kurikulum hingga aspek-aspek manajerial, sumber daya dan sarana-prasarana seperti beban kerja, kapasitas dosen, rekrutmen mahasiswa hingga sarana fisik pengajaran. Komponen-komponen yang melemahkan ini sangat berpengaruh pada tingkat kompetensi calon guru agama yang diluluskan oleh Prodi PAI.

2) Sejumlah komponen kelemahan sistem Prodi PAI tersebut diduga merupakan aspek-aspek kelemahan yang kurang lebih secara general juga mencirikan Prodi PAI di perguruan tinggi lainnya. Aspek-aspek yang mencirikan keterbatasan sistem PAI ini disampaikan oleh beberapa pejabat yang berhubungan langsung maupun tidak dengan Prodi PAI (Dekan Fakultas Tarbiyah di tiga PTKIN di Jawa, Direktorat Pendidikan Tinggi Kemenag) di beberapa tahap penelitian ini di luar *fieldwork* di UIN Antasari dan IAI Darusalam.

3) Inisiatif, manajemen dan proses produksi calon guru agama Islam di tingkat perguruan tinggi terutama tidak didorong oleh target pencapaian kualitas pendidikan, penciptaan kompetensi yang baik, dan pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas. Tingginya permintaan masyarakat dan minat calon mahasiswa terhadap Prodi PAI masih merupakan pertimbangan utama penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Prodi PAI. Pertimbangan pasar pendidikan yang besar dan menjanjikan ini mendorong target pencapaian dan pelaksanaan proses pendidikan dengan kualitas yang minimalis.

4) Hal tersebut di atas, terlebih ditambah dengan sistem administrasi dan birokrasi yang tidak efisien, menyebabkan kondisi di mana penyelenggaraan Prodi PAI dan produksi calon guru agama dilaksanakan sebagai *bussiness as usual* atau kegiatan apa adanya. Manajemen dan kegiatan pendidikan dijalankan sebagai rutinitas dengan target yang minimalis sementara program dan aspek-aspek pendukung untuk peningkatan kapasitas sistemik, baik dari struktur internal prodi atau PTKI maupun struktur kelembagaan yang lebih besar, dalam hal ini Kemenag, terasa cukup lemah.

5) Filosofi pendidikan, desain kurikulum, komposisi mata kuliah dan praktik pendidikan di kedua Prodi PAI berorientasi pada penciptaan prototipe guru sebagai sebatas tenaga pengajar yang terampil pada aspek instrumental pedagogis, meski dengan kapasitas keilmuan yang tidak dianggap cukup. Aspek-aspek pengajaran seperti penampilan, kemampuan komunikasi yang baik, dan menguasai teknik *publik speaking* yang baik tampak lebih signifikan dalam membentuk konsep tentang profil guru yang ideal. Aspek lainnya yang dipandang penting adalah penerapan standar moral simbolik seperti busana islami, tutur kata dan sopan santun. Wujud utama dari orientasi instrumental pedagogis tersebut adalah desain kurikulum Prodi PAI yang memasukkan mata kuliah pedagogis dan pendukung dengan proporsi yang lebih dominan dibandingkan mata kuliah-mata kuliah profesional-keislaman. Situasi ini berimplikasi pada kapasitas calon guru agama yang tidak memiliki bekal keilmuan keislaman yang cukup untuk menjalankan perannya di masyarakat, meski dengan kemampuan pengajaran yang baik.

6) Salah satu aspek yang melemahkan sistem pendidikan Prodi PAI di kedua PTKI adalah *input* calon mahasiswa dengan porsi yang signifikan (di atas 30%) calon

mahasiswa berasal dari sekolah yang tidak menyediakan bekal pengetahuan agama yang khusus (SMA dan SMK). Hal ini diperburuk oleh prosedur rekrutmen mahasiswa yang tidak secara spesifik membuka peluang secara khusus bagi lulusan sekolah dengan kemampuan pengetahuan agama yang baik (madrasah atau pesantren). Proses rekrutmen yang tidak standar menyebabkan seleksi calon mahasiswa tidak secara maksimal menghasilkan mahasiswa dengan potensi penguasaan pengetahuan agama yang baik.

7) Pandangan tentang dan praktik pendidikan di kedua PTKI pengelola PAI mencerminkan budaya pengajaran dan beragama yang diterima secara luas oleh masyarakat di luar institusi pendidikan. Budaya religius yang bersumber dari nilai-nilai dan etos *nahdliyin* di Kalsel sangat mewarnai suasana pendidikan, pemahaman, dan praktik pengajaran serta lebih jauh relasi antara dosen dan mahasiswa di Prodi PAI. Budaya pengajaran religius ini terwujud pada mode pengajaran yang memberikan tekanan yang sangat kuat pada pembangunan keyakinan pada diri peserta didik akan keunggulan Islam sebagai agama dan urgensi aplikasi ajaran agama terutama pada tingkat individu.

8) Sikap keberagamaan di kalangan responden dosen dan mahasiswa PAI di kedua PTKI pada dasarnya bersifat terbuka, secara normatif toleran dan menjunjung tinggi konteks keindonesiaan dengan Pancasila. Kendati demikian, penelitian ini menemukan inkonsistensi pada sejumlah aspek sikap keberagamaan dosen dan terutama mahasiswa PAI, dengan dosen menunjukkan tingkat konsistensi lebih tinggi. Hampir seluruh atau sebagian besar responden mahasiswa mempercayai kesesuaian antara Islam dan Pancasila, mendukung demokrasi dan meyakini bahwa pemerintahan Indonesia saat ini harus ditaati. Namun terdapat proporsi signifikan responden memandang perlunya *khilafah* dalam penegakan syariat. Mereka kontra terhadap ajaran radikalisme dan intoleransi, namun juga menolak pendirian rumah ibadah agama lain di kota mereka (khususnya di Martapura).

9) Temuan paling penting penelitian ini di Kalimantan Selatan adalah kuatnya pengaruh kultur lokal religius *nahdliyin* terhadap atmosfer religius di Kalimatan Selatan dalam membendung penyebaran narasi Islamisme di lingkungan Prodi PAI di kedua PTKI, khususnya di IAI Darusalam. Kultur religius ini bersumber dari pesantren-pesantren tradisional yang telah sangat lama berada di Kalimantan Selatan terutama Kota Martapura dan dipimpin oleh para tuan guru yang sangat dihormati sebagai penjaga otoritas religius di Kalimantan Selatan. Fenomena ini memberikan petunjuk bahwa atmosfer dan budaya religius yang kuat di luar kampus dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi PTKI dalam menciptakan iklim pendidikan yang terbuka, moderat dan berorientasi pada semangat kebangsaan, serta lebih jauh membentengi iklim pendidikan dari paparan ajaran intoleran dan radikalisme.

Catatan Penutup: Kembali pada Ilmu-Ilmu Islam dan Islam Banjar, Sebuah Rekomendasi

Sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan calon guru agama yang berkualitas, mampu memberi tanggapan atas perkembangan situasi kebangaan dan keumatan, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang mendalam, peneliti merekomendasikan beberapa langkah berikut:

1) Aspek utama pada pendidikan calon guru agama sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini adalah lemahnya lulusan Prodi PAI dalam penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan kemampuan mereka dalam merespons dinamika persoalan keagamaan dalam konteks kebangsaan. Karenanya, perlu dilakukan rekonstruksi atas filosofi dan desain pendidikan PAI, pada jenjang S1, dengan orientasi pada produksi lulusan dengan penguasaan keilmuan keislaman yang jauh lebih menonjol dibandingkan keterampilan pedagogisnya. Rekonstruksi ini harus dimulai dengan memandang guru agama bukan terutama sebagai aktor pengajar yang dapat menjalankan berbagai instrumen teknis pengajaran, namun sebagai aktor akademik yang memiliki penguasaan ilmu agama yang memadai dan berkapasitas dalam mereproduksi pengetahuan agama secara independen sesuai dengan analisisnya tentang masalah keumatan kontekstual.

2) Rekonstruksi tersebut juga harus mendorong model, desain dan budaya pendidikan yang bersifat terbuka, kritis dan berwawasan kebangsaan. Model dan desain yang demikian perlu dirumuskan dalam kurikulum dan model pengajaran yang bersifat responsif pada masalah kontekstual keumatan dan kebangsaan dengan orientasi pada penjagaan dan pemeliharaan atas kehidupan berbangsa. Dalam hal ini isu tentang penyebaran ajaran yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme di tengah masyarakat Islam Indonesia harus mendapat perhatian yang serius. Budaya dan praktik pendidikan di kelas dan luar kelas perlu diorientasikan pada nilai dan semangat kebangsaan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi dengan mempertahankan tradisi keilmuan keislaman berkembang.

3) Secara lebih teknis, desain kurikulum PAI perlu memberikan porsi jauh lebih pada mata kuliah profesional keislaman dengan mengurangi secara signifikan mata kuliah pedagogis dan pendukung yang tidak secara langsung berhubungan dengan keilmuan profesional. Langkah ini harus disertai dengan peningkatan kualitas materi pada maka kuliah profesional tersebut yang salah satu aspeknya adalah segi kemutakhiran akademik dan dorongan sikap kritis di kalangan mahasiswa. Pada titik ini, materi keislaman dengan konteks lokal berbasis budaya dan nilai-nilai masyarakat Kalimantan Selatan akan menjadi bahan ajar yang sangat strategis dan penting.

4) Alternatif prosedur penerimaan mahasiswa dan proses rekrutmen mahasiswa perlu diupayakan agar alumni pesantren yang memiliki dasar pengetahuan

keislaman yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk diterima sebagai mahasiswa. Pada saat yang sama, standarisasi sistem rekrutmen mahasiswa baru harus dilakukan agar mahasiswa baru dengan latar belakang non pesantren atau madrasah memiliki standard pengetahuan agama yang memadai.

5) Perlunya merumuskan mekanisme kepemimpinan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Bagian penting dalam efesiensi kepemimpinan ini adalah penyederhanaan birokrasi dan sistem administrasi agar beban tanggung jawab teknis dan dokumentasi pejabat yang bersifat rutin tidak membebani fungsi kepemimpinan dalam penguatan dan pengembangan Prodi PAI.

6) Perlunya merumuskan sistem penugasan atas dosen dan pejabat yang memungkinkan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengajaran mereka secara berkala. Aspek ini termasuk menyediakan dukungan yang cukup bagi peningkatan keilmuan dosen dan pejabat melalui penelitian atau *workshop*, pengembangan kerja sama penelitian dan dukungan untuk publikasi karya ilmiah.

7) Pelajaran terpenting dari penelitian lapangan di Kalimantan Selatan adalah kuatnya budaya pembelajar religius masyarakat di luar kampus yang memberikan atmosfer positif bagi kehidupan akademik dalam kampus terutama dalam membendung narasi Islam intoleran yang berasal dari luar budaya lokal. Budaya religius yang bersifat lokal yang telah terbangun lebih dari satu abad ini adalah sumber daya bagi kampus dalam mereproduksi nilai-nilai dan narasi agama yang toleran, menghargai budaya lokal dan berorientasi kebangsaan. Prodi PAI perlu memperkuat hubungan antara pelaksanaan pendidikan dalam kampus dengan konteks budaya keberagamaan di luar kampus yang seperti itu dalam rangka menciptakan proses pendidikan yang lebih kontekstual seiring dengan dinamika keumatan dan kemasyarakatan di luarnya.

Untuk konteks Kalimantan Selatan, penelitian ini menunjukkan bahwa konteks agama yang telah begitu lama berasosiasi dengan agama menyediakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya bagi pengayaan narasi dan praktik agama itu sendiri, namun lebih bagi konstruksi budaya dan etos pendidikan yang bermakna pada masyarakat setempat. Sebagaimana dinyatakan Jackson (2005) bahwa pendidikan agama harus juga mempertimbangkan perbedaan dan aspek lokalitas referensi agama dalam suatu masyarakat untuk mendorong penghormatan ekspresi religius yang berbeda. Hal ini berarti budaya dan etos pendidikan di luar lembaga pendidikan harus dipertimbangkan dan dilibatkan dalam proses pendidikan untuk menciptakan model pendidikan yang responsif dan peka terhadap dinamika budaya dan politik di luarnya.

Referensi

Apple, Michael W. 2004. *Ideology and Curriculum*, New York and London: Routlegde Falmer.

----. 2012. *Education and Power*, New York and London: Routlegde, Tylor and Francis Group.

Daud, Alfani. 1997. *Islam & Masyarakat Banjar*, *Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jackson Robert, 2005, "How Far Can Religious Education Contribute to Multicultural/ Intercultural Education?", *Srcipture* 89: 235-246.

Lukens-Bull, Ronald A. 2001."Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia." *Anthropology & Education Quarterly* 32 (3): 350-372.

----. 2013. *Islamic Higher Education in Indonesia*, *Continuity and Conflict*, New York: Palgrave Macmillan.

Tan, Cherlene, 2011. *Islamic Education and Indoctrination*, *the Case in Indonesia*, New York and London: Routledge.

Tim Penyusun. 2018. *Draft Format KKNI Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Torres, Carlos Alberto. 2006. "Scholing, Power, and the Exile of the Soul", dalam Lois Weis, Cameron McCarthy, and Greg Dimitriadis. *Ideology, Curriculum, and the New Sociology of Education: Revisiting the Work of Michael Apple*. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group.

9

KELUAR DARI *BUSINESS AS USUAL*

Produksi Guru Pendidikan Agama Islam di Makassar

Ahmad Muttaqin

Pendahuluan

Selama ini Makassar dikenal sebagai daerah yang keras dan panas. Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan serta menjadi *hub* untuk wilayah Indonesia Timur. Posisi ini menjadikan Makassar semacam *meltingpoint* dari beragam suku bangsa dari aneka latar belakang untuk tumbuh, berkembang, dan melakukan berbagai aktivitas mulai dari bisnis hingga pendidikan. Di Makassar, sebagai kota Metropolitan Indonesia bagian Timur, dengan mudah dapat dijumpai warga dari berbagai suku bangsa lokal seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maupun etnis Tionghoa hingga warga kebangsaan lain.

Secara umum hubungan antar komunitas sosial, budaya, dan agama berjalan dengan baik, meski konflik antar warga terutama pemuda dan mahasiswa kerap terjadi yang dipicu oleh sentimen antar daerah. Dalam berbagai kajian konflik, Makassar dikenal sebagai daerah "sumbu pendek" yang rentan terhadap konflik sosial. Konflik komunal cukup besar antara etnis Bugis Makassar dengan Tionghoa pernah terjadi pada September 1997. Konflik dipicu oleh perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang

warga Tionghoa namun penegakan hukumnya dinilai masyarakat setempat kurang berkeadilan. Dipicu sentimen warga terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh etnis tertentu, akhirnya amuk massa dan konflik sosial meluas.

Kehidupan keagamaan di kota Makassar juga sangat dinamis. Hampir semua aliran dan gerakan keagamaan tumbuh subur. Ormas keislaman mainstream, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) tumbuh dan berkembang dengan baik. Muhammadiyah memiliki berbagai amal usaha mulai dari Taman Kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi. NU juga memiliki jaringan pesantren dan Perguruan Tinggi yang cukup luas. Di luar dua ormas mainstream tersebut juga berkembang gerakan dan organisasi keislaman baru yang mengusung penegakan syariat Islam dan simbolisasi cara ber-Islam model baru, seperti KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam), Wahdah Islamiyah, dll.

Konstelasi sosial keagamaan di Makassar sedikit banyak juga termanifestasi di kampus-kampus Perguruan Tinggi, terutama dari aktivitas kemahasiswaannya. Nomenklatur gerakan kemahasiswaan mainstream yang tumbuh dan berkembang di dalam kampus antara lain HMI, PMII, dan IMM. Gerakan kemahasiswaan mainstream ini terus tumbuh dan berkembang, masing-masing berkontestasi menawarkan aktivitasnya kepada mahasiswa/i baru untuk bergabung dengan memasang *flyer* atau poster di beberapa tempat strategis.

Di luar gerakan kemahasiswaan mainstream di Makassar tersebut, sejak tahun 1990an mulai muncul kelompok mahasiswa yang menawarkan orientasi keagamaan berbeda dari yang dipraktikkan oleh ketiga organisasi mahasiswa di atas. Menurut Samsurizal (2015), gerakan kemahasiswaan baru tersebut manifestasi dari: (1) Gerakan Tarbiyah (KAMMI, LDK), (2) Hizbut Tahrir Indonesia (Gema Pembebasan), (3) Syiah (IJABI), dan (4) Mahasiswa Pecinta Musholla (MPM, yang didominasi oleh Salafi Wahdah).

Di tengah kehidupan keagamaan dan kemahasiswaan Makassar sebagaimana di atas, bagian ini mencoba menguraikan: *pertama*, profil produsen guru Pendidikan Agama Islam di Makassar; *kedua*, permasalahan yang dihadapi oleh produsen guru PAI baik pada aras input, proses maupun out put; *ketiga*, langkah-langkah yang telah diambil oleh *stakeholders* internal produsen guru PAI di Makassar untuk mengatasi masalah yang dihadapi; dan *keempat*, pelajaran yang dapat dipetik serta rekomendasi apa saja untuk perbaikan sistem produksi guru PAI di masa yang akan datang.

Bagian selanjutnya dalam bab ini akan menjelaskan *setting* produsen guru PAI di Makassar. Dalam hal ini akan dijelaskan profile kampus dan Program Studi PAI di UINAM dan UMI, serta *profile* dosen dan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan problematika Prodi PAI di Makassar di tengah menguatnya arus islamisme serta *best practices* produsen guru PAI Makassar dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagian selanjutnya menjelaskan beberapa usulan reformasi sistem

produksi guru PAI, *lesson learned* yang dapat dipetik dari penelitian ini, lalu ditutup dengan kesimpulan.

Setting Wilayah, Profil Kampus, Dosen, dan Mahasiswa

Penelitian ini dilaksanakan di dua Program Studi Pendikan Agama Islam pada dua Perguruan Tinggi Islam di Makassar, satu negeri dan satu swasta. Perguruan Tinggi negeri diwakili oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan Perguruan Tinggi Swasta diwakili oleh Universitas Muslimim Indonesia (UMI). Meski yang satu berstatus negeri dan satu swasta, kedua Perguruan Tinggi Islam ini memiliki hubungan kesejarahan yang sangat lekat.

Secara usia, UMI 10 tahun lebih tua dibandingkan UINAM. Pendirian UMI dimulai sejak tahun 1952 atas inisiatif para ulama Makassar, para raja di Sulawesi Selatan, serta gubernur Makassar. Secara resmi UMI berdiri pada tahun 1954. Saat ini, UMI termasuk Perguruan Tinggi Islam Swasta tertua, terbesar dan terkemuka di Kawasan Indonesia Timur. UMI memiliki 14 Fakultas, 55 Program Studi, 214 doktor, 32 Guru Besar, 21.450 mahasiswa aktif dan 5.694 mahasiswa baru pada tahun 2018.

Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (UINAM) merupakan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar, yang berdiri pada tahun 1962. Pada awalnya IAIN Alauddin Makassar merupakan Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan baru berdiri sendiri menjadi IAIN melalui serangkaian proses penegerian Fakultas Syariah UMI menjadi Fakultas Syariah di IAIN Alauddin pada tahun 1962, penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tabiyah di IAIN Alauddin tahun 1964, serta penegerian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar pada tahun 1965. Tahun 2005 IAIN Alauddin Makassar berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005, tertanggal 10 Oktober 2005. Berdasar uraian ini dapat dikatakan bahwa UINAM merupakan "anak" dari UMI.

Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di UINAM merupakan salah satu dari 8 Prodi di bawah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Visi PAI UINAM adalah: "Pusat Penyiapan Calon Guru Pendidikan Agama Islam dan Tenaga Kependidikan yang Berdaya Saing dan Unggul dalam Integrasi Keilmuan dan Pembelajaran berbasis Peradaban Islam di Kawasan Timur Indonesia pada Tahun 2025." Visi ini menegaskan bahwa Prodi PAI UINAM secara tegas menyatakan sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik calon guru PAI namun juga tenaga kependidikan. Prodi PAI UINAM memposisikan unggul dan berdaya saing di Kawasan Indonesia Timur dengan target waktu ketercapaian pada tahun 2025.

Sedangkan Misi Prodi PAI UINAM adalah: (1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis peradaban Islam dalam rangka menghasilkan calon guru Pendidikan Agama Islam dan tenaga kependidikan

yang berdaya saing; (2) Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu agama Islam berbasis integrasi keilmuan dan peradaban Islam; (3) Memperkuat landasan praktik penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat; (4) Memperkuat jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, baik dalam maupun luar negeri (http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/).

Visi Prodi PAI UMI adalah "Menghasilkan alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tahun 2020 yang berkompeten dan professional dalam bidang pendidikan agama Islam berbasis IT". Visi Prodi PAI UMI ini merupakan turunan dari Visi Universitas yang berbunyi: "Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi." "Berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah" dijadikan sebagai *tag line* UMI, dengan core values "Unggul Mutu Islami" yang kalau disingkat juga UMI.

Sedangkan misi Prodi PAI UMI antara lain: (1) Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Agama Islam secara professional; (2) Mewujudkan tenaga guru pendidikan Agama Islam yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah serta berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni islami; dan (3) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas Pendidikan Agama Islam dalam bentuk kerja sama.

Rumusan visi Prodi PAI UMI diatas secara eksplisit berorientasi pada output, yakni menghasilkan lulusan PAI yang kompeten dan professional berbasis IT dalam bidang PAI, tanpa menjelaskan alumni tersebut menjadi apa atau berprofesi apa. Kejelasan alumni PAI UMI berprofesi apa baru tampak jelas pada rumusan misi prodi kedua, yaitu "mewujudkan tenaga guru", serta rumusan tujuan prodi yang pertama yang menyebutkan "Menghasilkan sarjana muslim yang mampu menjadi guru agama Islam yang professional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat." Diperlukan telaah secara mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan visi Prodi PAI UMI di atas. Visi tersebut secara eksplisit menyatakan target waktunya untuk menghasilkan alumni yang berkompeten dan professional bidang PAI berbasis IT adalah tahun 2020. Saat ini, kira-kira tingkat ketercapaian visi tersebut sudah berada pada level mana? Pertanyaan semacam ini penting, mengingat tahun 2020 sudah dekat, dua tahun dari waktu saat penelitian ini dilakukan, namun dari pengamatan ruang dan fasilitas kampus, nuansa IT belum terlihat secara menonjol.

Dari sisi SDM dosen, Prodi PAI UINAM memiliki 17 dosen tetap yang terdiri dari 14 doktor, dan 3 Master, dengan jabatan fungsional 2 Guru Besar, 12 Lektor Kepala, dan 3 Lektor. Dari 17 dosen tersebut tiga di antaranya perempuan. Dosen PAI UMI berjumlah 18; terdiri dari 1 Guru Besar, 1 Lektor Kepala, 10 Lektor, dan 4 Asisten Ahli dan sisanya belum memiliki jabatan fungsional. Dari 18 dosen tersebut baru dua orang yang sudah doktor. Data ini menunjukkan bahwa dosen PAI di PTKI Negeri memiliki kualifikasi

akademik lebih baik dibanding PTKI Swasta. Kompetensi pengajaran dosen-dosen UINAM dan UMI secara keseluruhan sudah baik, hal ini ditandai dengan hasil angket dari 10 dosen PAI UINAM *score* pelaksanaan pembelajarannya berada pada level Tinggi (2) dan Sangat Tinggi (8), sedangkan dosen-dosen PAI UMI 1 orang level Tinggi dan 9 orang Sangat Tinggi. Kompetensi pengajaran yang diukur dengan *score* pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari aspek penggunaan hasil penelitian yang relevan sebagai bahan ajar, pemutakhiran materi dan referensi kuliah, penggunaan strategi pembelajaran aktif, kesediaan menerima kritik dari mahasiswa serta penyampaian isu-isu aktual dan pentingnya toleransi serta bahaya ekstremisme dalam beragama.

Pada aspek penyampaian materi kuliah tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini konsisten dengan pandangan dosen tentang hidup bertetangga dengan non-Muslim. Semua dosen setuju (UINAM 3, UMI 5), dan sangat setuju (UINAM 7, UMI 5) dengan pernyataan "bertetangga dengan non-Muslim tidak masalah). Keterbukaan dosen-dosen PAI di Makassar ini juga dapat dilihat dari kesediaan mereka untuk menerima informasi keagamaan dari sumber yang beragam. Terhadap pertanyaan "*Untuk urusan agama, saya hanya percaya pada ustaz atau ulama yang saya ikuti, karena hanya ustaz saya yang benar pemahamannya*", 9 dari 10 dosen PAI UINAM yang mengisi angket menyatakan tidak setuju, dan semua dosen PAI UMI menyatakan tidak setuju (2 tidak setuju, 8 sangat tidak setuju).

Kompetensi dosen sebagaimana dijelaskan di atas terkonfirmasi dengan pendapat mahasiswa PAI UNINAM yang 90% (41% sangat setuju dan 49% setuju) dan 82% mahasiswa PAI UMI (14% sangat setuju dan 68% setuju) menyetujui bahwa dosen-dosen PAI mereka memiliki pengetahuan yang komprehensif. Pengetahuan dosen yang komprehensif ini pada gilirannya berpengaruh terhadap pengetahuan mahasiswa. Terhadap pernyataan "Dosen mata kuliah keislaman berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan agama saya", 92% mahasiswa UINAM menyetujuinya (49% sangat setuju, 43% setuju), dan 82% mahasiswa UMI juga menyetujuinya (16% sangat setuju, 66% setuju).

Kualitas dan kompetensi dosen sebagaimana uraian diatas relevan dengan masih tingginya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap dosen sebagai sumber rujukan keagamaan. Di mata mahasiswa PAI, dosen-dosen PAI baik di UNINAM dan UMI lebih dipercaya oleh mahasiswa (UINAM: sangat setuju 30% dan setuju 57%; UMI: 25% sangat setuju dan 64% setuju) dalam hal penjelasan keagamaan dari pada sumber-sumber internet dan sosial media. Tingginya tingkat kepercayaan mahasiswa PAI di Makassar terhadap dosen dari aspek rujukan keagamaan dibanding sumber internet dan sosial media ini tampaknya merupakan hasil dari pola hubungan kekeluargaan yang dibangun antara dosen dan mahasiswa selama ini. Di UINAM mahasiswa memanggil dosen dengan sebutan "Ustaz/Ustazah" untuk yang senior atau "Kakak" untuk dosen muda, sedang di UMI dosen dengan panggilan "Ayahanda" dan "Bunda". Sebaliknya, dosen memanggil mahasiswa dengan sebutan "Ananda", "Nak" atau "Adik". Selain aspek hubungan

kekeluargaan, program dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan pihak kampus juga turut mewarnai. Hal ini tampak pada UMI memiliki program-program pembinaan keislaman di luar perkuliahan, misalnya: ketika mahasiswa sedang melaksanakan ibadah jumat di masjid, mahasiswi dibina dalam kajian keislaman di kelas oleh dosen perempuan.

Dari sisi mahasiswa, kualitas input mahasiswa PAI cukup beragam, namun sebagian besar, lebih dari 50% berasal dari SMU/SMK Umum. Berdasar data angket yang masuk, 13% mahasiswa PAI UINAM berasal dari alumni pesantren, 19% dari Madrasah Aliyah dan 66% dari SMU/SMK Umum, dan sekolah lain 2%. Dari 66% mahasiswa yang berasal dari SMU/SMK Umum tersebut 43% masuk melalui jalur Ujian Mandiri, 28% jalur SPAN-PTKIN, 19% jalur UMPTKIN, dan sisanya 8% mengisi lain-lain dan 2% tidak menjawab. Di UMI, latar belakang mahasiswa PAI yang berasal dari alumni pesantren 21%, Madrasah Aliyah 20%, SMU/SMK Umum 52%, SMA/SMK Islam 4%, dan 3% sisanya tidak menjawab. Sedangkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI di kedua kampus tersebut berdasar *self identification assessment* sebagian besar menyatakan kurang dan cukup. Data lengkap perbandingan kemampuan Bahasa Arab mahasiswa PAI dari kedua kampus tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.1.

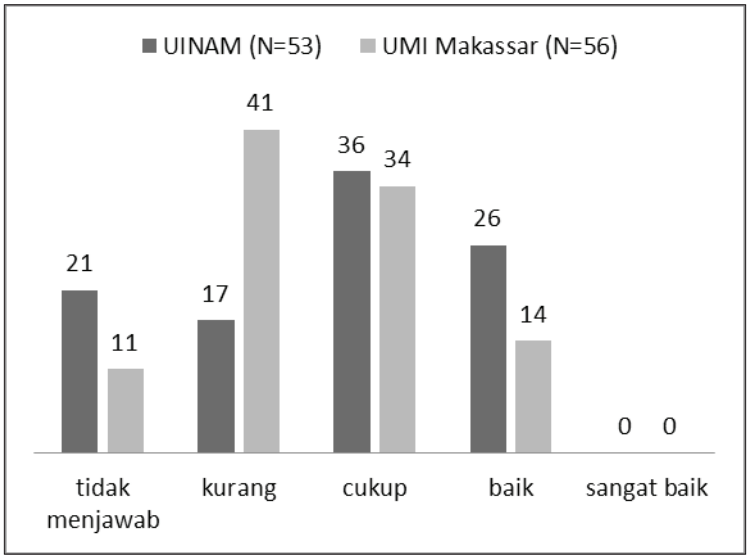

Gambar 9.1: Grafik Kemampuan Memahami Bacaan/Teks Arab Mahasiswa PAI (dalam %).

Data di atas menunjukkan bahwa *raw input* mahasiswa PAI di kedua PTKI di Makassar tersebut belum sepenuhnya memenuhi standard ideal. Hal ini tampak dari sebagian besar asal sekolah mereka dari SMU/SMK Umum, serta tingkat penguasaan Bahasa Arab yang mayoritas masih berada pada kategori kurang (UINAM 17%, dan

UMI 41%) dan cukup (UINAM 36% dan UMI 34%). Hanya 26% mahasiswa UINAM, dan 14% mahasiswa PAI yang percaya diri memiliki kemampuan bahasa Arab baik dan tidak satu pun dari mereka menyatakan memiliki kemampuan sangat baik.

Sebagaimana UINAM, UMI juga memiliki kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, bahkan cukup "keras". Berita tentang bentrok, perkelahian antar mahasiswa, tawuran antara mahasiswa dengan warga, bahkan tawuran antar fakultas, atau bahkan antar mahasiswa dalam satu fakultas sering muncul di layar televisi dan media lainnya. Jejak digital tentang demonstrasi dan bentrokan mahasiswa UMI dengan mudah dapat dilihat di internet; misalnya portal new.rakyatku.com pada tanggal 18 Oktober 2017 memberitakan tawuran mahasiswa UMI yang terjadi antara senior dan junior dalam satu fakultas. (http://news.rakyatku.com, 2017).

Universitas menerapkan kebijakan pesantrenisasi semua mahasiswa baru selama satu bulan sebagai bagian dari pembinaan karakter dan berislam secara moderat. Sejak pesantrenisasi diterapkan, tawuran antar mahasiswa berkurang. Selain itu, dalam bidang akademik, UMI memiliki kekhasan: seluruh mahasiswa UMI, apapun prodinya, memperoleh 5 mata kuliah: Ilmu Aqidah, Ilmu Syariah, Ilmu Akhlaq, Ilmu Dakwah, dan Islam Disiplin Ilmu. Pesantrenisasi dan 5 mata kuliah wajib keislaman untuk seluruh mahasiswa UMI ini merupakan nilai lebih dari PTS ini untuk mengembangkan wacana dan praktik Islam moderat di kalangan mahasiswa. Secara organisatoris, UMI bahkan memiliki Wakil Rektor IV bidang Dakwah dan Kampus Islami.

Merujuk pada Buku Panduan Fakultas Agama Islam UMI tahun 2017, struktur Kurikulum PAI di UMI dapat dipetakan sebagai berikut: sekitar 31% mata kuliah Profesional-Keislaman, 40% mata kuliah pedagogis, dan 29% mata kuliah penunjang. Kurikulum PAI UMI sudah menyediakan mata kuliah yang berorientasi pada kesiapan mahasiswa dan alumni hidup di tengah masyarakat yang multikultural dan pentingnya menghargai keragaman serta kemampuan untuk berpikir kritis. Hal ini tampak pada mata kuliah penunjang yang ditawarkan seperti Pendidikan Multikultural, Fiqih Ikhtilaf dan Kontemporer, Pendidikan dan Komitmen Kemanusiaan, serta Pendidikan dan Perubahan Sosial. Sedangkan mata kuliah yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dapat dijumpai pada Dasar-dasar Filsafat, Logika, Filsafat Pendidikan Islam, Teori Pendidikan Kritis. Di UINAM, dari 150 SKS mata kuliah yang ditawarkan, 53 (35%) SKS merupakan mata kuliah Pedagogis, 68 (45%) SKS mata kuliah keislaman, dan 29 (20%) SKS mata kuliah Pendukung. Di antara mata kuliah yang didesain untuk menumbuhkan berpikir kritis mahasiswa adalah: isu-isu aktual dalam pendidikan, perbandingan mazhab, *tarikh tasyri'* dan *masail al-fiqhiyah.* Sedangkan mata kuliah yang memberikan bekal kemampuan mahasiswa hidup di era terbuka dan multikultural antara lain: isu-isu pendidikan, kewirausahaan, komputer praktis, pengembangan budaya dan seni dalam PAI, pendidikan multikultural, dan pendidikan soft skill.

Prodi PAI UMI merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Jurusan Tarbiyah. Dua prodi yang lain yaitu Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Pendidikan

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Jurusan Tarbiyah merupakan salah satu Jurusan di bawah Fakultas Agama Islam. Dua jurusan yang lain adalah Syariah dan Dakwah.

Total *student body* mahasiswa PAI UMI adalah 543, merupakan jumlah terbanyak untuk mahasiswa di FAI dengan total mahasiswa FAI 900an. FAI memiliki 3 Jurusan: Syariah (Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal as-Syakhsiyah dan Hukum Ekonomi Islam), Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) dan Dakwah (Komunikasi dan Penyiaran Islam).

Sebagaimana yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta lainnya, meningkatkan kualitas in-put calon mahasiswa masih merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Satu sisi Perguruan Tingi Swasta memerlukan jumlah mahasiswa yang memadai agar Perguruan Tinggi dapat *survive*, namun di sisi lain dituntut juga untuk melakukan seleksi agar memperoleh calon yang memenuhi standard. Idealnya, sebagai mana diakui oleh para dosen PAI, mahasiswa yang masuk di Prodi PAI adalah mereka yang memiliki bekal kompetensi keislaman dan Bahasa Arab yang di atas rata-rata. Kriteria ini ada pada alumni pesantren atau Madrasah Aliyah. Namun kenyataannya yang masuk ke PAI di UMI, sebagai mana data angket diatas sebanyak 52%, dan bahkan berdasar data yang dikemukakan pimpinan Fakultas sekitar 60% berasal dari SMA/SMK Umum. *Raw input* yang seperti ini tentu mengharuskan pengelola Prodi PAI untuk bekerja lebih berat pada proses pendidikan dan pengajaran. Diperlukan program-program pembinaan keislaman dan Bahasa Arab yang intensif agar mahasiswa yang berasal dari SMU memiliki kompetensi yang memadai sebagai calon guru Pendidikan Agama Islam. Di UMI misalnya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan bahasa asing lainnya, fakultas bekerja sama dengan Akademi Bahasa Asing UMI, yang lokasinya berada dalam satu gedung dengan FAI.[1] Sebagian mahasiswa PAI ikut kuliah bahasa asing di ABA UMI di akhir pekan.

Meski berbagai usaha peningkatan kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI sudah dilakukan di UMI, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari jawaban angket terhadap pertanyaan kemampuan membaca teks Arab mahasiswa: dari 56 sampel mahasiswa yang mengisi angket, hanya 8 (14,3%) yang mengaku bisa membaca teks Arab dengan Baik, dan tidak seorang pun menyatakan dirinya memiliki kemampuan sangat baik. Selebihnya, 19 (33,9%) mahasiswa mengaku memiliki kemampuan cukup, 23 (41%) mengaku kurang, dan 6 (10,7%) tidak menjawab.

Ketika ditanyakan kompetensi mahasiswa dan alumni PAI UMI, pimpinan FAI UMI dengan yakin mengatakan bahwa alumninya mampu bersaing dengan alumni PAI dari perguruan tinggi yang lain di Makasar, termasuk alumni PAI UINAM. Dicontohkan, dalam penerimaan guru Aqidah Akhlaq untuk salah satu MAN Insan Cendekia di Sulawesi, yang diterima adalah alumni PAI UMI. Penerimaan guru-guru agama di kabupaten Goa juga alumni PAI UMI yang diterima. Rata-rata masa tunggu mahasiswa

[1] Akademi Bahasa Asing UMI terlatak di Lantai 1 Gedung H, sedangkan FAI menempati lantai 2.

PAI untuk berkarya adalah 4 bulan dengan gaji pertama rata-rata Rp1,5 juta. Mahasiswa yang selesai PPL juga sebagian sudah ditawari oleh sekolah untuk membantu mengajar.

Keunggulan Alumni PAI UMI ini menurut mantan Dekan FAI merupakan hasil perpaduan antara sistem pendidikan di UINAM dari aspek kajian keislamannya dan UNM (Universitas Negeri Makassar) untuk metode pembelajarannya. Meski para dosen dan pengelola menyatakan kelebihan dan keunggulan PAI UMI, namun mereka mengakui masih ada kekurangan dalam pengelolaan PAI di UMI terutama minimnya ketersediaan referensi dan bahan pustaka lainnya.

Arus Islamisme di Ladang Produksi Guru PAI

UINAM dan kampus-kampus di Makassar pada umumnya terkenal keras. Mahasiswanya sering melakukan demonstrasi yang disertai dengan bakar ban. Perkelahian atau tawuran terjadi antar mahasiswa, tidak hanya antar Perguruan Tinggi, bahkan juga antar fakultas dalam satu Perguruan Tinggi.

Organisasi ekstra mahasiswa yang *exist* di UINAM antara lain: HMI, PMII, IMM, KAMMI, IMDI. Di UINAM, aktivis HMI terkenal sebagai demonstran & kurang peduli dengan akademik kampus, PMII aktif dalam kajian-kajian isu kontemporer dan cukup berprestasi secara akademik, IMM dan KAMMI aktivis dakwah masjid.

Menurut penuturan dosen-dosen UINAM, sekitar lima sampai sepuluh tahun lalu banyak dijumpai mahasiswa yang berjubah, bercelana cingkrang di atas mata kaki, dan bersurban, serta mahasiswi bercadar di kampus. Lambat laun keberadaan mahasiswa yang berjubah dan bersurban mulai menghilang, namun mahasiswi bercadar dengan berbagai variannya masih banyak dijumpai hingga saat ini. Ada yang mengenakan cadar bagian dari pakaian Muslimah yang dikenakannya (biasanya berwarna hitam atau gelap), ada juga yang bercadar dengan memodifikasi masker kain yang berwarna-warni.

Kehadiran mahasiswa bersurban, bercelana cingkrang dan mahasiswi bercadar tersebut menandakan arus baru masuknya gerakan mahasiswa ekstra kampus yang lebih berorientasi pada tawaran model ber-Islam ala Timur Tengah, terutama pada aspek simbolisasi cara berpakaian. Banyak diduga cara berpakaian yang dikenakan gerakan mahasiswa model ini tidak hanya sekadar menawarkan bentuk kesalehan (*piety*), namun juga berkorelasi dengan *world view* mereka tentang hubungan antara Islam dan Negara, kemajemukan, dan hubungan dengan kelompok-kelompok keagamaan lain. Disinyalir pandangan keagamaan mereka cenderung eksklusif, pemahaman teks keagamaan secara literal, dan kurang toleran terhadap perbedaan. Di kampus, gerakan mahasiswa model ini berhimpun dalam Lembaga Dakwah Kampus/Fakultas serta Mahasiswa Pecinta Masjid/Mushalla yang keberadaannya ada mulai dari tingkat universitas hingga fakultas.

Khawatir terhadap perkembangan gerakan keagamaan model ini, pimpinan universitas dan fakultas mulai mengambil beberapa langkah kebijakan. Fakultas

Keguruan dan Ilmu Tarbiyah UINAM, misalnya, menjadikan organisasi ekstra MPM (Mahasiswa Pecinta Masjid), dan LDF (Lembaga Dakwah Fakultas) menjadi organisasi intra. Dengan diakui sebagai organisasi intra, maka MPM dan LDF dapat memperoleh dana pembinaan dari kampus. Langkah ini ditempuh agar keberadaan organisasi ini dapat dipantau dan dibina secara langsung oleh pihak fakultas.

Di UMI, organisasi ekstra mahasiswa yang dominan adalah HMI dan PMII. Organisasi ini tersegmentasi per fakultas. Misalnya, di FITK yang dominan PMII, di Fakultas Ekonomi dan Pertanian dominan HMI.

Dulu, sekitar 5 tahun lalu, sempat marak kajian keagamaan di masjid kampus yang dipelopori oleh kelompok-kelompok bercelana cingkrang dan bercadar. Saat ini kelompok tersebut sudah dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan di masjid kampus. Mereka masih ada namun di luar kampus. Kebijakan ini ditempuh karena pimpinan Kampus UMI menyadari bahwa mahasiswa rentan terpapar oleh paham radikal. Paham radikal yang dimaksud oleh pimpinan fakultas adalah paham yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peta Masalah Produksi Guru PAI di Makassar dan Usaha Mengatasinya di Tengah Arus Islamisme

Kesadaran bahwa proses produksi guru PAI selama ini menghadapi berbagai permasalahan sudah menjadi kesadaran bersama para stakeholders PAI di Makassar. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan dosen, pengelola Prodi dan Pimpinan Fakultas Tarbiyah serta FGD dengan mahasiswa. Permasalahan dalam proses produksi guru PAI ini dapat dipetakan dalam 3 ranah: input, proses dan output.

Pada ranah input, disadari bahwa mahasiswa yang masuk PAI tidak semuanya memiliki kompetensi keislaman dan bahasa Arab yang memadai. Pada ranah proses, permasalahan bisa dilihat dari sejauh mana aspek kurikulum, SDM dosen, fasilitas kampus, metode pembelajaran serta lingkungan internal dan external kampus berkontribusi positif terhadap proses produksi guru PAI. Sedangkan pada ranah output, permasalahannya terkait dengan standar kompetensi lulusan atau profil lulusan antar perguruan tinggi yang beragam..

Di antara tiga ranah tersebut, permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh Prodi PAI di UINAM dan UMI adalah pada ranah input, sebab diketahui bahwa mahasiswa yang masuk ke Prodi PAI tidak semuanya memiliki kompetensi keislaman dan bahasa Arab yang memadai. Salah satu faktornya adalah persentase mahasiswa yang berasal dari SMU/SMK masih cukup tinggi. Pengelola PAI UINAM Makassar menyebutkan bahwa sekitar 30-40% mahasiswa PAI berasal dari SMU/SMK. Di UMI angkanya jauh lebih tinggi, mencapai 60%.[2]

[2] Hasil angket mahasiswa menunjukkan bahwa 66% mahasiswa PAI di UINAM, dan 52% di UMI berasal dari SMU/K umum.

Dosen-dosen mata kuliah Keislaman merasa kesulitan dalam mengajar mahasiswa yang berasal dari SMU sebab penguasaan dasar-dasar Studi Islam serta kemampuan Bahasa Arab mereka yang rendah. Beberapa mahasiswa bahkan tidak bisa baca tulis Al-Quran. Secara kelembagaan, UINAM dan UMI telah berusaha untuk mengatasi problem input tersebut. Beberapa langkah yang sudah ditempuh antara lain:

1) Di UINAM terdapat program pembinaan karakter (*character building*) yang mencakup pembinaan bahasa asing dan BTQ. Program ini diperuntukkan bagi semua mahasiswa baru untuk memberikan bekal standar minimal kemampuan berbahasa Asing (Arab dan Inggris) serta kemampuan Baca Tulis Al-Quran. Namun menurut pengelola dan dosen PAI, program ini hasilnya belum maksimal.

2) UMI memiliki program pesantrenisasi selama sebulan. Sejak tahun 2000 Badan Wakaf UMI memiliki Pesantren Darul Mukhlishin di Pangkeb, yang berjarak sekitar 60 KM dari Kota Makasar. Di Pesantren inilah seluruh mahasiswa UMI dari seluruh program studi wajib mengikuti program pesantrenisasi selama satu bulan penuh. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa angkatan, setiap angkatan bisa mencapai 700 mahasiswa. Mereka wajib menginap di pesantren. Selama di pesantren para mahasiswa melakukan kegiatan peribadatan salat wajib dan sunah (*Tahajjud* dan *Dhuha*), berzikir, serta mengikuti kajian keislaman (aqidah, akhlaq, syariah). Bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar, diadakan kelas khusus. Selama sebulan di pesantren para mahasiswa juga diajak menjalankan puasa Senin Kamis. Menurut pengakuan pimpinan dan dosen Fakultas Agama Islam, program pesantrenisasi ini hasilnya cukup positif mengubah karakter mahasiswa. Kampus yang dulu terkenal mahasiswanya sering berkelahi antar fakultas, lambat laun mulai hilang. Menurut penuturan mahasiswa, pesantrenisasi efektif mengubah kepribadian, namun hanya sesaat, sehingga cepat hilang begitu kembali ke aktivitas kampus.

3) Usaha lain untuk mengatasi lemahnya input dalam studi Islam dan bahasa Arab, beberapa mahasiswa didorong oleh para dosen untuk belajar mandiri atau ikut kajian-kajian di luar. Berapa dosen juga merekomendasikan *peer teaching*, meminta mahasiswa yang berlatar belakang sekolah umum untuk belajar pada teman sejawat yang memiliki kemampuan lebih baik seperti yang dari alumni pesantren atau Aliyah.

4) Di UINAM, untuk meningkatkan kualitas input PAI juga dilakukan dengan mengurangi jumlah mahasiswa yang diterima. Sebelumnya, mengingat peminat prodi ini cukup banyak, biasanya jumlah mahasiswa baru yang diterima sampai 5 kelas. Namun sejak 3 tahun terakhir mulai dikurangi menjadi 3 kelas pada tahun 2016 dan 2017, dan hanya 2 kelas di tahun 2018.

Permasalahan kedua adalah pada ranah lingkungan dalam dan luar kampus terkait dengan munculnya ancaman paham dan gerakan keagamaan mahasiswa yang orientasi

Islamismenya cukup kuat. Di antara ciri-ciri gerakan mahasiswa yang semacam ini adalah pemahaman teks keagamaan secara literal, apresiasi terhadap keragaman yang rendah, serta praktik keagamaan yang lebih berorientasi simbolis. Pimpinan fakultas dan pengelola Prodi PAI serta mahasiswa sudah menyadari potensi masalah di kemudian hari terhadap gerakan mahasiswa yang semacam ini, baik di UINAM maupun UMI.

Para mahasiswa dalam FGD ketika ditanya apakah di kampus ada mahasiswa atau yang diindikasi radikal, sebagian mahasiswa mengakuinya. Hal yang sama juga diakui oleh sebagian dosen dan pimpinan fakultas. Ketika peneliti kembali bertanya apa yang dimaksud dengan kelompok radikal itu, mereka menjawab bahwa yang dimaksud kelompok radikal adalah yang anti NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk merespons menguatnya arus Islamisme tersebut antara lain:

1) Fakultas Tarbiyah UINAM mengakomadasi Lembaga Dakwah Fakultas (LDF), dan Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) dari organisasi ekstra menjadi organisasi intra. Dahulu, ketika menjadi organisasi ekstra, kedua lembaga tersebut sebagian besar diisi mahasiswa dari kelompok tertentu yang terindikasi Islamismenya tinggi. Untuk meminimalkan dominasi kelompok tertentu dalam lembaga tersebut, serta untuk memudahkan pihak fakultas terlibat secara langsung dalam penyemaian Islam moderat, maka keduanya diadopsi menjadi organisasi intra sehingga aktivitas dan para aktivisnya lebih bisa dipantau dan dikontrol.

2) Di UMI, ada kebijakan untuk membatasi dan melarang kelompok-kelompok yang diindikasi memiliki Islamisme tinggi beraktivitas di masjid kampus. Pihak Fakultas bahkan menerapkan kebijakan mengontrol keikutsertaan mahasiswa dalam kajian keislaman di luar kampus. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan PAI UMI bila akan beraktivitas di kelompok kajian luar kampus diminta untuk meminta izin pimpinan fakultas.

3) Dalam perkuliahan, dosen-dosen PAI di UINAM juga sudah memasukkan isu-isu kontemporer seperti multikulturalisme dan pentingnya toleransi dalam mata kuliah keislaman, seperti dalam fikih kontemporer, hadis, tafsir, dan sejarah peradaban Islam. FAI UMI memiliki MK Fikih Ikhtilaf Kontemporer untuk meng-*update* wawasan mahasiswa tentang perkembangan terkini di dunia, seperti isu radikalisme dan terorisme, juga untuk mengembangkan sikap *tasamuh* terhadap perbedaan, selain itu juga ada mata kuliah Pendidikan Multikultural.

4) Pimpinan Fakultas dan dosen-dosen PAI juga sadar dan peduli terhadap adanya mahasiswa yang terindikasi memiliki pandangan radikal, dalam pengertian anti NKRI dan tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dibawah bidang III, kemahasiswaan, FAI memiliki forum dialog akademik setiap semester, setelah selesai *Final Test*, sebagai ajang untuk menghimpun masukan dari mahasiswa terhadap proses belajar mengajar dan kehidupan kampus. Di forum ini juga

sering muncul laporan dari mahasiswa terhadap mahasiswa lain yang berpotensi radikal, atau laporan terhadap dosen yang cara mengajarnya kurang memadai, dll. Forum dialog akademik ini dihadiri oleh Pimpinan Fakultas dan mahasiswa, dosen tidak diundang.

5) Pimpinan Fakultas dan dosen UMI menilai radikalisme merupakan ancaman. Lembaga Dakwah dan Pengembangan Kampus islami memantau pergerakan kelompok mahasiswi yang bercadar dan mahasiswa *junkies* (bercelana congklang). Sejak 5 tahun terakhir UMI membatasi akses kelompok ini untuk menyelenggarakan kegiatan dan kajian di masjid. Saat ini mahasiswi bercadar juga diawasi. Di UMI, sebagaimana di UINAM dan kampus lain di Makassar, salah satu penyemai dan agen penyokong cadar adalah Wahdah Islamiyah.

6) Kebijakan FAI UMI untuk membentengi mahasiswa dari gerakan keislaman yang berpotensi radikal antara lain: Kampus membuat program kegiatan kajian dan zikir bagi mahasiswa untuk membentengi mahasiswa dari kemungkinan terpengaruh oleh paham radikal yang anti NKRI. Mahasiswa dihimbau secara lisan untuk tidak mengikuti kajian keislaman di luar kampus, sebelum berkoordinasi atau memperoleh izin dengan pimpinan Fakultas. Kegiatan ini dibawah kendali WD IV yang membidangi dakwah dan kampus islami.

Secara umum mahasiswa PAI di Makassar pro NKRI. Mahasiswa juga berpandangan bahwa Islam yang pas untuk Indonesia adalah Islam yang moderat ala Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Dalam perspektif mahasiswa PAI, kelompok radikal adalah yang anti NKRI. Mahasiswa lebih melihat radikalisme dalam perspektif kewarganegaraan yakni loyalitas warga negara terhadap prinsip berbangsa dan bernegara yang telah menjadi konsensus bersama. Persepsi mahasiswa ini menunjukkan bahwa "radikalisme" tidak terkait langsung dengan model dan cara berpakaian seseorang.

Baik di UINAM dan UMI ada mahasiswi yang bercadar, namun pihak kampus belum pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarangnya. Fenomena cadar di kampus Islam akhir-akhir ini menjadi isu yang menarik. Ada yang mengaitkan maraknya pemakaian cadar tersebut dengan indikasi keterpaparan para pemakai terhadap paham radikal yang anti NKRI, ada yang menilai hal itu sebagai ekspresi kesalihan (*piety expression*), dan ada juga yang menilainya hanya sebatas *trend* fashion busana muslimah.

Anggapan bahwa cadar sebagai indikasi keterpaparan terhadap paham radikal yang anti NKRI di kalangan mahasiswi tampaknya sulit dibuktikan sebab berdasar riset peneliti terhadap fenomena dan tren mahasiswi bercadar di UINAM pada bulan Agustus 2018, diperoleh data 10 dari 13 mahasiswi yang bercadar menyatakan kecintaannya pada NKRI.[3] Riset tersebut juga menghasilkan temuan bahwa mereka bercadar karena alasan teologis, berdasar pemahaman mereka bahwa bercadar merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam dan ekspresi kesempurnaan berislam, bukan sekadar tren mengikuti fashion.

[3] Dari 13 responden tersebut, 3 tidak menjawab. Dari 3 yang tidak menjawab tersebut, 1 orang warga negara asing.

Pernyataan para mahasiswi bercadar ini menunjukkan bahwa mereka mengenakan cadar karena alasan teologis yang bersumber dari pemahaman mereka terhadap teks hadis yang mereka yakini, bahwa wajah bagian dari aurat. Hal ini menandakan aktif dan kuatnya agen-agen penganjur perempuan bercadar dalam memainkan wacana bahwa bercadar bagian dari bentuk kesalihan (*piety expression*). Narasi ini terus mereka bangun sehingga banyak mahasiswi yang mengikutinya. Bila hal ini yang terjadi maka yang diperlukan adalah narasi alternatif yang bersumber dari *nash* yang kuat dan menjelaskan bahwa bercadar bukan wajib, wajah perempuan bukan aurat, serta ada sisi mudarat bercadar dalam proses pembelajaran. Diperlukan peran serta aktif para pakar studi Al-Quran dan al-Hadis dari PTKI untuk memberikan narasi "tanding" yang mudah dan dapat diterima dengan baik oleh para mahasiswi bahwa bercadar bukan bentuk sunah dan apalagi wajib. Langkah semacam ini yang telah dicoba oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan UINAM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan UINAM, mahasiswi bercadar di tingkat S1 jumlah totalnya belum diketahui secara pasti sebab pihak kampus belum pernah melakukan pendataan secara resmi. Yang menarik, mahasiswi yang bercadar bisa dijumpai tidak hanya pada mahasiswi tingkat sarjana (S1), namun juga di tingkat pascasarjana (S2) dan beberapa laboran. WR III yang juga pakar hadis menuturkan bahwa ia pernah memiliki 6 mahasiswi Pascasarjana bercadar di dalam satu kelas. Dekan Saintek UINAM juga menuturkan selain ada beberapa mahasiswinya yang bercadar, ada salah sorang laborannya yang juga bercadar.

Pihak kampus, dalam hal ini rektor, belum pernah mengeluarkan kebijakan khusus tentang cadar. Memang pernah dibahas dalam rapat pimpinan universitas, namun karena perbedaan perspektif dalam memandang cadar di kalangan pimpinan, maka belum pernah ada kebijakan resmi dari kampus tentang cadar ini, apakah akan dilarang, dibatasi atau dibebaskan. Yang ada adalah inisiatif personal dari para dosen atau pimpinan. Misalnya, WR III mengajak dialog mahasiswi bercadar yang ditemui secara insidental. Mereka biasanya ditanya apa alasan mengenakan cadar. Jika mereka bercadar karena alasan teologis, atau berdasar pemahamannya terhadap hadis tertentu, maka mereka akan diajak untuk memahami hadis yang dijadikan dasar bercadar tersebut secara tepat. Lalu mereka diajak untuk memahami *nash* tersebut secara menyeluruh agar tidak salah kaprah menginterpretasi ayat dan hadis. Selain itu para mahasiswi tersebut bercadar karena mengikuti anjuran dari kelompok tertentu, maka perlu diadakan pembinaan untuk memetakan antara kajian keislaman dengan praktik hidup berdasarkan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan budaya di Indonesia.

Sejauh ini di UINAM dan UMI belum ada aturan larangan bercadar di kampus, melainkan hanya kode etik berpakaian yang berlaku di kampus. Jika nanti akan ada aturan larangan bercadar diberlakukan di kampus, terutama di lingkungan PTKI, pimpinan kampus berharap agar regulasi tersebut sebaiknya berasal dari Kementerian Agama Pusat, bukan dari aturan masing-masing PTKI.

Sebagian pimpinan kampus juga mengusulkan agar mahasiswi yang bercadar perlu dicari solusi secara persuasif dan partisipatif. Alasan utama mereka bercadar yang sering disampaikan kepada publik adalah kehati-hatian dan menjaga diri, sehingga hal itu tidak bisa diputuskan sepihak oleh mayoritas yang tidak mengenakan cadar. Pimpinan kampus perlu diskusi panjang dengan mereka melalui forum khusus. Harapannya melalui forum tersebut mereka mendapatkan metode memahami ayat atau hadis lebih *comprehensive*.

Menatap Masa Depan PAI

Ada beberapa usulan dari *stakeholders* PAI di Makassar yang mengemuka dari hasil *Focused Group Discussion* (FGD) tentang upaya perbaikan Prodi Pendidikan Agama Islam. *Pertama*, hilangkan skripsi, sebab skripsi yang ditulis oleh mahasiswa hanya disimpan menumpuk di perpustakaan. Usulan ini muncul dalam FGD mahasiswa. Sebagai gantinya, mahasiswa diminta membaca dan memahami sekitar 150 buku tentang Islam. Usaha ini juga untuk merespons minat baca mahasiswa yang saat ini menurun dan budaya literasi yang hilang. Tentu usulan semacam ini terlalu ekstrem, sebab menulis skripsi bagi mahasiswa strata satu --atau level 6 jika merujuk pada Kurikulum Standard Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)— orientasinya adalah latihan penelitian. Pada konteks ini menulis skripsi merupakan media latihan mahasiswa untuk memecahkan masalah secara akademik melalui prosedur ilmiah. Melihat masih pentingnya kemampuan meneliti bagi sarjana, usulan komprominya adalah tambahan "kewajiban" membaca sejumlah buku bagi mahasiswa yang akan lulus, di samping kewajiban menulis tugas akhir dengan menulis skripsi.

Usulan *kedua* yang muncul dari mahasiswa adalah memberlakukan syarat kemampuan baca kitab bagi mahasiswa yang akan lulus. Usulan ini penting dan strategis untuk calon alumni PAI yang nanti akan menjadi guru pendidikan Agama Islam di Sekolah. Dengan bekal kemampuan baca kitab, para guru akan mampu mencari rujukan mengajar langsung pada sumber yang *mu'tabar* dan otoritatif, tidak hanya bergantung pada *teks book* atau bahkan hanya pada sumber-sumber di internet yang kualitasnya belum teruji. Namun, usulan ini tentu memerlukan dukungan SDM dosen yang juga memiliki kemampuan baca kitab yang baik. Sayangnya, sebagaimana pengakuan sebagian mahasiswa, tidak semua dosen PAI memiliki kemampuan baca kitab yang baik. Syarat lulus mahasiswa PAI yang saat diberlakukan di UINAM adalah hapal juz 30 dan dan TOEFL minimal 350.

Usulan *ketiga* yang mengemuka adalah perlunya forum silaturahmi mahasiswa PAI se-Indonesia. Forum silaturahmi mahasiswa PAI ini bila dikelola dengan baik memiliki peran dan fungsi strategis untuk meningkatkan kapasitas calon guru PAI. Melalui forum mahasiswa PAI se-Indonesia diseminasi ide dan perkembangan mutakhir dalam kependidikan dapat dengan mudah dilaksanakan. Forum mahasiswa PAI se-Indonesia juga dapat difungsikan sebagai ajang kompetisi akademis serta minat bakat

antar mahasiswa melalui *annual meeting*, yang berisi konferensi ilmiah tentang PAI, lomba karya tulis ilmiah, dan kegiatan keilmiahan lainnya.

Keempat, sudah saatnya produksi guru PAI berorientasi pada kualitas, bukan kuantitas. Prodi PAI termasuk program studi yang jumlahnya paling banyak di lingkungan PTKI baik negeri maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa peminat Prodi PAI masih cukup besar. Besarnya peminat dari masyarakat yang akan kuliah di Prodi ini semestinya tidak digunakan sebagai *aji mumpung* untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya yang seolah dijadikan sebagai "lumbung" pendapatan bagi Perguruan Tinggi. Besarnya peminat ini idealnya digunakan untuk meningkatkan kualitas input calon mahasiswa PAI. Prodi PAI tetap dituntut untuk terus meningkatkan animo peminat namun jumlah mahasiswa yang diterima harus dibatasi dengan *passing grade* yang lebih ketat sehingga memenuhi standard kualitas terbaik. Rasio mahasiswa yang ikut seleksi dengan yang lolos perlu terus diperbesar yang mengindikasikan tingkat selektivitasnya tinggi. Semakin baik dan berkualitas *raw input* PAI, semakin "mudah" dalam proses pendidikan dan pengajaran, semakin berkualitas lulusannya, akhirnya akan semakin bermutu pula guru-guru PAI.

Pelajaran Terpetik

Secara metodologi, ada beberapa catatan dalam penelitian ini. Pemilihan sampel mahasiswa dan dosen untuk mengisi angket dalam penelitian ditentukan tidak dengan teknik *random sampling* yang ketat. Untuk mahasiswa, pemilihan sample dilakukan secara *purposive* pada mahasiswa PAI minimal semester V. Sample per semester juga tidak dilakukan secara *random*. Saat menentukan sampel juga belum didasari dengan perhitungan jumlah populasi yang pasti. Pilihan dua kampus, UINAM dan UMI, lebih didasari pada keterwakilan PTKAI negeri dan swasta serta keduanya merupakan kampus ternama di Kota Makassar. Prodi PAI di kedua PTKI tersebut dipilih karena pertimbangan usianya yang paling tua di Kota Makassar, dengan asumsi semakin tua usia prodi tersebut semakin banyak guru PAI yang telah dihasilkan. Hal ini perlu menjadi catatan agar data kuantitatif tidak sertamerta dijadikan *judgement* untuk melakukan generalisasi. Akan lebih tepat bila data kuantitatif tersebut digunakan untuk melihat *tren* serta melengkapi data kualitatif. Sedangkan untuk dosen, sampel dipilih secara *purposive* dengan prioritas pada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah keislaman seperti Fikih, Tafsir, Sejarah Peradaban Islam, Akhlak, Bahasa Arab, dll.

Secara konseptual, penelitian ini berusaha untuk tidak terjebak pada arus wacana radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Sebab, belajar dari penelitian-penelitian terdahulu tentang ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan persetujuan penggunaan kekerasan atas nama agama di kalangan siswa, mahasiswa, guru-guru, serta masyarakat (muslim) pada umumya cenderung hanya memunculkan "keributan" pro dan kontra terhadap hasil penelitian tersebut, namun solusi konkrit terhadap masalah yang sebenarnya kurang terurai secara memadai. Padahal, penelitian-penelitian dan program

counter terrorism dan deradikalisasi yang sudah ada banyak yang terjebak pada *radicalism thesis*, yang menurut Kanan Malik cenderung simplistis dan dibangun oleh argumen yang tidak berbasis data.

Malik mencontohkan dengan mengutip hasil studi M15 tentang extremism di Inggris bahwa "far from being religious zealots, a large number of those involved in terrorism do not practice their faith regularly". Malik juga mengutip hasil penelitian London's Queen Mary College yang menyebutkan tidak adanya korelasi antara pelaku teror dengan latar kemiskinan dan rendahnya pendidikan. March Sageman, mantan agen CIA dan sekarang menjadi akademisi dan konsultan program counterterrorism pemerintah Amarika Serikat, sebagai mana dikutip Malik, menyebutkan bahwa teroris sering berada di antara yang terbaik dan tercerdas dari keluarga kelas menengah (Malik, 2015).

Sayangnya, para pengkritik "*conventional radicalization thesis*" ini juga mengidap kelemahan yang sama. Di antara yang sering digunakan argumen oleh para pengkritik adalah bahwa agama bukan faktor mendorong munculnya aksi terror, namun politik. Intervensi negara-negara Barat terhadap negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang justru mendorong munculnya aksi terror. Argumen semacam ini seolah menutupi adanya faktor internal (cara beragama dan politik dalam negeri) tentang munculnya aksi terror. Malik lebih jauh menulis, "*Where the conventional thesis focuses on the 'pull' factor of fundamentalist Islam, such critics stress the «push» factor of Western foreign policy*" (Malik, 2015).

Mencoba keluar dari jebakan wacana radikalisme dan ekstremisme, penelitian ini menggunakan konsep *Islamisme* yang diharapkan lebih "netral" dalam melihat dan mengategorisasikan temuan. Dengan konsep ini, peneliti mencoba keluar dari sekadar mengelaborasi ancaman intoleransi, radikalisme dan ekstremisme. Pembahasan yang lebih penting adalah *best practice* apa saja yang sudah dilakukan oleh kampus dan pengelola PAI dalam rangka keterlibatan (*engagement*) mereka dalam menyelesaikan problem produksi guru PAI di tengah menguatnya arus Islamisme akhir-akhir ini.

Stakeholders internal PAI di Makassar sudah menyadari bahwa PAI menghadapi berbagai masalah mulai dari input, proses dan output. Pimpinan universitas dan fakultas serta pengelola PAI juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, meski masih bersifat sporadis, belum disertai *roadmap* perbaikan yang jelas sehingga hasilnya belum memadai. Belum terlihat upaya perbaikan yang fundamental terkait tata kelola produksi guru PAI ini. Pembatasan penerimaan jumlah mahasiswa baru PAI di UINAM sejak dua tahun terakhir ini, pesantrenisasi mahasiswa selama sebulan, serta dorongan pada mahasiswa PAI UMI untuk kuliah *twining program* dengan Akademi Bahasa Asing yang secara kebetulan kampusnya berada dalam satu gedung, merupakan contoh usaha pengelola PAI untuk mendapatkan input dan meningkatkan kapasitas mahasiswa yang sudah masuk agar lebih berkualitas. Kepedulian dan keterlibatan secara langsung pihak kampus untuk menangani problem menguatnya

arus Islamisme di kalangan mahasiswa dengan menjadikan organisasi kemahasiswaan ekstra menjadi organisasi intra di FITK UINAM serta pemantauan terhadap mahasiswa yang mengikuti kajian keislaman di luar kampus di UMI merupakan contoh *best practices* pengelola PAI untuk keluar dari "*business as usual*". Meski demikian inisiasi reformasi yang sudah dilakukan oleh kedua Prodi PAI di Makasar masih terkesan *responsive*, belum proaktif yang disertai dengan peta jalan yang komprehensif. Untuk itu, usaha-usaha ini perlu memperoleh dukungan dari segenap pihak, terutama para pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Belum efektifnya "reformasi" sistem produksi guru PAI ini salah satunya juga dikarenakan belum maksimalnya kebijakan yang diambil berbasis pada data (*data driven policy*). Hal ini tampak pada belum digunakannya secara maksimal data kuantitatif sebagai basis analisis masalah dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dosen dan pengelola (Kaprodi dan Sekprodi) mengeluhkan banyaknya alumni SMU Umum yang masuk PAI, namun ketika ditanya berapa persen pastinya alumni SMU Umum yang masuk di PAI, tidak ada data kuantitatif pasti yang bisa diberikan. Angka yang disampaikan hanya perkiraan. Keluhan dosen-dosen mata kuliah keislaman tentang sulitnya mengajar mahasiswa yang berlatar belakang SMU juga belum dibarengi dengan kebijakan fundamental untuk mengubah sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, atau implementasi program matrikulasi bagi yang sudah diterima. Pada konteks inilah masih terjadi tarikan kepentingan antara tuntutan pasar dan idealitas. Karena tuntutan pasar, bahwa prodi PAI merupakan prodi yang laku, belum ada upaya pembatasan terhadap input yang berasal dari SMU, meskipun pimpinan Fakultas dan Prodi PAI mengakui bahwa alumni PAI yang berlatar belakang pesantren secara kualitas lebih baik dibanding alumni non-Pesantren.

Diperlukan kebijakan dari Pusat (Kemenag) untuk melakukan reformasi PAI secara fundamental. Fakultas dan Prodi sudah melakukan inisiatif perbaikan, namun hasilnya masih belum efektif dan terkesan sporadis. Para pengelola PAI mengharapkan reformasi PAI dilakukan melalui kebijakan Pusat (Kemenag).

Catatan Penutup

Berbagai masalah dalam proses produksi guru PAI telah menjadi kesadaran bersama di kalangan para pemangku kepentingan internal di UINAM dan UMI Makassar. Secara SDM, dosen-dosen PAI UINAM dan UMI berkualitas, namun input mahasiswa masih belum sesuai dengan kriteria ideal. Hal ini dikarenakan masih tingginya rasio calon mahasiswa PAI yang berasal dari SMU/SMA Umum dengan penguasaan dasar-dasar keislaman dan Bahasa Arab yang masih di bawah standard. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengelola Prodi PAI dan mahasiswa PAI dengan latar belakang yang beragam tersebut dihadapkan dengan trend arus Islamisme yang menguat di lingkungan kampus. Untungnya, para *stakeholders* internal "produsen" guru PAI di Makassar sudah menunjukkan kesadarannya terhadap ancaman menguatnya arus Islamisme tersebut dan

telah melakukan berbagai upaya *engagement* untuk melakukan langkah-langkah preventif melalui berbagai kebijakan. Prodi PAI UINAM dan UMI Makassar juga telah melakukan berbagai upaya perbaikan terhadap masalah produksi guru PAI serta melakukan inovasi untuk keluar dari pengelolaan Prodi yang biasa-biasa saja (*business as usual*). Diperlukan dukungan yang kuat dari para pemangku kebijakan, terutama Kementerian Agama Pusat untuk berani mengambil langkah fundamental memperbaiki proses produksi guru mulai dari input, proses dan output.

Referensi

Buku Panduan Fakultas Agama Islam Universitas Muslimin Indonesia, 2017.

Buku Saku: Peraturan Akademik, *Peraturan Kemahasiswaan*, *Panduan Sistem Akademik Terpadu (SIMPADU)*, Univeritas Muslim Indoensia, 2014.

http://news.rakyatku.com/read/70172/2017/10/18/mahasiswa-umi-tawuran-suasana-kampus-memanas. Diakses 15 November 2018.

http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/.

Malik, Kenan, "The Push and Pull of Extremism", dalam https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/10/push-pull-extremism-151005103731467.html. Diakses tanggal 9 Desember 2018.

Syamsurijal, *Salafi-Wahabisme; Potret Pergesaran Paham Keagamaan Mahasiswa Islam Makassar*, Penelitian tidak diterbitkan.

Tim Penyusun Buku Saku Mahasiswa. 2018. *Buku Saku Mahasiswa*, *Pedoman Aturan dan Ketentuan dalam Kehidupan Kampus*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Yayasan Wakaf UMI. 2018. *Buku Panduan Pelaksanaan Penceraham Qalbu*. Padanglampe: Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin UMI.

10

ISLAM MODERAT VS ISLAM MILENIAL

Sistem Produksi Guru PAI di UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim Nusa Tenggara Barat

Alimatul Qibtiyah

Pendahuluan

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah satu wilayah yang dijadikan barometer keislaman di wilayah Indonesia bagian Timur. NTB juga dikenal sebagai pulau seribu masjid yang dikawal oleh tuan guru atau kiai haji dalam istilah Jawa yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Selain sebagai pemegang kunci narasi keislaman di Lombok, para tuan guru bersama lembaga non pemerintah lainnya dalam beberapa persoalan dapat menjadi pelerai konflik yang efektif di NTB (Jacob, 2010). Aspek religiositas masyarakat Lombok yang tinggi, ditambah dengan konstruksi Islam lokal dari Nahdlatul Wathan (NW) -yang secara kuantitas keanggotaan merupakan organisasi Islam terbesar di NTB- menjadikan beberapa kampus PTKI membuka Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk menjawab kebutuhan "pasar" pendidikan Islam di Lombok.

Dua perguruan tinggi di NTB, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan Institut Agama Islam Nurul Hakim (IAI Nurul Hakim), menjadikan PAI sebagai prodi unggulan. Karena itulah dua kampus ini menjadi sumber penting di saat bicara

sistem produksi guru agama dan pemahaman Islamisme para calon guru PAI di NTB. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Islamisme mempunyai enam spektrum yaitu purifikasi, formalitas beragama, anti sistem, anti agama lain, anti Barat dan kekerasan (Tibi, 2012). Salah satu catatan penting sebagai gambaran keagamaan di NTB selain NW, organisasi Islam yang juga terus berkembang hingga saat ini adalah Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Ahmadiyah. Selain itu, data yang juga patut dicatat adalah meskipun terhitung pulau kecil NTB memiliki lembaga pendidikan Islam (pesantren) yang cukup banyak. Data BPS hingga tahun 2014 mencatat sebanyak 549 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten di NTB, dan pada tahun 2017 BNPT mencatat 5 pesantren di NTB terindikasi radikal (Sindu, 2017).

Oleh karena itu, menjadi penting untuk memaparkan hasil penelitian terkait sistem produksi Guru PAI yang melibatkan mahasiswa, dosen dan pimpinan yang berjumlah 153 orang dengan rincian 106 Mahasiswa/i, 21 Dosen dan 6 pimpinan, 84 laki-laki dan 69 perempuan, 82 dari UIN Mataram dan 71 dari IAI Nurul Hakim ini. Alur pembahasan dalam tulisan ini, setelah memberikan alasan pemilihan kota dan PT target penelitian, lalu dilanjutkan dengan sikap Islamisme para dosen calon guru PAI/ mahasiswa/i, kemudian dilanjutkan dengan sistem produksi guru PAI yang terdiri dari proses input dan pola rekrutmen mahasiswa PAI. Sistem produksi guru PAI ini juga akan dilihat kesesuaian visi, misi dengan kurikulum yang ditawarkan serta profile dosen, proses kegiatan belajar mengajar, suasana dan kegiatan lingkungan kampus yang dimungkinkan mempengaruhi sistem produksi guru PAI. Setelah kesimpulan, di akhir tulisan ini akan diberikan rekomendasi sebagai bahan pembuatan kebijakan bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas sistem produksi calon guru PAI, serta menguatkan moderasi beragama mereka yang mana hasil penelitian akan memberi sumbangan pada kehidupan Indonesia yang lebih baik.

Profil UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim

UIN Mataram sebelumnya berstatus IAIN dan berganti nama menjadi UIN 2017. Masa transisi ini menjadikan UIN terus berbenah dalam banyak aspek, baik dari aspek sarana maupun prasarana termasuk sumber daya manusia. Ada lima Fakultas untuk program sarjana yaitu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Sedangkan Program Pascasarjana ada enam Program Studi yaitu, Pendidikan Bahasa Arab, Komunikasi Penyiaran Islam, Ekonomi Syariah, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Ahwal Syakhsiyah dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Satu-satunya yang punya program Doktor di UIN Mataram sampai tahun 2018 adalah PAI. Selain PAI, Fakultas Tarbiyah dan keguruan mempunyai 9 program studi yang lain, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, Matematika, IPS Ekonomi, IPA Biologi, PGMI, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan PAUD. Persoalan akreditasi, sampai tahun 2018 UIN Mataram belum mempunyai prodi yang terakreditasi A. Saat penelitian ini dilakukan, perkuliahan

masih banyak dilaksanakan di tenda karena banyak ruang yang tidak layak digunakan pasca gempa di tahun 2018.

IAI Nurul Hakim sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurul Hakim, diresmikan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1421 H/13 September 2000 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si. IAI Nurul Hakim adalah perguruan Tinggi di bawah Yayasan PP Nurul Hakim yang merujuk model pendidikan dan pengajaran PP Modern Gontor. IAI Nurul Hakim memadukan antara tradisi ilmiah kampus (intelektualitas) dengan tradisi spiritualitas Pesantren sehingga dapat melahirkan Sarjana Islam yang kreatif, tangguh, profesional, mandiri dengan dijiwai oleh nilai-nilai agama (IAI Nurul Hakim, 2018). Program studi meliputi di IAI Nurul Hakim terdiri dari Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Agama Islam (PAI) dan D-IV PGMI.

Di lingkungan IAI Nurul Hakim, selain Perguruan Tinggi ada lembaga pendidikan lain dari tingkat Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Ma'had Aly Darul Hikmah dan bagian Al-Ulum Al-Islamiyah serta Bahasa Arab. Di pesantren Nurul Hakim bahkan ada Progam Pendidikan Khusus (*Kulliyatul Mu'allimin Wal Mu'allimat Al-Islamiyah*-KMMI) yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih mendekati kesempurnaan di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu agama Islam. Kurikulum pendidikan merupakan perpaduan antara kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pesantren Nurul Hakim dan KMI Pondok Modern Gontor dan sekolah-sekolah menengah yang ada di Timur Tengah. Dengan alokasi waktu belajar yang lebih banyak dengan sistem Full Days School. MIPA, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Ilmu-ilmu agama Islam merupakan program inti yang sangat diutamakan di samping kegiatan ekstra lainnya. Santri/santriwati yang bisa masuk ke Program Pendidikan Khusus adalah calon santri yang telah lulus masuk ujian pesantren dan memiliki NEM SD di atas 32 serta lulus pada ujian seleksi dengan menyetujui persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti kesiapan belajar selama 6 tahun (MTs dan MA) (PP Nurul Hakim, 2018). Jika dilihat dari sistem yang ada di Pesentren Nurul Hakim mempunyai basis keagamaan dan bahasa Arab yang kuat. Sama dengan UIN Mataram, IAI Nurul Hakim juga belum ada prodi yang terakreditasi A.

Islamisme Mahasiswa dan Dosen

Berdasarkan tingkat Islamisme yang digagas Bassam Tibi (2012) data antara dosen dan mahasiswa berbeda. Tingkat Islamisme dosen, jika diurutkan dari yang paling rentan adalah sekitar 48% anti Barat, 34% anti agama lain dan juga cenderung puritan 20% setuju dengan formalitas syariat Islam, 5% setuju dengan kekerasan berbasis agama. Semua responden dosen setuju (100%) dengan sistem demokrasi. Jika dilihat aspek kekerasan yang berbasis agama, mahasiswa lebih banyak yang setuju (23%) daripada dosennya (5%). Namun jika dilihat berdasarkan asal perguruan tinggi, dosen-dosen IAI

Nurul Hakim mempunyai tingkat Islamisme yang lebih tinggi daripada dosen-dosen yang ada di UIN Mataram. Gambar 10.1 menunjukkan dengan jelas perbedaan tersebut.

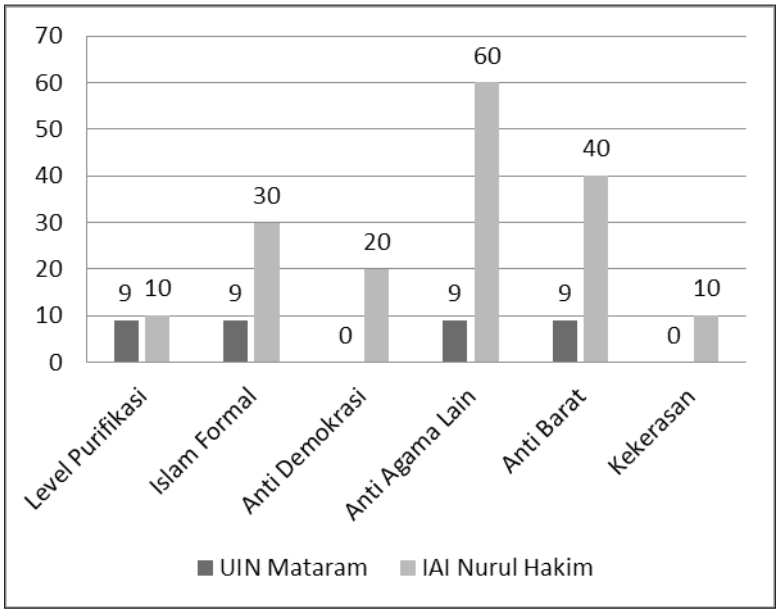

Gambar 10.1: Score Islamisme Dosen UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim di NTB

Sedikit berbeda dengan Islamisme dosen, urutan yang paling rentan bagi mahasiswa adalah 60% anti Barat dan cenderung puritan, 47% setuju dengan formalitas syariat agama, 46% anti demokrasi, 42% anti agama lain dan terakhir 23% menyetujui kekerasan berbasis agama. Namun jika dilihat berdasarkan asal perguruan tinggi, sama seperti para dosennya, mahasiswa IAI Nurul Hakim mempunyai tingkat Islamisme yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang ada di UIN Mataram. Chart 2 menjelaskan bahwa hampir di semua aspek, kecuali anti demokrasi, Mahasiswa IAI Nurul Hakim mempunyai tingkat Islamisme yang lebih tinggi daripada mahasiswa UIN Mataram.

Baik dosen maupun mahasiswa mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu isu resistensi Barat menjadi isu yang paling menjadi perhatian mereka. Salah satu mahasiswa dari UIN Mataram saat di Focus Group Discussion (FGD) menyebutkan bahwa dia tidak mau sekolah ke Barat sekalipun yang memberikan beasiswa adalah masyarakat muslim yang ada di sana (FGD, 30 September 2018).

Beberapa mahasiswa dari UIN Mataram mengatakan seharusnya pemimpin itu muslim dan demokrasi itu tidak selalu menjadikan pemimpin itu muslim, karena ada peluang untuk agama lain, karena mau tidak mau harus diterima.

> Saya berpandangan, karena terlahir di sini mau tidak mau harus diikuti dan menerima sistem demokrasi karena demokrasi memberikan peluang seseorang tanpa membedakan

latarbelakang agama. Kurang pas menurut saya harus orang Islam yang naik jadi pemimpin (Feb, interview September 2018)

Menurut saya seorang rakyat harus memilih pemimpin seagama, mempercayakan, harus agama Islam karena sudah dijelaskan pada surat Maidah. Yang penting Islam karena mempercayakan agama lebih baik dari pada non muslim (Adi, interview 30 September 2018).

Berbeda dengan dua temannya, salah satu mahasiswi menyetujui sistem demokrasi dan dia tidak mempermasalahkan pemimpin non muslim, yang penting sikap dan perilakunya islami.

Menurut saya Islam itu musyawarah intinya dan demokrasi bentuk yang penting musyawarah yang penting hasilnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan tidak membebankan Islam. Sekalipun ia tidak Islam namun sifatnya Islam, tidak apa-apa tidak Islam namun kepribadiannya Islam (Lina, interview 30 September 2018).

Saat ditanya tentang keberadaan non Muslim di Indonesia, salah satu mahasiswa IAI Nurul Hakim berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia itu Islam semua. Namun hal ini disanggah oleh beberapa temannya yang mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin Islam semua, karena dalam sejarah berbagai agama ada di Indonesia.

Kalau saya sendiri karena kita berbhineka tunggal ika, maka kita yang harus bersosialisasi, bertoleransi antar umat beragama, sama kita ambil dari Quran yang *lakum dinukum waliyadin* (FGD, 20 Oktober 2018).

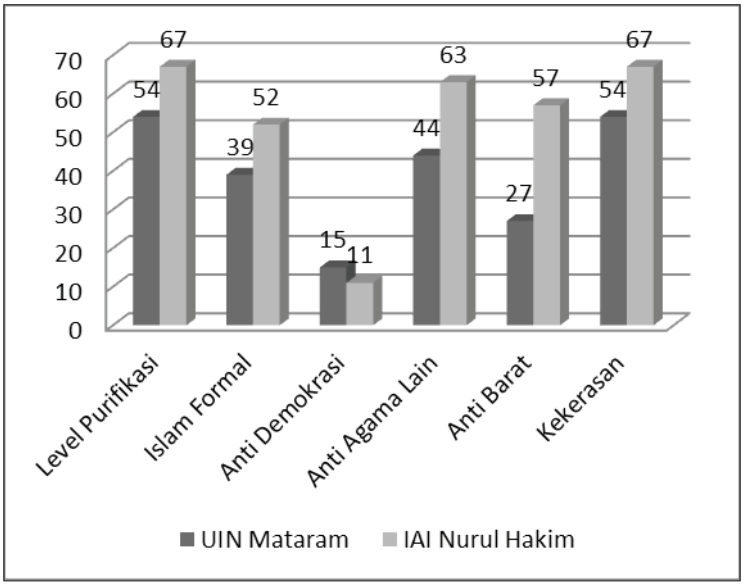

Gambar 10.2: Score Islamisme Dosen UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim di NTB

Saat ditanya tentang kemungkinan terpaparnya radikalisme di kalangan mahasiswa PAI, dan indikator terpaparnya baik dosen dan pimpinan menyebutkan dengan simbol cadar. Mahasiswa Prodi PAI lebih banyak yang menggunakan cadar daripada mahasiswa Prodi lainnya di UIN Mataram. Berdasarkan data yang diperoleh, di UIN Mataram ada 75 mahasiswi yang memakai cadar , 45 (60%) di antaranya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dari 45 tersebut 14 (31%) di antaranya dari PAI. Hal ini disetujui oleh salah seorang dosen yang baru pindah ke PAI, yang mana sebelumnya di Prodi Matematika.

> Di Prodi Matematika yang ada di UIN, kalau biasanya prodi non agama di kampus umum itu lebih konservatif daripada prodi sosial, maka kalau di UIN Mataram sebaliknya, kalau di prodi Matematika yang saya ketahui hanya ada 2 orang yang pakai masker, dan kadang juga saya tegur, tetapi kalau di PAI di setiap kelas hampir ada 5-6 mahasiswi yang pakai cadar (Nur Hilaliyati, interview 1 Oktober 2018).

Hal ini tercerminkan juga pada *model* yang ada di website PAI UIN Mataram, yang mana satu di antaranya mengenakan cadar.

Gambar 10.3: Tampilan Beranda Website PAI UIN Mataram

Di IAI Nurul Hakim, para pimpinan tidak setuju jika cadar dijadikan sebagai indikasi radikalisme seseorang. Salah satu hasil wawancara dengan Pimpinan IAI Nurul Hakim, dikatakan bahwa imaginasi pakaian bagi mahasiswa perempuan adalah dengan menggunakan cadar (Supiatun, Interview 22 Oktober 2018). Agak berbeda, Wakil Ketua Bidang Akademik IAI Nurul Hakim berpendapat bahwa:

> Pakaian ideal di Indonesia adalah yang penting menutup aurat persoalan cara menutupnya terserah dan sebaiknya di Indonesia biar seperti sekarang ini yang mana mempunyai keragaman dalam cara berpakaian muslimahnya (Mukhlisin, interview 22 Oktober 2018).
>
> Pemakaian cadar di sini dihormati, dipersilahkan, malah lebih bagus jika pakai cadar semua...pakai cadar itu lebih terjaga, misalnya kalau terlambat,...pakai cadar kok terlambat, maka dia akan malu. pakai cadar bukan dari bagian radikalisme (Supiatun, interview 22 Oktober 2018).

Di Nurul Hakim, ada nama-nama 'Hijrah' setelah pakai cadar (Interview 21 Oktober 2018). Nama-nama Hijrah ini ada yang didapatkan dari ustazahnya dan yang membuat sendiri. Salah satu mahasiswi PAI bercadar nama aslinya Nurul dari IAI Nurul Hakim mengatakan bahwa setelah hijrah dia mempunyai nama baru, yaitu SAGITA singkatan dari Sabar, Giat dan Taat (Interview 21 Oktober 2018). Di UIN Mataram pemahaman bahwa *niqab* sebagai simbol ke-*kaffah*-an dan kewajiban berdakwah mendorong untuk mengajak teman-temannya memakai *niqab*, dengan memberikan hadiah cadar di ulang tahunnya (FGD, 30 September 2018).

Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai barometer Islamisme seseorang adalah dengan melihat pandangannya pada isu gender. Ada hubungan yang sangat signifikan antara nilai-nilai kesetaraan gender dan status perempuan dan konflik kekerasan (Fink, Zeiger, and Bhulai,. 2016: 28). Mempromosikan keadilan gender adalah merupakan agenda PBB (the UN's Preventing Violent Extremism Plan of Action) dalam mencegah kekerasan ekstrem yang belakangan ini terjadi (UN, 2015). Peran perempuan sebagai pembentuk kebijakan, pendidik, anggota masyarakat dan aktivis dalam berkontribusi memerangi kekerasan ekstrem sudah mulai diakui (OSCE, 2013: 2; Carter, 2013). Women, Peace and Security (WPS) agenda dari UNSCR 1325 juga menekankan bahwa peran perempuan dalam PVE atau CVE sangat signifikan terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, pendidikan kritis dan memberi kesempatan yang setara pada perempuan di ruang publik dan produksi (Couture, 2014: viii; Idris & Abdelaziz, 2017). Hubungan yang kuat antara perempuan dan keluarga juga dipandang sebagai agen yang potensial untuk menyebarkan toleransi (Majoran, 2015; Calfas, 2016). Karena itu melihat aspek gender dalam penelitian ini juga penting.

Ada beberapa aspek gender ditanyakan dalam penelitian ini, yaitu masalah poligami, kepemimpinan perempuan dan keutamaan laki-laki. Berdasarkan data survey menunjukkan bahwa pada isu poligami antara yang setuju dengan tidak setuju hampir sama baik dosen maupun mahasiswa. Temuan ini menarik dan sejalan dengan fenomena yang terjadi di NTB. Beberapa kasus poligami yang dilakukan oleh pejabat termasuk gubernur NTB juga pernah menjadi perbincangan. Tiga mahasiswi bercadar dari IAIN Nurul Hakim menyetujui poligami, namun dengan catatan tidak menjadi istri kedua karena menjadi istri kedua akan menyakiti istri pertama (Interview, 21 Oktober 2018). Artinya lebih baik disakiti daripada menyakiti. Selain itu persetujuan poligami dikarenakan takut berbuat zina, anak-anak tidak kehilangan kasih sayang ayah dan juga agar tetap mendapat nafkah secara adil. Satu responden mengatakan bahwa perlu dibuat surat perjanjian sebelum poligami agar adil dan tetap menafkahinya (Interview, 21 Oktober 2018). Berikut laporan dari mereka:

> Kalo jadi yang kedua ya kayaknya *ndak* bisa. *Nggak* mau. Kalo jadi yang pertama mau dicariin yang kedua boleh... Biar tidak ada yang tersakiti. Biar disakiti *ndak* apa-apa... jika keadaannya itu memang harus poligami, tidak cukup dengan satu isteri, daripada dia zina ya *udah deh* saya ikhlasin *aja* dia poligami yang penting saya sama anak saya itu terjamin... Saya kasih dia jika memang tidak bisa menahannya. Misalnya *kayak* harus *gitu* punya istri

> lagi. Daripada saya *diceraiin*. Ya *udah* kasih aja gitu. Kan kalo *diceraiin* itu *doble* sakitnya... kan kasian anak kita. Kita juga ketemu sama mantan suami malu. Bukan kekasih halal lagi, sudah haram. Iya, harus saya buat surat perjanjian kalo buat saya. Saya *ndak* mau ditelantarkan (Interview, 21 Oktober 2018).

Alasan poligami bagi mereka selain sunah nabi juga untuk menghindarkan suami dari penyaluran syahwat seksual yang tidak halal. Selain itu ada juga responden yang ingin mendapatkan payung emas Fatimah di pintu surga. Padahal Fatimah tidak pernah dipoligami atau Nabi tidak pernah mengizinkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mempoligami Fatimah (Qibtiyah, 2006). Di saat pengalaman Fatimah dijelaskan, para responden mengatakan bahwa hadis tersebut daif. Selain itu mereka juga tidak tahu kalau Nabi Muhammad monogami selama 25 tahun dan dalam Al-Quran Surat An Nisa 129 Nabi merasa tidak dapat berbuat adil dengan istri-istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keislaman terkait dengan poligami kurang memadai.

Kalau terkait dengan kepemimpinan perempuan atas laki-laki dosen lebih mempunyai sensitivitas gender yang baik daripada mahasiswa, hampir setengah (45%) mahasiswa tidak menyetujuinya, sedangkan dosen yang tidak setuju sekitar 10%. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasiswi IAI Nurul Hakim, terungkap bahwa pendapat tentang kepemimpinan perempuan atas laki-laki beragam, ada yang membolehkan asal tidak jadi presiden dan ada yang tidak masalah jadi presiden asal dia mampu. Mereka melaporkan sebagai berikut:

> Perempuan boleh juga jadi pemimpin, asal ilmu perempuan itu lebih dari laki-laki. Namun kalau jadi presiden kalau itu tantangannya *kan* besar, jadi *ndak pantes* aja kalo perempuan (Interview, 21 Oktober 2018).

Tetapi jika bicara keutamaan laki-laki atas perempuan, mahasiswa justru mempunyai sensitivitas gender yang lebih baik daripada dosennya. Mahasiswa yang tidak setuju keutamaan laki-laki atas perempuan hanya sekitar 18%, sementara dosennya sekitar 62%. Ini temuan menarik mengapa generasi milenial ini mempunyai pandangan yang lebih egaliter dalam persoalan ini. Hal ini dimungkinkan karena wacana kesetaraan gender sudah banyak dibicarakan di kalangan anak muda. Sementara pada dosen kalau bukan bidangnya masih jarang berbicara masalah gender, hal ini berbeda dengan kepemimpinan yang mana hal itu tidak hanya wacana tetapi mereka juga mengalami pemilihan pemimpin dan menjadi pemimpin di kampus mereka bekerja.

> Temuan akan masih tingginya bias gender di kalangan dosen dan mahasiswa ini berhubungan dengan tingkat Islamisme mereka. Mereka yang mempunyai bias gender biasanya mempunyai kecenderungan berpikir secara konservatif, tekstual dan puritan. Beberapa literature menyampaikan bahwa kecenderungan berpikir tekstual dan konservatif itu memahami teks keagamaan apa adanya, termasuk dalam memahami isu gender (Burhanudin & Fathurahman, 2004; Wahid, 2008).

Input dan Rekrutmen Mahasiswa

Responden dari unsur mahasiswa terdiri dari 106 (41.5% laki-laki dan 58.5% Perempuan; 49% dari UIN Mataram dan 51% dari IAI Nurul Hakim). Kebanyakan responden (73%) pengguna facebook dan hanya sekitar 9% yang menggunakan Instagram. Kebanyakan mereka tinggal bersama orang tua (44%) dan kost (23%), tinggal di pesantren/Asrama (18%). Walaupun mereka mahasiswa PAI, tidak semua mempunyai motivasi menjadi guru. Hanya sekitar 35% dari mereka yang ingin jadi guru, selebihnya yaitu 33% ingin berdakwah, dan juga sebagian mereka atas kehendak orang tua.

Jika dilihat dari asal sekolahnya banyak yang berasal dari MA Pesantren (43%) lalu diikuti lulusan MAN/MAS 34%, hanya sekitar 14% yang berasal dari sekolah umum (SMAN/SMKN). Berdasarkan laporan Bapak WD1 FTK dan Kaprodi PAI UIN Mataram, ada perbedaan kualitas antara asal sekolah umum dan agama. Selain itu kasus di NTB, aspek geografis atau asal daerah juga menentukan kualitas input calon guru PAI.

> Proses rekrutmen melalui SPAN PTKIN agak rawan, karena tidak ada proses test baca tulis Al Qur'an...Asal sekolah umum biasanya sekitar 15-20% dan mereka mempunyai kualitas yang sangat berbeda dengan yang berasal dari sekolah agama/pesantren... secara psikologis mereka butuh kajian agama secara intensif... selain itu mahasiswa yang berasal dari Timur, mohon maaf ya seperti dari Bima, mereka mempunyai ilmu agama yang lemah dan sebagian mereka memakai cadar... untuk mengatasinya perlu diadakan matrikulasi bagi mahasiswa yang berasal dari sekolah umum (Abdul Quddus dan Saparudin, 1 Oktober 2018) .

Jika dilihat dari proses rekrutmen, Calon mahasiswa PAI UIN Mataram banyak yang menggunakan jalur mandiri yaitu sekitar 57% lalu diikuti dengan SPAN-PTKIN 37%. Sedangkan di IAI Nurul Hakim semua proses rekrutmen calon mahasiswa PAI menggunakan jalur mandiri 90% mereka masuk PAI sebagai pilihan pertama.

Berbeda dengan proses rekrutmen mahasiswa di UIN Mataram, di IAI Nurul Hakim hanya menggunakan jalur Mandiri dan semua yang mendaftar diterima. Fasilitas sangat terbatas, tidak ada LCD di 19 Kelas yang ada dan tidak ada kerja sama dalam hal fasilitas dengan pihak lain. Bahkan di Pondoknya, ada 25 Kelas yang belajarnya di teras. Kondisi tidak muatnya daya tampung sudah diusulkan oleh Bapak WR1 agar menerima sesuai dengan daya tampung fasilitas.

> Saya pernah mengusulkan agar menerima santri di pondok dan sekolah sesuai dengan daya tampung, namun pihak yayasan menyampaikan bahwa semua yang mencari ilmu tidak boleh dihalang-halangi. Kata pihak yayasan, para orang tua sudah dikasih tahu kalau daya tampung terbatas, dan kalau mereka tetap daftar ulang, berarti mereka setuju dengan kondisi yang ada (Mukhlisin, interview 22 Oktober 2018).

Berdasarkan tes kemampuan bahasa Arab, data menunjukkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa PAI mempunyai kemampuan bahasa Arab di atas rata-rata, hanya

ada 5% (1 orang) yang mempunyai kompetensi bahasa Arab yang sangat rendah dan ada sekitar 35% (7 orang) yang mempunyai kemampuan bahasa Arab rendah. Selebihnya yaitu sekitar 45% (9 orang) baik, dan 15% Sangat baik (3 orang). Jika dilihat lebih detail lagi, data menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI IAI Nurul Hakim lebih baik daripada UIN Mataram. 50% mahasiswa IAI Nurul Hakim mempunyai kemampuan bahasa baik dan 20% sangat baik. Sementara di UIN Mataran 40% baik dan 10 % sangat baik. Alasan mahasiswa IAI Nurul Hakim mempunyai kemampuan bahasa Arab yang baik ini dimungkinkan karena adanya kerja sama antara IAI Nurul Hakim dengan Ma'had Khalid bin Walid yang mendapatkan bantuan dana dari Saudi untuk pelatihan bahasa Arab (Muchklisin, interview 22 Oktober 2018).

Terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, rata-rata di kedua perguruan tinggi masuk kategori baik. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang ada didata survei. Kebijakan peningkatan kemampuan bahasa Inggris di UIN Mataram adalah dengan menyelenggarakan English Study Club (ESC). Namun kebijakan ini berlaku bagi siapa yang tertarik (Asfari, Interview, 1 Oktober 2018). Untuk di Nurul Hakim tidak ada program peningkatan kompetensi bahasa Inggris, karena tidak ada yang mengajar (Supiatun, Interview, 22 Oktober 2018).

Selain kemampuan bahasa Arab, di kedua perguruan tinggi ini mempunyai kebijakan terkait dengan hafiz atau hafalan Al Qur'an. Di UIN Mataram ada kebijakan salah satu syarat untuk munaqasyah adalah hafal minimal 1 juz. Agak berbeda dengan UIN Mataram, IAI Nurul Hakim mempunyai perhatian yang lebih dalam hal program hafiz. Kampus akan memberikan beasiswa tahfiz pada mahasiswa yang hafal minimal 15 juz. Berdasarkan data yang ada, belum ada kebijakan untuk peningkatan kompetensi keagamaan lain, selain baca tulis Al-Quran dan tahfiz.

Kemampuan literasi mahasiswa dalam mencari rujukan belajar agama juga bervariasi. Penelitian ini menemukan bahwa lebih banyak perempuan (59%) yang mencari informasi agama dari internet daripada laki-laki (39%). Hampir semua responden baik laki-laki maupun perempuan bergabung ke medsos untuk belajar agama dan hampir dua

Universitas	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Prodi PAI
Visi UIN Mataram adalah menjadi perguruan tinggi Islam dengan tata kelola yang baik dan berdaya saing nasional dalam mengembangkan kajian Islam, sains teknologi dan peradaban secara integratif	Menjadi fakultas tarbiyah dan keguruan dengan tata kelola yang baik dan berdaya saing nasional dalam mengembangkan kajian Islam, sains teknologi, dan peradaban secara integratif.	Menjadi Program Studi PAI "Terkemuka" pada tahun 2025 dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.

Gambar 10.3: Matriks Keselarasan Visi Universitas, Fakultas dan Prodi PAI UIN Mataram

pertiga dari mereka bertanya persoalan agama di medsos. Namun demikian semua masih lebih percaya pada dosen daripada medsos dalam mencari jawaban keagamaan mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan kuatnya pengaruh tokoh agama lokal (tuan guru) di masyarakat.

Visi IAI Nurul Hakim	Visi Prodi PAI
Menjadi perguruan tinggi Islam berbasis pesantren yang unggul, kompetitif, dan inovatif	Unggul, berkualitas, dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, dan praktik Pendidikan Agama Islam.
Misi IAI Nurul Hakim	**Misi Prodi PAI**
Melakukan kegiatan transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mendalam dengan penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan, pembelajaran, dan penelitian Melakukan pembinaan mental spiritual keislaman guna mencapai tujuan terbentuknya sarjana yang berwawasan spiritual pesantren, dan Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta berkonstribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan aktual yang timbul di masyarakat	Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; Mempersiapkan lulusan berkualitas yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran moral, keluasan ilmu agama Islam, dan kematangan profesional dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Mengembangkan penelitian pendidikan agama yang dapat melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan pendidikan agama Islam; dan Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam kerangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, terutama dalam Pendidikan Agama Islam.

Gambar 10.3: Matriks Keselarasan Visi Universitas, Fakultas dan Prodi PAI IAI Nurul Hakim

Visi-Misi

Salah satu ciri lembaga yang baik adalah, lembaga yang mempunyai core values, visi, misi yang jelas terukur dan juga dipahami oleh semua para pihak yang terlibat di dalamnya. UIN Mataram dan IAN Nurul Hakim mempunyai visi dan misi yang sudah disosialisasikan di dokumen tertulis maupun di laman websitenya.

Core values UIN Mataram adalah cendekia, terbuka dan keunggulan. Kecendikiaan adalah nilai keulamaan yang didasari integritas dan sikap inovatif-kreatif, baik pada aspek akademik, kepemimpinan dan lingkungan serta tatakelola. Keterbukaan adalah sifat persona dan tata kelola yang menakar inklusi dan keterlibatan aktif (*engagement*) warga UIN Mataram. Keunggulan adalah nilai yang diusung UIN Mataram. Core values

tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam visi universitas, fakultas dan prodi, dalam hal ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Prodi PAI.

Berdasarkan visi tersebut UIN Mataram mempunyai misi untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta tata kelola yang kredibel, *accountable* dan berdaya saing. Selanjutnya visi ini juga dikembangkan menjadi misi Fakultas dan Prodi PAI yang mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama.

Core values yang ditetapkan di IAI Nurul Hakim dikenal dengan Panca Jiwa Pesantren yang terdiri dari Keikhlasan, Kemandirian (Berdikari), Kesederhanaan, Ukhuwah Islamiyah, dan Kebebasan Terarah. IAI Nurul Hakim memadukan antara tradisi ilmiah kampus (intelektualitas) dengan tradisi spiritualitas pesantren sehingga dapat melahirkan Sarjana Islam yang kreatif, tangguh, profesional, mandiri dengan dijiwai oleh nilai-nilai agama. *Core values* ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Visi di tingkat universitas dan program studi. Berdasarkan hasil interview dan dokumen yang didapatkan, IAI Nurul Hakim tidak berafiliasi pada salah satu ormas atau kelompok tertentu, tetapi lebih bersifat netral. Visi untuk PAI adalah" Unggul, berkualitas, dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, dan praktik Pendidikan Agama Islam".

Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Kurikulum PAI di UIN Mataram tidak jauh beda dengan UIN lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari Peraturan Presiden no 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) No 44 Tahun 2015. Berdasarkan dokumentasi yang ada, tiga profil lulusan PAI UIN Mataram adalah menjadi pendidik PAI di Sekolah dan Madrasah, konselor PAI dan enterpreneur PAI. Jika dilihat sebaran mata kuliah dan capaian pembelajaran bidang sikap dan tata nilai ada 26, pengetahuan 26, dan keterampilan 37 capaian pembelajaran. Dan jika dilihat lebih terperinci, penekanan lebih dominan pada kompetensi pedagogis daripada kompetensi keislaman. Kompetensi keislaman ditekankan pada keislaman yang naratif, bukan yang kritis. Hal ini juga diakui oleh beberapa pimpinan termasuk Kaprodi PAI UIN Mataram.

> Ada perubahan yang sangat signifikan di kurikulum KKNI, kalau dulu bahasa Arab itu ada 1 sampai 4, sehingga saat lulus mereka mempunyai kemampuan bahasa yang lumayan. Bahkan dulu di PAI ada yang menggunakan skripsi bahasa Arab, sekarang hampir tidak ada. Ada seorang mahasiswa yang mempunyai IPK 3.9, tetapi lulusnya lama, setelah ditanya, dia merasa malu lulus PAI kok belum bisa bahasa Arab. Karena itu dia belajar bahasa Arab di luar kampus. Di PAI UIN Mataram untuk mengatasi kekurangan kompetensi keislaman, praktikumnya ada praktikum perawatan jenazah dan pendidikan mawaris (Saparudin, Interview, 1 Oktober 2018).

Lebih lanjut lagi, Kaprodi PAI UIN Mataram menyampaikan bahwa di acara pertemuan skala nasional dibahas perlu adanya revolusi kurikulum PAI yang mana

diusulkan lulusan PAI harus diperdalam penguasaan konten di program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

> Pada program PPG yang lulusan PAI lebih ditekankan pada penguasaan konten sebesar 70-80%, sedangkan yang lulusan non PAI dikuatkan aspek pedagogisnya dengan komposisi 70-80% pedagogis dan 20-30% konten (Saparudin, Interview, 1 Oktober 2018).

Tidak jauh berbeda dengan UIN Mataram, IAI Nurul Hakim juga menerapkan kurikulum berbasis KKNI dan mempunyai empat profil lulusan sebagai pendidik, pengelola pendidikan, asisten peneliti, dan entrepreneur.

Unsur lain yang juga penting untuk dilihat dalam mendalami sistem produksi guru agama adalah terkait Implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Hampir semua responden dosen dari UIN Mataram menyampaikan bahwa mereka menggunakan hasil-hasil penelitian dalam perkuliahan, melakukan pemutakhiran Rencana Perkuliahan Semester (RPS), mendorong peserta didik untuk mampu menyelesaikan persoalan dan menyelipkan isu-isu aktual dalam materi pembelajaran. Sebagaimana disampaikan salah satu dosen PAI UIN Mataram berikut:

> Memang kita menjelaskan yang namanya hukum Islam Indonesia itu bisa dilakukan baik secara *kaffah*, salah satunya yang konstitusional bisa dilakukan seperti di Aceh yang itu bisa dilakukan. Kalau tidak seperti itu maka kita akan hancur. *Ma la yudraku kulluhu fala yutraku kulluh.* Jangan secara konstitusional tidak boleh namun faktanya tidak dilakukan, kira-kira begitu yang dijelaskan salah satu bentuk pemutakhiran materi kita." (Taisir, Interview, 1 Oktober 2018).

Sementara untuk dosen PAI IAI Nurul Hakim kurang dari setengah (40%) mereka yang menggunakan hasil-hasil penelitian dalam pembelajaran. Hampir sama dengan UIN Mataram, dosen IAI Nurul Hakim juga hampir semua melakukan pemutakhiran RPS. Tidak ada perbedaan dalam hal menerima kritikan mahasiswa baik di UIN Mataram maupun di IAI Nurul Hakim, sama-sama tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan.

Terkait dengan isu-isu kontemporer, hampir semua dosen PAI UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim menyelipkan pentingnya nilai-nilai toleransi. Terkait dengan bahaya ekstremisme dalam beragama, sekitar kurang dari setengah IAI Nurul Hakim yang menyelipkannya dalam proses pembelajaran. Tetapi dosen PAI UIN Mataram hampir semua menyampaikan atau membahas ini. Hal ini senada dirasakan oleh para mahasiswanya. Mereka melaporkan bahwa semua dosen-dosennya menyelipkan pentingnya toleransi di UIN Mataram dan sekitar 90% dosen PAI IAI Nurul Hakim juga menyampaikan. Salah satu mahasiswi perempuan yang mempunyai pemikiran "paling terbuka" selama FGD melaporkan salah satu dosennya mengajaknya untuk berpikir kritis dan kontekstual:

> Pak Jumarim metodenya diajak berpikir, diajak kritis semua diminta untuk berpendapat. Menurutnya Islam itu tergantung dia berada. Contohnya di Arab Saudi rata-rata bercadar kalau di Indonesia berbeda tergantung geografis dan kondisinya (Interview 30 September 2018).

Namun demikian hasil FGD menunjukkan bahwa pengintegrasian isu-isu kontemporer yang dilakukan oleh para dosen PAI tidak sertamerta menjadikan mahasiswa PAI mengikuti atau tertarik dengan isu-isu kontemporer, termasuk munculnya model keislaman kontemporer dan transnasional. Saat ditanya isu-isu kontemporer yang diikuti hanya ada satu yang dapat menyebutkan, yaitu isu lima hari sekolah dan *full day school* (FGD, 30 September 2018). Lain halnya dengan temuan FGD di IAI Nurul Hakim, saat ditanya tentang Islam Nusantara, banyak yang tidak mengenal dan memahami. Satu di antara mahasiswa peserta FGD IAI Nurul Hakim memahami bahwa Islam Nusantara itu "….meninggal dengan menggunakan kain batik, bukan kain kafan" (FGD 21 Oktober 2018). Informasi ini memang sempat beredar secara viral di saat ada polemik penerimaan Islam Nusantara di Padang. Bahkan saat ditanya apakah tahu dengan "Islam Berkemajuan", tidak ada satu pun yang mengenal dan memahami. Temuan ini menunjukkan bahwa mereka kurang mengikuti kajian-kajian Islam kontemporer.

Akan tetapi, agak berbeda dengan isu bahayanya ekstremisme beragama, tidak semua dosen menyampaikannya di perkuliahan. Di IAI Nurul Hakim sekitar 59% dan di UIN Mataram mencapai 90% yang menyampaikan isu ini. Dari data tersebut baik dari pernyataan dosen dan mahasiswa pengintegrasian isu-isu aktual lebih banyak dilakukan oleh UIN Mataram daripada IAI Nurul Hakim.

Terkait dengan pemilihan sekolah yang digunakan sebagai praktik lapangan mahasiswa PAI, UIN Mataram mempunyai kebijakan yang netral dan *flexible*, yang penting adalah mahasiswa dapat melakukan praktik mengajar. Sekolah yang dipilih oleh mahasiswa PAI UIN Mataram kebanyakan dari sekolah daerah asal mahasiswa tersebut (Interview, 1 Oktober 2018). Sedangkan di IAI Nurul Hakim, kebanyakan didasarkan pada sekolah alumni yang hingga saat ini sudah 60 alumni yang memiliki lembaga pendidikan, hal ini juga yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern Gontor (Interview, 22 Oktober 2018).

Dalam konteks penghargaan pada dosen, belum ada kegiatan pemilihan dosen ideal baik di UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim. Dan saat ditanya siapa yang menjadi dosen ideal dan dosen tidak disukai beserta alasannya kepada mahasiswa, mereka mempunyai jawaban yang beragam. DI UIN Mataram ada dosen PAI yang dianggap sebagai "Yang Maha Benar" ketika ditanya terkait penerapan pembelajaran yang dialogis.

> Tergantung dosen itu sendiri, ada dosen yang kadang-kadang meskipun mahasiswa benar tetap mahasiswa disalahkan. Sampai salah satu mahasiswa mengatakan "Maha benar dosen dengan segala perkataannya"... matakuliah akhlak tasawuf, dan MKP Metode Khusus PAI. Tidak boleh telat satu detik pun yang telat dianggap alpa sedangkan kalau dia telat dia masa bodoh (FGD, 30 September 2018).

Dosen dan Pimpinan

Responden dari unsur pimpinan dan dosen ada 21 orang yang terdiri dari 11 orang UIN Mataram dan 10 orang IAI Nurul Hakim dengan komposisi 17 laki-laki dan hanya 4 yang

perempuan. Empat dari lima (81%) mereka mempunyai akun *facebook* dan kebanyakan umur antara 30-45 tahun. Ada 12 orang (57%) bergelar master dan ada 9 (43%) orang yang sudah bergelar doktor.

Kemampuan leadership para pimpinan di UIN Mataram cukup bagus. WR1, Prof. Dr. Masnun, M.A., mendapatkan gelar S1 sampai S3 di UIN Yogyakarta dan pernah mengikuti latihan kepemimpinan selama 3 hari di Deakin University Australia dan 2 minggu di Yogyakarta. WD1 dan Kaprodi walaupun akhir-akhir ini secara spesifik belum pernah mengikuti latihan kepemimpinan yang khusus, namun di beberapa acara ada materi kepemimpinan. Di luar kampus mereka mempunyai pengalaman menjadi pemimpin di beberapa tempat, misalnya di ormas.

Para pimpinan baik di UIN Mataram maupun di IAI Nurul Hakim menjelaskan bahwa visi pribadi mereka sejalan dengan visi institusi. WD1 UIN Mataram menyampaikan bahwa visi pribadinya terkait dengan pendidikan adalah mewujudkan Islam yang *rahmatal lil'alamin* dan membentuk karakter *khalifah* dan *abdullah*. Dengan demikian Islam itu dapat menjadi rahmat untuk semua makhluk (Abdul Quddus, Interview 1 Oktober 2018). Sedangkan visi Kaprodi PAI UIN Mataram menyampaikan bahwa visi pribadi beliau yaitu menjadikan muslim yang baik sekaligus warga negara yang baik, juga sejalan dengan visi institusi tempat bekerja (Saparudin, Interview 1 Oktober 2018).

Walaupun visi terbuka sebagaimana dicanangkan oleh UIN Mataram, namun masih ada 2-3 dosen yang dalam realitasnya masih tertutup dan masih bias dalam melihat Barat dan bahkan masih ada kecenderungan konservatif. Hal ini dilaporkan oleh pimpinan UIN Mataram saat terjadi persoalan miskomunikasi antara mahasiswi bercadar dengan pembimbing skripsi. Beberapa dosen yang dirasa tidak terbuka tersebut mempersoalkan kenapa dosen memberikan perhatian dan pembinaan kepada mahasiswi bercadar, sementara tidak perhatian kepada mereka yang menggunakan pakaian ketat (Interview 1 Oktober 2018).

Kemampuan dan pengalaman leadership di IAI Nurul Hakim agak berbeda dengan yang di UIN Mataram. Ketua IAI Nurul Hakim, Supiatun, juga merangkap sebagai kepala sekolah SD di yayasan yang sama, dan terkadang membantu bekerja di yayasan. Beliau belum pernah mendapatkan pelatihan kepemimpinan secara khusus dan mendapatkan gelar S1 di UIN Mataram dan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang (Tarbiyah). Sementara Wakil Ketua bidang akademik, Mukhlisin, pernah mendapatkan pelatihan kepemimpinan selama dua minggu di Jakarta yang diadakan oleh yayasan As Shofa yang bergerak di bidang pendidikan. Mukhlisin mendapat gelar sarjana di Madinah (syariah), S2 di UMM Malang (Tarbiyah), dan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia (Dakwah Leadership).

Berdasarkan pengakuan dari para dosen PAI, mereka mempunyai kemampuan bahasa yang cukup baik, baik dalam bahasa Arab dan Inggris. Hanya sekitar seperempat dari mereka yang mengaku mempunyai kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang

sangat baik. Kemampuan bahasa para dosen PAI baik di UIN Mataran maupun di IAN Nurul Hakim tidak berdasarkan hasil test, namun hanya berdasarkan hasil survei.

Lingkungan Kampus

Lingkungan kampus salah satu yang sangat mempengaruhi. Di UIN Mataram maupun di IAI Nurul Hakim tidak ada larangan dari pihak kampus bagi kegiatan ekstra kemahasiswaan, seperti HMI, IMM, PMII, KAMMI, dan organisasi ekstra lainnya. Idealnya memang mahasiswa harus menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan daya pikir, nalar, wawasan, dan pengalaman.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa mahasiswa yang dari umum dan dari wilayah Timur, yang merasa kurang mempunyai ilmu agama banyak yang belajar dari luar kuliah. PAI UIN Mataram pernah bekerja sama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan Semarang untuk melakukan identifikasi kegiatan kemahasiswaan. Dari penelitian itu ada sekitar 12 organisasi ekstra mahasiswa termasuk di antaranya ex-HTI. Saparudin, Ketua Prodi PAI, menyampaikan:

> Saat itu kami memetakan kegiatan ekstra kampus, dan hasilnya ada sekitar 12 organisasi yang salah satunya ada lembaga yang menangani buletin Islam Kaffah, dan setelah ditelisik itu buletin HTI (Saparudin, interview 1 Oktober 2018).

Selanjutnya WD1 FTK, Abdul Quddus, menyampaikan bahwa pengaruh pemikiran radikal yang terjadi pada mahasiswa PAI tidak dapat dipungkiri karena ada ruang ada kelembagaan di luar sana dan ada diskusi masalah khilafah, walaupun jumlah mahasiswa yang terlibat tidak banyak (interview 1 Oktober 2018). Hal senada ditegaskan oleh salah satu dosen perempuan di PAI, menurut beliau jika mahasiswa mempunyai pemahaman yang baik dan berdiskusi secara intensif dengan dosen dan tidak hanya mengandalkan informasi di luar dosen maka tidak akan sampai terpengaruh paham radikalisme (Nur Hilalliyati, interview 1 Oktober 2018)

Saat ditanyakan tentang indikator terpapar radikal, pimpinan UIN Mataram menyebutkannya dengan simbol cadar bagi perempuan dan merasa kesulitan mengidentifikasi untuk laki-laki. Pemakai cadar tidak selalu dari kalangan yang selama ini dianggap kelompok "kanan", di PMII yang dikenal liberal juga ada yang menggunakan. Bahkan ada pemakai cadar yang kritis, dan bersikap biasa, bahkan kalau ketemu dosen laki-laki juga berjabatan tangan (Saparudin, 1 Oktober 2018).

Upaya Menangkal Radikalisme di Kampus

Temuan lapangan menujukkan bahwa kata radikalisme tidak diartikan secara tunggal oleh para dosen baik di UIN Mataram maupun di IAI Nurul Hakim. Tidak ada kesepakatan dalam mendefinisikan istilah radikalisme itu. Narasi pemahaman tentang radikalisme dan ketidaksepakatan atau bantahan terhadap hasil penelitian yang menyebutkan bahwa

mahasiswa PAI terpapar radikalisme selalu muncul di setiap penggalian data. Diksi "tidak sepakat" diutarakan hampir semua responden di kalangan dosen maupun mahasiswa. Beberapa narasi yang muncul dari kalangan dosen saat FGD antara lain:

> Kalau saya tidak setuju, pertama yang bikin kurikulum dari sana ya (Diktis), ya kita berikan asupan dan suplemen lain dari kajian-kajian kitab kuning, saya juga bingung kok bisa kemudian mahasiswa PAI terindikasi, digeneralisir seolah-olah radikal (FGD, 22 Oktober 2018).

> Pertama saya ingin tahu apa dulu radikalisme, penafsiran yang karena nanti orang yang rajin baca Quran itu radikal, taat beragama dikatakan radikal, orang berjenggot radikal, kalau di katakan anak-anak PAI itu radikal saya tidak setuju, karena mohon maaf ya saya 5 tahun di Surabaya itu dulu membina mahasiswa dan justru yang radikal itu bahkan dikeluarkan dari kampus, itu mahasiswa ITS, Unibraw, dan Unair ya kalau Sunan Ampel itu tidak (Mukhlisin, Interview, 22 Oktober 2018).

> Menurut saya di UIN Mataram, mahasiswa yang sampai pada aksi dan terlibat pada radikalisme belum ada, namun dalam konteks pemikiran dan secara simbolis, dengan menggunakan cadar, menunjukkan kecenderungan ke arah radikal. walaupun memang tidak semua mahasiswi bercadar karena alasan ideologis, ada beberapa di antara mereka karena alasan ikut teman dan juga tidak harmonis di keluarga (Muhammad Quddus & Saparudin, interview 1 Oktober 2018).

Karena alasan belum adanya mahasiswa yang terindikasi sebagai kalangan muslim radikal dan belum menemukan unsur-unsur radikalisme di dalam kampus dan juga narasi yang berkembang seperti di atas maka upaya-upaya yang dilakukan universitas dalam rangka penangkalan radikalisme masih sebatas kegiatan yang bersifat *discourse* atau pengembangan wacana dan hanya dilakukan satu moment tertentu seperti seminar dengan mengangkat isu Islam Moderat baik di IAI Nurul Hakim maupun di UIN Mataram, dan deklarasi anti radikalisme di UIN Mataram.

Satu catatan penting terkait dengan pencegahan radikalisme ini, para pejabat UIN Mataram (WR1, WD1 Tarbiyah, WD3 Tarbiyah dan Kajur PAI) menyampaikan bahwa saat penelitian ini dilakukan telah diwacanakan dan dibahas hal-hal yang terkait dengan tata tertib baru bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan. Aturan tersebut terkait dengan pelarangan penggunaan penutup muka pada saat di kelas dan pada saat bimbingan dengan dosen. Selain itu, pendataan jumlah mahasiswa bercadar yang dianggap sebagai identifikasi "paling mudah" telah dilakukan dengan hasil data sebanyak 73 mahasiswi UIN Mataram bercadar dan 63% mahasiswa bercadar ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Hal lain yang juga dilakukan oleh UIN Mataram adalah pembentukan Pusat Studi Islam Moderat juga telah muncul pada saat penelitian ini dilakukan.

Meskipun secara institusional tidak ada lembaga semacam pusat studi, lembaga mahasiswa atau komunitas khusus yang telah dibentuk oleh UIN Mataram dan IAI Nurul Hakim untuk pencegahan menyebarnya *term* radikalisme di kalangan mahasiswa, namun beberapa dosen PAI di UIN Mataram mengungkap bahwa melakukan tindakan-

tindakan secara individu sebagai dosen, seperti melakukan pendekatan kepada mahasiswa yang menggunakan cadar atau *niqab* dan memberikan pandangan lain terkait dengan *niqab* dan cadar tersebut secara langsung.

> Saya pernah punya kasus, ini mahasiswa bimbingan saya. Mahasiswa bimbingan skripsi, karena kita di jurusan ingin tahu seperti apa dia, karena mayoritas tidak ada di Indonesia, meskipun tidak ada yang harus memakai dan tidak ada yang mengatakan bahwa ia tidak harus memakai, apalagi ada isu-isu, sehingga saya katakan pada anak itu, saya sampaikan dalam perspektif fikih. Dari perspektif sosial, fitnah dalam pandangan global, karena bercadar bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar yang dari sekadar fitnah, dan anak tersebut keberatan dan ia telepon orang tuanya ke Bima, bapaknya menelepon salah satu dosen di sini, dan kemudian dia masih tetap bercadar. Anggapan orang tua, pembimbing tidak mau membimbing mahasiswanya (Ashari, Interview, 1 Oktober 2018)

Selain itu Dosen di UIN Mataram juga menyisipkan beberapa isu-isu kontemporer terkait dengan Islamisme ketika perkuliahan dan mencoba mengajak mahasiswa berdiskusi terkait isu tersebut.

Berbeda dengan UIN Mataram, di IAI Nurul Hakim justru cenderung membiarkan atau mempersilahkan bahkan dianggap sebagai kebaikan ketika mahasiswinya menggunakan cadar atau *niqab*. Menurut laporan dari para dosen dan pimpinan sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada santri atau mahasiswa Nurul Hakim yang terindikasi radikal. Bahkan sebagaimana disampaikan sebelumnya, menurut ibu Ketua IAI Nurul Hakim, beliau berharap suatu saat IAI Nurul Hakim dapat menggunakan cadar semua.

Catatan Penutup: Sebuah Rekomendasi

Berdasarkan beragam data tersebut dapat disimpulkan beberapa temuan menarik terkait dengan sistem produksi calon guru agama di Nusa Tenggara Barat dengan studi kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim, yaitu:

1) Di UIN Mataram dan di IAI Nurul Hakim belum mempunyai prodi yang terakreditasi A. Kurikulumnya menggunakan KKNI sebagaimana diputuskan oleh kementerian Riset dan Teknologi, namun berdasarkan dokumen yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan idealisme dan spirit KKNI. Kompetensi pedagogis lebih dominan daripada kompetensi keislaman. Materi keislaman lebih pada narasi dan deskriptif serta tidak banyak mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis. Para dosen banyak yang menyelipkan nilai-nilai toleransi tetapi tidak banyak yang menyelipkan bahaya dari ekstremisme beragama.
2) Proses dialogis terbangun saat proses pembelajaran, walaupun ada dosen yang dianggap yang maha benar dan ketat dalam soal keterlambatan. Para dosen mempunyai kemampuan mengikuti isu-isu kontemporer, namun hal ini tidak

secara otomatis diikuti oleh para mahasiswanya. Masih banyak mahasiswa yang kesulitan di saat diminta menceritakan pengalamannya dalam membahas isu-isu kontemporer. Di IAI Nurul Hakim wacana Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan kurang terpahami dengan baik.

3) Kemampuan bahasa Arab lebih baik daripada bahasa Inggris. IAI Nurul Hakim mempunyai kemampuan bahasa yang lebih baik daripada UIN Mataram, hal ini dikarenakan di IAI Nurul Hakim mempunyai kerja sama dengan Ma'had Khalid bin Walid yang didanai oleh pemerintah Saudi. Kebijakan peningkatan kemampuan keagamaan masih sebatas baca tulis Al-Quran dan tahfiz, belum ada program yang memperdalam materi keislaman lainnya.

4) Berdasarkan tingkat Islamisme mahasiswa mempunyai tingkat Islamisme yang lebih tinggi daripada dosen. IAI swasta dalam hal ini IAI Nurul Hakim mempunyai kecenderungan Islamisme yang lebih tinggi daripada perguruan tinggi Negeri dalam hal ini UIN Mataram. Penelitian ini mengungkap perbenturan antara Islam moderat dengan Islam milenial yang cenderung dekat dengan Islamisme. Dosen maupun mahasiswa mempunyai sikap anti Barat yang paling tinggi daripada sikap mereka pada aspek islamisme lainnya. Aspek kekerasan yang berbasis agama, mahasiswa lebih banyak yang setuju (23%) daripada dosennya (5%).

5) Isu gender menjadi salah satu barometer melihat tingkat islamisme seseorang, semakin sensitif pada isu kesetaraan gender maka semakin rendah tingkat islamismenya. Responden baik dosen maupun mahasiswa yang setuju dan tidak setuju pada isu poligami sebagai sunah nabi yang perlu dicontoh hampir sama jumlahnya. Isu kepemimpinan perempuan atas laki-laki dosen lebih banyak mendukung, sementara laki-laki mempunyai keutamaan atas perempuan lebih didukung mahasiswa daripada dosen.

6) Cadar sering digunakan untuk mengidentifikasi "paling mudah" seseorang cenderung terpapar islamisme dan 63 persen pemakai cadar dari prodi PAI di UIN Mataram. Sementara isu cadar tidak menjadi persoalan di IAI Nurul Hakim. Penelitian ini menginspirasi UIN Mataram untuk mengkaji pemberlakuan pelarangan penggunaan penutup wajah saat kuliah dan proses akademik lainnya, sebagaimana dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga. Upaya penangkalan radikalisme belum secara sistematis dilakukan di kedua perguruan tinggi ini.

Berdasarkan data, temuan, dan analisis serta kesimpulan, maka penelitian di NTB ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

1) Input calon guru PAI sebaiknya sudah mempunyai bekal keislaman yang baik. Input mahasiswa masih ada yang dari sekolah umum yang tidak mempunyai *basic* keislaman yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk mencari tambahan

keislaman dari luar kampus, yang terkadang kurang terukur dan terkontrol warna keislamannya.

2) Proses rekrutmen dengan prosedur SPAN PTKIN dan Mandiri yang tidak ada proses seleksi tes wawancara perlu ditinjau ulang. Terkadang proses rekrutmen model ini tidak dapat mengukur tingkat keislaman yang dibutuhkan oleh calon guru PAI secara memadai. Apalagi prinsip tidak boleh menghalangi seseorang belajar, sehingga semua pendaftar harus diterima (kasus IAI Nurul Hakim), ini juga menjadikan rawan dengan minimnya kemampuan calon guru agama secara komprehensif.

3) Jika dilihat dari kondisi dan kapasitas mahasiswa PAI, yang masih kurang mempunyai semangat akademik yang kritis, tidak mengikuti isu-isu kontemporer dan mempunyai tingkat Islamisme yang memprihatinkan, serta mempunyai kapasitas kemampuan bahasa yang kurang, maka diperlukan upaya-upaya untuk berpikir agak revolusioner dalam mengubah kurikulum dan lingkungan akademis yang kondusif dan mendorong berpikir kritis, aktual dan mempunyai toleransi yang baik, serta siap menghadapi persaingan global dengan menguasai bahasa asing. diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam mendekati dan membina mahasiswa-mahasiswa yang dianggap telah terpapar pada Islamisme. Diperlukan pendekatan yang lebih merangkul mereka. Kajian tentang kesetaraan dan keadilan gender juga perlu digiatkan, sebagai langkah awal untuk mengajak berpikir kritis dan berperspektif keadilan.

4) Diperlukan perubahan kurikulum yang lebih seimbang dalam keislaman dan kemampuan pedagogis serta bahasa. Jika masih menggunakan KKNI, diperlukan adanya matrikulasi bagi mereka yang berasal dari sekolah umum. Pada program PPG, jika lulusan PAI maka, kompetensi keislaman lebih banyak daripada konten pedagogisnya, sebaliknya jika non PAI, diberikan sebaliknya.

5) Diperlukan standar yang sama antara dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Dosen PAI di perguruan tinggi negeri relatif mempunyai banyak kesempatan dalam mengikuti peningkatan kapasitas dibanding dengan dosen di perguruan tinggi swasta.

6) Lingkungan yang mendukung pada keislaman dan keindonesiaan baik melalui kegiatan intra dan ekstra kampus lebih ditekankan, mengingat mahasiswa sering mendapatkan pengaruh islamisme di luar kampus.

Referensi

Becky Carter. 2013. "Women and Violent Extremism." *GSDRC*. www.gsdrc.org.

Burhanudin, J., & Fathurahman, O. 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta.

Calfas, A. 2016. "'Why Women are the Missing Link in Countering Extremism.'" *Fair Observer*. http://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/women-counter-extremism-middle-east- north-africa-99121/.

Couture, K. 2014. "A Gendered Approach to Countering Violent Extremism: Lessons Learned from Women in Peace-Building and Conflict Prevention Applied Successfully in Bangladesh and Morocco." *Brookings Institute Policy Papers*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Women-CVE- Formatted-72914-Couture-FINAL2.pdf.

Fink, N., Zeiger, S. and Bhulai, R. 2016. "A Man's World: Exploring the Roles of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism." *Hedayah and Global Centre on Cooperative Security*. http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf.

IAI Nurul Hakim, "Visi dan Misi." https://nurulhakim.or.id/pendidikan/iai-nh/.

Iffat Idris with Ayat Abdelaziz. 2017. "Women and Countering Violent Extremism." *GSDRC*.

Kingsley, Jeremy Jacob. 2010. Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia. PhD Thesis. The University of Melbourne.

Majoran, A. 2015. "Mothers & Wives: Women's Political Role in Countering Violent Extremism." *The Mackenzie Institute*. http://mackenzieinstitute.com/mothers-wives-womens-potential-role-countering-violent-extremism.

OSCE. 2013. "Women and Terrorist Radicalization: Final Report." *OSCE*.

Qibtiyah, Alimatul. 2006. *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.

Sindu. 2017. "Polri Petakan Masjid yang Terindikasi Terpapar Radikalisme." *KBR*. September 20, 2017.

Bassam Tibi. 2012. Islamism and Islam. New Haven: Yale University Press.

UN. 2015. "Plan of Action to Prevent Violent Extremism: Report of the UN Secretary General." UN Secretary General. http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=asi.

Wahid, Marzuki. 2008. "Peta Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia". *The Wahid Institute*. http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=64/hl=id/Peta_Pemikiran_Dan_Gerakan_Islam_Di_Indonesia.

TENTANG CISFORM

Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) adalah lembaga penelitian di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bergerak di bidang studi Islam dan transformasi sosial. Sebagai lembaga penelitian, CISForm mengembangkan penelitian interdisipliner dan mengkaji berbagai isu-isu aktual dalam konteks Indonesia, khususnya yang terkait dengan proses modern-transformasi sosial yang terus bergulir. Laju modernisasi dan globalisasi disertai pergeseran keragaman dan rasionalitas telah membuka ragam peluang bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya.

CISForm memposisikan diri sebagai pusat penelitian interdisipliner yang berminat pada isu-isu multikulturalisme, dialog antar agama, radikalisme, ekstremisme serta pertentangan antara Islam dan budaya lokal. CISForm juga sangat memperhatikan keragaman permasalahan sosial yang menghantui lingkup luas dalam masyarakat muslim di Indonesia, seperti: kemiskinan, keterbelakangan, dan kekerasan.

CISForm terus berkontribusi dalam menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia agar mampu berkiprah dalam mengarungi dan mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga ini juga mengembangkan program-program yang menghasilkan publikasi berupa buku, jurnal, dan karya-karya lain yang dapat diakses para akademisi secara luas, baik dalam maupun luar negeri. Publikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat studi keislaman secara umum dan UIN Sunan Kalijaga secara khusus dalam percaturan wacana agama dan proses transformasi sosial. Pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu tersebut akan memberikan landasan yang kukuh bagi lahirnya solusi alternatif melalui berbagai program advokasi, pembelajaran, dan pemberdayaan komunitas. Sebagai upaya pengembangan program dan kegiatan, CISForm juga membangun kerja sama yang solid dengan pusat dan lembaga riset, LSM, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Perhatian yang penuh dari lembaga-lembaga tersebut terhadap isu-isu terkini di Indonesia akan menjadi modal penting bagi CISForm dalam membangun kerja sama yang saling bermanfaat.

PROFIL PARA PENULIS

MUHAMMAD WILDAN adalah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menyelesaikan gelar sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995) dan master di Universitas Leiden Belanda (1999), ia menyelesaikan doktornya di Universitas Nasional Malaysia, UKM (2009). Beberapa pengalamannya sebagai peneliti antara lain di lembaga-lembaga: International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) Belanda (2007), Asian Research Institute (ARI) di National University of Singapore (2007), dan Center for Near Middle Eastern Studies (CNMS) Universitas Marburg, Jerman (2015). Bidang kajian yang menjadi minat penelitiannya adalah tentang Islam dan politik di Indonesia kontemporer, terutama pada isu radikalisme, budaya popular Islam, dan juga isu-isu kelompok minoritas. Di antara publikasi terbarunya adalah "Islamism and Democratization in the Post 411-212 rallies of Indonesia" dalam *Journal of Thinking ASEAN* (Habibie Center, 2017). Selain sebagai dosen, ia juga menjabat sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia bisa dihubungi di wildan71@gmail.com.

ABDUR ROZAKI adalah dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 di IAIN Sunan Kalijaga (1999), S2 di Universitas Gadjah Mada (2003), dan S3 di UIN Sunan Kalijaga (2015). Rozaki aktif melakukan kajian keislaman seputar Islam popular, demokratisasi dan politik identitas serta reformasi pedesaan. Dalam dua tahun terakhir ini menjadi peneliti dalam kajian *Counter Violence Extremism* (CVE) bersama CISForm UIN Sunan Kalijaga yang me-*launching* 40 film animasi religi guna mempromosikan Islam Moderat di kalangan anak muda agar tidak terjebak pada konsumsi film-film jihadisme dan ektremisme lainnya. Ia juga menjadi konsultan LSM Gemawan Kalbar dalam pengembangan Indeks Desa Berdaya (IDB). Rozaki aktif mempresentasikan gagasannya di berbagai forum seperti pada *Workshop Oil Palm Plantation and Local Politics in Indonesia* yang diselenggarakan oleh CSEAS Kyoto University Jepang, 10 Juli 2010 dengan topik: *Business and Local Politics in West Kalimantan: A study on power relation between rulers and entrepreneurs in the expansion of oil palm plantation.* Dia bisa dihubungi di rozaki75@gmail.com.

AHMAD MUTTAQIN adalah peneliti CISForm dan dosen pada Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Muttaqin menyelesaikan PhD dalam bidang Sosiologi Agama/Studi Agama-Agama dari Universty of Western Sydney, Australia (2012), dan saat ini menjadi Ketua ASAI (Asosiasi Studi Agama Indonesia). Di antara karya tulis yang dipublikasikan dalam

tiga tahun terakhir antara lain: "Penelitian Keagamaan Integratif-Interkonektif" dalam *Jurnal Religi* vol. 14 no. 1, 2018, "Problems, Challenges and Prospects of Indonesian Muslim Community in Sydney for Promoting Tolerance" (bersama Achmad Z. Arifin & Firdaus Wajdi), dalam *KOMUNITAS*, *International Journal of Indonesian Society*, no 2, 2016; "Globalisasi, Keberagamaan Hibrida dan Komodifikasi Agama dalam Masyarakat Multikultural", Pengantar Buku *Muslimah Perkotaan: Globalizing Life Style, Religion & Identity*, karya Faiz, cetakan ke-2 (2016); "From Occultism to Hybrid Sufism: the Transformation of an Islamic-Hybrid Spiritual Group in Contemporary Indonesia, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*, vol. 4, no. 1, June 2014; Dia bisa dihubungi di muttaqinsejati@gmail.com.

AHMAD SALEHUDIN merupakan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan bidang keahlian Antropologi Agama. Menyelesaikan S1 Perbandingan Agama (2002) dari IAIN Sunan Kalijaga, Master in *Comparative Study of religion* dari *Center for Religious and Cross Cultural Studies* (CRCS) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan Doktor Interreligious Studies (IRS) juga dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan judul disertasi *Theologizing Farming: Religiosity and Economic Rationality of Muslim Peasants in the Dieng Mountains.* Pada tahun 2016 mengikuti *short course* Metodologi Penelitian di Leiden University, Belanda. Selain itu, juga berminat melakukan penelitian dengan isu-isu yang berkaitan dengan *Living Islam*, dinamika pendidikan Islam (pesantren), Multikulturalisme dan globalisasi, serta isu-isu agama dan lingkungan. Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain: *Masjid yang Terbelah: Kontestasi Antaraliran Islam dalam Masyarakat Jawa* (2018), dan "The Face of Mountainous Islam: The Dynamic of Islam in the Dieng Mountains Wonosobo, Central Java, Indonesia" (2017). Dia bisa dihubungi di salehudinyogya@gmail.com

ALIMATUL QIBTIYAH adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seorang aktivis perempuan di Aisyiyah dan Muhammadiyah. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yoyakarta (1995), S2 Psikologi Sosial di UGM (2000), S2 Women's Studies di Iowa Amerika (2005), dan S3 di Universitas Western Sydney Australia (2012). Sejak 1997 penulis banyak berkiprah di bidang perempuan, gender, seksualitas dan feminisme. Tahun 2014-2015 pernah menjadi direktur Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Periode 2015-2020 penulis dipercaya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyiyah dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu penulis juga koordinator Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Di antara karya penulis adalah "Paradigma Pendidikan Seksualitas: Teori dan Praktik, Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual", "Peran Perempuan dan Media pada ABI (Aksi Bela Islam)", dan lain-lain yang dapat dilihat di website: www.genderprogressive.com. Dia bisa dihubungi di alimatulqibty@gmail.com.

FATIMAH HUSEIN adalah dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menyelesaikan studi S3 di University of Melbourne Australia. Bidang keahlian yang dikembangkannya adalah Filsafat Agama dan Dialog antar Agama. Pada tahun 2014-2017, ia bersama beberapa akademisi dari Austrian Academy of Sciences mendapatkan dana riset dari Austrian Science Fund dengan penelitian bertema "Islamic (Inter)Faces of the Internet: Emerging Socialities and Forms of Piety in Indonesia". Di antara publikasi terbarunya termasuk "The Revival of Riya': Displaying Muslim Piety Online in Indonesia," *American Ethnologist* (8 November 2017), dan "Online Piety and Its Discontent: Revisiting Islamic Anxieties on Indonesian Social Media" (bersama Martin Slama), *Indonesia and the Malay World*, Vol. 46, Issue 134 (2018). Dia bisa dikontak di fatimahhusein@yahoo.com.

RACHMAD HIDAYAT adalah dosen tetap pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan peneliti pada Institute for Masculinities, Violence and Religion (IMVIRE). Sebelumnya, ia adalah peneliti pada the Asia Institute, the University of Melbourne, dan visiting scholar pada Institute for Politics, Religions and Society, the Australian Catholic University. Rachmad memfokuskan risetnya pada isu radikalisme, maskulinisme dan kekerasan atas nama agama. Ia menyelesaikan PhD di Monash University Australia 2015, berdasar penelitian tentang *Muslim Masculinities in Australia.* Gelar MA, juga diperoleh dari Monash University, 2010, dengan thesis mengenai *Islam, masculinites and domestic violence in Java.* Beberapa karyanya antara lain adalah buku berjudul: *Ilmu yang Seksis* (Jendela 2004), *Men's Involvement in Reproductive Health, an Islamic Perspective,* (dengan Hamim Ilyas, PSW-UIN Suka 2006), *Wajah Kekerasan,* (Rifka Annisa 2009). Menerbitkan sejumlah jurnal dan book chapters pada penerbit internasional seperti Cambridge University Press. Dia bisa dihubungi di ridyah@gmail.com

SEKAR AYU ARYANI adalah dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyelesaikan S1 (1985), S2 (1994), dan S3 (2003) di UIN Sunan Kalijaga. Dia mempunyai sejumlah pengalaman sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik di almamaternya. Selain di bidang psikologi agama dan sejarah agama-agama, dia juga menaruh minat pada pendidikan. Di antara karya-karyanya adalah "Healthy-Minded Religious Phenomenon in Shalawatan: A Study on Three Majlis Shalawat in Java," di *Indonesian Journal of Islam and Muslim Society* (2017). Dia bisa dihubungi di sekarayu1826@gmail.com.

SUKIMAN adalah dosen Prodi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Ia menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (1996), Magister Pendidikan (M.Pd.) di Universitas

Negeri Yogyakarta (2001), dan Doktor Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Di samping mengajar di UIN, ia juga aktif dalam memberikan pelatihan tentang kurikulum dan evaluasi pembelajaran bagi guru-guru dan pengawas di sekolah/madrasah. Buku yang telah dipublikasikan adalah: (1) *Pengembangan Media Pembelajaran*, Pedagogia, Yogyakarta (2012), (2) *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Remaja Rosdakarya, Bandung (2015), (3) *Sistem Penilaian Pembelajaran*, Media Akademi, Yogyakarta (2017), (4) *Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif*, FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018). Dia bisa dihubungi di drsukiman10@gmail.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

Menanam Benih di Ladang Tandus
Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia

Radikalisme dan ekstremisme masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Ancaman ini terlihat jelas dengan berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme di berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Beberapa penelitian menemukan bahwa gejala intoleransi dan radikalisme juga berkembang di ranah sekolah, khususnya SLTA, dan perguruan tinggi. Perkembangan intoleransi dan radikalisme ini seiring dengan semakin meningkatnya semangat religiositas umat Islam dan maraknya salafisme global. Untuk kasus di Indonesia, kondisi ini juga diperparah oleh buruknya demokrasi, pemerataan pembangunan, dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak baik.

Buku ini merupakan laporan hasil penelitian yang melihat sejauh mana Prodi PAI di PTKI mampu menjadi bagian dari lembaga peneguh ideologi negara dan penyemai pandangan agama yang moderat. Riset ini juga menelusuri sejauh mana kurikulum, metode, proses belajar di Prodi PAI dan lingkungan kampus mampu menghasilkan guru-guru agama yang berorientasi pada pendidikan moral di tengah masyarakat multikultur. Secara umum, penelitian ini berusaha untuk melihat ketahanan Prodi PAI dalam menangkal tantangan arus islamisme, khususnya intoleransi dan radikalisme, yang sedang melanda Indonesia.

CISForm Center for the Study of Islam and Social Transformation
State Islamic University Sunan kalijaga Yogyakarta

PPIM UIN JAKARTA

CONVEY INDONESIA

ISBN: 978-623-9024-00-0